

Wisma Bakrie Lt 2

Jl. HR Rasuna Said Kav B-1
Jakarta 12920

Online

Email: corsec@bakrietelecom.com
Website: www.bakrietelecom.com

Telepon

+621 5292 0264

Daftar Isi

Table of Contents

Daftar Isi	01
Tentang Laporan Tahunan	02

Ikhtisar Kinerja 2022

Ikhtisar Kinerja Keuangan Penting	04
Informasi Saham	05

Laporan Manajemen

Laporan Direksi	08
Laporan Dewan Komisaris	14

Profil Perusahaan

Identitas Perusahaan	18
Sekilas Tentang BTEL	19
Visi, Misi dan Nilai Perusahaan	22
Kegiatan Usaha	24
Wilayah Operasional	25
Struktur Organisasi	24
Daftar Keanggotaan Asosiasi	24
Profil Direksi	26
Profil Komisaris	31
Karyawan	36
Komposisi Pemegang Saham	37
Entitas Anak	39
Kronologi Pencatatan Saham	41
Kronologi Pencatatan Efek Lainnya	42
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	42

Analisa dan Pembahasan Manajemen

Tinjauan Ekonomi dan Industri	44
Tinjauan Operasi per Segmen Usaha	45
Tinjauan Kinerja Keuangan	46
Kemampuan Membayar Utang	49
Kolektibilitas Piutang	49
Struktur Modal	50
Ikatan Material Investasi Barang Modal	50
Prospek Usaha	50
Perbandingan Target 2022 dan Realisasi 2022	51
Aspek Pemasaran	51
Kebijakan Dividen	52
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	52
Informasi Investasi Akuisisi Anak Perusahaan	52
Perubahan Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan	52

Tata Kelola Perusahaan

Best Practice dalam Tata Kelola Perusahaan	54
Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka	55
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	57
Pelaksanaan dan Keputusan RUPS Tahunan	58
Realisasi Keputusan RUPS Tahun 2022	59
Direksi	61
Dewan Komisaris	63
Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi 2022	67
Penilaian Terhadap Kinerja Dewan Komisaris Dan Direksi	68
Hubungan Afiliasi, Rangkap Jabatan dan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2022	68
Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2022	71
Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris	71
Komite Audit	71

Komite Nominasi dan Remunerasi	74
Sekretaris Perusahaan	77
Unit Audit Internal	78
Sistem Pengendalian Internal	80
Kode Etik dan Budaya Perusahaan	82
Sistem Pelaporan Pelanggan	83

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	84
--	----

Laporan Keberlanjutan

Strategi Keberlanjutan	86
Tata Kelola Keberlanjutan	88
Kinerja Keberlanjutan	90
Kinerja Ekonomi	90
Kinerja Lingkungan Hidup	91
Aspek Sosial	92
Aspek Ketenagakerjaan	92
Aspek Kemasyarakatan	93
Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan	94
Tanggung Jawab Laporan Tahunan	101

Laporan Keuangan





Memfaatkan momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi dan momentum tren digitalisasi di Indonesia yang terjadi pada tahun 2022, PT BAKRIE TELECOM, TBK. ("BTEL atau Perseroan") beradaptasi bergerak maju menangkap peluang guna mencapai pertumbuhan yang lebih baik kedepan.

Momentum tren digitalisasi terjadi dengan ditandai proses ASO (*Analog Switch Off*) yaitu migrasi siaran televisi free to air dari sistem analog menuju digital yang dilakukan pemerintah pada 2 November 2022. Hal ini menjadi stimulus di berbagai sektor, antara lain transportasi, lifestyle, pendidikan, kesehatan, logistik, agrikultur, dan keuangan.

Perseroan meningkatkan perannya secara signifikan dalam rangka mendorong pertumbuhan yang inklusif di berbagai sektor kehidupan melalui penguatan segmen usaha yang saling melengkapi dan mendukung ekosistem bisnisnya di era digital. Penguatan segmen usaha Perseroan antara lain

diwujudkan dengan memperluas portofolio bisnisnya melalui ekspansi ke bidang usaha digital yang tidak hanya memiliki keselarasan pandangan untuk memajukan sistem ekonomi digital di Indonesia namun juga menciptakan prospek pertumbuhan yang berkelanjutan bagi Grup BTEL.

Dalam Bidang Penyiaran Perseroan melihat adanya peluang positif terkait dengan pengadaan peralatan siaran digital yang dibutuhkan oleh Lembaga Penyiaran Swasta. Untuk itu Perseroan bersama-sama dengan entitas anak perusahaan merespon peluang digitalisasi tersebut dengan memperkuat diri dengan mendukung proses digitalisasi melalui usaha pengadaan infrastruktur digital. Diharapkan langkah ini menjadi langkah positif kedepan bagi Perseroan dan entitas anak perusahaan dalam waktu mendatang.





Ikhtisar Keuangan

Financial Highlights

(Dalam juta Rp kecuali Laba (Rugi) per saham dalam Rp)

(in millions of Rp except for net income per share in Rp)

Laporan Laba Rugi Konsolidasi dan Penghasilan Komprehensif	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember Years ended on December 31			Consolidated Statements of Comprehensive Income
	2022	2021	2020	
Pendapatan	47,850	52,110	10,537	Revenue
Beban Langsung	15,480	15,719	6,569	COGS
Laba Kotor	32,370	36,391	3,968	Gross Profit
Laba Operasi	(16,723)	(6,271)	(11,464)	Operating Profit (Loss)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(117,926)	(94,976)	(108,137)	Profit (loss) for the Year
Rugi Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Net Loss for the year attributable to:
Pemilik Entitas Induk	(112,851)	(85,328)	(108,128)	Owners of the Parent
Kepentingan Non-Pengendali	(5,074)	(9,648)	(9)	Non-controlling Interests
Total Rugi Tahun Berjalan	(117,926)	(94,976)	(108,137)	Total Loss for the year
Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Total Comprehensive Income for the Year Attributable To:
Pemilik Entitas Induk	(110,442)	(91,352)	(108,268)	Owners of the Parent
Kepentingan Non-Pengendali	(5,074)	(9,648)	(9)	Non-controlling Interests
Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	(115,517)	(101,000)	(108,277)	Total Comprehensive Income for the Year
Laba (Rugi) per saham	(3,27)	(2,75)	(2,94)	Net income (loss) per share

Informasi Saham

Share Information

Pergerakan Saham BTEL Per Triwulan di Tahun 2022

BTEL's Stock Movements Per Quarter in 2022

Triwulan Quarter	Tertinggi High	Terendah Low	Penutupan Closing	Volume	Jumlah Saham Tercatat Total Listed Shares	Kapitalisasi Pasar Market Capitalization
I	50	50	50	-	36.822.665.755	1.841.133.287.750
II	50	50	50	-	36.822.665.755	1.841.133.287.750
III	50	50	50	-	36.822.665.755	1.841.133.287.750
IV	50	50	50	-	36.822.665.755	1.841.133.287.750

Pergerakan Saham BTEL Per Triwulan di Tahun 2021

BTEL's Stock Movements Per Quarter in 2021

Triwulan Quarter	Tertinggi High	Terendah Low	Penutupan Closing	Volume	Jumlah Saham Tercatat Total Listed Shares	Kapitalisasi Pasar Market Capitalization
I	50	50	50	-	36.822.665.755	1.841.133.287.750
II	50	50	50	-	36.822.665.755	1.841.133.287.750
III	50	50	50	-	36.822.665.755	1.841.133.287.750
IV	50	50	50	-	36.822.665.755	1.841.133.287.750

Jumlah Saham, Harga dan Kapitalisasi Pasar Tahun 2022

Number of Shares, Prices and Market Capitalization in 2022

Keterangan	Tahun 2022 Year of 2022	Description
Jumlah Lembar Saham	36.822.665.755	Number of Shares
Harga Saham Penutupan (Rp) per 31 Des 2021	50	Price of Closing Shares (Rp) as of 31 Dec 2021
Kapitalisasi Pasar (Rp)	1.841.133.287.750	Market Capitalization



Aksi Korporasi

Corporasi Action

Sepanjang tahun 2022, tidak ada aksi korporasi yang dilakukan oleh BTEL atau Perseroan.

Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (Suspension) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (Delisting)

Action Of Temporary Suspension Of Stock Trading (Suspension) And/Or Elimination Of Share Listing (Delisting)

Perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (Bursa) mengalami penghentian sementara sejak tanggal 27 Mei 2019 sesuai dengan pengumuman Bursa No. Peng-SPT-00010/BEI.PP1/05-2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT. Bakrie Telecom Tbk dan Pengumuman Bursa No. Peng-00005/BEI.PP1/05-2021 tanggal 10 Mei 2021 perihal Perpanjangan Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL).

Suspensi dilakukan dengan merujuk pada Laporan Keuangan Perseroan yang mendapatkan opini tidak memberikan pendapat (*disclaimer*) dari Kantor Akuntan Publik selama dua tahun berturut-turut periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2019 yang disampaikan Perseroan kepada Bursa.

Berdasarkan pengumuman Bursa No.: Peng-00008/BEI.PP1/05-2021 saham Perseroan telah disuspensi selama 24 bulan pada tanggal 27 Mei 2021, sehingga Perseroan telah memenuhi kriteria Penghapusan Pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia.

Merujuk peraturan Bursa No.: I-I, Bursa dapat melakukan delisting efek apabila Perusahaan Tercatat mengalami sekurang-kurangnya satu kondisi di bawah ini:

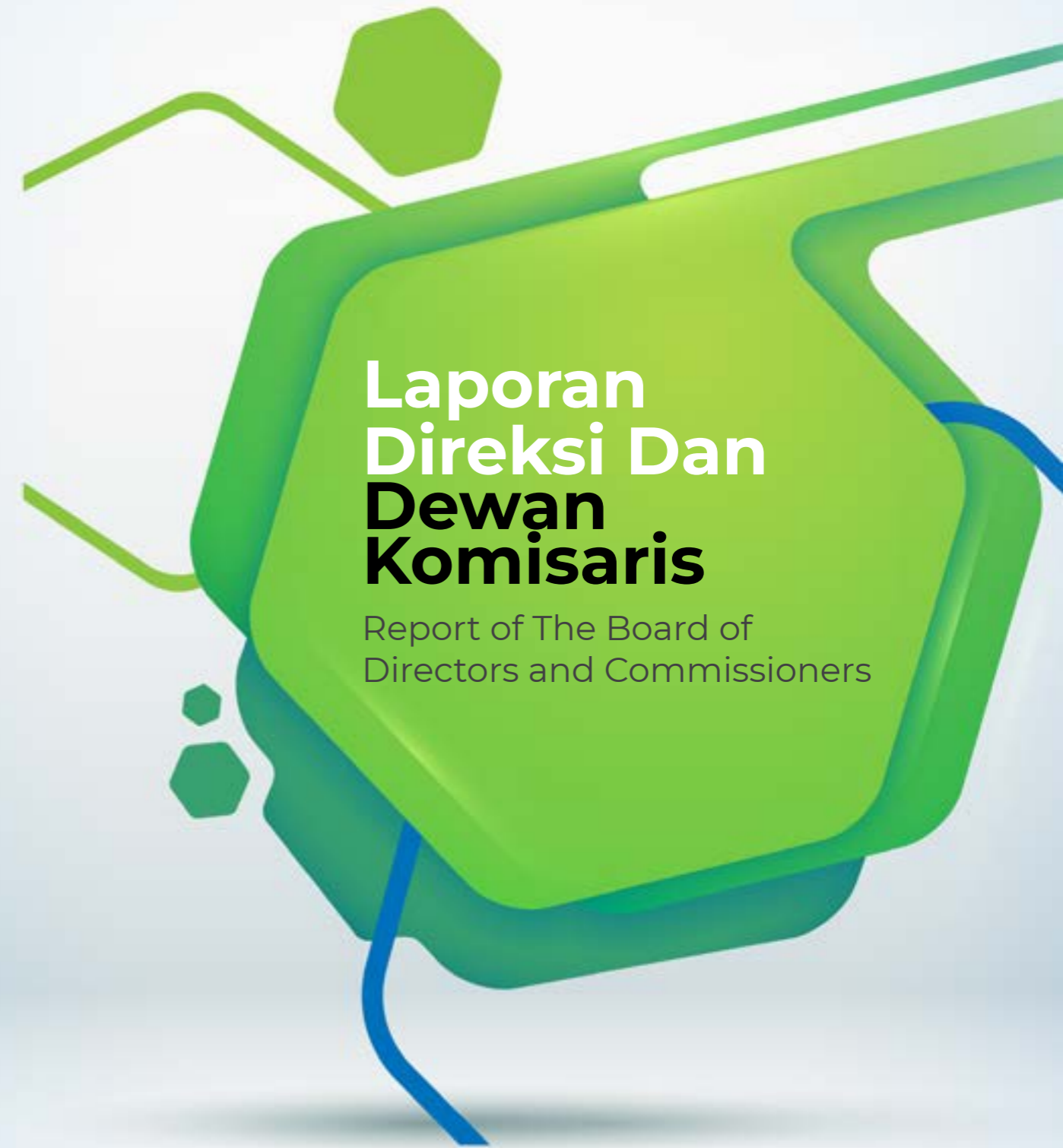
a. Mengalami kondisi atau peristiwa yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap

kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat baik secara finansial atau hukum dan tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai;

b. Saham Perusahaan Tercatat disuspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sekurang-kurangnya selama 24 bulan terakhir.

Perseroan telah mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) tersebut yaitu:

- Perseroan telah memperbaiki kinerja Laporan Keuangan diaudit untuk periode 30 September 2020, 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2022 yang masing-masing mendapatkan opini Wajar dengan Pengecualian.
- Terkait dengan kelangsungan kegiatan usaha, Perseroan telah melakukan upaya-upaya strategis melalui anak-anak Perusahaan aktif beroperasi dan menjalankan kegiatan usahanya di bidang layanan solusi telekomunikasi, layanan *contact center*, teknologi informasi dan pekerjaan sipil, layanan penyediaan infrastruktur penyiaran digital, serta agensi periklanan digital. Perseroan menargetkan pertumbuhan pendapat dari bidang - bidang tersebut.
- Perseroan senantiasa melakukan komunikasi dengan bursa guna mendapatkan masukan yang positif agar upaya-upaya yang dilakukan Perseroan sejalan dengan kebijakan Bursa.



Laporan Direksi Dan Dewan Komisaris

Report of The Board of
Directors and Commissioners



Harya Mitra Hidayat
 Direktur Utama
 President Director

Laporan Direksi

The Board of Directors Report

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga Perseroan berhasil melewati tahun 2022 yang masih penuh tantangan. Pada kesempatan ini, perkenankan kami untuk menyampaikan berbagai upaya yang telah dilakukan dan dicapai oleh Perseroan sepanjang tahun 2022.

Seiring meredanya kasus pandemi Covid-19, tahun 2022 menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Kegiatan usaha yang terus meningkat turut menopang laju pemulihan ekonomi Indonesia. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,31% pada tahun 2022, atau tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 yang tercatat sebesar 3,7%.

Secara berkelanjutan pemerintah turut serta mengambil peran aktif dalam pemulihan ekonomi dan dunia industri berbagai program stimulus dijalankan pemerintah untuk dapat menggerakkan roda perekonomian.

Adanya momentum digitalisasi melalui *Analog Switch Off (ASO)* pada 02 November 2022, turut memberikan angin segar pada perjalanan ekonomi, hal ini berdampak pada meningkatnya berbagai sektor ekonomi antara lain transportasi, *lifestyle*, pendidikan, kesehatan, logistik, agrikultur, dan keuangan.

Strategi Kinerja Perseroan Tahun 2022

Seiring dengan mulai pulihnya kegiatan ekonomi di tahun 2022. Perseroan menyikapi perkembangan usaha sambungan telepon tetap dengan pangsa pasar korporasi atau perkantoran yang terbilang



flat, Perseroan melalui entitas anaknya, terus melakukan kegiatan pemasaran terutama dengan menyasar *high rise building* yang baru atau masih dalam tahap pembangunan namun dengan prospek yang cukup menjanjikan dengan potensi masuknya korporasi dan pelaku usaha yang akan menjadi *tenant* gedung tersebut. Perseroan mampu untuk menyiapkan dan memberikan layanan komunikasi yang terintegrasi baik sambungan telepon tetap maupun dengan penyediaan akses data.

Perseroan tetap berupaya untuk mempertahankan dan mengelola layanan telekomunikasi untuk layanan korporat. Demikian pula halnya dengan layanan *contact center* 24 jam yang diandalkan oleh klien Perseroan dalam mempertahankan keterhubungan dengan pelanggan, sesuatu yang sangat penting di era saat ini.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang menara telekomunikasi beserta ekosistemnya, Perseroan memiliki dua portofolio utama dalam menjalankan kegiatan usahanya, yaitu sewa menara telekomunikasi (*tower lease*) dan usaha lainnya (*tower-related business*) yang terdiri dari *project solution*, dan *managed services*.

Momentum *Analog Switch Off (ASO)*, memberikan peluang bagi Perseroan untuk menjalankan usaha dalam bidang penyewaan infrastruktur penyiaran digital. PT Cakrawala Andalas Fasilitas yang sejak tahun 2023 berganti nama menjadi PT Viva Teknologi Integra ("VIVAT") hadir sebagai bentuk inovasi Perseroan dalam mendukung kebutuhan klien dalam menyediakan layanan infrastruktur digital Penyiaran di masa kini dan di masa depan.

Perseroan menyadari bahwa masuknya industri penyiaran TV FTA ke era siaran digital yang dimulai secara bertahap mulai tanggal 2 November 2022 merupakan keniscayaan bagi industri TV FTA itu sendiri dan juga bagi lini bisnis penyediaan dan pengelolaan infrastruktur

multipleksing yang menyokong siaran digital. Perseroan telah mendapatkan kepercayaan untuk mengelola infrastruktur multipleksing yang izinnya penyelenggaraannya dimiliki oleh ANTV dan tvOne. Dengan teknologi multipleksing yang memungkinkan satu frekuensi dapat dipergunakan untuk menyiarkan beberapa kanal siaran digital, maka Perseroan dituntut untuk memperkuat layanan dan infrastrukturnya untuk mengantisipasi penambahan jumlah stasiun TV FTA yang akan memanfaatkan slot multipleksing tersebut, di samping terus fokus untuk mengelola infrastruktur dan teknologi untuk penyiaran digital ANTV dan tvOne serta beberapa stasiun TV FTA lainnya.

Dalam penyusunan target dan strategi bisnis dalam rencana kerja Perseroan di tahun 2022, Direksi telah memaparkan dan memberikan rumusan strategi bagi seluruh elemen Perseroan untuk mencapai target yang dituju berikut peluang-peluang baru yang memiliki potensi untuk ditangkap. Rencana kerja, target, dan strategi ini juga sebelumnya mendapatkan masukan dan arahan dari Dewan Komisaris Perseroan.

Lebih lanjut Direksi juga mengingatkan seluruh entitas anak segala kemungkinan risiko yang mungkin timbul dalam perjalanan pengelolaan usaha berikut dengan upaya memitigasi risiko tersebut. Untuk memastikan semua proses untuk mencapai target Perseroan dijalankan dengan efisien, efektif dan konsisten, Direksi mengambil peran untuk memonitor implementasi strategi dan kebijakan tersebut.

Di tengah situasi yang penuh tantangan, pada tahun 2022, Perseroan mampu terus menjaga service level layanan dengan baik dalam pengelolaan infrastruktur multipleksing terutama kepada ANTV dan tvOne serta beberapa stasiun TV FTA lainnya. Lini bisnis pengelolaan infrastruktur siaran televisi digital mampu menjadi salah

satu sumber pendapatan utama Perseroan. Sementara itu di sektor usaha sambungan telepon tetap, Perseroan mampu untuk tetap mempertahankan 2,013 sambungan telepon tetap dari 148 klien korporasi yang tersebar di 6 gedung perkantoran atau komersial.

Peranan Direksi dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan Strategis Perseroan

Perseroan sebagai organisasi berorientasi pada keuntungan berkomitmen dalam upaya mempertahankan keberlanjutan usaha untuk kehidupan yang lebih baik dengan memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Di setiap wilayah operasi usahanya, Perseroan terus berupaya untuk memperhatikan dan mengantisipasi potensi permasalahan yang mungkin timbul di sisi sosial dan lingkungan. Konsep pengelolaan keuangan untuk berkelanjutan juga menjadi ikhtiar bagi manajemen. Dalam aspek sosial, Perseroan baik sendiri maupun bersinergi dengan grup usaha Bakrie melaksanakan berbagai program *Corporate Social Responsibility (CSR)* antara lain berpartisipasi dalam kegiatan penyaluran bantuan dalam rangka menyambut Ramadhan.

Proses yang Dilakukan Direksi dalam Implementasi Strategi Perseroan

Direksi senantiasa melakukan rapat dengan unit-unit usaha serta mendiskusikan pertanggungjawaban secara berkala. Direksi juga terlibat langsung dengan operasional sejauh diperlukan dalam mengambil suatu keputusan sehingga hasil yang diperoleh dapat dimaksimalkan demi Perseroan dan Pemangku Kepentingan.

Perbandingan Antara Hasil yang Dicapai dengan yang Ditargetkan

Pada tahun 2022, Perseroan telah mencatat

pendapatan sebesar Rp 47.9 miliar atau pencapaian 54% dari targetnya sebesar Rp 87.8 miliar.

Pencapaian pendapatan tersebut dihasilkan dari segmen usaha existing layanan solusi telekomunikasi yang memberikan kontribusi sebesar Rp 9.5 miliar, jasa teknologi informasi sebesar Rp 4.8 miliar, infrastruktur media dengan pendapatan Rp 26.4 miliar serta layanan agensi periklanan digital dengan pendapatan sebesar Rp 7.2 miliar. Dari sisi profitabilitas, Perseroan masih mencatatkan rugi bersih sebesar Rp 117.9 miliar atau naik sebesar 24% jika dibandingkan dengan rugi bersih di tahun 2021 sebesar Rp 95.0 miliar.

Kendala yang Dihadapi Perseroan

Pada akhir Februari 2022, saat dunia sedang berupaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi, dunia industri kembali menerima tantangan akibat adanya krisis geopolitik di Eropa Timur. Hal ini berdampak pada kenaikan harga energi dan pada gilirannya memberikan tekanan terhadap tingkat inflasi dan mengakibatkan Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga secara bertahap sampai akhir tahun 2022.

Dalam menghadapi krisis global tersebut, pemerintah Indonesia dan otoritas ekonomi melakukan langkah-langkah strategis dan memberikan hasil yang positif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren meningkat sehingga pada akhir tahun 2022 berhasil mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,31%. Dengan berbagai strategi dan langkah dan stimulus pemerintah bagi dunia usaha yang komprehensif tersebut, Perseroan berupaya untuk dapat bertahan, tumbuh dengan sehat dan berkelanjutan di masa mendatang.

Prospek Usaha Perseroan

Pelaksanaan ASO secara bertahap mulai tahun 2022 dan diharapkan selesai di tahun 2023 membuka peluang yang cukup besar bagi Perseroan sebagai pengelola infrastruktur multipleksing untuk memberikan layanan bagi berbagai stasiun TV FTA seiring dengan meningkatkan okupansi slot multipleksing yang dikelola oleh Perseroan. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menargetkan pelaksanaan ASO selesai di tahun 2023 dan lebih dari 600 stasiun TV telah selesai bermigrasi ke siaran digital. Tak kalah penting, Perseroan juga telah melakukan berbagai persiapan sebagai perusahaan penyedia teknologi yang tidak hanya berfokus pada pengelolaan infrastruktur siaran digital namun juga untuk menjawab tantangan bisnis di era digital. Transformasi digital di berbagai lini bisnis mendorong Perseroan mengambil langkah untuk menangkap peluang menjadi pengelola dan penyedia teknologi digital seraya tetap mempertahankan pengelolaan infrastruktur multipleksing.

Sementara itu di tengah gempuran bisnis komunikasi melalui internet, Perseroan meyakini bahwa penambahan ruang perkantoran seiring dengan pertumbuhan high rise building akan menjadi modal penting bagi Perseroan untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah pelanggan. Perseroan akan mempersiapkan dan menyediakan layanan komunikasi terpadu sambungan telepon tetap dan layanan data atau internet.

Industri telekomunikasi, informasi dan digital diyakini akan terus tumbuh di tahun 2022-2023, seiring dengan program digitalisasi yang terjadi di hampir seluruh sektor industri. Selain itu, dengan telah dikeluarkannya sektor informasi dan komunikasi dari Daftar Negatif Investasi,

maka investasi di sektor ini juga diprediksi akan mengalami peningkatan.

Prospek usaha di bidang penyiaran digital, Perseroan menerima hak untuk menyediakan jasa pengelolaan infrastruktur penyiaran digital terrestrial di Indonesia.

Penerapan Tata Kelola Perseroan

Perseroan menyadari pentingnya penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten, yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness* guna menjaga dan meningkatkan nilai Perseroan (*corporate value*). Direksi senantiasa berkomitmen pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sembari menjaga pengendalian internal, berkomunikasi secara transparan, dan mengelola tingkat risiko Perseroan secara efektif sehingga fundamental Perseroan semakin kuat dan terjaga dengan baik. Peningkatan dan pemuktahiran kualitas GCG dilakukan oleh Perseroan secara terus-menerus yang disesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kondisi industry dan perkembangan bisnis Perseroan.

Kebijakan untuk Merespons Tantangan dalam Pemenuhan Strategi Keberlanjutan

Untuk merespon tantangan dalam pemenuhan strategi berkelanjutan dalam usaha penyewaan infrastruktur, berikut adalah beberapa kebijakan yang Perseroan implementasikan:

1. Mendorong pengguna infrastruktur untuk menggunakan sumber energi hijau atau ramah lingkungan.
2. Menerapkan standar efisiensi energi yang ketat untuk infrastruktur yang disediakan.
3. Mengatur kebijakan pengelolaan limbah bagi pengguna infrastruktur untuk meminimalkan

dampak negatif terhadap lingkungan.

4. Mewajibkan pengguna infrastruktur untuk menjalankan kegiatan perbaikan dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Hal ini dapat mencakup penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan, pemeliharaan peralatan agar tetap efisien, dan mengurangi emisi gas rumah kaca selama proses perbaikan.
5. Meningkatkan kesadaran pengguna infrastruktur tentang pentingnya keberlanjutan dan memberikan informasi dan panduan mengenai praktik berkelanjutan yang dapat diterapkan dalam operasi mereka.

Penerapan kebijakan-kebijakan ini akan membantu mendorong pengguna infrastruktur untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Selama tahun 2022, Perseroan telah berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk mewujudkan target-target yang telah ditetapkan. Target dan pencapaian Perseroan di sepanjang tahun 2022 sebesar 54% dari target yang telah ditetapkan.

Strategi Pencapaian Target

Untuk mencapai target keberlanjutan, Perseroan menyadari pentingnya pengelolaan risiko baik risiko keuangan, risiko lingkungan, maupun risiko sosial. Perseroan secara periodik melakukan proses identifikasi, analisis, mitigasi, evaluasi, monitoring, dan komunikasi terhadap risiko operasional bisnis infrastruktur telekomunikasi dan teknologi yang berpotensi menghalangi pencapaian target Perseroan.

Penutup

Pencapaian Perseroan di tahun 2022 adalah hasil dari dedikasi dan kerja keras setiap insan Perseroan yang didukung oleh pemegang saham dan segenap pemangku kepentingan. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Dewan Komisaris yang telah memberikan arahan atas strategi Perseroan dalam menghadapi tantangan pandemi dan persaingan industri, serta kontribusi setiap karyawan Perseroan dalam memperjuangkan kemajuan Perseroan. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham Perseroan, mitra kerja, dan pemangku kepentingan lainnya yang sangat kami hargai atas kepercayaan dan kerja samanya di sepanjang tahun 2022. Demikian laporan atas kegiatan pengelolaan Perseroan tahun 2022 ini kami sampaikan. Kami optimis mampu mengatasi berbagai tantangan yang kami hadapi dan memanfaatkan berbagai peluang di depan.

Jakarta, 30 Juni 2023

Atas nama Direksi
PT Bakrie Telecom Tbk,

Harya Mitra Hidayat
Direktur Utama
President Director



Taufan Eko Nugroho Rotorasiko
 Komisaris Utama
President Commissioner

Laporan Dewan Komisaris

The Board Of Commissioners Report

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa kami panjatkan puji dan syukur kepada-Nya karena kami dapat menjalankan tugas pengawasan dan pengelolaan perusahaan yang diamanatkan kepada kami selaku Dewan Komisaris Perseroan. Atas nama Dewan Komisaris, bersama ini kami sampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan selama tahun 2022.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa kegiatan operasional Perseroan telah mengacu kepada strategi bisnis yang telah ditetapkan, dikelola secara profesional, sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam laporan ini, Dewan Komisaris melaporkan penilaian terhadap kinerja Direksi dalam melakukan pengelolaan Perseroan, pengawasan terhadap implementasi strategi Perseroan, pandangan atas prospek usaha dan rencana kerja yang disusun oleh Direksi untuk tahun 2022, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG), penilaian atas kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris, perubahan komposisi Dewan Komisaris, frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi.

Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun oleh Direksi

Dewan Komisaris menilai bahwa prospek usaha yang telah disusun oleh Direksi Perseroan beserta strategi-strateginya telah mempersiapkan Perseroan untuk menjawab tantangan dan menangkap peluang bisnis untuk tercapainya target Perseroan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.



Dewan komisaris juga berpendapat bahwa Direksi perlu terus melakukan evaluasi lebih lanjut secara periodik mengenai strategi yang telah ditetapkan agar bisa meningkatkan kinerja ke level yang lebih baik lagi. Evaluasi ini perlu dilakukan dan tetap mengelola risiko yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang, dengan terus memperhitungkan efisiensi serta memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja.

Penilaian atas Kinerja Direksi

Sepanjang 2022, Dewan Komisaris dan Direksi mengapresiasi bahwa Perseroan terus mengupayakan langkah dan strategi yang efektif untuk mendorong kinerja yang lebih baik untuk memperoleh hasil yang sangat positif. Kami mendukung Perseroan untuk terus bertumbuh baik secara organik maupun anorganik agar semakin tangguh dan kuat dalam menghadapi tantangan usaha. Dengan semakin berkembangnya skala usaha Perseroan, kami akan terus bekerja sama dengan Direksi untuk memastikan Perseroan senantiasa melakukan perbaikan secara berkelanjutan baik dalam hal operasional dan finansial.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) tetap menjadi fokus dari tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris bersama dengan Direksi.

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris tidak hanya bertanggung jawab kepada hasil atau tujuan yang dicapai tetapi juga senantiasa memantau proses untuk mencapai hasil yang diharapkan. Terkait dengan praktik GCG, Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Penutup dan Apresiasi

Mewakili Dewan Komisaris, saya menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan oleh para pemegang saham dan pemangku kepentingan kepada Perseroan. Dewan Komisaris juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap jajaran Direksi dan seluruh jajaran manajemen serta karyawan, berkat dedikasi dan kerja kerasnya sehingga Perseroan berhasil melalui tahun 2022 yang penuh tantangan dan mencatatkan kinerja yang baik.

Apresiasi yang tinggi juga diberikan kepada kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia yang senantiasa memberikan masukan, saran dan arahan sehingga Perseroan dapat menjalankan kegiatan bisnis dan tata kelola dengan baik.

Jakarta, 30 Juni 2023

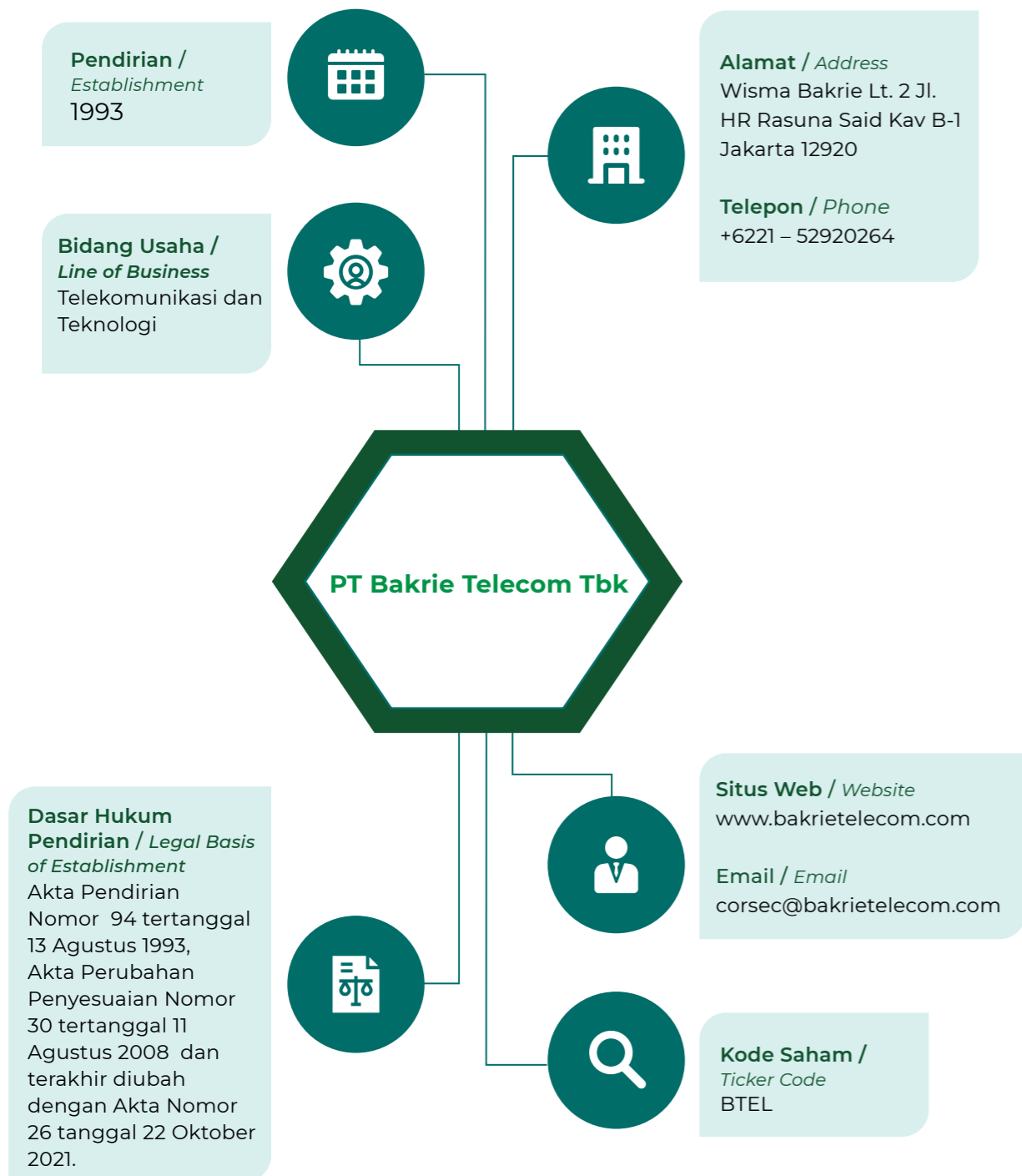
Atas nama Dewan Komisaris
PT Bakrie Telecom Tbk,

Taufan Eko Nugroho Rotorasiko
Komisaris Utama
President Commissioner



Identitas Perusahaan

Company's Profile



Sekilas Tentang Btel

BTEL at Glance

PT Bakrie Telekom Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") pertama kali berdiri dengan nama PT Radio Telekomunikasi (Ratelindo) pada tahun 1993. Pada awalnya Perseroan menjalankan usaha dibidang telekomunikasi dan teknologi yang menyediakan solusi terintegrasi untuk pelanggannya berbasis teknologi E-TDMA (*Enhanced -Time Division Multiple Access*) dengan brand Ratelindo.

Pada tahun 2003 Perseroan meningkatkan bentuk dan teknologi layanan telekomunikasi dengan menghadirkan layanan telekomunikasi *fixed wireless access* (FWA) yang mengusung teknologi terbaru satu itu CDMA (Code Division Multiple Access) dengan cakupan wilayah layanan meliputi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten (JBB). Dengan brand Esia dan tarif yang lebih terjangkau, layanan FWA Perseroan disambut antusias masyarakat luas yang pada masa itu masih tergantung pada layanan telekomunikasi berbasis *Global System for Mobile communication* (GSM) yang disediakan oleh beberapa operator. Perseroan juga sekaligus mengubah nama korporasinya menjadi PT Bakrie Telecom.

Di tahun 2006 Perseroan mengambil langkah strategis untuk menjadi perusahaan telekomunikasi yang andal dan terkemuka, Perseroan menawarkan sebagian sahamnya agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyertaan modal ke dalam Perseroan dan kemudian Perseroan menjadi perusahaan publik yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta). Sebagai perusahaan publik,

nama Perseroan berubah menjadi PT Bakrie Telecom Tbk dengan *ticker* BTEL.

Pada tahun 2007, Kementerian Komunikasi dan Informatika mempercayakan lisensi FWA bagi BTEL dengan cakupan area operasi layanan yang semula di area Jawa Barat-Jakarta-Bandung (JBB) menjadi seluruh area Indonesia. Mengikuti kemajuan teknologi informasi yang sangat dinamis dan memperhatikan kebutuhan konsumen, di tahun 2010 BTEL mulai bertransformasi untuk juga berkompetisi dalam bisnis layanan data *Broadband Wireless Access* dengan teknologi CDMA EVDO Rev. A, dimana dengan layanan terbaru ini pelanggan dapat menikmati layanan akses internet atau data dengan berbagai media atau *gadget*.

Pada tahapan selanjutnya, dengan mengusung konsep kemitraan pemanfaatan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi, di tahun 2014 Perseroan memulai bertransformasi dari Perusahaan penyelenggara jaringan dan operator jasa teleponi dasar menjadi penyedia layanan teleponi dasar. Hal ini ditandai dengan kolaborasi antara BTEL dan PT Smartfren Telecom Tbk (Smartfren) dalam kerja sama pemanfaatan jaringan telekomunikasi Smartfren oleh BTEL.

Akhir tahun 2014, Perseroan mencapai kesepakatan dengan para krediturnya untuk merestrukturisasi utang Perseroan melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kesepakatan

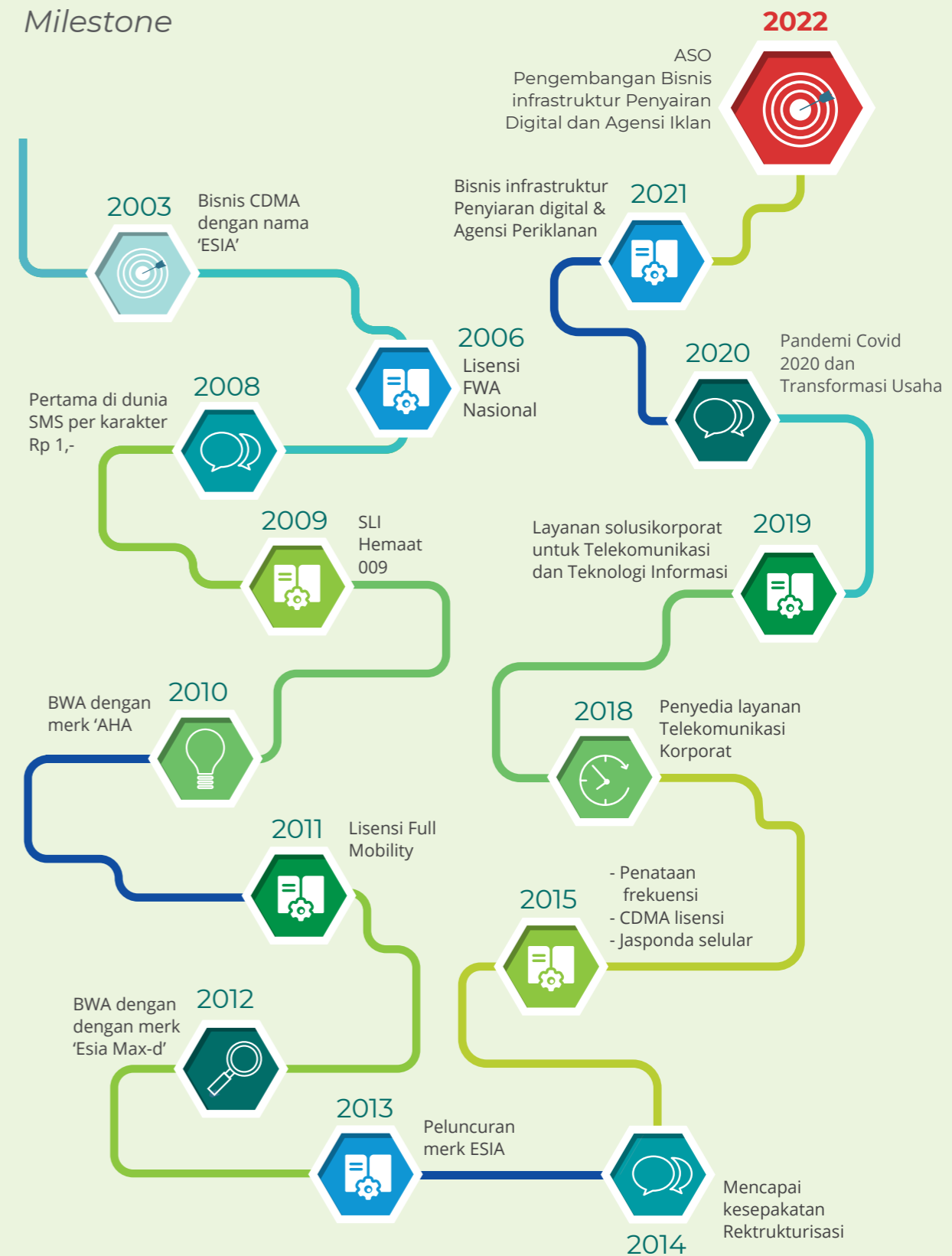
restrukturisasi utang tersebut ditetapkan dalam suatu Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi atau disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 9 Desember 2014 dan dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 23 Oktober 2015.

Mulai pada tahun 2016 Perseroan mengimplementasikan inisiatif yang bersifat jangka Panjang berupa penyediaan layanan telekomunikasi dengan fokus pada segmen pengguna di gedung-gedung tinggi (*high rise building*) melalui anak usaha Perseroan, PT Layanan Prima Digital (LPD) dan tetap menjalankan bisnis *call centre* atau *contact centre*. Pada tahun 2019 Perseroan melalui anak Perusahaan PT Inovasi Teknologi Nusantara (ITN) menyediakan solusi IT dan *Engineering*.

Perseroan pada tahun 2020, melakukan transformasi bisnis untuk melengkapi bisnis sebelumnya sebagai penyedia layanan telekomunikasi ritel menjadi *TMT Service and Infrastructure Provider*. Jasa yang ditawarkan Perseroan meliputi jasa solusi telekomunikasi, jasa teknologi informasi dan jasa sipil. Sejak tahun 2021 dan dilanjutkan pada 2022, Perseroan melakukan ekspansi bisnis dengan menawarkan jasa agensi periklanan digital dan jasa pengelolaan infrastruktur penyiaran *digital terrestrial* di Indonesia.

BTEL meyakini bahwa transformasi model bisnis yang saat ini sedang berjalan mempunyai harapan untuk menjadi lini usaha baru yang akan menjadi andalan Perseroan dalam kontribusi pendapatan ke depan.

Jejak Langkah Milestone



Visi, Misi dan Nilai Perusahaan

Company Vision, Mission and Value



VISI *Vision*

Menghubungkan semua generasi dengan dunia digital.

MISSION *Mission*

Memberikan pengalaman unik dan menyenangkan bagi pengguna dalam berinteraksi dengan dunia informasi, komunikasi dan hiburan.

Nilai-nilai Perusahaan

Core Values

- 

Passion,
dorongan untuk menyebarkan energi positif dan menularkannya kepada lingkungan perusahaan. Perilaku nilai tersebut meliputi integritas, penghargaan martabat, motivasi, semangat, dan mempelajari tren, teknologi, metode, dan keterampilan baru.
- 

Appreciating People,
menghargai karyawan sebagai faktor terpenting dengan memahami dan mengakui kontribusi setiap individu. Perilaku nilai tersebut meliputi penghormatan dan penghargaan terhadap sesama, baik internal maupun eksternal, dan pengembangan para pegawai dan mitra sendiri.
- 

Customer Centric,
menyenangkan pelanggan dan melayani mereka dengan produk dan layanan berkualitas tinggi. Perilaku nilai tersebut meliputi interaksi secara langsung dengan pasar, mencari tahu dan memahami kebutuhan pelanggan, pelayanan yang setara bagi semua pelanggan.
- 

Operational Excellence,
memahami pentingnya efisiensi dan efektivitas dan dampaknya kepada kepuasan pelanggan. Perilaku nilai tersebut meliputi semangat lebih cepat, lebih baik, dan lebih terjangkau harganya, profesionalisme, disiplin, kerja sama dan sinergi.
- 

Innovation,
keberanian untuk berkompetisi, memproduksi, dan menyuarkan terobosan untuk mendorong perusahaan agar menjadi yang terdepan dalam persaingan bisnis. Perilaku nilai tersebut meliputi mental "Bisa", berpikir kreatif, berpikir secara unik dalam hubungan dengan pengalaman pelanggan, dan berani mengambil risiko yang telah diperhitungkan.



Kegiatan Usaha

Company's Business Activities

Produk dan layanan yang disediakan Perseroan, di antaranya:

- Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Televisi
- Penyelenggara Layanan Broadband dan Komunikasi
- Penyediaan dan Pengembangan Platform dan Aplikasi Komunikasi Cloud
- Penyediaan Layanan *Office Solution for High Rise Building*
- Penyediaan Layanan *Digital Bisnis dan Marketing*
- *Contact Center* dan *Outsourced Call Center*

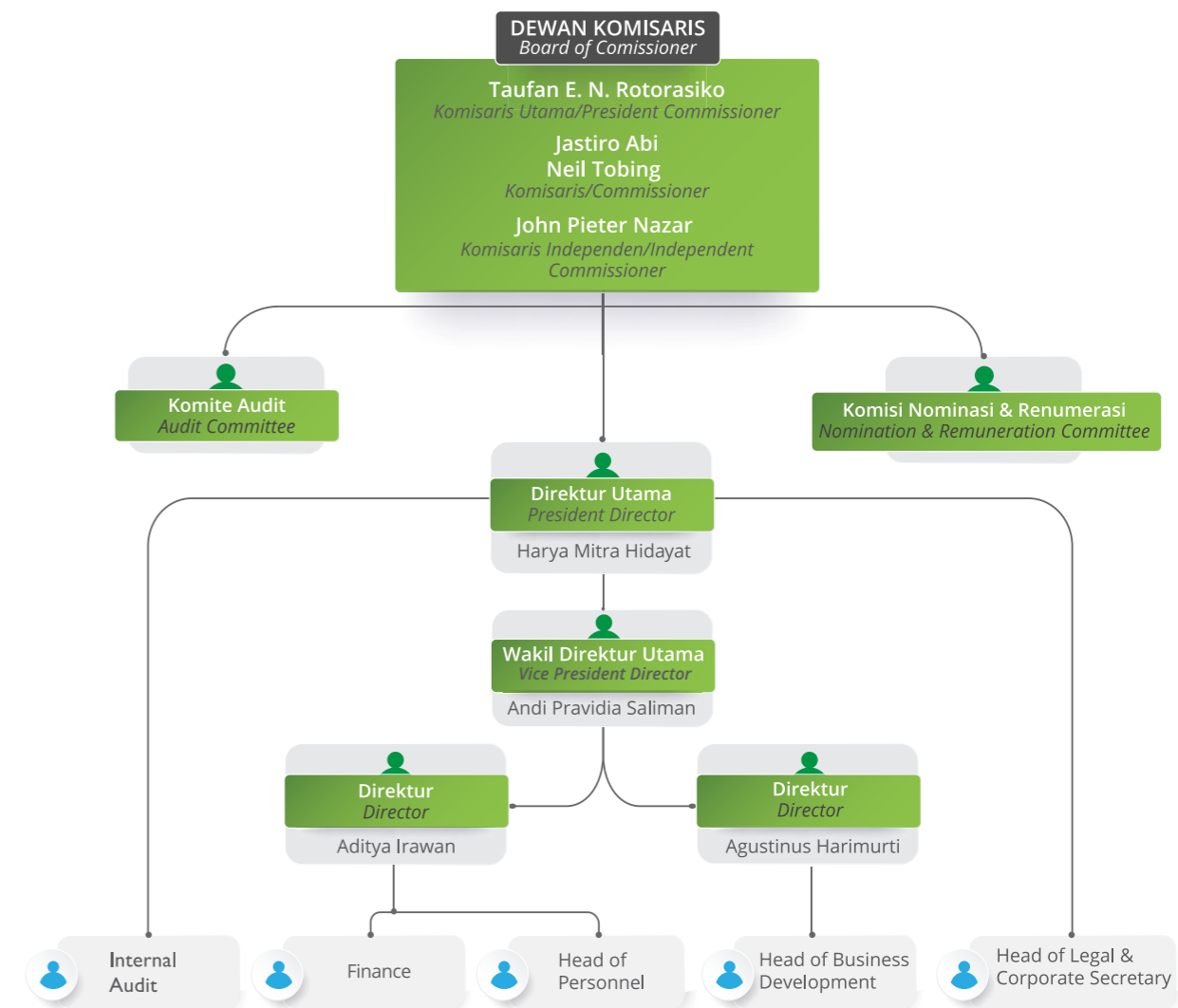
Wilayah Operasional

Operational Area

Pada tahun 2022 dalam pengelolaan infrastruktur penyiaran digital Perseroan telah beroperasi di beberapa zona layanan diantaranya Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara dan Kalimantan.

Struktur Organisasi

Organisation Structure



Daftar Keanggotaan Asosiasi

Association Membership

Dalam rangka pelaksanaan penerapan keuangan berkelanjutan Perseroan ikut berpartisipasi dalam keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional sebagai berikut:

1. Kamar Dagang dan Industri Indonesia
2. Asosiasi Emiten Indonesia (Skala Nasional)
3. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet - APJII (Skala Nasional)

Profil Direksi

Board of Director's Profile



Agustinus Harimurti
Direktur

DIRECTOR



Harya Mitra Hidayat
Direktur Utama

PRESIDENT
DIRECTOR



Andi Pravidia Saliman
Wakil Direktur
Utama

VICE PRESIDENT
DIRECTOR



Aditya Irawan
Direktur

DIRECTOR



Harya Mitra Hidayat
Direktur Utama
President Director

Usia
Age
49 tahun / 49 years

Domisili
Domicile
Jakarta

Kewarganegaraan
Citizen
Indonesia

Riwayat Pendidikan
Educational Background

MBA, University of
Baltimore, Maryland

B.S. Business
Administration,
Denver University

Pengalaman Kerja *Work experience*

Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, pernah menjabat sebagai *Executive Vice President* 2006–2007. Jabatan lain sebelumnya adalah Direktur Utama PT Bakrie Toll Road dari 2007–2012, *VP Corporate Finance* di PT Bumi Resources Tbk. 2004–2007, *VP Corporate Finance* di Asia Capital Manager selama 2002–2004. Tahun 2001–2002 menjabat *Associate Director* di AAJ Associates. Tahun 1998 menjabat sebagai *Management Trainee* di Worldcom, Associates di Merrill Lynch, Singapura tahun 1999–2001.

Riwayat Penunjukan *Appointment History*

Diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 31 Agustus 2020 sesuai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 75 tanggal 31 Agustus 2020.

Hubungan Afiliasi *Affiliate Relationship*

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan Pemegang Saham Pengendali dan Utama

Kepemilikan Saham BTEL *BTEL Share Ownership*

Tidak ada / None



Andi Pravidia Saliman
Wakil Direktur Utama
Vice President Director

Usia
Age
49 tahun / 49 years

Domisili
Domicile
Jakarta

Kewarganegaraan
Citizen
Indonesia

Riwayat Pendidikan
Educational Background

Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi Indonesia, STEI/AAI

MBA, Universitas Gajah Mada

Pengalaman Kerja *Work experience*

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2016. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Direktur PT Lativi Mediakarya (tvOne). Selepas menuntaskan studi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, STEI/AAI, Jakarta pada tahun 1996, Andi Pravidia mulai berkarir sebagai *auditor* di beberapa Kantor Akuntan di Jakarta. Selanjutnya antara tahun 1998 sampai 2002, beliau berkarya di PT. Putra Sumber Utama Timber, Paper & Forest Product Industry dan di PT Dinar *Securities*. Pengalamannya sebagai *auditor* dan kompetensi di bidang keuangan dan *accounting* membawa Andi Pravidia bergabung dengan Group Bakrie pada tahun 2002 sampai dengan saat ini dengan beberapa posisi terakhir antara lain *Vice President* PT Bakrie Global Ventura, Presiden Direktur PT Fajar Bumi Sakti, dan *Vice President Director* Perseroan.

Riwayat Penunjukan *Appointment History*

Diangkat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 30 November 2022 sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 78 tanggal 30 November 2022.

Hubungan Afiliasi *Affiliate Relationship*

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan Pemegang Saham Pengendali dan Utama

Kepemilikan Saham BTEL *BTEL Share Ownership*

Tidak ada / None



Agustinus Harimurti
Direktur
Director

Usia
Age
48 tahun / 48 years

Domisili
Domicile
Jakarta

Kewarganegaraan
Citizen
Indonesia

Riwayat Pendidikan
Educational Background

Sarjana Hukum, Universitas
Indonesia pada tahun 1999.

Pengalaman Kerja *Work experience*

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2021. Selepas menuntaskan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1999, Agustinus Harimurti mulai berkarir sebagai advokat/pengacara di Kantor Kantor Hukum Yan Apul, selanjutnya antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 berkarir sebagai *Legal Manager* di PT Bakrie Swasakti Utama dan sejak tahun 2004 memegang posisi sebagai *Corporate Secretary* PT Bakrie Telecom Tbk,.

Riwayat Penunjukan *Appointment History*

Diangkat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 22 Oktober 2021 sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 26 tanggal 22 Oktober 2021.

Hubungan Afiliasi *Affiliate Relationship*

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan Pemegang Saham Pengendali dan Utama.

Kepemilikan Saham BTEL *BTEL Share Ownership*

Tidak ada / None



Aditya Irawan
Direktur
Director

Usia
Age
46 tahun / 46 years

Domisili
Domicile
Jakarta

Kewarganegaraan
Citizen
Indonesia

Riwayat Pendidikan
Educational Background
Sarjana Akuntansi Universitas Indonesia pada tahun 1999.

 **Pengalaman Kerja**
Work experience

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2022. Selepas menuntaskan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1999, Aditya Irawan mulai berkarir sebagai auditor di Deloitte Touche & Tohmatsu selanjutnya antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 berkarir sebagai Internal Audit di PT CMA Indonesia dan sejak tahun 2004 memegang posisi sebagai *VP Special Projects* PT Bakrie Telecom Tbk, dan *Chief Financial Officer* PT Bakrie Telecom Tbk sampai dengan tahun 2022.

 **Riwayat Penunjukan**
Appointment History

Diangkat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 30 November 2022 sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 78 tanggal 30 November 2022.

 **Hubungan Afiliasi**
Affiliate Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan Pemegang Saham Pengendali dan Utama.

 **Kepemilikan Saham BTEL**
BTEL Share Ownership

Tidak ada / None

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioner's Profile



John Pieter Nazar
Komisaris Independen

INDEPENDENT COMMISSIONER



Jastiro Abi
Komisaris

COMMISSIONER



Taufan E. N. Rotorasiko
Komisaris Utama

PRESIDENT COMMISSIONER



Neil R. Tobing
Komisaris

COMMISSIONER



Taufan Eko Nugroho Rotorasiko
Komisaris Utama
President Commissioner

Usia <i>Age</i> 47 tahun / 47 years	Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i> Bachelor of Science in Computer Information System
Domisili <i>Domicile</i> Jakarta	Kewarganegaraan <i>Citizen</i> Indonesia
	Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i> Master of Business Administration

Pengalaman Kerja
Work experience

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2019. Menyelesaikan pendidikan di Strayer College Washington DC untuk meraih *Bachelor of Science in Computer Information System* pada tahun 1998 dan di tahun 2009 Beliau menyandang *Master of Business Administration* dari UCLA-NUS Executive MBA Program. Taufan E.N Rotorasiko memulai karir di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi sebagai *Network Engineer dan Software Engineer* di beberapa perusahaan IT di Amerika Serikat diantaranya Nth Information System, Bell Atlantic, dan Verizon. Beliau bergabung di Grup Bakrie sejak tahun 2002 sebagai *Group Information System Administration Manager* di PT Bakrie & Brothers sampai tahun 2009. Saat ini beliau juga menjabat sebagai *Chief Executive Officer* PT Multi Kontrol Nusantara dan Komisaris PT Bakrie Indo Infrastructure.

Riwayat Penunjukan
Appointment History

Diangkat sebagai komisaris Utama Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 31 Agustus 2020 sesuai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 75 tanggal 31 Agustus 2020.

Hubungan Afiliasi
Affiliate Relationship

Tidak Memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya namun memiliki hubungan dengan Pemegang Saham Pengendali dan Utama.

Kepemilikan Saham BTEL
BTEL Share Ownership

Tidak ada / None



John Pieter Nazar
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Usia <i>Age</i> 67 tahun / 67 years	Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i> Sarjana Hukum UII Yogyakarta
Domisili <i>Domicile</i> Jakarta	Kewarganegaraan <i>Citizen</i> Indonesia

Pengalaman Kerja
Work experience

Menjabat Komisaris Independen sejak tahun 2019. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Indonesia-Yogyakarta dalam program studi Hukum Ekonomi pada tahun 1981 dan di tahun 1999 menyandang master hukum dari Institute Business Law and Management-Jakarta. Beliau berprofesi sebagai advokat dengan segudang pengalaman baik litigasi maupun non-litigasi dan saat ini memimpin kantor hukum John Pieter Nazar & Partners. Sebelumnya Beliau bergabung dengan beberapa firma hukum ternama di antaranya Harjono Tjitrosoebono *Law Office*, Law Firm Mahfud MD & Associates dan Maqdir Pieter Ishak *Law Firm*. Bapak John Pieter pernah memimpin organisasi Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Jakarta Pusat. Saat ini John Pieter Nazar juga menjabat sebagai Ketua Umum Mediator Nasional Indonesia (MNI), Ketua Dewan Kehormatan PERADI RBA (Persatuan Advokat Indonesia), Ketua Komite Tetap Hubungan Dengan Lembaga Penegak Hukum Dan Lembaga Tinggi Negara Kadin Indonesia, dan Pendiri dan Kepala Lembis (Lembaga Mediasi Bisnis) Kadin Indonesia.

Riwayat Penunjukan
Appointment History

Diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 31 Agustus 2020 sesuai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 75 tanggal 31 Agustus 2020.

Hubungan Afiliasi
Affiliate Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan Pemegang Saham Pengendali dan Utama.

Kepemilikan Saham BTEL
BTEL Share Ownership

Tidak ada / None



Jastiro Abi
Komisaris
Commissioner

Usia <i>Age</i> 51 tahun / 51 years	Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i> Sarjana Teknik Universitas Diponegoro
Domisili <i>Domicile</i> Jakarta	M.Eng.Sc. Queensland University of Technology Australia
Kewarganegaraan <i>Citizen</i> Indonesia	M.B.A. University of Western Australia

Doktor BINUS University pada tahun 2017.

 **Pengalaman Kerja**
Work experience

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2021, dan saat ini juga menjabat sebagai Direktur PT Visi Media Asia Tbk. Beliau pernah menduduki berbagai posisi penting antara lain sebagai Direktur Perseroan sejak 2019, Wakil Direktur Utama Perseroan kurun waktu 2016–2019, Direktur Utama Perseroan periode 2013 -2016 dan Direktur Keuangan Perseroan dari tahun 2007 -2011. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur PT Bakrie Swasakti Utama dan berbagai posisi manajerial pada divisi Corporate Banking, Credit Recovery Unit, Trade Finance di HSBC pada tahun 1998 - 2002 dan PT Astra International Tbk. pada tahun 1997 - 1998. Selain itu Beliau juga pernah menjabat sebagai anggota Badan Pengawas di Asosiasi Telekomunikasi Selular Indonesia (ATSI). Jastiro Abi memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Diponegoro pada tahun 1995, M.Eng.Sc. dari Queensland University of Technology Australia pada tahun 1997, M.B.A. dari University of Western Australia pada tahun 2005, dan meraih gelar Doktor dari BINUS University pada tahun 2017.

 **Riwayat Penunjukan**
Appointment History

Diangkat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 22 Oktober 2021 sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 26 tanggal 22 Oktober 2021.

 **Hubungan Afiliasi**
Affiliate Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan Pemegang Saham Pengendali dan Utama.

 **Kepemilikan Saham BTEL**
BTEL Share Ownership

Tidak ada / None



Neil Ricardo Tobing
Komisaris
Commissioner

Usia <i>Age</i> 55 tahun / 55 years	Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i> Sarjana Hukum Universitas Katolik Parahyangan
Domisili <i>Domicile</i> Jakarta	Master of Laws, University of New South Wales
Kewarganegaraan <i>Citizen</i> Indonesia	

 **Pengalaman Kerja**
Work experience

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2022. Neil Ricardo Tobing saat ini juga menjabat sebagai Direktur PT Visi Media Asia Tbk, Komisaris PT Lativi Mediakarya, Wakil Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, dan Wakil Ketua Komisi Tetap Penyiaran Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Beliau pernah menduduki berbagai posisi penting antara lain sebagai Sekretaris Jenderal pada Dewan Periklanan Indonesia sejak tahun 2014 sampai dengan 2020, Direktur PT Redal Semesta hingga tahun 2015, Deputi Direktur Legal dan Programming Services PT Cakrawala Andalas Televisi pada tahun 2009 sampai tahun 2011, Direktur Legal dan Compliance Quantum Multimedia Communication Pty. Ltd., Melbourne, Australia pada tahun 2003 hingga tahun 2009, Direktur PT Quantum Bahan Enterprise pada tahun 2002 hingga tahun 2009 dan Direktur Iridium South Pacific Pty. Ltd. .dari tahun 1997 sampai dengan tahun 1998.

 **Riwayat Penunjukan**
Appointment History

Diangkat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 30 Noovember 2022 sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 78 tanggal 30 November 2022.

 **Hubungan Afiliasi**
Affiliate Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan Pemegang Saham Pengendali dan Utama.

 **Kepemilikan Saham BTEL**
BTEL Share Ownership

Tidak ada / None



Karyawan

Employees

Per tanggal 31 Desember 2022, jumlah karyawan Perusahaan sebanyak 204 karyawan, dengan rincian sebagai berikut:

Komposisi Karyawan berdasarkan Tingkat Pendidikan

Workforce Composition by Level of Education

Pendidikan / Education	Jumlah Orang / Number of People	Persentase / Percentage (%)
Magister (S2)	3	1%
Sarjana (S1)	87	43%
Diploma (D3)	46	23%
SMA	68	33%
Total	204	100%

Komposisi Karyawan berdasarkan Jenis Kelamin

Workforce Composition by Level of Gender

Jenis Kelamin / Gender	Jumlah Orang / Number of People	Persentase / Percentage (%)
Laki-laki	185	91%
Perempuan	19	9%
Total	204	100%

Komposisi Karyawan berdasarkan Tingkat Jabatan

Workforce Composition by Organizational Level

Jabatan / Position	Jumlah Orang / Number of People	Persentase / Percentage (%)
Manager - Up	64	31%
Supervisor	51	25%
Staff	89	44%
Total	204	100%

Komposisi Karyawan berdasarkan Status

Workforce Composition by Employment Status

Status / Status	Jumlah Orang / Number of People	Persentase / Percentage (%)
Tetap	179	88%
Tidak Tetap	25	12%
Total	204	100%

Komposisi Karyawan berdasarkan Usia / Workforce Composition by Age Group

Status / Status	Jumlah Orang / Number of People	Persentase / Percentage (%)
41 s/d 55 Tahun	137	67%
31 s/d 40 Tahun	51	25%
s/d 30 Tahun	16	8%
Total	204	100%

Komposisi Pemegang Saham

Composition of Shareholders

Per 31 December 2022, komposisi kepemilikan saham di Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham yang Memiliki 5% Saham atau Lebih

Shareholders owning 5% or More

Pemegang Saham / Shareholders	Jumlah Lembar Saham / Number of Shares	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership
PT. Mahindo Agung Sentosa	5,000,439,000	13.58%
PT. Huawei Tech Investment	6,189,313,980	16.81%
Credit Suisse AG Singapore Branch S/A Bright Ventures Pte Ltd.	1,980,000,000	5.38%
Raiffeisen Bank International AG, Singapore Branch S/A Best Quality Global Limited	2,213,279,000	6.01%
PT. Bakrie Global Ventura	2,639,582,576	7.17%
TOTAL	18,022,614,556	48.94%

Pemegang Saham yang Memiliki Kurang dari 5% Saham

Shareholders owning 5% or Less

Pemegang Saham / Shareholders	Jumlah Lembar Saham / Number of Shares	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership
PT. Jasa Investindo	1,613,331,000	4.38%
PT. Minna Padi Investama Securitas	826,255,500	2.24%
PT. Recapital Securities	500,000,000	1.36%
Publik	15,860,464,699	43.08%
Total	18,800,051,199	51.06%

Pemegang Saham Domestik dan Internasional

Domestic and International Shareholders

Status Investor <i>Investor Status</i>	Keterangan <i>Information</i>		
	Jumlah Investor <i>Total Investor</i>	Jumlah Saham <i>Number Of Shares</i>	%
Status Investor / <i>Investor Status</i>			
Perorangan Lokal <i>Local Individual</i>	5.502	5,247,994,624	14.25%
Institusi Lokal <i>Local Institution</i>	101	24,619,151,841	66.86%
SUBTOTAL LOKAL <i>SUBTOTAL OF LOCAL</i>	5,613	29,867,146,465	81.11%
<i>Foreign</i>			
Perorangan Asing <i>Foreign Individual</i>	56	38,455,016	0,10%
Badan Usaha Asing <i>Foreign Corporation</i>	75	6,917,064,274	18.78%
SUBTOTAL ASING <i>SUBTOTAL OF FOREIGN</i>	131	6,955,519,290	18.89%
TOTAL SAHAM <i>TOTAL SHARES</i>	5.701	36,822,665,755	100.00%

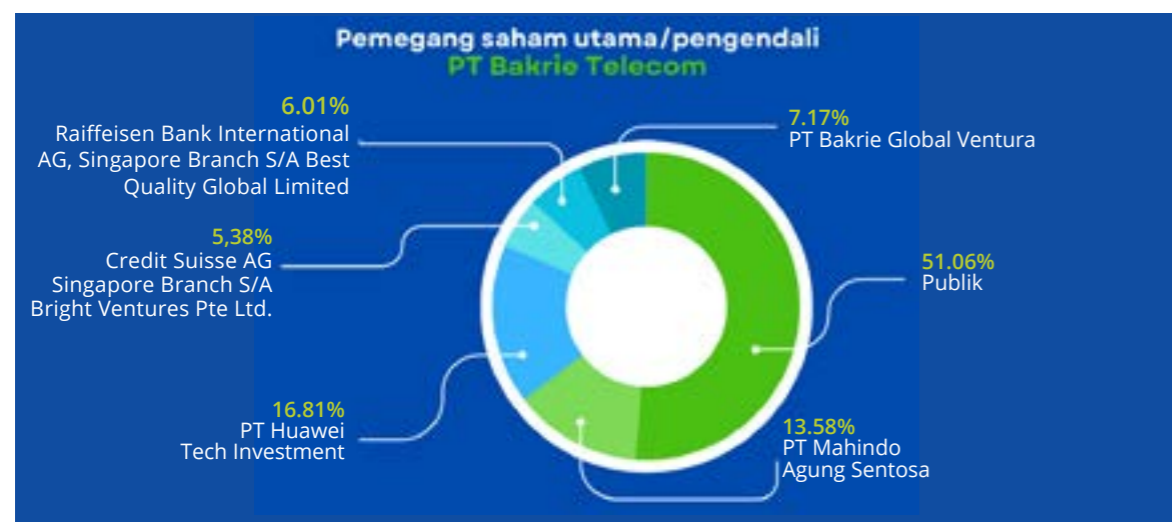
Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang Memiliki Saham

The Member of the Board of Directors and Member of the Board of Commissioners owning Shares

No	Pemegang Saham <i>Shareholders</i>	Jumlah Lembar Saham <i>Number of Shares</i>	Persentase Kepemilikan <i>Percentage of Ownership</i>
1.	Nihil	Nihil	Nihil

Informasi Pemegang Saham Utama /Pengendali

Main/Controlling Shareholders Information



Entitas Anak

Subsidiaries

PT BAKRIE CONNECTIVITY	
Nama Perusahaan <i>Subsidiaries Name</i>	PT Bakrie Connectivity
Bidang Usaha <i>Business Activity</i>	Penyediaan barang dan jasa berbasis dan internet
Tanggal Pendirian <i>Date of Establishment</i>	11 Maret 2010
Dasar Hukum Pendirian <i>Legal Basis of Establishment</i>	Akta Pendirian Nomor 3 tahun 2010
Status Operasi <i>Operation Status</i>	Non Operasional
Kepemilikan Efektif <i>Effective Ownership</i>	PT Bakrie Telecom Tbk (99,8%)
Alamat Kantor <i>Company Address</i>	Gedung Setiabudi 2, Lt. 2
PT ANUGERAH ANDALAN INVESTAMA	
Nama Perusahaan <i>Subsidiaries Name</i>	PT Anugerah Andalan Investama
Bidang Usaha <i>Business Activity</i>	Penyediaan barang dan jasa berbasis IP, internet dan multimedia
Tanggal Pendirian <i>Date of Establishment</i>	16 Juni 2016
Dasar Hukum Pendirian <i>Legal Basis of Establishment</i>	Akta Pendirian Nomor 9 Tahun 2016
Status Operasi <i>Operation Status</i>	Non Operasional
Kepemilikan Efektif <i>Effective Ownership</i>	PT Bakrie Telecom Tbk (99,8%)
Alamat Kantor <i>Company Address</i>	Gedung Setiabudi 2, Lt. 2
PT MITRA KREASI KOMUNIKA	
Nama Perusahaan <i>Subsidiaries Name</i>	PT Mitra Kreasi Komunika
Bidang Usaha <i>Business Activity</i>	Perdagangan Barang dan Jasa
Tanggal Pendirian <i>Date of Establishment</i>	18 Desember 2006
Dasar Hukum Pendirian <i>Legal Basis of Establishment</i>	Akta Pendirian Nomor 35 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Akta Nomor 15 Tahun 2017
Status Operasi <i>Operation Status</i>	Non Operasional
Kepemilikan Efektif <i>Effective Ownership</i>	99,9% (melalui AAI)
Alamat Kantor <i>Company Address</i>	Wisma Bakrie Lt. 2



PT INOVASI TEKNOLOGI NUSANTARA

Nama Perusahaan <i>Subsidiaries Name</i>	PT Inovasi Teknologi Nusantara
Bidang Usaha <i>Business Activity</i>	Teknologi Informasi dan Jasa Sipil
Tanggal Pendirian <i>Date of Establishment</i>	19 Juni 2015
Dasar Hukum Pendirian <i>Legal Basis of Establishment</i>	Akta Pendirian Nomor 12 Tahun 2015
Status Operasi <i>Operation Status</i>	Operasional
Kepemilikan Efektif <i>Effective Ownership</i>	PT Bakrie Telecom Tbk (melalui MKK) 99,9%
Alamat Kantor <i>Company Address</i>	Gedung Wirausaha

PT LAYANAN PRIMA DIGITAL

Nama Perusahaan <i>Subsidiaries Name</i>	PT Layanan Prima Digital
Bidang Usaha <i>Business Activity</i>	Teknologi Informasi, Layanan Pelanggan, dan Multimedia
Tanggal Pendirian <i>Date of Establishment</i>	15 Januari 2014
Dasar Hukum Pendirian <i>Legal Basis of Establishment</i>	Akta Pendirian Nomor 3 Tahun 2014
Status Operasi <i>Operation Status</i>	Operasional
Kepemilikan Efektif <i>Effective Ownership</i>	PT Bakrie Telecom Tbk (melalui MKK) 99,9%
Alamat Kantor <i>Company Address</i>	Rasuna Office Park South Podium UG Floor Taman Rasuna Apartemen Jl. HR. Rasuna Said.

PT SANGADS DIGITAL PARIWARA

Nama Perusahaan <i>Subsidiaries Name</i>	PT SANGADS DIGITAL PARIWARA
Bidang Usaha <i>Business Activity</i>	Digital Advertising Agency
Tanggal Pendirian <i>Date of Establishment</i>	17 Juni 2021
Dasar Hukum Pendirian <i>Legal Basis of Establishment</i>	Akta Pendirian Nomor 24 Tahun 2021
Status Operasi <i>Operation Status</i>	Operasional
Kepemilikan Efektif <i>Effective Ownership</i>	PT Bakrie Telecom Tbk (melalui ITN) 40%
Alamat Kantor <i>Company Address</i>	Gedung Promenade Jl Bangka Raya

PT CAKRA ANDALAS FASILITAS

Nama Perusahaan <i>Subsidiaries Name</i>	PT Cakra Andalas Fasilitas (Sejak tahun 2023 berganti nama menjadi PT Viva Teknologi Integra atau disingkat VIVAT)
Bidang Usaha <i>Business Activity</i>	Teknologi Informasi dan Infrastruktur
Tanggal Pendirian <i>Date of Establishment</i>	9 Januari 2018
Dasar Hukum Pendirian <i>Legal Basis of Establishment</i>	Akta Pendirian Nomor 2 Tahun 2018
Status Operasi <i>Operation Status</i>	Operasional
Kepemilikan Efektif <i>Effective Ownership</i>	PT Bakrie Telecom Tbk (melalui ITN) 45%
Alamat Kantor <i>Company Address</i>	The Convergence Indonesia Lt. 6, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said,

Kronologi Pencatatan Saham*)

Share Listing Chronology

Jenis Pencatatan <i>Type of Listing</i>	Tanggal Pencatatan <i>Date of Listing</i>	Jumlah Saham Beredar <i>Shares Outstanding</i>	Nilai Nominal <i>Nominal Value</i>	Harga Penawaran <i>Price</i>
Penawaran Umum Perdana	3 Februari 2006	5,500,000,000	Saham Seri B Rp 100	Saham Seri B Rp 110
Pencatatan Saham	3 Februari 2006	18,779,415,495	Saham Seri B Rp 100	Saham Seri B Rp 110
Penerbitan Saham Dengan Hak Untuk Memesan Efek Terlebih Dahulu	29 Februari 2008	28,482,417,579	Saham Seri B Rp 100	Saham Seri B Rp 350
Penerbitan Saham tanpa Hak Untuk Memesan Efek Terlebih Dahulu	22 Juni 2012 & 29 Agustus 2012	30,584,590,655	Saham Seri B Rp 100	Saham Seri B Rp 265
Penerbitan Saham tanpa Hak Untuk Memesan Efek Terlebih Dahulu (Konversi Obligasi Wajib Konversi)	1 Maret 2017 & 26 Agustus 2019	36,822,665,755	Saham Seri B Rp 100	Saham Seri B Rp 200

*) Saham dicatitkan di Bursa Efek Indonesia



Kronologi Pencatatan Efek Lainnya

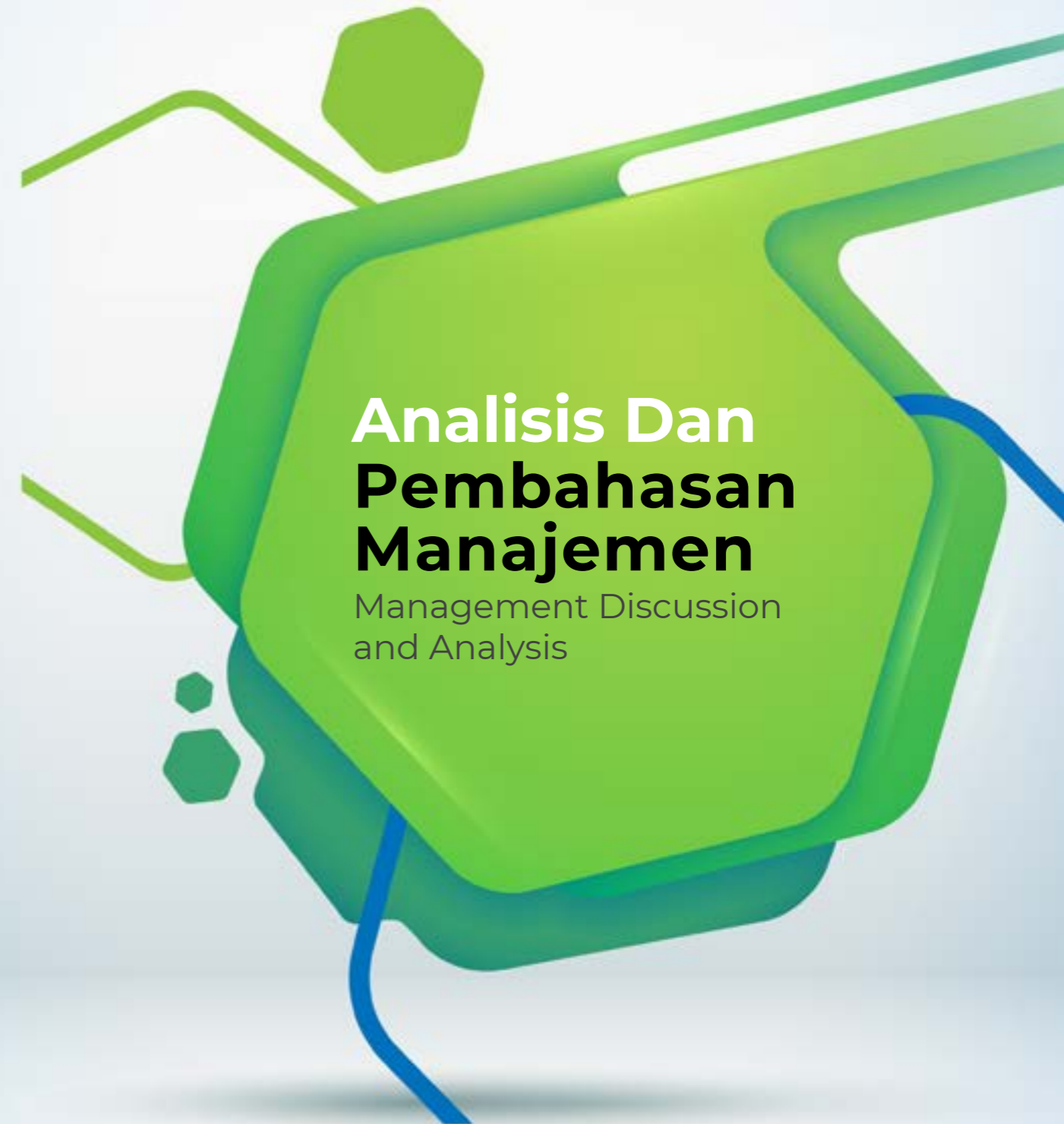
Other Share Listing Chronology

Nama Obligasi	Jumlah Nominal	Tingkat Suku Bunga	Jatuh Tempo
Wesel Senior (Diterbitkan oleh Bakrie Telecom Pte. Ltd.)	USD 380.000.000	11,5% P.A	7 Mei 2015

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Capital Market Supporting Professionals and Institutions

Profesi Penunjang	Alamat	Tipe Jasa	Nomor Std
Akuntan Publik: Drs. A. Krisnawan Budipracoyo, Akt., CPA., MBA (KAP Krisnawan, Nugroho & Fahmy)	Pesanggrahan Office R 102 Jl. Lebak Bulus III No 50 Jakarta 12440 - Indonesia	Akuntan Publik	Kep367-/KM.2017/1
PT Ficomindo Buana Registrar	Jl. Kyai Caringin No.-2A, Cideng, Gambir, Jakarta 10150 - Indonesia	Biro Administrasi Efek	09.03.1.66.53633
Leolin Jayayanti, SH, M.Kn	Jl. Pulo Raya VI No. 1, Kebayoran Baru Jakarta 12170 - Indonesia	Notaris Publik	N44-/PM.2018/22



Tinjauan Ekonomi Dan Industri

Economic and Industry Review

Pada tahun 2022, perekonomian global tumbuh lebih lambat. Mengacu pada laporan *International Monetary Fund (IMF)* dalam *World Economic Outlook* yang dirilis tanggal 11 April 2023, pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2022 hanya sebesar 3.4% atau menurun signifikan dari pertumbuhan tahun 2021 yang tercatat sebesar 6.0% (*year on year*). Perlambatan pertumbuhan ekonomi global diantaranya disebabkan masih mewabahnya pandemi Covid-19 di Tiongkok meskipun pada tingkat ringan. Selain itu, pengetatan kebijakan moneter yang dilakukan oleh sebagian besar negara termasuk di negara-negara maju juga turut mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

Perkembangan inflasi global menjadi tantangan yang harus dihadapi di tahun 2022. Tingkat inflasi global di tahun 2022 mencapai level 8.7% dibandingkan 4.7% di tahun 2021. Menurut data Badan Pusat Statistika (BPS) Inflasi 2022 mencapai 5.5% meningkat dibanding dengan inflasi 2021 sebesar 1.9%, namun ditengah perlambatan kinerja ekonomi global pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5.3% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia tetap terjaga, serta prospek ekonomi jangka menengah yang tetap kuat.

Pada tahun 2022, industri telekomunikasi dan teknologi merupakan salah satu sektor yang memiliki prospek bisnis. Berdasarkan Studi *Google Temasek, Bain & Company* (2022) menunjukkan ekonomi digital Indonesia di 2022 mencapai USD77 miliar atau tumbuh 22% dari 2021. Indonesia berhasil menjadi pemain utama dalam ekonomi digital ASEAN, karena sekitar 40%

dari nilai total transaksi ekonomi digital ASEAN berasal dari Indonesia.

Berdasarkan laporan Profil Internet Indonesia 2022 yang dirilis oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai angka 210 juta orang atau sebesar 77.0% dari total penduduk Indonesia. Angka tersebut naik dibandingkan periode sebelumnya sekitar 73.7% (196.7 juta jiwa).

BPS juga mencatat pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi rata-rata pada tahun 2022 adalah 6.5%. Sementara, lembaga pemeringkat *Moodys Investor Services* memperkirakan sektor informasi dan komunikasi Indonesia akan bertumbuh 4.0 - 4.5% di tahun 2023. Pertumbuhan di sektor informasi dan komunikasi didukung oleh meningkatnya penggunaan teknologi digital pada masa pandemi.

Menilik pada pertumbuhan yang signifikan dalam bisnis industri telekomunikasi, dan *Momentum Analog Switch Off (ASO)*, BTEL melangkah kedalam bidang penyewaan infrastruktur penyiaran digital dengan nama VIVAT. Mengusung Visi Menjadi perusahaan penyedia layanan teknologi terintegrasi yang terdepan dan terpercaya dalam *lanskap* ekosistem digital Indonesia. VIVAT berusaha berkomitmen dalam pencapaian visi tersebut dengan menjalankan Misi;

1. Memahami kebutuhan pengguna jasa dan menyediakan solusi yang efektif dan efisien dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas.



2. Pendayagunaan teknologi secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan teknologi yang dinamis dan pesat guna memberikan *value added services* kepada pengguna jasa.
3. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dari waktu ke waktu dalam rangka penguasaan teknologi terkini dan berfokus pada kepuasan pengguna jasa.

Tidak hanya bergerak dalam bidang penyewaan infrastruktur, VIVAT mengembangkan diri dengan memiliki 3 portofolio bisnis yaitu *Digital Terrestrial Television Services, Production Services, dan IT Services*, dengan cakupan wilayah multiplexer sebanyak 38 wilayah layanan seluruh Indonesia dan peralatan infrastruktur dan teknologi yang memadai VIVAT dipercaya mampu membantu pelanggan di dalam memenuhi kebutuhan akan layanan teknologi terintegrasi.

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Operational Review per Segment

Perseroan mencatatkan pendapatan usaha di tahun 2022 sebesar Rp 47.9miliar atau menurun 8% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp 52.1miliar. Pendapatan Perseroan berasal dari bisnis telekomunikasi dan teknologi yang mencakup layanan telekomunikasi untuk layanan korporat, layanan solusi IT dan *engineering*, pelayanan pengelolaan infrastruktur untuk siaran televisi, serta jasa agency periklanan digital.

Layanan Telekomunikasi untuk Segmen Korporat

Telecommunications Services for the Corporate Segment

Perseroan melalui unit usaha PT Layanan Prima Digital (LPD) menyediakan layanan untuk pelanggan korporat yaitu B2B *Telecommunication Solution*. Layanan B2B *Telecommunication Solution* terdiri dari *Voice Connectivity* dan *Data Connectivity*. Selain itu LPD juga menjalankan usaha *contact center* dan *premium short access number* dengan kode akses 140xx. Jumlah pendapatan di segmen usaha ini mencapai Rp 9.5miliar.

Layanan Jasa Teknologi Digital

Digital Technology services

Layanan Jasa Teknologi digital yang meliputi *IT managed service*, jasa sipil, jasa pengelolaan infrastruktur digital dan agensi periklanan digital diselenggarakan oleh unit usaha PT Inovasi Teknologi Nusantara (ITN) dan anak-anak Perusahaan ITN:

- IT managed Service (*IT infrastructure, NOC surveillance, Datacomm & VPN infrastructure admin, Jasa pengelolaan email serta Autogate Solution*) dikerjakan oleh ITN.
- Jasa sipil juga dikerjakan oleh ITN seperti instalasi perangkat *fiber optic*, instalasi *power supply*, jasa pemeliharaan utilitas, dan jasa mekanikal engineering lainnya.
- Jasa pengelolaan infrastruktur teknologi dikerjakan oleh unit usaha PT Cakra Andalas Fasilitas (CAF) dalam mendukung siaran TV Digital Terrestrial.
- Agensi periklanan digital dikerjakan oleh PT Sangads Digital Pariwara (Sangads) yang juga merupakan anak usaha dari ITN.

Pendapatan dari jasa teknologi digital yang dihasilkan oleh ITN, CAF, Sangads mencapai Rp 38.4 miliar.



Tinjauan Kinerja Keuangan

Financial Position Statement

Keterangan	2022	2021	Persentase (%)
Asset			
Current Assets	11.425	13.796	-17%
Non-Current Assets	21.850	6.962	214%
Total Assets	33.275	20.758	60%
Liabilities			
Short - Term Liabilities	958.161	914.501	5%
Long-Term Liabilities	4.931.941	4.842.143	2%
Total Liabilities	5.890.102	5.756.644	2%
Total Equity	(5.856.827)	(5.735.886)	2%
Total Liabilities & Equity	33.275	20.758	60%

Aset

Asset

Jumlah aset Perseroan yang tercatat hingga 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 33.3 miliar, meningkat sebesar 60% dari Rp 20.8 miliar di tahun 2021. Aset lancar Perseroan sebesar Rp 11.4 miliar, mengalami penurunan sebesar 17% dari Rp 13.8 miliar di tahun 2021 terutama disebabkan oleh penurunan kas dari Rp 3.1 miliar menjadi Rp 404 juta di tahun 2022. Di sisi lain, aset tidak lancar tercatat sebesar Rp 21.9 miliar meningkat sebesar 214% dari Rp 6.9 miliar di tahun 2021, terutama disebabkan oleh peningkatan aset dalam pengerjaan yang meliputi pembelian perangkat *monitoring*, *transmitter*, dan *Integrated Receiver/Decoder (IRD)* sebesar Rp12.5 miliar yang mana pada tanggal 31 Desember 2022 masih dalam proses penyelesaian.

Liabilitas

Liability

Di tahun 2022, liabilitas jangka pendek Perseroan sebesar Rp 958.2 miliar meningkat 5% dibandingkan tahun 2021 Rp 914.5 miliar. Liabilitas jangka panjang Perseroan sebesar Rp 4.9 triliun mengalami peningkatan 2% dari Rp 4.8 triliun di tahun 2021 disebabkan oleh peningkatan pada akrual bunga.

Ekuitas

Equity

Pada tahun 2022, jumlah ekuitas Perseroan tercatat mengalami defisiensi modal sebesar Rp 5.9 triliun, mengalami peningkatan sebesar 2% dari Rp 5.7 triliun di tahun 2021 disebabkan rugi bersih di tahun 2022.

Laporan Laba Rugi

Profit (Loss) Statement

Keterangan	2022	2021	(%)	Information
Pendapatan	47.850	52.110	-8%	Operating Revenues
Beban Langsung	(15.480)	(15.719)	-2%	Direct Cost
Laba Kotor	32.370	36.391	-11%	Gross Profit
Bebas Umum & Administrasi	(49.093)	(42.662)	15%	General and Administration Expenses
Rugi Usaha	(16.723)	(6.271)	167%	Operating Losses
Beban Keuangan	(89.814)	(89.831)	-0,02%	Financial Expenses
Rugi Selisih Kurs	(7.057)	(2.317)	205%	Loss From Foreign Exchange
Beban Lain-lain	(4.378)	4.168	205%	Other Income (Charge)
Pajak Penghasilan	46	(725)	106%	Income Tax Expenses
Rugi Tahun Berjalan	(117.926)	(94.976)	24%	Net Loss for the year
Penghasilan Komprehensif Lain				Other Comprehensive Income
Pengukuran kembali rugi atas Liabilitas imbalan kerja	2.409	(6.024)	140%	Remeasurement on employee benefit liabilities
Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	(115.517)	(101.000)	14%	Total Comprehensive Loss for The Year
Rugi Tahunan Berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Net Loss for the year attributable to:
Pemilik Entitas Induk	(112.851)	(85.328)	32%	Owners of the Parent
Kepentingan Non-Pengendali	(5.074)	(9.648)	-47%	Non-controlling Interests
Total	(117.926)	(94.976)	24%	Total
Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Total Comprehensive Loss for the Year Attributable to:
Pemilik Entitas Induk	(110.442)	(91.352)	21%	Owners of the Parent
Kepentingan Non-Pengendali	(5.074)	(9.648)	-47%	Non-controlling Interests
Total	(115.517)	(101.000)	14%	Total



Sepanjang tahun 2022, Perseroan membukukan total pendapatan sebesar Rp 47.9 miliar mengalami penurunan sebesar 8% dari pendapatan tahun 2021 sebesar Rp 52.1 miliar. Pendapatan perseroan meliputi pendapatan yang berasal dari layanan infrastruktur media sebesar Rp 26.4 miliar, jasa telekomunikasi sebesar Rp 9.5 miliar, jasa periklanan digital sebesar Rp 7.2 miliar dan jasa teknologi informasi sebesar Rp 4.8 miliar.

Pendapatan jasa pengelolaan infrastruktur media di CAF masih menjadi kontributor terbesar pada pendapatan. Perseroan akan terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan dengan menambah jenis dan wilayah layanan serta jumlah pelanggan

untuk dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Sementara itu Perseroan membukukan penurunan total beban langsung sebesar 2% menjadi Rp 15.5 miliar pada tahun 2022. Adapun beban umum dan administrasi mengalami peningkatan sebesar 15% menjadi Rp 49.1 miliar, peningkatan ini disebabkan oleh biaya jasa profesional yang mengalami kenaikan karena adanya biaya jasa konsultan pemasaran digital.

Sepanjang tahun 2022, Perseroan mencatat rugi komprehensif tahun berjalan sebesar Rp 115.5 miliar, meningkat sebesar 14% dari tahun 2021 sebesar Rp 101.0 miliar.

Arus Kas Equity

Keterangan	2022	2021	Persentase (%) Percentage (%)	Information
Arus Kas dari Aktivitas Operasional	(2.620)	7.657	-134%	Cash Flows from Operating Activities
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(129)	(4.913)	-97%	Cash Flow from Investment Activities
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	-	-	0%	Cash Flow from Funding Activities
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas	(2.749)	2.744	-200%	Net Increase (Decrease) in Cash & Cash Equivalents
Awal Tahun	3.153	409	671%	Beginning of the Year
Akhir Tahun	404	3.153	-87%	end of the Year

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities

Pada tahun 2022, Perseroan memperoleh arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar negatif Rp 2.6 miliar, mengalami penurunan sebesar 134% dibandingkan pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp 7.7 miliar. Penurunan tersebut terutama berasal dari peningkatan pembayaran kepada pemasok dan pembayaran kepada karyawan, masing-masing sebesar 18% dan 25%.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investment Activities

Pada tahun 2022, Perseroan mencatat penggunaan arus kas bersih untuk aktivitas investasi sebesar Rp

129 juta, angka tersebut mengalami penurunan sebesar 97% dibandingkan penggunaan tahun 2021 yaitu sebesar Rp 4.9 miliar. Penggunaan arus kas bersih untuk aktivitas investasi tersebut terutama untuk perolehan aset tetap.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Funding Activities

Pada tahun 2022 dan 2021, Perseroan tidak mencatatkan kas bersih yang diterima Perseroan dari aktivitas Pendanaan.

Kemampuan Membayar Utang Dan Kolektibilitas Piutang Ability to Pay Debt and Collectibility of Receivables

Kemampuan Membayar Utang Ability to Pay Debt

Keterangan	2022	2021	Information
Rasio Kas	0,00x	0,00x	Cash Ratio (x)
Rasio Cepat	0,01x	0,01x	Quick Ratio (x)
Rasio Lancar	0,01x	0,02x	Current Ratio (x)
Rasio Kewajiban terhadap Ekuitas	(1,01x)	(1,00x)	DER (x)
Rasio Kewajiban terhadap Aset	177,01x	277,32x	DAR (x)

Kolektibilitas Piutang Accounts Receivable Rate

Keterangan/	2022	2021	Information
Perputaran Piutang	8	12	AR Turn Over
Hari Piutang	48	44	AR Days

Struktur Modal

Capital Structure

Struktur Permodalan Perseroan per 31 Desember 2022 berada pada posisi defisiensi modal sebesar Rp 5.9 triliun. Kondisi ini terutama disebabkan oleh kerugian operasional tahun-tahun sebelumnya.

Berikut ini adalah perbandingan struktur modal Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir:

Keterangan	2022	2021	Persentase (%) Percentage (%)	Information
Liabilitas Jangka Pendek	958.161	914.501	5%	Short-Term Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang	4.931.941	4.842.143	2%	Long-Term Liabilities
Jumlah Liabilitas	5.890.102	5.756.644	2%	Total Liabilities
Jumlah Ekuitas	(5.856.827)	(5.735.886)	2%	Total Equity
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	33.275	20.758	60%	Total Liabilities and Equity
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas	-101%	-100%	-	Liabilities to Equity Ratio

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal

Material Commitments for Capital Goods Investments

Pada tahun 2022 Perseroan tidak melakukan investasi dan ikatan material atas barang modal.

Prospek Usaha

Business Prospect

Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 pada kisaran 4.5%- 5.3%. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan permintaan domestik, aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA), serta berlanjutnya Proyek Strategis Nasional (PSN). Pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan akan berdampak positif terhadap bisnis Perseroan.

Pandemi COVID-19 dan besarnya populasi digital native (generasi Millennial dan generasi Z) yang

mewakili 57.8% total populasi Indonesia menjadi faktor yang mengakselerasi penggunaan media digital. Berdasarkan laporan APJII, penetrasi internet di Indonesia per April 2023 telah mencapai 78.4% dari populasi Indonesia atau setara dengan 215.6 juta pengguna. Dengan demikian, peran media digital akan semakin penting di masa yang akan mendatang.

Selain itu, mengingat pesatnya pertumbuhan jumlah pengguna internet di Indonesia ke depan yang menciptakan potensi ekonomi digital yang sangat besar, Perseroan senantiasa berinvestasi dalam mengembangkan dan memperkuat bisnisnya untuk menangkap peluang pendapatan dari bisnis digital. Perusahaan melihat bahwa potensi bisnis di industri ini akan terus tumbuh dan akan dimaksimalkan dengan meningkatkan kinerja yang lebih baik.

Perbandingan Target 2022 dan Realisasi 2022

Comparison of 2022 Target and Its Realization

Kinerja Perseroan sepanjang tahun 2022 untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya, dapat dilihat melalui laporan keuangan yang telah diaudit dan dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh Perseroan. Dari laporan tersebut, dapat dilihat bahwa pendapatan Perseroan tercapai sebesar Rp 47.9 miliar atau 54% dari target yang ditetapkan pada saat awal tahun 2022 sebesar Rp 87.8 miliar.

Aspek Pemasaran

Marketing Aspects

Sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan yang berkelanjutan, Perseroan senantiasa melaksanakan strategi pemasaran dan penjualan dengan baik. Pada tahun 2022, Perseroan menjalankan strategi pemasaran sebagai berikut:



01.

Perseroan menerapkan strategi pendekatan kepada developer high rise building yang masih dalam tahap pembangunan atau penyelesaian gedung. Di samping itu, pemasaran dilakukan dengan strategi replikasi keberhasilan sebelumnya pada satu gedung tertentu dengan pendekatan pada developer atau building management yang sama di gedung-gedung lainnya.

02.

Di lini bisnis teknologi, dengan strategi pendekatan hubungan afiliasi, Perseroan berinisiatif untuk menangkap peluang-peluang yang ada di dalam Kelompok Usaha Bakrie. Banyak bidang usaha atau proyek yang dapat diperoleh dengan strategi tersebut. Proyek pengelolaan infrastruktur siaran televisi digital adalah beberapa contoh dari keberhasilan penerapan strategi pemasaran produk layanan Perseroan.

03.

Sehubungan dengan rencana pengembangan bisnis periklanan digital, Perseroan menargetkan pelaku bisnis di dalam ekosistem e-commerce sebagai pangsa pasar.



Kebijakan Dividen

Dividend Policy

Sehubungan dengan kerugian bersih yang dicatatkan Perseroan sebesar Rp 117.9 miliar di tahun 2022 dan Rp 95.0 miliar di tahun 2021, maka Perseroan tidak membagikan dividen di tahun-tahun tersebut.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Realization of the Use of Funds from Public Offering

Pada tahun 2022, Perseroan tidak melakukan penawaran umum dalam bentuk penerbitan saham baru.

Informasi Investasi Akuisisi Anak Perusahaan

Sepanjang tahun 2022, Perseroan tidak melakukan investasi akuisisi dan pendirian anak usaha.

Perubahan Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perseroan

Amendments to the Terms and Regulations that have a Significant Impact on the Company.

Tidak terdapat perubahan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap bisnis Perseroan.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Changes in Accounting Policies

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi.





Best Practices Dalam Tata Kelola Perusahaan

Best Practices in The Implementation of The Good Corporate Governance

Tata kelola perusahaan merujuk pada sistem, proses, dan praktik yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengelola dan mengendalikan operasinya. Tujuan tata kelola perusahaan adalah memastikan transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, dan pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan dengan menjaga kepentingan semua pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat.

Demi mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, terdapat prinsip-prinsip dalam Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* yang perlu dipenuhi dengan baik. Tidak hanya sebagai dasar pengelolaan dan pelaksanaan Perusahaan, prinsip-prinsip tersebut diterapkan untuk memberikan nilai tambah (*shared values*) bagi seluruh pemangku kepentingan serta mencapai pertumbuhan bisnis yang optimal. Terdapat lima prinsip dasar GCG yang dipegang teguh oleh BTEL dalam penerapan Tata Kelola yang baik di Perusahaan, meliputi:

1. Transparency (Keterbukaan)

Prinsip ini diterapkan melalui penyediaan sarana komunikasi yang efektif, responsif, akurat, jelas, dan tepat waktu yang salah satunya terdapat pada laporan keuangan, laporan tahunan, dan hal-hal lain yang relevan. Penerapan prinsip ini merupakan keterbukaan BTEL kepada para pemangku kepentingan sehingga mampu memahami kinerja dan tindakan Perusahaan.

2. Accountability (Akuntabilitas)

Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. BTEL memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan Perusahaan dapat dipertanggungjawabkan kepada public.

3. Responsibility (Pertanggungjawaban)

Melaksanakan tanggung jawab atas segala keputusan dan tindakan Perusahaan dengan berlandaskan pada asas kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku.

4. Independent (Independensi)

Menjalankan kegiatan Perusahaan secara mandiri, tanpa paksaan, atau tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta prinsip dan tata nilai perusahaan.

5. Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran)

Bersikap adil dan setara dalam memenuhi hak-hak setiap Pemangku Kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap memperhatikan kaidah dan peraturan perusahaan.



Dengan senantiasa berusaha menjaga kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan asas keadilan dalam pengambilan setiap keputusan, BTEL percaya upaya ini tidak hanya terpenuhi sebagai *best practices* dalam Perusahaan namun juga mampu menciptakan lingkungan kerja yang sinergis sehingga kinerja Perusahaan dapat berkembang sesuai dengan visi dan misinya demi mencapai tujuan usaha secara maksimal.

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Implementation of Guideline in The Corporate Governance for Public Companies

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan, Perseroan mengacu pada dasar-dasar dan pedoman peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU 40/2007");
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UU 8/1995");
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka ("POJK 21/2015");
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata

Kelola Perusahaan Terbuka ("SEOJK 32/2015").

Sebagai perusahaan publik, Perseroan selalu berusaha untuk terus meningkatkan kualitas dan mengembangkan layanan yang dimiliki serta melakukan perbaikan di dalam Perseroan sendiri. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, Perseroan memandang sangat penting penerapan suatu Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/"GCG"), hal ini untuk menjaga kesinambungan kegiatan usaha Perseroan.

Penerapan GCG secara konsisten dan berkesinambungan yang didukung oleh integritas dan komitmen yang tinggi serta peran aktif dari berbagai perangkat dalam Perseroan diharapkan menjadi bagian dari budaya Perseroan untuk mencapai kesinambungan dan ketahanan usaha Perseroan dalam jangka panjang, meningkatkan kinerja Perseroan, dan pada akhirnya memberikan nilai tambah Perseroan untuk kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan, termasuk pula para pengguna jasa Perseroan.

Dalam penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik Perseroan melaksanakan seluruh kegiatan usaha dengan menganut Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dengan penerapan TARIF, sebagai 5 (lima) pilar dasar dari GCG, yaitu:

1. Keterbukaan;
2. Akuntabilitas;
3. Pertanggungjawaban;
4. Independensi; dan
5. Kesetaraan dan Kewajaran.



Penerapan 5 (lima) pilar dasar tersebut diyakini oleh Perseroan sebagai instrumen yang dapat diandalkan dalam mengatur segala aspek bisnis yang dijalankan oleh Perseroan, baik oleh Dewan Komisaris, Direksi dan segenap karyawan Perseroan, sehingga diharapkan dapat menciptakan keseimbangan dalam operasional usaha Perseroan secara menyeluruh. Keseimbangan operasional usaha yang akan dicapai meliputi segala bentuk kepentingan, baik individu maupun kelompok, baik internal maupun eksternal, sehingga kepentingan Perseroan, Pemegang Saham, dan Pemangku Kepentingan akan mencapai titik ekuilibrium.

1. Keterbukaan

Sebagai perusahaan publik, Perseroan senantiasa berusaha menjaga objektivitas dalam menjalankan kegiatan usahanya, dengan cara menyediakan informasi yang material dan relevan secara rutin kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan, serta memastikan bahwa informasi tersedia tepat waktu, memadai, jelas, akurat, serta mudah diakses.

Perseroan senantiasa menyampaikan berbagai laporan rutin yang diwajibkan bagi perusahaan publik, antara lain laporan keuangan interim, laporan keuangan tengah tahunan, dan laporan keuangan tahunan yang diaudit, laporan tahunan, dan laporan insidentil, yang antara lain terkait dengan aksi korporasi, transaksi afiliasi, maupun transaksi material, seluruhnya baik dalam paparan publik maupun melalui media cetak maupun media elektronik. Disamping itu, Perseroan juga menyediakan sarana berupa akses bagi khalayak umum untuk memperoleh laporan tahunan Perseroan melalui website resmi www.bakrietelecom.com

2. Akuntabilitas

Penerapan pilar akuntabilitas oleh Perseroan sebagai perusahaan publik merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Perseroan kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan agar pengelolaan Perseroan dilakukan secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan Perseroan tanpa mengesampingkan kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan.

Setiap karyawan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam program pelatihan dan seminar, baik di dalam maupun di luar Perseroan, untuk pengembangan kompetensinya. Tidak hanya berhenti disana, hasil pengembangan tersebut juga wajib diterapkan dan disebarakan bagi karyawan lainnya agar selalu ada peningkatan dan penyempurnaan dalam setiap aspek dalam Perseroan. Penerapan sistem oleh Perseroan sehubungan dengan penghargaan bagi karyawan berprestasi dan sanksi bagi karyawan yang melanggar juga memberikan kesempatan bagi Perseroan untuk secara objektif menguji akuntabilitasnya.

3. Pertanggungjawaban

Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terkecuali Perseroan. Manfaat dari kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ini tidak hanya akan dirasakan oleh para pelanggan Perseroan yang dapat menikmati layanan secara nyaman, tetapi juga bagi Perseroan dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lancar dan mencapai kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Salah satu upaya Perseroan untuk penerapan prinsip kehati-hatian ini adalah dengan memiliki

Sekretaris Perusahaan yang bekerjasama dengan Divisi *Corporate Legal* dalam memastikan kepatuhan Perseroan terhadap Anggaran Dasar, Peraturan Perusahaan, dan peraturan-peraturan di bidang pasar modal

4. Independensi

Perseroan senantiasa memastikan bahwa pengelolaan Perseroan dilakukan secara independen, tidak saling mendominasi, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, serta bebas dari benturan kepentingan. Dengan demikian pengambilan keputusan akan senantiasa objektif dan diharapkan dapat memberikan output yang optimal bagi kepentingan Pemegang Saham, Pemangku Kepentingan dan para karyawannya. Sebagai contoh, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dapat memiliki pendapat yang independen untuk pengambilan keputusan, tentunya tanpa mengurangi kemungkinan untuk memperoleh pendapat atau saran yang independen dari konsultan hukum, sumber daya manusia dan konsultan independen lainnya

5. Kesetaraan dan Kewajaran

Prinsip kesetaraan dan kewajaran diterapkan oleh Perseroan untuk setiap pihak yang berkepentingan terhadap Perseroan. Perseroan senantiasa memberikan kesempatan yang wajar kepada setiap pihak untuk dapat mengakses informasi Perseroan sesuai dengan prinsip keterbukaan (*transparency*) dalam lingkup kedudukan masing-masing, sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan oleh otoritas pasar modal, komunitas pasar modal, dan Stakeholders kepada Perseroan.

Prinsip kesetaraan juga diterapkan oleh Perseroan untuk setiap individu yang kompeten serta berkemauan dan berdedikasi tinggi untuk berkarya untuk Perseroan. Perkembangan karir masing-masing karyawan Perseroan tidak dibedakan berdasarkan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik. Perseroan senantiasa menjaga dan memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban karyawan secara adil dan wajar.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perseroan tertinggi, yang mempunyai hak dan kewenangan yang tidak dimiliki Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

RUPS dapat menjadi wadah komunikasi antara Pemegang Saham dengan Perseroan, yang bertujuan agar pemegang saham mendapatkan pemahaman atas informasi yang telah dipublikasikan oleh Perseroan.

Adapun sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan mengenal 2 (dua) RUPS, yaitu:

1. RUPS Tahunan (RUPST);
2. RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS Luar Biasa (RUPSLB).

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) dilaksanakan di Bakrie Tower, Lantai 36, pada tanggal 30 November 2022.

Pelaksanaan dan Keputusan RUPS Tahunan

Implementation and Resolution of the Annual GMS

Pada tahun 2022, BTEL melaksanakan RUPS Tahunan dan Luar Biasa yang diselenggarakan 30 November 2022. Setiap mata acara beserta penjelasannya, telah diunggah di website Perseroan pada tanggal yang sama dengan tanggal pemanggilan, dengan rincian sebagai berikut:

Penyelenggaraan RUPST:

Hari/tanggal: Rabu, 30 November 2022
 Tempat: Bakrie Tower
 Kuorum: 24.446.944.881 saham yang mewakili 66.59% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 36.822.665.755 saham.

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi:

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi:		
Dewan Komisaris	Komisaris Utama	Taufan Eko Nugroho Rotorasiko
	Komisaris Independen	John Pieter Nazar
	Komisaris	Jastiro Abi
Direksi	Direktur Utama	Harya Mitra Hidayat
	Direktur	Andi Pravidia Saliman
	Direktur	Agustinus Harimurti

RUPS Tahunan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar serta POJK 15/ POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), Perseroan telah melakukan beberapa pelaporan guna memenuhi peraturan di atas, yaitu:

- Pemberitahuan**
 Memberitahukan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat tertanggal 24 Oktober 2022 Nomor 0032/EST-07/ CorpSec/X/2022
- Pengumuman**
 Mengumumkan rencana Rapat kepada Para Pemegang Saham Perseroan melalui: Situs web Perseroan, Situs Web Bursa Efek Indonesia, Situs Web penyedia E-RUPS dalam hal ini situs web eASY KSEI pada tanggal 21 Oktober 2022. Dan telah disampaikan pelaporan bukti pengumuman tersebut melalui surat Nomor 0031/ EST-07/CorpSec/X/2022.



Pemanggilan

Melakukan pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham Perseroan melalui: Situs web Perseroan, Situs Web Bursa Efek Indonesia, Situs Web penyedia E-RUPS dalam hal ini situs web eASY KSEI pada tanggal 8 November 2022. Dan telah disampaikan pelaporan bukti pengumuman tersebut melalui surat Nomor 0032/EST-07/ CorpSec/X/2022.



Hasil RUPS

Menyampaikan ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada OJK dan IDX pada tanggal 2 Desember 2022 melalui surat Nomor 0039/EST-07/ CorpSec/XII/2022.

Realisasi Keputusan RUPST

Realization of AGMS Resolutions

RUPS Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 yang dihadiri oleh 24.446.944.881 saham yang mewakili 66.59% dari total keseluruhan saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dalam RUPST ini, Perseroan menunjuk PT Ficomindo Buana Registrar sebagai pihak independen untuk melakukan perhitungan suara RUPST.

Hingga berakhirnya tahun buku 2022, Perusahaan telah merealisasikan semua keputusan yang diambil pada RUPST 2022. Semua keputusan tersebut telah dituangkan ke dalam Akta Berita Acara Nomor 78 tanggal 30 November 2022. Berikut adalah rincian keputusan RUPS tahun 2022 beserta realisasinya:

Hasil Keputusan/Resolutions			
Keputusan Mata Acara 1	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan tahun 2021 dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, laporan neraca dan laba rugi, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan tahun 2021 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.		
Pengambilan Keputusan	Hasil Perhitungan Jumlah Suara :		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	24.098.255.655 suara atau 98.57% dari total jumlah suara saham yang hadir	348.689.226 suara atau 1.43% dari total jumlah suara saham yang hadir	0 suara atau 0% dari total jumlah suara saham yang hadir.
Realisasi/ Realization	Telah terealisasi secara penuh (100%)		

Keputusan Mata Acara 2 Menyetujui pemberian kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk dan syarat lainnya.

Pengambilan Keputusan	Hasil Perhitungan Jumlah Suara :		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	24.030.099.381 suara atau 99.93% dari total jumlah suara saham yang hadir;	16.845.500 suara atau 0.07% dari total jumlah suara saham yang hadir;	0 suara atau 0% dari total jumlah suara saham yang hadir.

Realisasi/Realization Telah terealisasi secara penuh (100%)

Keputusan Mata Acara 3 Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan masa jabatan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut :

1. Mengangkat Bpk Neil Ricardo Tobing sebagai Komisaris Perseroan.
2. Mengangkat Bpk Aditya Irawan sebagai Direktur Perseroan.
3. Mengangkat Bpk Andi Pravidia Saliman sebagai Wakil Direktur Utama.
4. Menetapkan dan menegaskan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung efektif sejak penutupan Rapat ini sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Taufan E.N. Rotorasiko
 Komisaris Independen : John Pieter Nazar
 Komisaris : Jastiro Abi
 Komisaris : Neil Ricardo Tobing

Direksi

Direktur Utama : Harya Mitra Hidayat
 Wakil Direktur Utama : Andi Pravidia Saliman
 Direktur : Agustinus Harimurti
 Direktur : Aditya Irawan

1. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan remunerasi atau honorarium bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan.
2. Memberi kuasa kepada Corporate Secretary Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan perubahan dan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengambilan Keputusan	Hasil Perhitungan Jumlah Suara :		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	24.080.845.655 suara atau 98.50% dari total jumlah suara saham yang hadir	366.099.226 suara atau 1.50% dari total jumlah suara saham yang hadir	11.000 suara atau 0.00% dari total jumlah suara saham yang hadir.

Realisasi/Realization Telah terealisasi secara penuh (100%)

Direksi Board of Directors

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Pengangkatan anggota Direksi diangkat oleh RUPS hingga penutupan RUPS Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

- Jangka waktu jabatannya berakhir
- Mengundurkan diri
- Tidak lagi memenuhi persyaratan perundangundangan yang berlaku
- Meninggal dunia
- Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dan dinyatakan pailit.

Komposisi Direksi

Composition of the Board of Directors

Berdasarkan Anggaran Dasarnya, Perseroan memiliki 1 (satu) Direktur Utama sebagai pemimpin Perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, Direktur Utama dibantu oleh 3 (tiga) Direktur. Hingga Desember 2022, anggota Direksi BTEL terdiri dari:

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Tenure	Dasar Pengangkatan Appointment Basis
Harya Mitra Hidayat	Direktur Utama President Director	2020-2023	Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 75 tanggal 31 Agustus 2020
Andi Pravidia Saliman	Wakil Direktur Utama Vice President Director	2022-2025	Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 78 tanggal 30 November 2022
Agustinus Harimurti	Direktur Director	2021-2024	Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 26 tanggal 22 Oktober 2021
Aditya Irawan	Direktur Director	2022-2025	Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 78 tanggal 30 November 2022

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Duties and Responsibilities of The Directors

Dalam menjalankan fungsi operasionalnya, tugas pokok Direksi adalah :

- Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan; dan
- Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Pedoman dan Piagam Direksi

Board Manual and Charter of the Board of Directors

Pedoman (Board Manual) dan Piagam (Charter) merupakan wujud komitmen Perusahaan dalam menerapkan implementasi *Good Corporate Governance (GCG)* guna mencapai visi dan menjalankan misi yang telah ditetapkan secara konsisten dan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan

Piagam (Charter) Direksi diuraikan sebagai berikut:

- Dasar Hukum
- Definisi Umum
- Keanggotaan Direksi
- Rangkap Jabatan
- Tugas dan Wewenang Direksi
- Rapat Direksi
- Kepemilikan Saham
- Pelaporan

Rapat Direksi 2022

Meeting of the Board of Directors in 2022

Berdasarkan Pasal 16 POJK No. 33 tahun 2014, Rapat Direksi wajib dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan dengan dipimpin oleh Direktur Utama dan dihadiri mayoritas anggota Direksi. Rapat Direksi dilakukan sebagai sarana bagi anggota Direksi untuk melakukan evaluasi kinerja Perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan operasional, kondisi keuangan Perusahaan, serta realisasi strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan. Sepanjang tahun 2022, BTEL telah mengadakan Rapat Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali yang beberapa diantaranya banyak dilaksanakan secara virtual, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Jumlah Rapat <i>Total Meetings</i>	Persentase Tingkat Kehadiran <i>Percentage of Attendance Rate</i>
Harya Mitra Hidayat	Direktur Utama <i>President Director</i>	12	100%
Andi Pravidia Saliman	Wakil Direktur Utama <i>Vice President Director</i>	12	100%
Agustinus Harimurti	Direktur <i>Director</i>	12	100%
Aditya Irawan	Direktur <i>Director</i>	1	100%



▶ Direksi

Adapun agenda yang dibahas dalam Rapat Direksi tersebut antara lain rencana kerja, operasional kegiatan divisi setiap bulan, operasional kegiatan Perusahaan Anak setiap bulan, strategi setiap bulannya, serta evaluasi pencapaian tiap program kerja, rencana Rapat Umum Pemegang Saham, pemberian THR, strategi Perseroan menghadapi persaingan industri yang semakin ketat, dan lain-lain.

Penilaian terhadap Komite yang mendukung Pelaksanaan Tugas Direksi

Assessment of the Committees that support the Implementation of the Board of Directors' Duties

Direksi Perseroan didukung oleh sejumlah komite yang mana penilaian dan evaluasi kinerja komite-komite pendukung kinerja Direksi dilakukan secara rutin oleh Direksi di setiap tahun, dengan menggunakan kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Pencapaian kinerja selama tahun buku.
- Kompetensi
- Partisipasi dalam pembahasan bersama Direksi

Dewan Komisaris *Board of Commissioners*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberi nasihat kepada Direksi, serta memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola terselenggara dalam setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS hingga penutupan RUPS Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

- Jangka waktu jabatannya berakhir
- Mengundurkan diri
- Tidak lagi memenuhi persyaratan perundangundangan yang berlaku
- Meninggal dunia
- Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dan dinyatakan pailit

Komposisi Dewan Komisaris

Composition of the Board of Commissioners

Per 31 Desember 2022, Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 4 (empat) orang yang terdiri dari Komisaris Utama, Komisaris dan Komisaris Independen. Komposisi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Masa Jabatan <i>Tenure</i>	Dasar Pengangkatan <i>Appointment Basis</i>
Taufan E.N Rotorasiko	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	2020-2023	Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 75 tanggal 31 Agustus 2020
John Pieter Nazar	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	2020-2023	Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 75 tanggal 31 Agustus 2020
Jastiro Abi	Komisaris <i>Commissioner</i>	2021- 2024	Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 26 tanggal 22 Oktober 2021
Neil Ricardo Tobing	Komisaris <i>Commissioner</i>	2022- 2025	Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 78 tanggal 30 November 2022



▶ Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Duties and Responsibilities of The Commissioners

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris BTEL sebagaimana tercantum dalam Piagam Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

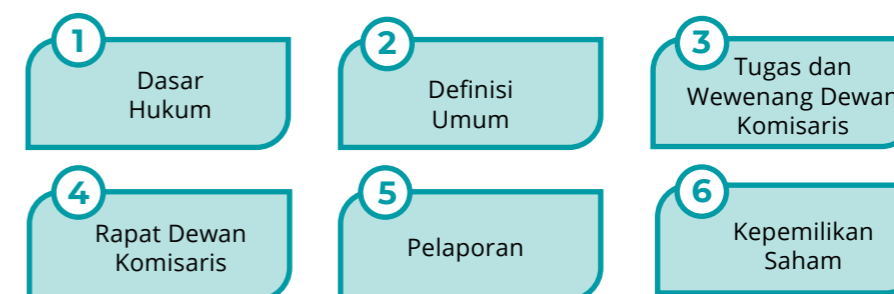
1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dewan Komisaris dapat membentuk komite-komite dengan mengacu pada ketentuan pasar modal yang berlaku.

Pedoman dan Piagam Dewan Komisaris

Board Manual and Charter of the Board of Commissioners

Pedoman Kerja Dewan Komisaris (Board Manual) disusun sebagai acuan dalam menjalankan tugas sebagai Dewan Komisaris di Perusahaan. Penyusunan Board Manual ini sebagai wujud komitmen Perusahaan dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance (GCG)* guna mencapai visi dan menjalankan misi yang telah ditetapkan secara konsisten dan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan Piagam (*Charter*) Dewan Komisaris diuraikan sebagai berikut:



Rapat Dewan Komisaris 2022

Meeting of the Board of Commissioners in 2022

Selama tahun 2022, Dewan Komisaris melaksanakan rapat sebanyak 6 kali termasuk turut mengundang direksi untuk berpartisipasi dalam rapat-rapat tersebut untuk membahas dan memantau pengelolaan usaha serta memberikan masukan atas strategi yang dirumuskan Direksi. Selain itu, rapat tersebut berguna untuk Dewan Komisaris dalam mengambil keputusan secara kolektif sekaligus mengevaluasi kinerja operasional Perusahaan. Hingga 31 Desember 2022, rapat Dewan Komisaris BTEL telah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Jumlah Rapat <i>Total Meetings</i>	Persentase Tingkat Kehadiran <i>Percentage of Attendance Rate</i>
Taufan E.N Rotorasiko	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	6	100%
John Pieter Nazar	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	6	100%
Jastiro Abi	Komisaris <i>Commissioner</i>	6	100%
Neil Ricardo Tobing	Komisaris <i>Commissioner</i>	1	100%



Penilaian Kinerja Anggota Dewan Komisaris

Assessment Of The Performance Of The Board Of Commissioners

Penilaian dan evaluasi kinerja anggota Dewan Komisaris dilaksanakan dengan Masing-masing anggota Dewan Komisaris melaksanakan penilaian sendiri atau self assessment terhadap pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolejal paling kurang satu kali dalam setahun. *Self-assessment* ini dimaksudkan sebagai kontribusi masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan dengan menggunakan tolak ukur sebagai berikut:

- Keberhasilan dalam pengawasan penerapan dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- Keberhasilan dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan Direksi dalam pengelolaan Perseroan yang dilakukan secara strategis dan fungsional serta sesuai dengan kepentingan Perseroan.

Penilaian terhadap Komite yang mendukung Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Assessment of the Committees that support the Implementation of the Board of Commissioners Duties

Dewan Komisaris secara berkala melakukan penilaian atas efektivitas kinerja Komite Audit. Penilaian kinerja mengacu kepada *Key Performance Indicator* (KPI) serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris Perseroan didukung oleh sejumlah komite di antaranya adalah Komite Audit.

Adapun dalam melakukan penilaian kinerja terhadap komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
2. Laporan Tahunan kegiatan Komite Audit.

Independensi Komisaris Independen

Independence of Independent Commissioner

Perseroan memiliki 1 (satu) orang Komisaris Independen. Perseroan berkomitmen penuh untuk menetapkan independensi Komisaris Independen dengan tujuan menjaga objektivitas dalam pelaksanaan tugasnya. John Pieter Nazar diangkat menjadi Komisaris Independen PT Bakrie Telecom, Tbk berdasarkan Akta Nomor 20 tanggal 13 Agustus 2020, sebagai Komisaris Independen Perseroan, beliau tidak memiliki saham maupun hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi 2022

Joint Meeting Of The Board Of Commissioners And Board Of Directors In 2022

Sepanjang tahun 2022 dan sesuai dengan POJK Nomor 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengadakan rapat bersama sebanyak 3 (tiga) kali dengan catatan kehadiran sebagai berikut:

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Jumlah Rapat <i>Total Meetings</i>	Persentase Tingkat Kehadiran <i>Percentage of Attendance Rate</i>
Taufan E.N Rotorasiko	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	3	100%
John Pieter Nazar	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	3	100%
Jastiro Abi	Komisaris <i>Commissioner</i>	3	100%
Neil Ricardo Tobing	Komisaris <i>Commissioner</i>	1	100%
Harya Mitra Hidayat	Direktur Utama <i>President Director</i>	3	100%
Andi Pravidia Saliman	Wakil Direktur Utama <i>Vice President Director</i>	3	100%
Agustinus Harimurti	Direktur <i>Director</i>	3	100%
Aditya Irawan	Direktur <i>Director</i>	1	100%

Adapun agenda yang dibahas dalam Rapat Gabungan tersebut antara lain mengenai persetujuan Anggaran Perseroan tahun buku 2022; Evaluasi kinerja Perseroan Q1, penentuan Kantor Akuntan Publik, Semester 1, Q3; serta pembahasan anggaran dan strategi di tahun 2023.

Penilaian Terhadap Kinerja Dewan Komisaris Dan Direksi

Assessment Of The Performance Of The Board Of Commissioners And The Board Of Directors

Kinerja Direksi akan dievaluasi setiap tahunnya oleh Pemegang Saham melalui RUPS. Pemberian penilaian didasarkan pada realisasi rencana dan target yang ditetapkan di awal tahun. Komitmen dan dedikasi dari masing-masing anggota Direksi dalam mendukung pencapaian target dan strategi Perusahaan juga memengaruhi penilaian forum. Selain evaluasi melalui forum RUPS, Dewan Komisaris juga memberikan saran serta rekomendasi kepada Direksi guna meningkatkan kinerjanya di tahun-tahun berikutnya. Sepanjang tahun 2022, Perseroan menilai bahwa seluruh jajaran Dewan Komisaris serta Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan secara maksimal dalam mendukung kemajuan dan kepentingan serta keberlanjutan Perusahaan.

Hubungan Afiliasi, Rangkap Jabatan, Dan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Dan Direksi Tahun 2022

Affiliation Relationship, Concurrent Position And Share Ownership Of The Board Of Commissioners And The Board Of Directors In 2022

Tabel-tabel dibawah ini menunjukkan hubungan afiliasi, rangkap jabatan, serta kepemilikan saham diantara Dewan Komisaris dan Direksi.

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with					
		Dewan Komisaris Board Of Commissioners		Direksi Board Of Directors		Pemegang Saham Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Taufan E.N Rotorasiko	Komisaris Utama President Commissioner		✗		✗		✗
John Pieter Nazar	Komisaris Independen Independent Commissioner		✗		✗		✗
Jastiro Abi	Komisaris Commissioner		✗		✗		✗
Neil Ricardo Tobing	Komisaris Commissioner		✗		✗		✗
Harya Mitra Hidayat	Direktur Utama President Director		✗		✗		✗
Andi Pravidia Saliman	Wakil Direktur Utama Vice President Director		✗		✗		✗
Agustinus Harimurti	Direktur Director		✗		✗		✗
Aditya Irawan	Direktur Director		✗		✗		✗

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga dengan Familial Relationship with					
		Dewan Komisaris Board Of Commissioners		Direksi Board Of Directors		Pemegang Saham Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Taufan E.N Rotorasiko	Komisaris Utama President Commissioner		✗		✗		✗
John Pieter Nazar	Komisaris Independen Independent Commissioner		✗		✗		✗
Jastiro Abi	Komisaris Commissioner		✗		✗		✗
Neil Ricardo Tobing	Komisaris Commissioner		✗		✗		✗
Harya Mitra Hidayat	Direktur Utama President Director		✗		✗		✗
Andi Pravidia Saliman	Wakil Direktur Utama Vice President Director		✗		✗		✗
Agustinus Harimurti	Direktur Director		✗		✗		✗
Aditya Irawan	Direktur Director		✗		✗		✗

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Kepemilikan Saham dengan Shareholder Relationship with					
		Dewan Komisaris Board Of Commissioners		Direksi Board Of Directors		Pemegang Saham Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Taufan E.N Rotorasiko	Komisaris Utama President Commissioner		✗		✗		✓
John Pieter Nazar	Komisaris Independen Independent Commissioner		✗		✗		✗
Jastiro Abi	Komisaris Commissioner		✗		✗		✗
Neil Ricardo Tobing	Komisaris Commissioner		✗		✗		✗
Harya Mitra Hidayat	Direktur Utama President Director		✗		✗		✗
Andi Pravidia Saliman	Wakil Direktur Utama Vice President Director		✗		✗		✗
Agustinus Harimurti	Direktur Director		✗		✗		✗
Aditya Irawan	Direktur Director		✗		✗		✗

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Concurrent Positions of the Board of Commissioners

Terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris sebagai Komisaris dan Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik lain sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Jabatan pada emiten/perusahaan publik lain Position in the Company/other public companies
Taufan E.N Rotorasiko	Komisaris Utama President Commissioner	Nihil / Nil
John Pieter Nazar	Komisaris Independen Independent Commissioner	Komisaris PT Mahakarsa Biru Energi Tbk
Jastiro Abi	Komisaris Commissioner	Direktur PT Visi Media Asia Tbk
Neil Ricardo Tobing	Komisaris Commissioner	Direktur PT Visi Media Asia Tbk

Rangkap Jabatan Direksi

Concurrent Positions of the Board of Directors

Terdapat rangkap jabatan anggota Direksi sebagai Komisaris dan Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik lain sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Jabatan pada emiten/perusahaan publik lain Position in the Company/other public companies
Harya Mitra Hidayat	Direktur Utama President Director	Nihil / Nil
Andi Pravidia Saliman	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Nihil / Nil
Agustinus Harimurti	Direktur Director	Nihil / Nil
Aditya Irawan	Direktur Director	Nihil / Nil

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Share Ownership Commissioners and Directors

Tidak terdapat kepemilikan saham baik Dewan Komisaris dan Direksi.

Remunerasi Dewan Komisaris Dan Direksi Tahun 2022

Remuneration Of The Board Of Commissioners and Directors In 2022

Setiap tahunnya, Dewan Komisaris mengusulkan jumlah dan penentuan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang kemudian dipertimbangkan serta disetujui melalui RUPS berdasarkan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut, jumlah remunerasi bagi Dewan Komisaris di tahun 2022 secara keseluruhan adalah sebesar Rp 390.000.000,- Remunerasi tersebut diberikan dalam bentuk Gaji, Tunjangan, Fasilitas dan Insentif Kerja baik untuk Dewan Komisaris maupun Direksi. Sedangkan remunerasi bagi anggota Direksi tidak dibayarkan melalui Perseroan.

Prosedur dan Indikator Penetapan

Procedures and Indicators

RUPS melimpahkan wewenang untuk menetapkan besarnya remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Komite-Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Committees Under The Board Of Commissioners

Komite Audit

Audit Committee

Mengacu pada POJK No. 55/POJK.04/2015, tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit melalui Surat Keputusan Pembentukan dan Pengangkatan Komite Audit Nomor 061/ EST-06/BOC/VI/2019 tanggal 24 Juni

2019, yang menetapkan mengangkat :

1. Ketua : John Pieter Nazar
2. Anggota 1 : Arydhian B. Djamin
3. Anggota 2 : Dwi Winarmo

Sebagai anggota independen, Komite Audit tidak terlibat dalam pengelolaan Perusahaan. Hal ini bertujuan agar Komite Audit dapat menerapkan pengawasan secara objektif dan profesional.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite Audit

Duties, Responsibilities, and Authorities of the Audit Committee

Perseroan telah menyusun Piagam Komite Audit tertanggal 24 Juni 2019, yang merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit antara lain meliputi:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan, yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan



pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atau temuan auditor internal;

- f. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas yang ditentukan;
- g. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan di Perseroan.

Wewenang komite audit meliputi:

The authorities of the audit committee include:

- a. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya; dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Profil Ketua Komite Audit

Profile of the Chairman of Audit Committee

John Pieter Nazar
Ketua Komite Audit

Profil Ketua Komite dapat dilihat pada bagian profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Profil Anggota Komite Audit

Profile of the Chairman of Audit Committee

Arydhian B. Djamin
Anggota Komite Audit

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Padang tanggal 03 Maret 1975, saat ini berusia 48 tahun. Memperoleh gelar sarjana (S1) Akuntansi di Universitas Indonesia dan sarjana (S2) Magister Akuntansi dan Sistem Informasi di Universitas Indonesia. Diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan dan Pengangkatan Komite Audit Nomor 061/ EST-06/BOC/VI/2019.

Menjadi Anggota Komite Audit Perseroan Sejak 2014 dan sebagai General Manager of Finance and Accounting Special Project di PT Bakrie Telecom Tbk. sejak 2007. Sebelum bergabung dengan Komite Audit, pada tahun 2012 juga pernah memegang posisi General Manager Accounting PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk.

Piagam Komite Audit

Profile of the Member of Audit Committee

Komite Audit telah memiliki Piagam Komite Audit sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan fungsi pengawasan. Piagam Komite Audit diterbitkan pada tanggal 24 Juni 2019. Piagam Komite Audit tersebut berisi antara lain definisi, dasar hukum pembentukan Komite Audit, maksud dan tujuan, struktur dan keanggotaan Komite Audit, tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Audit, rapat Komite Audit, pelaporan, masa tugas, serta lain-lain.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit 2022

Audit Committee Activities in 2022

Selama tahun 2022, Komite Audit telah melakukan fungsinya melalui aktivitas sebagai berikut:

- 1. Mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali bersama dengan Direksi dan Unit Audit

Internal untuk menelaah draft laporan keuangan yang akan diterbitkan setiap kuartal;

- 2. Membahas temuan-temuan yang signifikan dan berpotensi berisiko bagi Perseroan; dan
- 3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit oleh KAP.
- 4. Melakukan supervisi dan review terhadap rencana dan pelaksanaan program kerja Unit audit Internal Auditor tahun 2022.

Independensi Komite Audit

Audit Committee Independence

Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit diantaranya juga mengatur independensi bagi anggota Komite Audit. Anggota Komite Audit diharapkan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam menyampaikan pendapat dan melaksanakan tugasnya.

Rapat Komite Audit 2022

Meeting of Audit Committee in 2022

Kebijakan frekuensi rapat Komite Audit adalah satu kali dalam 3 (tiga) bulan. BTEL telah mengadakan Rapat Komite Audit sebanyak 4 (empat) kali dengan tingkat kehadiran dan rincian sebagai berikut:

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Jumlah Rapat <i>Total Meetings</i>	Persentase Tingkat Kehadiran <i>Percentage of Attendance Rate</i>
John Pieter Nazar	Ketua / <i>Head</i>	4	100%
Arydhian B. Djamin	Anggota / <i>Member</i>	4	100%
Dwi Winarmo	Anggota / <i>Member</i>	4	100%

Komite Nominasi dan Remunerasi

Audit Committee Independence

Dalam menunjang pelaksanaan praktik GCG, BTEL membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertugas memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai nominasi dan remunerasi dari para anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu, fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi lainnya adalah untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

Profile of the Nomination and Remuneration Committee

John Pieter Nazar Ketua (Periode: sd 2022)

Profil Ketua Komite dapat dilihat pada bagian profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

- Surat Keputusan Pembentukan dan Pengangkatan Komite Nominasi Nomor 063/EST-06/BOC/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019
- Surat Pernyataan Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor 064/EST-06/BOC/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019
- Sepanjang tahun 2022 tidak ada pelatihan dan pendidikan yang diikuti Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

R. Bismarka Kurniawan Anggota (Periode: sd 2022)

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Saat ini berusia 51 tahun. Memperoleh gelar sarjana (S1) *Bachelor of Science in Civil Engineering (Construction)* dari University of Southern California, sarjana (S2) *Master of Engineering in Structural Engineering minoring in Business Administration* dari Cornell University dan sarjana (S2) *Master of Business Administration in Finance, Investment and Banking* dari University of Wisconsin-Madison.

- Surat Keputusan Pembentukan dan Pengangkatan Komite Nominasi Nomor 063/EST-06/BOC/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019
- Surat Pernyataan Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor 064/EST-06/BOC/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019
- Sepanjang tahun 2022 tidak ada pelatihan dan pendidikan yang diikuti Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Memiliki pengalaman sebagai Komisaris Perseroan PT Bakrie Telecom Tbk, Direktur Utama Perseroan PT Bakrie Telecom Tbk., Direktur PT Visi Media Asia Tbk., Komisaris Utama PT Digital Media Capital, Komisaris PT Bakrie Global Ventura, Komisaris PT Intermedia Capital Tbk., Komisaris PT Cakrawala Andalas Televisi, Direktur PT Arutmin Indonesia dan PT Kaltim Prima Coal.

Budi Benzani Anggota (Periode: sd 2022)

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Saat ini berusia 55 tahun. Memperoleh gelar diploma (D3) Akademi Perhotelan dan Pariwisata Sahid dan sarjana (S1) Hukum Universitas Indonesia.

- Surat Keputusan Pembentukan dan Pengangkatan Komite Nominasi Nomor 063/EST-06/BOC/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019
- Surat Pernyataan Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor 064/EST-06/BOC/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019
- Sepanjang tahun 2022 tidak ada pelatihan dan pendidikan yang diikuti Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Memiliki pengalaman sebagai *General Manager Human Resources dan General Affairs* VIVA Group (Juli 2014 - sekarang)

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Independence of the Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen, serta tidak dipengaruhi tanpa intervensi dari pihak lainnya. Independensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tercermin dari susunan anggotanya yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

Independence of the Nomination and Remuneration Committee

Adapun tugas, tanggung jawab, serta wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Nominasi

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:
 - Komposisi dan proses nominasi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

- Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
- Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

b. Membantu Dewan Komisaris melakukan evaluasi kinerja Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris;

d. Melakukan telaah dan memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;

e. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun prosedur dan menganalisis kriteria nominasi bagi calon Dewan Komisaris dan Direksi;

f. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite sesuai dengan ketentuan POJK yang diterbitkan kemudian.

2. Fungsi Remunerasi

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - Kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - Besaran Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- c. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan sejenis dan skala usaha dari Perseroan dalam industri;
- d. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
- e. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat

variable;

- f. Struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- g. Anggota Komite wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data, dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas Komite; dan
- h. Komite wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi 2022

Meeting of the Nomination and Remuneration in 2022

Sesuai Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi, rapat Komite Nominasi dan Remunerasi paling tidak wajib dilaksanakan 1 (satu) kali dalam empat bulan. Pada tahun 2022, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali.

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Jumlah Rapat <i>Total Meetings</i>	Persentase Tingkat Kehadiran <i>Percentage of Attendance Rate</i>
John Pieter Nazar	Ketua / <i>Head</i>	3	100%
R. Bismarka Kurniawan	Anggota / <i>Member</i>	3	100%
Budi Benzani	Anggota / <i>Member</i>	3	100%

Pelaksanaan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi 2022

Meeting of the Nomination and Remuneration in 2022

Sepanjang tahun 2022, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan pembahasan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Pembahasan remunerasi dan tantiem anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- Pembahasan Tunjangan Hari Raya kepada Karyawan;
- Persetujuan Struktur Organisasi Perseroan;

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan berfungsi sebagai penghubung (*liaison officer*) antara Perusahaan dengan berbagai pemangku kepentingan baik regulator, investor maupun masyarakat. Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab atas berbagai fungsi terkait dengan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengungkapan informasi. Selain itu, Sekretaris Perusahaan juga memastikan reputasi yang dibentuk perusahaan berjalan yang baik.

Setelah Sekretaris Perusahaan dirangkap oleh Direktur sejak Agustus 2021, maka sejak Maret 2022 berdasarkan Surat Keputusan Direksi tertanggal 25 Maret 2022, posisi Sekretaris Perusahaan BTEL dijabat oleh Purwoko Suatmadji.

Profil Sekretaris Perusahaan

Profile of Corporate Secretary



Purwoko Suatmadji
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Usia
Age
49 tahun / *49 years*

Domisili
Domicile
Jakarta

Kewarganegaraan
Citizen
Indonesia

Riwayat Pendidikan
Educational Background

Program Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Social dan Politik Universitas Indonesia, lulus 1996 dan S-1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, lulus 1998

Pengalaman Kerja

Work experience

Sejak Mei 2007 sampai dengan September 2012 menjabat sebagai Manager Legal Settlement di Perseroan, selanjutnya sebagai GM *Legal for Commerce and Settlement* sejak Oktober 2012 sampai dengan sekarang dan menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 25 Maret 2022 sampai dengan sekarang.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

Adapun tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan antara lain sebagai berikut:

<p>Mengikuti perkembangan pasar modal</p>	<p>Memberi masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris mengenai GCG</p>	<p>Menyusun Laporan Tahunan Perseroan</p>	<p>Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya</p>	<p>Melaksanakan CSR Perusahaan</p>
<p>Melakukan pengkinian website agar sesuai dengan POJK 8/POJK.04/2015</p>	<p>Sebagai penghubung antara Perseroan dengan Regulator</p>	<p>Mempersiapkan <i>press release</i> Perseroan</p>	<p>Membina hubungan baik dengan Pemegang Saham</p>	<p>Membina hubungan baik dengan Media</p>

Unit Audit Internal

Internal Audit Unit

Sebagai bukti kepatuhan BTEL terhadap POJK No. 56/POJK.04/2015 perihal Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal, Perusahaan membentuk Unit Audit Internal. Unit ini berfungsi sebagai wadah konsultasi (*consultative management*) seputar efektivitas pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan. Audit Internal juga bertugas untuk memberikan keyakinan (*assurance*) kepada Perusahaan melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan pengawasan, serta pelaksanaan tata kelola perusahaan.

Profil Kepala Unit Audit Internal

Profile of the Head of Internal Audit Unit

Perseroan mengangkat Christin Simon Efendi sebagai Unit Audit Internal sekaligus Kepala Unit Audit Internal Perseroan, melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 0613A/EST-06/BOD/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.

Christin Simon Efendi *Internal Audit*

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir tanggal 29 Mei 1979, saat ini berusia 44 tahun. Memperoleh gelar sarjana (SI) Akutansi Universitas Atmajaya Jakarta lulus tahun 2001.

Berpengalaman sebagai *Treasury dan Accounting Manager* serta pernah menjabat sebagai *General Manager Business Control* pada Perseroan

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi:
Workshop Overview PSAK tanggal 17 – 15 April 2020

Kedudukan Audit Internal

Dalam melaksanakan tugas Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur

Piagam Audit Internal

Profile of the Head of Internal Audit Unit

Sesuai dengan POJK No. 56/POJK.04/2015, Piagam Audit Internal sebagai panduan bagi anggota Audit Internal mengatur hal-hal berikut:

1. Dasar Hukum dan Pertimbangan
2. Visi dan Misi
3. Struktur dan Kedudukan
4. Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab, Wewenang dan Lingkup Kerja Unit Audit Internal
5. Kode Etik
6. Persyaratan
7. Standar Profesi
8. Pertanggung jawaban Unit Audit Internal
9. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor Internal

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Unit Audit Internal

Duties, Responsibilities and Authorities of the Internal Audit Unit

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal diatur dalam Piagam Audit Internal yang meliputi:

1. Membantu Direktur Utama mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, sistem pengendalian internal dan *corporate governance*;
2. Memberikan saran/usulan perbaikan

3. Mengadakan penilaian atas sistem pengendalian internal.

Adapun wewenang Unit Audit Internal diantaranya sebagai berikut:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;



2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;

3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentiiil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit; dan

4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Kantor Akuntan Publik

Public Accounting Firm

Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dilakukan melalui RUPS Tahunan 2022, dengan mempertimbangkan saran Komite Audit. Melalui Audit Eksternal, laporan keuangan tahunan Perusahaan dapat teruji kebenaran dan keabsahannya secara objektif dan independen. Melalui RUPS Tahunan 2022, Pemegang Saham memutuskan Menunjuk Akuntan Publik Drs A. Krisnawan Budipracoyo No. AP.0041 dari Kantor Akuntan Publik Krisnawan, Nugroho & Fahmy atau Akuntan Publik lainnya yang ditunjuk untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

Hasil Penilaian oleh Kantor Akuntan Publik

Assessment Results by the Public Accounting Firm

Untuk tahun buku 2022, Kantor Akuntan Publik Krisnawan, Nugroho & Fahmy menilai bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian BTEL dan entitas anaknya (yang telah diaudit) telah disajikan secara

wajar dengan pengecualian dalam semua hal yang material, dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Pembentukan sistem ini bertujuan untuk menentukan pelaksanaan tata kelola perusahaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan operasional, dan fungsi-fungsi lainnya agar dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Melalui mekanisme-mekanisme pengendalian tersebut, Perusahaan berusaha untuk mengurangi risiko yang tidak diharapkan dalam kegiatan usaha. Selain itu, Sistem Pengendalian Internal juga diharapkan mampu mengurangi penyimpangan dari etika bisnis yang dapat mempengaruhi reputasi dan kinerja Perusahaan.

Prosedur Pengendalian Internal

Internal Control Procedure

Pengendalian Keuangan

Financial Control

Pengendalian Keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa hasil audit telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi dan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, Pengendalian Keuangan dilaksanakan oleh Unit Audit Internal dan Unit Audit Eksternal. Unit Audit Internal juga melakukan pengawasan terhadap kinerja Unit Audit Eksternal dengan tujuan agar materi dapat tersusun selaras serta komprehensif. Proses pengendalian dilakukan dengan memisahkan fungsi *Accounting* dan *Finance* untuk menghindari penipuan (*fraud*). Setiap divisi memasukkan dokumen ke bagian *Accounting* untuk diperiksa. Kemudian, dokumen tersebut akan dilanjutkan ke

bagian *Finance* untuk diproses pembayarannya.

Tinjauan Efektivitas Sistem

Pengendalian Internal

Review of the effectiveness of the Internal Control System

Tinjauan efektivitas pada Sistem Pengendalian Internal dilakukan untuk menyampaikan evaluasi kepada Perusahaan mengenai pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal. Wujud komitmen Perusahaan untuk terus menyempurnakan Sistem Pengendalian Internal adalah melalui tinjauan efektivitas yang dilakukan setiap tahunnya secara rutin. Unit Audit Internal dan Unit Audit Eksternal menilai bahwa Sistem Pengendalian Internal Perusahaan telah berjalan dengan baik dan efektif terkait pengelolaan operasional, keuangan, dan kepatuhan Perusahaan di setiap aspek Perusahaan.

Permasalahan Hukum

Legal Issues

Pada tahun 2020 terdapat perkara penting yang melibatkan Perusahaan yaitu:

- Perkara gugatan perdata di pengadilan New York Amerika Serikat terhadap beberapa pihak termasuk Perusahaan oleh Universal Investment Advisory SA, Vaquero Master EM Credit Fund Ltd, dan Trucharm Ltd yang yang memegang lebih dari 25% (duapuluh lima persen) *Wesel Senior* -USD yang diterbitkan oleh Bakrie Telecom, Pte. Ltd (entitas anak). Gugatan tersebut terkait pemenuhan kewajiban pembayaran bunga *Wesel Senior*-USD. Gugatan ini sudah muncul sejak September 2014. Di tahun 2019 proses peradilan gugatan ini dihentikan sementara karena Perseroan mengajukan permohonan Chapter 15 ke Bankruptcy Court for the Southern District of New York.

- Permohonan Chapter 15 oleh Perseroan kepada the U. S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York untuk pengakuan atas keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang telah mengesahkan Perjanjian Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tanggal 9 Desember 2014. Sampai akhir 2020, proses peradilan masih berlangsung dan belum terdapat keputusan dari pengadilan.

Kedua proses peradilan tersebut berikut putusnya tidak akan mempengaruhi keputusan homologasi Perjanjian Perdamaian dalam PKPU BTEL yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat berdasarkan Keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 59/Pdt.Sus/PKPU/2014/PNiaga.Jkt.Pst tanggal 9 Desember 2014 sebagaimana juga telah dikuatkan Mahkamah Agung RI melalui putusan Nomor 83PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 tanggal 23 Oktober 2015.

Sanksi Administrasi

Administrative Sanctions

Sebagai tindak lanjut terhadap laporan keuangan Perseroan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang masih dengan opini disclaimer dari Kantor Akuntan Publik yang mengaudit, maka Bursa Efek Indonesia masih tetap memberlakukan sanksi suspensi perdagangan saham BTEL di pasar reguler dan pasar tunai sepanjang tahun 2022.

Sebagai perusahaan publik dan emiten, BTEL memiliki kewajiban terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan di bidang pasar modal, dalam hal ini terutama peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (Bursa). Pada tahun 2022, Perusahaan mengalami keterlambatan penyampaian laporan tahunan 2021. Atas keterlambatan tersebut OJK dan Bursa mengenakan sanksi administrasi berupa teguran



dan denda untuk dibayarkan oleh Perseroan.

Kode Etik Dan Budaya Perusahaan

Code of Conducts and Corporate Cultures

Kode Etik Perusahaan merupakan bagian dari praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) dalam rangka menerapkan pembangunan budaya dan karakter di dalam internal PT Bakrie Telecom, Tbk serta mencapai visi dan misi Perseroan. Dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya, BTEL menerapkan nilai loyalitas terhadap Perseroan terhadap karyawan, yang menjadi pegangan untuk memastikan tidak terjadinya perilaku-perilaku menyimpang yang akan merugikan berbagai pihak selama proses pelaksanaan usaha berlangsung.

Dalam rangka mendukung penerapan Kode Etik dan Budaya Perusahaan, maka Perseroan melakukan sosialisasi dan publikasi mengenai etika tersebut berikut dengan tata acara penerapan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasinya. Melalui aktualisasi dari keseluruhan sikap tersebut, seluruh karyawan dan segenap insan Perseroan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran, pola pikir, sikap serta perilakunya dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) merupakan bagian dari pengendalian Perusahaan dalam mencegah kecurangan selama berlangsungnya kegiatan usaha. Hal ini dilakukan demi mewujudkan penerapan dan penegakan tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Dengan sistem ini, Perusahaan dapat mencegah dan bahkan menindaklanjuti praktik korupsi, kolusi, nepotisme, serta bentuk sindikasi lainnya yang dapat melanggar hukum dan peraturan-peraturan tertentu.

Prosedur Pengelolaan Laporan Pelanggaran

Dugaan pelanggaran dapat dilaporkan melalui :

No. Telp: 021-52920264

Mobile: 081807011581

Email: daud@bakrietelecom.com

Pengaduan akan ditindaklanjuti melalui tahap identifikasi, investigasi, dan pemberian sanksi. Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa melindungi identitas pelapor dan segala bentuk informasi yang memicu pengancaman serta intimidasi terhadap pelapor serta terkait hal-hal yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Hal tersebut tentunya juga dapat dihindari selama pelapor menjaga kerahasiaan laporan yang dibuat.

Pengaduan Di Tahun Buku

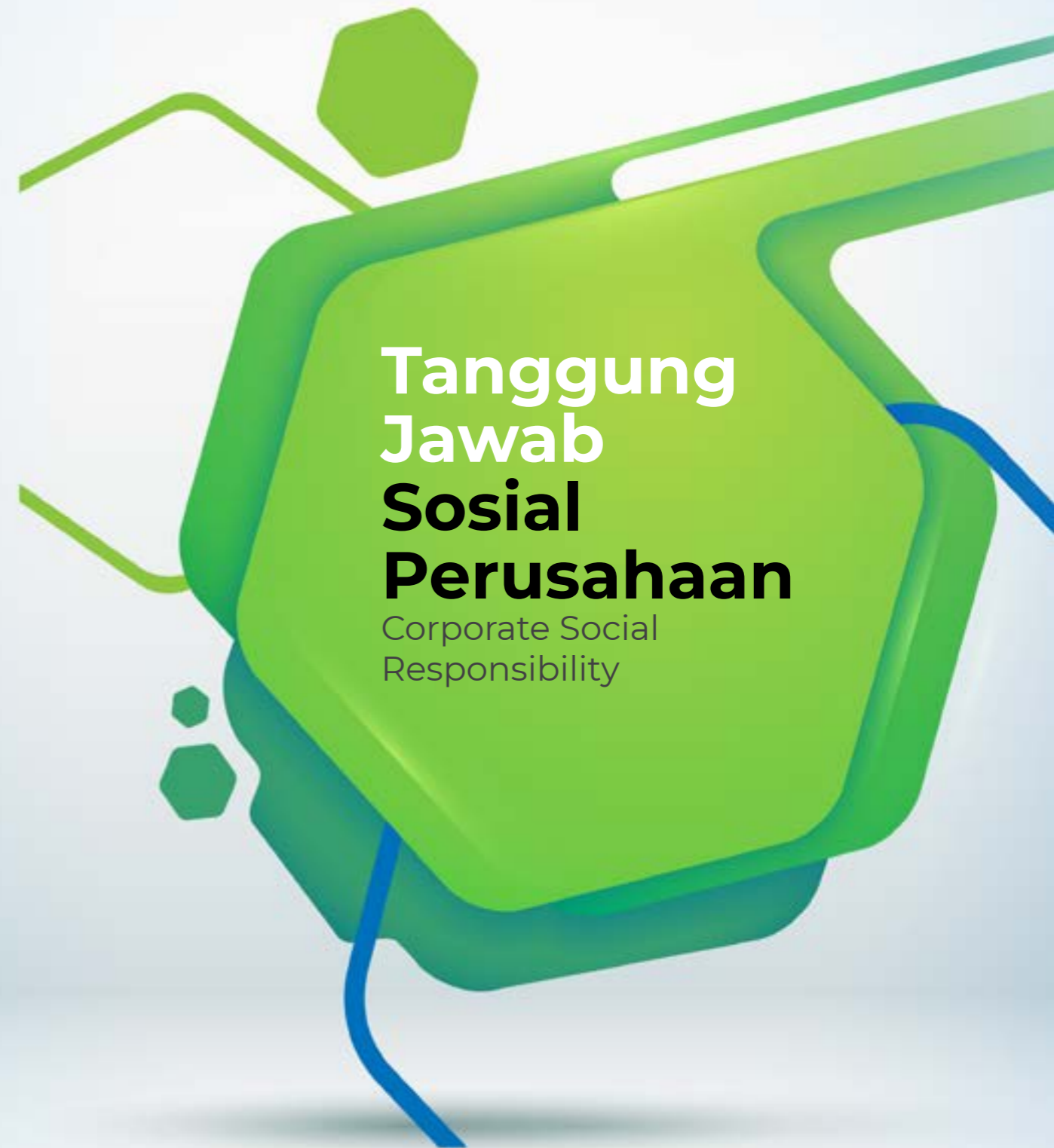
Complaints in Fiscal Year

Perusahaan tidak menerima pengaduan apapun yang terkait dengan jasa, produk, operasional, dan manajemen di sepanjang tahun 2022.

Penerapan Atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang Menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik (Referensi POJK)

Application Of Open Governance Guidelines For Emitents Publishing Effects In Equity Or Public Companies (POJK References)

Berdasarkan Referensi POJK Nomor 30/SEOJK.04/2016 mengenai penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik, Perseroan telah berkomitmen untuk melaksanakan seluruh praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik atau GCG sebagai bagian dari upaya mencapai visi dan misi serta tujuan Perusahaan.





Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility Program

PT Bakrie Telkom Tbk sebagai Perusahaan yang seluruh kegiatan usaha dan operasionalnya berhubungan langsung dengan pemangku kepentingan khususnya adalah lingkungan, masyarakat, karyawan dan konsumen tentu selalu memperhatikan kebutuhan dan dampak yang ditimbulkan. Untuk itu, Perseroan berkomitmen untuk terus memberikan dampak yang positif agar kelangsungan usahanya selalu berkelanjutan.

Melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), Perseroan berkomitmen memberikan hubungan timbal balik yang positif antara Perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Hubungan antara Perusahaan dan Pemangku kepentingan ini diharapkan dapat menjaga kelangsungan usaha Perusahaan sehingga Perusahaan dapat senantiasa memberikan kontribusinya terhadap lingkungan

Bersama badan sosial yang dikelola oleh Kelompok Usaha Bakrie, Perseoraan melakukan pertanggungjawaban sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*) kepada masyarakat dan lingkungan. Dalam hal ini Perseroan memberikan kontribusi sosial baik materi maupun tenaga dan pikiran yang disalurkan melalui Bakrie Amanah dan Yayasan Bakrie Untuk Negeri.

Informasi mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan pelaksanaan prinsip keberlanjutan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan.



Strategi Keberlanjutan [A.1]

Perseroan berkomitmen untuk menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan serta Perseroan secara konsisten menerapkan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) atau GCG yang mengandung prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kesetaraan dan kewajaran (*fairness*). Praktik tata kelola diterapkan untuk menjamin kegiatan operasional yang transparan, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan. Perseroan meyakini bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan fondasi bagi pertumbuhan yang berkelanjutan.

Perseroan berupaya untuk menyeimbangkan tujuan keberlanjutan dalam memperoleh keuntungan usaha serta pemberian manfaat bagi lingkungan, komunitas dan para pemangku kepentingan dengan menciptakan dan berbagi nilai-nilai dengan pemangku kepentingan dan terus berupaya meminimalkan dampak lingkungan. Berbagai kebijakan strategis terkait

keberlanjutan dirancang sesuai dengan kebutuhan dan dievaluasi efektivitasnya secara berkala untuk penyempurnaan sesuai dengan kondisi dan lingkungan bisnis. Perseroan berkeyakinan bahwa kemajuan industri telekomunikasi dan teknologi berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan tatanan social masyarakat.

Saat ini Perseroan melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas sebagai bentuk tanggung jawab Perseroan terhadap masyarakat. Perseroan juga mendukung agenda pemerintah Indonesia dalam upaya Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan - *Sustainable Development Goals* (SDGs). Perseroan berpartisipasi aktif dalam menyukseskan SDGs dengan mengintegrasikan berbagai tujuan yang relevan ke dalam program dan aktivitas Perseroan.

Dengan demikian, Perseroan menjadikan sepanjang tahun 2022 menjadi momentum untuk terus memperkuat strategi keberlanjutan Perseroan melalui kegiatan operasional yang memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan

Aspek Ekonomi [B.1]

Keterangan / Description	Realisasi Kinerja		
	2022A	2021A	2020A
Produk/jasa yang dijual	Jasa Telekomunikasi Jasa Teknologi Informasi Jasa Infrastruktur Media Jasa Periklanan Digital	Jasa Telekomunikasi Jasa Teknologi Informasi Jasa Infrastruktur Media Jasa Periklanan Digital	Jasa Telekomunikasi Jasa Teknologi Informasi
Nilai Ekonomi yang Dihasilkan Pendapatan Usaha	47.850	52.110	10.537
Jumlah Nilai Ekonomi yang Didistribusikan	47.850	52.110	10.537
Nilai Ekonomi yang Didistribusikan Gaji Karyawan dan Manfaat Pembayaran kepada Pemerintah (Pajak) Program CSR	29.661 1.461 50	24.956 693 50	8.317 594 50
Jumlah Nilai Ekonomi yang Didistribusikan	31.172	25.699	8.961

Aspek Lingkungan Hidup [B.2]

Konsumsi energi dalam Perusahaan sebagian besar digunakan untuk keperluan aktivitas operasional perkantoran. Untuk keperluan aktivitas kantor Perusahaan memanfaatkan energi listrik yang bersumber dari PLN. Perusahaan terus berupaya untuk melakukan penghematan energi listrik. Mengingat kegiatan usaha Perseroan bergerak di bidang telekomunikasi dan teknologi dimana proses bisnisnya tidak berkaitan langsung dengan lingkungan hidup, maka upaya pengurangan emisi, limbah dan efluen serta upaya pelestarian keanekaragaman hayati tidak disertakan dalam Laporan ini.

Aspek Sosial [B.3]

Sepanjang tahun 2022 Perusahaan telah melakukan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Jabodetabek dan sekitarnya, antara lain berupa bantuan kegiatan keagamaan, pembagian sembako dan pemberian bantuan untuk panti asuhan dengan total biaya yang telah dikeluarkan Perseroan untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut mencapai Rp50 juta.

Keanggotaan Asosiasi [C.5]

Perseroan menjalin dan menjaga kemitraan strategis dengan asosiasi dan institusi eksternal yang sangat penting dalam sektor industri telekomunikasi dan internet, yaitu sebagai anggota Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Perubahan Emiten dan Perusahaan Publik yang Bersifat Signifikan [C.6]

Pada tahun 2022, terdapat perubahan Direksi dan Komisaris seperti yang telah dijelaskan pada komposisi Direksi dan Komisaris.

Tata Kelola Keberlanjutan

Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan [E.1]

Dalam implementasi kinerja keberlanjutan yang dilaksanakan oleh Perseroan, penanggung jawab penerapan topik-topik berkelanjutan seperti topik ekonomi, sosial, dan lingkungan di Perseroan berada di bawah tanggung jawab Direksi dan *Corporate Secretary* dalam melaksanakan keseluruhan program.

Pengembangan Kompetensi Keberlanjutan [E.2]

Kebijakan pengembangan kompetensi yang diterapkan oleh Perseroan memiliki fokus pada peningkatan kapasitas, loyalitas, produktivitas, dan integritas karyawan sebagai aset penting dalam pertumbuhan dan kemajuan Perseroan.

Perseroan setiap tahunnya melakukan program pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas serta pengetahuan/kompetensi karyawan guna menjawab tantangan bisnis telekomunikasi dan teknologi yang semakin kompleks dan kompetitif.

Produktivitas karyawan dapat ditingkatkan dengan memberikan sarana dan prasarana yang memadai serta memberikan dukungan yang dibutuhkan. Dengan meningkatkan produktivitas karyawan, Perseroan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan operasionalnya. Pada tahun 2022, Perseroan telah melaksanakan pelatihan terkait bidang teknologi & digital yang diikuti oleh pegawai unit pengembangan produk dengan total pelatihan sebesar 36 Jam. Perseroan juga telah melaksanakan pelatihan internal terkait penyusunan Laporan Keberlanjutan yang diikuti oleh pegawai unit berkelanjutan.

Penilaian Risiko Atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan [E.3]

Perseroan telah menerapkan sistem manajemen risiko yang dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi dengan memiliki kebijakan anti korupsi dan anti gratifikasi yang sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah ditentukan. Kebijakan ini telah diturunkan menjadi prosedur pelaksana dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko atas tindak korupsi yang mungkin terjadi. Hasil dari penilaian ini akan dilaporkan kepada Dewan Komisaris sebagai salah satu bentuk tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakannya sesuai dengan fungsionalnya.

Hubungan dengan Pemangku Kepentingan [E.4]

Pemangku kepentingan memiliki peranan penting dalam menciptakan kegiatan bisnis secara berkelanjutan. Perseroan secara rutin menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan dengan tujuan menciptakan hubungan harmonis antar kedua belah pihak guna mendengarkan aspirasi, kebutuhan, kekhawatiran, serta masukan para pemangku kepentingan di seluruh wilayah operasional.

Pemangku Kepentingan	Metode Pendekatan
Pemegang Saham	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Pemerintah dan Regulator	<ul style="list-style-type: none"> Pertemuan Berkala Pelaporan Pelaksanaan Kepatuhan
Karyawan	<ul style="list-style-type: none"> Townhall Meeting Pendidikan dan Pelatihan Evaluasi Kinerja
Mitra Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Kontrak dan Perjanjian Kerja Evaluasi dan Penilaian
Masyarakat dan Komunitas	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan-Kegiatan CSR secara berkala Pertemuan berkala

Permasalahan Terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan [E.5]

Pada tahun 2022, dalam penerapan tata kelola keberlanjutan Perseroan mematuhi peraturan yang berlaku, sehingga tidak menemukan permasalahan yang signifikan dan memiliki dampak terhadap keberlangsungan usaha.

Saat ini upaya Perseroan dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan adalah mempertahankan kinerja keuangan secara optimal, mengingat pandemic Covid-19 masih memberi dampak yang signifikan terhadap dunia industri. Oleh sebab itu, Perseroan fokus dalam melakukan efisiensi biaya operasional, dengan demikian pelaksanaan keuangan berkelanjutan dapat terimplementasi dengan baik.

Kinerja Keberlanjutan

Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan [F.1]

Dalam rangka membangun budaya keberlanjutan, Perseroan telah menetapkan nilai-nilai Perseroan, yaitu:

- Mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- Mempromosikan perubahan yang inovatif dan positif pada industri media di Indonesia;
- Menjalankan usaha berdasarkan prinsip transparansi, keterbukaan, keteraturan, dan kemandirian;
- Menerapkan program tanggung jawab perusahaan dengan konsisten dan berkelanjutan.

Biaya Lingkungan Hidup [F.4]

Pada tahun 2022, Perseroan tidak menganggarkan secara khusus dana untuk kegiatan CSR di bidang lingkungan hidup.

Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan [F.5]

Sepanjang tahun 2022, Perseroan senantiasa melakukan efisiensi dalam hal pengurangan serta penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan. Perseroan memiliki kebijakan yang ramah lingkungan sehingga berdampak baik bagi kinerja keberlanjutan di bidang lingkungan hidup.

Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan [F.6]

Penggunaan energi dalam Perusahaan sebagian besar untuk kegiatan operasional perkantoran, dengan memanfaatkan energi listrik yang bersumber dari PLN. Untuk mencapai tujuan

dalam melakukan efisiensi energi, Perusahaan berfokus pada pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu dan berkelanjutan serta termanfaatkannya energi secara efisien.

Pada tahun 2022, total biaya pemakaian listrik sebesar Rp 96juta, mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp 83 juta. Secara pemakaian listrik tidak ada peningkatan signifikan, namun peningkatan biaya ini dikarenakan adanya kenaikan tarif listrik ditahun 2022.

Upaya dan Pencapaian Efisiensi dan Penggunaan Energi Terbaru [F.7]

Perseroan melakukan sejumlah upaya untuk mencapai efisiensi energi, anatara lain adalah:

- Mensosialisasikan kepada seluruh karyawan tentang upaya penghematan energi.
- Penggunaan peralatan listrik hemat energi dan mematikan peralatan listrik saat tidak digunakan.
- Memaksimalkan rapat dengan pertemuan telekonferensi.

Pengelolaan Air [F.8]

Perseroan menggunakan air bersih yang bersumber dari PDAM. Air bersih menjadi suatu hal penting untuk mendukung keberlangsungan kegiatan operasional, oleh karena itu Perusahaan selalu mengupayakan agar tidak terjadi keterbatasan dalam hal air bersih. Selain itu Perseroan juga telah melakukan sosialisasi kepada para karyawan untuk melakukan penghematan/efisiensi penggunaan air. Namun demikian, Perseroan belum melakukan analisa hasil penghematan penggunaan air.

Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati [F.9]

Kegiatan bisnis serta wilayah operasional Perseroan tidak berada di daerah konservasi ataupun memiliki keanekaragaman hayati. an produktivitas dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan sektor informal lainnya melalui promosi digital.

Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati [F.10]

Sepanjang tahun 2022, Perseroan tidak melakukan usaha konservasi keanekaragaman hayati, hal ini disebabkan oleh wilayah Perseroan tidak berada di daerah konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati.

Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan berdasarkan Jenisnya [F.11]

Sepanjang tahun 2022, Perseroan tidak melakukan kegiatan pengukuran jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan.

Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan [F.12]

Dalam rangka mencapai pengurangan emisi yang dikonsumsi oleh Perseroan serta menghasilkan kualitas udara serta lingkungan yang berkelanjutan, Perusahaan melakukan efisiensi pengguna Bahan Bakar Minyak dengan mengoptimalkan mobilitas perjalanan dinas serta menggunakan pertemuan secara daring melalui telekonferensi, guna menghasilkan kualitas udara serta lingkungan yang berkelanjutan.

Pengelolaan Limbah [F.13]

Perseroan memastikan limbah dikelola dengan baik sesuai standar dan peraturan yang berlaku. Adapun limbah-limbah yang dihasilkan berupa limbah perkantoran (kertas dan plastik), limbah sisa makanan, dan sampah-sampah yang dikategorikan sebagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (baterai). Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab Perseroan dalam upaya melindungi dan mengurangi risiko terhadap lingkungan dari kegiatan operasional yang dijalankan.



Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen [F.14]

Pengelolaan limbah di kawasan Perusahaan dimulai dari pemisahan limbah organik, anorganik, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Pengolahan limbah dilakukan dengan cara melalui kerja sama dengan pihak ketiga.

Tumpahan yang Terjadi [F.15]

Sepanjang tahun 2022, tidak terjadi tumpahan atau kebocoran limbah B3 di seluruh wilayah operasional Perseroan.

Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan [F.16]

Sepanjang tahun 2022, Perseroan tidak menerima adanya pengaduan lingkungan hidup yang disebabkan oleh adanya aktivitas bisnis di Perseroan.

Aspek Sosial

Komitmen untuk Memberikan Layanan atas Produk dan/ atau Jasa yang Setara kepada Konsumen [F.17]

Salah satu pemangku kepentingan utama bagi Perseroan adalah konsumen dengan posisinya yang begitu penting, maka Perseroan berkomitmen untuk mewujudkan kepuasan konsumen. Secara berkala dan berkesinambungan, Perseroan melakukan perbaikan hingga penyempurnaan layanan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Aspek Ketenagakerjaan

Kesetaraan Kesempatan Bekerja [F.18]

SDM menjadi penggerak keberhasilan bisnis Perseroan, oleh karena itu kesejahteraan dan kenyamanan SDM selalu menjadi perhatian. Perseroan meyakini bahwa kesetaraan di tempat kerja adalah bagian dari upaya untuk menghormati hak dasar setiap manusia dengan memberi kesempatan dan perlakuan yang sama agar dapat terus berkembang dan memberikan hasil terbaik.

Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa [F.19] Perseroan senantiasa mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku terkait ketenagakerjaan di Indonesia. Oleh sebab itu, Perseroan tidak mempekerjakan pegawai di bawah umur dan tenaga kerja paksa.

Upah Minimum Regional [F.20]

Perseroan memenuhi ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) regional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman [F.21]

Perusahaan menjamin tersedianya lingkungan kerja yang aman, kondusif dan layak, serta fasilitas pendukung yang baik. Selama tahun 2022, tidak mencatatkan adanya kecelakaan kerja (zero accident) di Perusahaan, hal ini menjadi komitmen yang secara berkala ditingkatkan kualitasnya.

Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai [F.22]

Perseroan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mendapatkan pelatihan dan/ atau Pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki baik yang disediakan oleh Perseroan baik yang diselenggarakan secara internal maupun secara eksternal.

Aspek Kemasyarakatan

Dampak Operasi terhadap Masyarakat Sekitar [F.23]




Perseroan bersinergi dengan Group usaha dalam mengembangkan program-program kemasyarakatan seperti Pendidikan, Kesehatan, pengembangan ekonomi lokal, budaya hingga lingkungan. Dampak positif program-program tersebut di antaranya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat sekitar, peningkatan kesejahteraan, dan perbaikan tingkat kesehatan masyarakat.

Pengaduan Masyarakat [F.24]

Sepanjang tahun 2022, Perseroan tidak mendapatkan laporan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Perseroan di bidang lingkungan hidup.

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) [F.25]

Sepanjang tahun 2022, Perseroan mengadakan kegiatan tanggung jawab sosial di antaranya adalah sebagai berikut:

-  Memberikan bantuan kegiatan keagamaan.
-  Menyalurkan bantuan sembako.
-  Memberikan bantuan untuk panti asuhan.

Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan [F.26]

Perseroan menyadari bahwa persaingan dunia telekomunikasi dan teknologi semakin ketat akibat pesatnya perkembangan teknologi digital yang menuntut inovasi dan kreativitas untuk memperluas pangsa pasarnya. Perseroan senantiasa melakukan inovasi dan pengembangan atas produk/jasa, hingga inovasi-inovasi dalam program *Corporate Social Corporate* – CSR untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan - TPB (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya bagi Pelanggan [F.27]

Perseroan senantiasa berkomitmen untuk menawarkan produk dan layanan yang aman dan berkualitas kepada para pelanggannya. Produk dan layanan yang didistribusikan dan ditawarkan Perseroan telah memiliki standar keselamatan dan kesehatan, perizinan serta sertifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dampak Produk/Jasa [F.28]

Perseroan telah melakukan penilaian pada semua produk dan layanan yang didistribusikan dan dijual kepada pelanggan.

Jumlah Produk yang Ditarik Kembali [F.29]

Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat penarikan produk yang dihasilkan oleh Perseroan akibat komponen yang bermasalah. Perseroan senantiasa melakukan antisipasi dan tindakan yang memadai untuk memastikan pelanggan tidak dirugikan.

Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/ atau Jasa Keuangan Berkelanjutan [F.30]

Perseroan telah memenuhi standar layanan kepada pelanggannya, namun sepanjang tahun 2022 Perseroan tidak melakukan survei Tingkat Kepuasan Pelanggan tersebut.

Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/Pojk.03/2017 | List Of Disclosure Based On Pojk No.51/Pojk.03/2017 [G.4]

NO. INDEKS	NAMA INDEKS	HALAMAN
STRATEGI KEBERLANJUTAN <i>Sustainability Strategy</i>		
A.1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan <i>Explanation on Sustainability Strategies</i>	86
IKHTISAR KINERJA ASPEK KEBERLANJUTAN <i>Overview of Sustainability Aspects Performance</i>		
B.1	Aspek Ekonomi <i>Economy Aspects</i>	87
B.2	Aspek Lingkungan Hidup <i>Environmental Aspects</i>	87
B.3	Aspek Sosial <i>Social Aspects</i>	87
PROFIL PERUSAHAAN <i>Company Profile</i>		
C.1	Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan <i>Vission, Mission, Sustainable Values</i>	22
C.2	Alamat Perusahaan <i>Company Address</i>	18
C.3	Skala Usaha: a. Total aset atau kapitalisasi dan total kewajiban; b. Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan; c. Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan saham; dan d. Wilayah operasional <i>Business Scale:</i> a. Total assets or assets capitalization and total liabilities; b. Total employee based on gender, position, age, education and employment status; c. Percentage of share ownership; and d. Operational area.	46 36 37 24
C.4	Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan <i>Product, Service and Business Activities</i>	24

C.5	Keanggotaan pada Asosiasi <i>Member Association</i>	88
C.6	Perubahan Emiten dan Perusahaan Publik yang Bersifat Signifikan <i>Significant Changes</i>	88

PENJELASAN DIREKSI
Director Explanation

D.1	Penjelasan Direksi <i>Director Explanation</i>	9
-----	---	---

TATA KELOLA KEBERLANJUTAN
Sustainable Corporate Governance

E.1	Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan <i>Person in Charge Responsibility for Sustainable Finance</i>	88
E.2	Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan Berkelanjutan <i>Sustainable Finance Competency Development</i>	88
E.3	Penilaian Risiko Atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan <i>Sustainable Finance Risk Assessment Implementation</i>	89
E.4	Hubungan dengan Pemangku Kepentingan <i>Stakeholders Relations</i>	89
E.5	Permasalahan Terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan <i>Sustainable Finance Implementation Problems</i>	89

KINERJA KEBERLANJUTAN
Sustainable Performance

F.1	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan <i>The Activities of Building a Culture of Sustainability</i>	90
-----	--	----

KINERJA EKONOMI
Economic Performance

F.2	Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi <i>Comparison of Production Targets and Performance, Portfolio, Financial Targets, or Investment, Revenue and Profit</i>	51
F.3	Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan <i>Comparison of Portfolio Targets and Performance, Financing Targets, or Investments in Financial Instruments or Projects in Line With the Implementation of Sustainable Finance</i>	-

KINERJA LINGKUNGAN HIDUP
Environmental Performance

F.4	Biaya Lingkungan Hidup <i>Environment Cost Incurred</i>	90
-----	--	----

ASPEK MATERIAL
Material Aspect

F.5	Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan <i>Use of Environmentally Friendly Materials</i>	90
-----	---	----

ASPEK ENERGI
Energy Aspect

F.6	Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan <i>The Amount and Intensity of Energy Used</i>	90
F.7	Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan <i>Efforts and Achievement of Energy Efficiency Including Use of Renewable Energy Sources</i>	90

ASPEK AIR
Water Aspect

F.8	Penggunaan Air <i>Water Used</i>	90
-----	-------------------------------------	----

ASPEK KEANEKARAGAMAN HAYATI
Biodiversity Aspect

F.9	Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keaneekaragaman Hayati <i>Impacts from Operational Areas Close to or in Conservation Areas or Having Biodiversity</i>	90
F.10	Usaha Konservasi Keaneekaragaman Hayati <i>Biodiversity Conservation Efforts</i>	91

ASPEK EMISI
Emission Aspect

F.11	Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya <i>The Amount and Intensity of Emissions Produced by Type</i>	91
F.12	Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan <i>Efforts and Achievement Emission Reduction Carried Out</i>	91

ASPEK LIMBAH DAN EFLUEN
Waste and Effluent Aspect

F.13	Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis <i>The Amount of Waste and Effluent Produced by Type</i>	91
------	--	----



F.14	Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen <i>Mechanism of Waste and Effluent Management</i>	92
F.15	Tumpahan yang Terjadi (jika ada) <i>Spills that Occur (if any)</i>	92

ASPEK PENGADUAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP
Environmental Complaint Aspect

F.16	Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan <i>The Amount and Material of Environmental Complaints Received and Resolved</i>	92
------	---	----

KINERJA SOSIAL
Social Aspect

F.17	Komitmen untuk Memberikan Layanan atas Produk dan/atau Jasa yang Setara kepada Konsumen <i>Commitment to Provide Services for Equivalent Products and/or Services to Consumers</i>	92
------	---	----

ASPEK KETENAGAKERJAAN
Employment Aspect

F.18	Kesetaraan Kesempatan Bekerja <i>Equality of Employment Opportunities</i>	92
F.19	Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa <i>Child Labor and Forced Labor</i>	92
F.20	Upah Minimum Regional <i>The Regional Minimum Wage</i>	92
F.21	Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman <i>Decent and Safe Working Environment</i>	92
F.22	Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai <i>Training and Capacity Building of Employees</i>	93

ASPEK MASYARAKAT
Society Aspect

F.23	Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar <i>Operational Impacts to the Surrounding Community</i>	93
F.24	Pengaduan Masyarakat <i>Public Complaints</i>	93
F.25	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) <i>Environmental and Social Responsibility Activities</i>	93

TANGGUNG JAWAB PENGEMBANGAN PRODUK/JASA BERKELANJUTAN
Responsibilities for Developing Sustainable Products/Services

F.26	Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan <i>Innovation and Development of Sustainable Financial Products and/or Services</i>	93
F.27	Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya bagi Pelanggan <i>Products/Services that have been Evaluated for Safety for Customers</i>	94
F.28	Dampak Produk/Jasa <i>Products/Service Impacts</i>	94
F.29	Jumlah Produk yang Ditarik Kembali <i>Number of Products Recalled</i>	94
F.30	Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan <i>Customer Satisfaction Survey of Sustainable Finance and/or Services</i>	94

LAIN-LAIN
Others

G.1	Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen (jika ada) <i>Written Verification from an Independent Party (if any)</i>	-
G.2	Lembar Umpan Balik <i>Feedback Form</i>	-
G.3	Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya <i>Feedback on Previous Year's Sustainability Report</i>	-
G.4	Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik <i>Disclosure List Based on POJK No.51/POJK.03/2017 regarding the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Listed Companies and Public Companies</i>	-

Tanggung Jawab Laporan Tahunan

Pernyataan Dewan Komisaris Dan Anggota Direksi Tentang Tanggung Jawab
Atas Laporan Tahunan 2022 PT Bakrie Telecom Tbk

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bakrie Telecom Tbk tahun 2022 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 30 Juni 2023

DEWAN KOMISARIS



Taufan E. N. Rotorasiko
Komisaris Utama



John Pieter Nazar
Komisaris Independen



Jastiro Abi
Komisaris



Neil Ricardo Tobing
Komisaris

DIREKSI



Harya Mitra Hidayat
Direktur Utama



Andi Pravidia Saliman
Wakil Direktur Utama



Agustinus Harimurti
Direktur



Aditya Irawan
Direktur

Halaman ini sengaja dikosongkan

Halaman ini sengaja dikosongkan



Laporan
Keuangan
Financial Report



Laporan Keuangan
Beserta Laporan Auditor Independen

Halaman ini sengaja dikosongkan



**Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen**

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK**

***Consolidated Financial Statements
as of December 31, 2022
and for the year ended
with independent auditor's report***

***PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES***

Daftar Isi**Table of Content**

	Halaman / <u>Page</u>	
Surat pernyataan direksi		<i>Board of directors' statement</i>
Laporan auditor Independen		<i>Independent auditors' report</i>
Laporan posisi keuangan konsolidasian	1	<i>Consolidated statements of financial position</i>
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	3	<i>Consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income</i>
Laporan perubahan defisiensi modal konsolidasian	5	<i>Consolidated statements of changes in capital deficiency</i>
Laporan arus kas konsolidasian	6	<i>Consolidated statements of cash flows</i>
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian	7	<i>Notes to the consolidated financial statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PT BAKRIE TELECOM Tbk DAN ENTITAS ANAK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
OF PT BAKRIE TELECOM Tbk AND
SUBSIDIARIES FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

1. Nama : H. Harya Mitra Hidayat
Alamat kantor : PT Bakrie Telecom Tbk
Jl. HR Rasuna Said Kav B-1,
Jakarta – 12920
Alamat rumah : Jl. Pejaten Barat II No.5A
RT 004/RW 008 Pejaten Barat
Pasar Minggu Jakarta Selatan
Telepon : (62 21) 52290264
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Aditya Irawan
Alamat kantor : PT Bakrie Telecom Tbk
Jl. HR Rasuna Said Kav B-1,
Jakarta – 12920
Alamat rumah : Kav Agraria No.94
RT.002/RW.016
Duren Sawit Jakarta Timur
Telepon : (62 21) 52290264
Jabatan : Direktur

1. Name : H. Harya Mitra Hidayat
Office address : PT Bakrie Telecom Tbk
Jl. HR Rasuna Said Kav B-1,
Jakarta – 12920
Residential address : Jl. Pejaten Barat II No.5A
RT 004/RW 008 Pejaten Barat
Pasar Minggu Jakarta Selatan
Telephone : (62 21) 52290264
Title : President Director
2. Name : Aditya Irawan
Office address : PT Bakrie Telecom Tbk
Jl. HR Rasuna Said Kav B-1,
Jakarta - 12920
Residential address : Kav Agraria No.94
RT.002/RW.016
Duren Sawit Jakarta Timur
Telephone : (62 21) 52290264
Title : Director

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Bakrie Telecom Tbk dan Entitas Anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Bakrie Telecom Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Bakrie Telecom Tbk dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian PT Bakrie Telecom Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Bakrie Telecom Tbk dan Entitas Anak.

1. We are responsible for the preparation and presentation of PT Bakrie Telecom Tbk and Subsidiaries' consolidated financial statements;
2. PT Bakrie Telecom Tbk and Subsidiaries' consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information contained in PT Bakrie Telecom Tbk and Subsidiaries' consolidated financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;
b. PT Bakrie Telecom Tbk and Subsidiaries' consolidated financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts;
4. We are responsible for PT Bakrie Telecom Tbk and Subsidiaries' internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made in all truth.

Atas nama dan mewakili Direksi / *For and on behalf of the Board of Directors*



H. Harya Mitra Hidayat
Direktur Utama / *President Director*

Aditya Irawan
Direktur / *Director*

Jakarta, 28 Juni 2023 / June 28, 2023



KRISNAWAN, NUGROHO & FAHMY

Public Accounting Firm | License No.367/KM.1/2017

Pesanggrahan Office R102, Jl Lebak Bulus III No.50, Jakarta 12440, Indonesia
telp. +62 21 2297 6353 | email: contactus@knfdts.id
www.knfdts.id

00075/2.1107/AU.1/06/0041-2/1/VI/2023

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT Bakrie Telecom Tbk dan Entitas Anak

Opini Wajar Dengan Pengecualian

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Bakrie Telecom Tbk dan entitas anak ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian pada laporan kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis untuk Opini Wajar Dengan Pengecualian

Aspek Perpajakan:

Kelompok Usaha belum mengakui akrual atas kewajiban pajak.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors

PT Bakrie Telecom Tbk and Subsidiaries

Qualified Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Bakrie Telecom Tbk and its subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2022, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph of our report, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2022, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Qualified Opinion

Taxation Aspects:

The Group has not recognized the accrued of tax liabilities.



**Basis untuk Opini Wajar Dengan Pengecualian
(lanjutan)**

Kelangsungan Usaha:

Seperti dijelaskan dalam Catatan 37 atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir, pada tanggal 31 Desember 2022, Kelompok Usaha mencatat nilai aset sejumlah Rp33,28 miliar serta mengalami defisiensi modal sejumlah Rp5,86 triliun dan mencatat liabilitas sejumlah Rp5,89 triliun termasuk utang jangka pendek sejumlah Rp958 miliar.

Manajemen Kelompok Usaha menyusun Laporan Keuangan konsolidasian terlampir dengan asumsi dan keyakinan untuk tetap mampu mempertahankan kelangsungan usaha, dengan diantaranya akan melaksanakan rencana aksi sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 37 serta masih memiliki Entitas Anak yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan mempertahankan kelangsungan usaha Kelompok Usaha sangat tergantung kepada hasil pelaksanaan rencana aksi manajemen Kelompok Usaha serta kinerja Entitas Anaknya.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Penyisihan untuk kerugian kredit ekspektasian atas piutang usaha

Pada tanggal 31 Desember 2022, piutang usaha Grup adalah sebesar Rp6,33 miliar, yang mencakup 19,03% dari total aset Grup, terdiri dari total piutang usaha neto pihak ketiga sebesar Rp975 juta dan pihak berelasi sebesar Rp5,36 miliar.

Sesuai dengan PSAK 71 Instrumen Keuangan, Grup menentukan kerugian kredit ekspektasian dengan menerapkan perubahan dalam kerugian kredit ekspektasian pada setiap tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit sejak awal pengakuan.

Basis for Qualified Opinion (continued)

Going Concern:

As explained in Note 37 to the accompanying Consolidated Financial Statements, as of December 31, 2021, the Group recorded the asset balance of IDR 33.28 billion and is suffering a capital deficiency of IDR 5.86 trillion and recorded liabilities of IDR 5.89 trillion including short-term liabilities amounting to IDR 958 billion.

The Group's management prepares the accompanying consolidated financial statements with the assumption and their believe that it could maintain going concern, on the basis that they will carry out the action plan as described in Note 37 and still have the Subsidiaries that have the ability to generate revenue.

This condition indicates that the ability to maintain the going concern of the business Group is highly dependent on the results of the implementation of the Group management action plan and the performance of its Subsidiaries.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Allowance for expected credit losses for trade receivables.

As of December 31, 2022, the Group's trade receivables amounted to Rp. 6.33 billion, which covers 19.03% of the Group's total assets, consisting of total net trade receivables from third parties of Rp. 975 million and related parties of Rp. 5.36 billion.

In accordance with PSAK 71 Financial Instruments, the Group determines expected credit losses by applying changes in expected credit losses at each reporting date to reflect changes in credit risk since initial recognition.



Hal Audit Utama (lanjutan)

Penyisihan untuk kerugian kredit ekspektasian atas piutang usaha

Prosedur audit kami mencakup, antara lain:

- Kami melaksanakan prosedur dengan memahami dan mengevaluasi desain dan implementasi dari pengendalian internal manajemen yang relevan sehubungan dengan cadangan kerugian kredit ekspektasian atas piutang usaha;
- Kami mengevaluasi keakuratan dan kelengkapan data yang digunakan dalam model kerugian kredit ekspektasian dan memeriksa keakuratan matematis dari perhitungan tersebut;
- Kami mengevaluasi kewajaran dari model kerugian kredit ekspektasian yang diadopsi manajemen dan asumsi utama (yaitu definisi gagal bayar, pengelompokan pelanggan, karakteristik resiko kredit dan informasi masa depan) yang digunakan manajemen untuk mengestimasi cadangan kerugian kredit ekspektasian.

Aset dalam pengerjaan

Pada tanggal 31 Desember 2022, Grup memiliki aset dalam pengerjaan adalah sebesar Rp 12,47 miliar, yang mencakup 37,48% dari total aset Grup.

Prosedur audit kami mencakup, antara lain:

- Kami melaksanakan prosedur dengan memahami substansi transaksi dan tujuan keberadaan Aset dalam pengerjaan tersebut;
- Kami melaksanakan prosedur verifikasi dokumen pendukung terkait pengadaan, pembayaran dan berita acara dalam pelaksanaannya;

Penekanan Suatu Hal

Penyelesaian Wesel Senior:

Kami membawa perhatian ke Catatan 4 atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir, Kelompok Usaha melakukan dekonsolidasi atas Bakrie Telecom Pte. Ltd. ("BTPL") (Entitas Anak), yang mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

Key Audit Matters (continued)

Allowance for expected credit losses for trade receivables.

Our audit procedures include, among others:

- *We carry out procedures by understanding and evaluating the design and implementation of relevant management internal controls with respect to the allowance for expected credit losses on trade receivables;*
- *We evaluate the accuracy and completeness of the data used in the expected credit loss model and check the mathematical accuracy of the calculations;*
- *We evaluate the reasonableness of the expected credit loss model adopted by management and the key assumptions (i.e. definition of default, customer grouping, credit risk characteristics and future information) used by management to estimate the allowance for expected credit losses.*

Assets in progress

As of December 31, 2022, the Group has assets in progress amounting to Rp 12.47 billion, which accounts for 37.48% of the Group's total assets.

Our audit procedures include, among others:

- *We carry out the procedure by understanding the substance of the transaction and the purpose of the existence of the Asset in the process;*
- *We carry out procedures for verifying supporting documents related to procurement, payment and minutes of implementation;*

Emphasis of Matter

Senior Notes Settlement:

We draw attention to Note 4 to the accompanying Consolidated Financial Statements, the Group has deconsolidated Bakrie Telecom Pte. Ltd. ("BTPL") (Subsidiary), which results in the following:



Penekanan Suatu Hal (lanjutan)

Penyelesaian Wesel Senior (lanjutan):

- Pada tanggal 31 Desember 2020, Kelompok Usaha tidak lagi mencatat kewajiban yang seharusnya sudah jatuh tempo kepada para pemegang wesel senior atas utang pokok dan akrual bunganya, masing-masing sejumlah USD 380 juta dan USD 334,30 juta (suku bunga 11,50% per tahun).
- Pada tanggal 31 Desember 2020, Kelompok Usaha mencatat kewajiban utang kepada BTPL dengan mengacu kepada ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 08 Desember 2014 dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU"), dimana utang kepada BTPL tersebut merupakan pinjaman pihak berelasi PT Bakrie Telecom Tbk ("Perusahaan") kepada BTPL yang dananya diperoleh BTPL dari wesel senior dengan utang pokok sejumlah USD 380 juta atau setara Rp 4,612 triliun dan akrual bunga sejumlah USD 27,36 juta atau setara dengan Rp 332,10 miliar (suku bunga 4% per tahun dan kurs PKPU, USD 1 = Rp 12.138).

Berdasarkan perjanjian utang wesel senior antara BTPL dengan para pemegang wesel senior, disebutkan bahwa Perusahaan sebagai entitas induk merupakan Penjamin atas utang wesel senior tersebut.

Seperti dijelaskan dalam Catatan 4 atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir, berdasarkan keterangan dari konsultan hukum Perusahaan di Amerika Serikat sehubungan dengan putusan atau court order tertanggal 6 Mei 2021 dari Pengadilan Kepailitan New York atas permohonan Chapter 15 yang diajukan Perusahaan, dinyatakan bahwa Pengadilan Kepailitan New York telah mengabulkan permohonan Chapter 15 BTEL dengan memberikan pengakuan atas keputusan PKPU BTEL sebagai foreign main proceeding berdasarkan Chapter 15 dari Undang-Undang Kepailitan Amerika Serikat. Lebih lanjut berdasarkan putusan tersebut BTEL mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hukum Amerika Serikat dimana pemegang Wesel Senior dan pihak manapun juga tidak dapat melakukan klaim atau tuntutan terhadap BTEL maupun terhadap aset-aset di Amerika Serikat milik BTEL.

Emphasis of Matter (continued)

Senior Notes Settlement (continued):

- *As of December 31, 2020, the Group did not record the due date obligations for senior note holders by principal debt and accrued interest, amounting to USD 380 million and USD 334.30 million, respectively (interest rate 11.50% per year).*
- *As of December 31, 2020, the Group recorded its obligations to BTPL with reference to the provisions contained in the Amicable Agreement dated December 8, 2014 in the Postponement of Debt Payment Obligations ("PKPU"), where the debt to BTPL is a loan from a related party of PT Bakrie Telecom Tbk ("the Company") to BTPL whose funds were obtained by BTPL from senior notes with principal debt of USD 380 million or equivalent to IDR 4.612 trillion and accrued interest amounting to USD 27.36 million or equivalent to IDR 332.10 billion (interest rate 4% per year and PKPU exchange rate, USD 1 = IDR 12,138).*

Based on the senior note agreement between BTPL and senior note holders, it is declared that the Company as the parent entity is the guarantor of the senior note debt.

As described in Note 4 to the accompanying Consolidated Financial Statements, based on information from the Company's legal consultant in the United States regarding the decision or court order dated May 6, 2021 from the New York Bankruptcy Court on the application for Chapter 15 submitted by the Company, it is stated that the Bankruptcy Court of New York has granted the application for Chapter 15 of BTEL by granting acknowledgment of the PKPU decision. BTEL as a foreign main proceeding under Chapter 15 of the United States Bankruptcy Act. Furthermore, based on the decision, BTEL has legal protection under United States law wherein the holders of Senior Notes and any other party cannot make claims or demands against BTEL or against assets in the United States belonging to BTEL.



KRISNAWAN, NUGROHO & FAHMY

Public Accounting Firm

00075/2.1107/AU.1/06/0041-2/1/VI/2023

Penekanan Suatu Hal (lanjutan)

Penyelesaian Wesel Senior (lanjutan):

Kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan adanya potensi perselisihan dimana para pemegang wesel senior akan mengklaim tagihan sebagaimana tercantum dalam perjanjian antara BTPL dengan para pemegang wesel senior.

Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Piutang Pihak Berelasi:

Seperti dijelaskan dalam Catatan 10 Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir, saldo piutang pihak berelasi sejumlah Rp5,64 miliar merupakan piutang atas setoran modal kepada PT CAF (Entitas Anak).

Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Informasi Lain:

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini Kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat yang berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Emphasis of Matter (continued)

Senior Notes Settlement (continued):

This condition does not preclude the possibility of a potential dispute in which the senior note holders that will claim their rights as declared in the agreement between BTPL and the senior note holders.

Our opinion is not modified in respect in this matters.

Due from related parties:

As explained in Note 10 to the accompanying Consolidated Financial Statements, the balance of related party receivable amounting to Rp5.64 billion represents receivable for paid-up capital to PT CAF (subsidiaries).

Our opinion is not modified in respect in this matters.

Other Information:

Management is responsible for the information. The other information comprises the information contained in the annual report, but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards Auditing established by Institute of Certified Public Accountants.



Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.



Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*



KRISNAWAN, NUGROHO & FAHMY

Public Accounting Firm

00075/2.1107/AU.1/06/0041-2/1/VI/2023

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Kantor Akuntan Publik / Registered Public Accountant
KRISNAWAN, NUGROHO & FAHMY

Drs. A. Krisnawan Budipracoyo, Akt., CPA
Izin Akuntan Publik No. AP. 0041 / License of Public Accountant No. AP. 0041



28 Juni 2023 / June 28, 2023

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022**
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022**
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	2c,5	404	3.153	Cash and cash equivalents
Piutang usaha				Trade receivables
Pihak ketiga (setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp73.405 dan Rp73.186 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021)	2i,2p,6	975	4.381	Third parties (net allowances for impairment loss of Rp73,405 and Rp73,186 respectively, as of December 31, 2022 and 2021)
Pihak berelasi (setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp2.711 dan Rp0 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021)	2d,2i,2p 6	5.357	1.903	Related parties (net allowances for impairment loss of Rp2,711 and Rp0 respectively, as of December 31, 2022 and 2021)
Persediaan	2e,7	2.006	644	Inventories
Uang muka	8	2.572	3.128	Advances
Biaya dibayar dimuka	2f,9	111	587	Prepaid expenses
Total Aset Lancar		11.425	13.796	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Pajak dibayar dimuka	27a	2.615	217	Prepaid Tax
Aset tetap - bersih (Setelah dikurangi jumlah akumulasi penyusutan dan penurunan nilai Rp13.209.181 dan Rp13.209.071 masing-masing pada 31 Desember 2022 dan 2021)	2g,2h,2i 2j,11	302	283	Fixed assets - net (Net with total accumulated depreciation and impairment loss amounting of Rp13,209,181 and Rp13,209,071 as of December 31, 2022 and 2021, respectively)
Piutang pihak berelasi	2d,10	5.640	5.640	Due from related parties
Aset dalam pengerjaan	2g,13	12.471	-	Assets in progress
Aset tidak lancar lainnya	12	822	822	Other non-current assets
Total Aset Tidak Lancar		21.850	6.962	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		33.275	20.758	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN DEFISIENSI MODAL				LIABILITIES AND CAPITAL DEFICIENCY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha				Trade payables
pihak ketiga	2p,14	426.173	418.333	third parties
pihak berelasi	2d,2p,14	16.915	16.864	related parties
Utang lain-lain	2p,15	179.945	157.731	Other payables
Utang pihak berelasi	2d,2p,28	47.272	47.272	Due to related parties
Beban akrual	2n,16	247.088	235.350	Accrued expenses
Utang pajak	2q,27b	28.060	24.791	Tax payables
Liabilitas imbalan kerja	2o,29	12.708	14.160	Employee benefit liability
Total Liabilitas Jangka Pendek		958.161	914.501	Total Current Liabilities

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See the accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of these consolidated financial statements

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022**
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022**
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	2022	2021	
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun: Utang yang diselesaikan melalui PKPU	18,36	4.931.941	4.842.143	Long-term liabilities - net of current maturities: Settlement of payables through PKPU
Total Liabilitas Jangka Panjang		4.931.941	4.842.143	Total Non-current Liabilities
Total Liabilitas		5.890.102	5.756.644	Total Liabilities
DEFISIENSI MODAL				CAPITAL DEFICIENCY
Modal saham				Capital stock
Nilai nominal				Par value
Saham biasa				Common shares
seri A Rp 200				series A Rp200
seri B Rp 100				series B Rp100
(dalam satuan penuh)				(in full amount)
Modal dasar				Authorized shares
Saham biasa seri A				Common shares series A
10.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021				10,000,000,000 shares as of December 31, 2022 and 2021
Saham biasa seri B				Common shares series B
87.111.652.195 saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021				87,111,652,195 shares as of December 31, 2022 and 2021
Modal ditempatkan dan disetor penuh				Issued and fully paid shares
Saham biasa seri A				Common shares series A
5.751.502.450 saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021				5,751,502,450 shares as of December 31, 2022 and 2021
Saham biasa seri B				Common shares series B
31.022.402.185 saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	19	4.252.541	4.252.541	31,022,402,185 shares as of December 31, 2022 and 2021
Tambahan modal disetor	20	2.488.871	2.488.871	Additional paid-in capital
Saham beredar yang diperoleh kembali	2m,21	(11.000)	(11.000)	Treasury stock
Agio saham beredar yang diperoleh kembali	2m,21	50.623	50.623	Premium on Treasury stock
Agio konversi utang menjadi saham	21	618.931	618.931	Premium on conversion stock
Obligasi wajib konversi		5.672.905	5.672.905	Mandatory convertible bonds
Defisit	31	(18.919.588)	(18.804.071)	Deficit
Defisiensi modal yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		(5.846.717)	(5.731.200)	Capital deficiency attributable to owners of the parent entity
Kepentingan non pengendali	2b,22	(10.110)	(4.686)	Non-controlling interest
Defisiensi Modal - Neto		(5.856.827)	(5.735.886)	Capital Deficiency - Net
TOTAL LIABILITAS DAN DEFISIENSI MODAL		33.275	20.758	TOTAL LIABILITES AND CAPITAL DEFICIENCY

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See the accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of these consolidated financial statements

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022**

(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
AS OF DECEMBER 31, 2022**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	<u>Catatan / Notes</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
PENDAPATAN USAHA				OPERATING REVENUE
Pendapatan usaha - bruto	2d,2n,23	47.850	52.110	Operating revenues - gross
Beban pokok pendapatan	2n,23	<u>(15.480)</u>	<u>(15.719)</u>	Cost of revenues
Pendapatan Usaha - Neto		<u>32.370</u>	<u>36.391</u>	Operating Revenues - Net
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Penyusutan	2g,2h,2n,11	110	91	Depreciation
Karyawan	2n,2o,25	29.661	24.139	Employee
Umum dan administrasi	2n,24	<u>19.322</u>	<u>18.432</u>	General and administrative
Total Beban Usaha		<u>49.093</u>	<u>42.662</u>	Total Operating Expenses
RUGI USAHA		<u>(16.723)</u>	<u>(6.271)</u>	OPERATING LOSS
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				OTHER INCOME (CHARGES)
Beban keuangan	26b,18	(89.814)	(89.831)	Financing charges
Laba (rugi) selisih kurs - neto	2q,26a	(7.057)	(2.317)	Gain (loss) foreign exchange - net
Lain-lain - neto	26c	<u>(4.378)</u>	<u>4.168</u>	Others - net
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Neto		<u>(101.249)</u>	<u>(87.980)</u>	Other Income (Charges) - Net
RUGI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		<u>(117.972)</u>	<u>(94.251)</u>	LOSS BEFORE INCOME TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2q	<u>46</u>	<u>(725)</u>	INCOME TAX EXPENSES
RUGI TAHUN BERJALAN		<u><u>(117.926)</u></u>	<u><u>(94.976)</u></u>	NET LOSS FOR THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See the accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of these consolidated financial statements

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022**

(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
AS OF DECEMBER 31, 2022**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	<u>Catatan / Notes</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:				Items that will be reclassified subsequently to profit or loss:
Pengkukuran kembali rugi atas liabilitas imbalan kerja		2.409	(6.024)	Remeasurement again on employee benefit liability
Penghasilan Komprehensif Lain - Neto setelah pajak		2.409	(6.024)	Other Comprehensive Income - Net Of Tax
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>(115.517)</u>	<u>(101.000)</u>	TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR
Rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada				Net loss for the year attributable to:
Pemilik entitas induk		(112.851)	(85.328)	Owner of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	2b,22	(5.074)	(9.648)	Non-controlling interest
Total		<u>(117.926)</u>	<u>(94.976)</u>	Total
Total rugi komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Total comprehensive loss for the year attributable to:
Pemilik entitas induk		(110.442)	(91.352)	Owner of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	2b,22	(5.074)	(9.648)	Non-controlling interest
Total		<u>(115.517)</u>	<u>(101.000)</u>	Total
RUGI NETO PER SAHAM DASAR DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (Angka penuh)				BASIC LOSS PER SHARE ATRIBUTABLE TO THE OWNER OF PARENT (Full amount)
Rugi bersih per saham	2r,32	<u>(3,27)</u>	<u>(2,75)</u>	Net loss per share

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See the accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of these consolidated financial statements

PT BAKRIE TELECOM Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN DEFISIENSI MODAL KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022

(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BAKRIE TELECOM Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN CAPITAL DEFICIENCY
AS OF DECEMBER 31, 2022

(Figure in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Defisiensi Modal yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/
Capital Deficiency Attributable to Owner of the Parent

	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor / Issued and Paid Shares	Tambahan Modal Disetor / Additional Paid-in Capital	Saham Beredar yang Diperoleh Kembali / Treasury Stock	Agio Saham Beredar yang Diperoleh Kembali / Premium on Treasury Stock	Agio Saham yang Dikonversi dari Hutang / Premium on Conversion Stock	Obligasi Wajib yang Dikonversi dari Hutang/ Mandatory Conversion Bonds	Cadangan Modal Lainnya / Other Capital Reserves	Defisit / Deficit	Total / Total	Kepentingan Non-pengendali / Non-controlling Interest	Defisiensi Modal - Neto / Capital Deficiency - Net	
Saldo 1 Januari 2021	4.252.541	2.488.871	(11.000)	50.623	618.931	-	-	(18.703.071)	(11.303.105)	(448)	(11.303.553)	Balance as of January 1, 2021
Rugi neto tahun berjalan								(94.976)	(94.976)	(4.238)	(99.214)	Net loss for the year
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan:	-	-	-	-	-	-	-	(6.024)	(6.024)	-	(6.024)	Other comprehensive income for the year
Penerbitan modal saham berasal dari OWK	-	-	-	-	-	5.672.905	-	-	5.672.905	-	5.672.905	Shares of stock from MCB conversion
Saldo 31 Desember 2021	4.252.541	2.488.871	(11.000)	50.623	618.931	5.672.905	-	(18.804.071)	(5.731.200)	(4.686)	(5.735.886)	Balance as of December 31, 2021
Saldo 1 Januari 2022	4.252.541	2.488.871	(11.000)	50.623	618.931	5.672.905	-	(18.804.071)	(5.731.200)	(4.686)	(5.735.886)	Balance as of January 1, 2022
Rugi neto tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	(117.926)	(117.926)	(5.424)	(123.350)	Net loss for the year
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan:	-	-	-	-	-	-	-	2.409	2.409	-	2.409	Other comprehensive income for the year:
Penerbitan modal saham berasal dari OWK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Shares of stock from MCB conversion
Saldo 31 Desember 2022	4.252.541	2.488.871	(11.000)	50.623	618.931	5.672.905	-	(18.919.588)	(5.846.717)	(10.110)	(5.856.827)	Balance as of December 31, 2022

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022**
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
AS OF DECEMBER 31, 2022**
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	44.864	41.191	Cash receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok dan aktivitas operasional lainnya	(19.349)	(16.393)	Cash paid to suppliers and other operating activities
Pembayaran kepada karyawan	(29.794)	(23.916)	Cash paid to employees
Pembayaran beban keuangan	(15)	(32)	Payment of financing charges
Penerimaan pajak	783	2.639	Receipt of taxes
Penerimaan bunga	13	3	Receipt of interest
Penerimaan lainnya	878	4.165	Others receipt
Kas Neto Diperoleh (Dibayarkan) dari/untuk Aktivitas Operasi	<u>(2.620)</u>	<u>7.657</u>	Net Cash Flows Received (Paid) from/for Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pembelian aset tetap	(129)	(313)	Purchase fixed assets
Penambahan investasi pada Entitas anak	-	(4.600)	Additional investment on Subsidiaries
Arus Kas Bersih yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	<u>(129)</u>	<u>(4.913)</u>	Net cash Flows Used in Investing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	(2.749)	2.744	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	<u>3.153</u>	<u>409</u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF PERIOD
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	<u><u>404</u></u>	<u><u>3.153</u></u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Bakrie Telecom Tbk (dahulu PT Radio Telepon Indonesia) ("Perusahaan") didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 13 Agustus 1993 dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 Tahun 1968, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1970 berdasarkan Akta Notaris No. 94 oleh Muhani Salim, S.H., sebagaimana diperbaiki dengan Akta Notaris Pembetulan No. 13 tanggal 5 November 1993 dan diubah dengan Akta Notaris No. 129 tanggal 27 November 1993, keduanya dibuat oleh Abdurachman Kadir, S.H., Notaris pengganti dari Muhani Salim, S.H.

Status Perusahaan mengalami perubahan menjadi perusahaan terbuka sebagaimana tertuang dalam resolusi para pemegang saham yang berkekuatan sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 6 tanggal 3 Februari 2006 yang dibuat oleh Agus Madjid, S.H. Dimana perubahan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima dan dicatat oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana tertuang dalam surat No. C-03880 HT.01.04.TH.2006, tanggal 13 Februari 2006.

Ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi penyelenggaraan jasa telekomunikasi nasional dengan daerah operasi saat ini di Jakarta. Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat berlokasi di Wisma Bakrie, Lantai 3, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-1, Jakarta Selatan. Perusahaan memulai beroperasi secara komersial pada tanggal 1 November 1995.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 11 Agustus 2008, ruang lingkup kegiatan Perusahaan telah diperluas yang meliputi; merencanakan, membangun dan menyewakan sarana / fasilitas telekomunikasi, melaksanakan kegiatan pemasaran dan penjualan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi, melakukan pemeliharaan, penelitian dan pengembangan sarana telekomunikasi, serta memperdagangkan perangkat / produk telekomunikasi.

1. GENERAL

a. Company Establishment

PT Bakrie Telecom Tbk (previously PT Radio Telepon Indonesia) ("the Company") was established in the Republic of Indonesia on August 13, 1993 within the framework of the Domestic Investment Law No. 6 Year 1968, as amended by Law No. 12 Year 1970 based on Notarial Deed No. 94, of Muhani Salim, S.H., as amended by Amendment Notarial Deed No. 13 dated November 5, 1993 and amended by Notarial Deed No. 129 dated November 27, 1993, both made of Abdurachman Kadir, S.H., substitute of Notary Muhani Salim, S.H.

The Company's status was changed to that of a public company through the resolutions of the Company's shareholders as notarized by Deed No. 6 of Agus Madjid, S.H., dated February 3, 2006. This change was reported to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and was accepted and recorded by the Directorate General of General Law Administration per letter No. C-03880 HT.01.04.TH.2006 dated February 13, 2006.

The scope of activities of the Company comprises the provision of telecommunication national services. The Company's operational areas currently in Jakarta. The Company is domiciled in Jakarta with its head office located at Wisma Bakrie, 3rd Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-1, South Jakarta. The Company started its commercial operations on November 1, 1995.

Based on the Extraordinary General Shareholders Meeting held on August 11, 2008, the scope of activities of the Company was modified to comprise; planning, development and lease of telecommunication equipment / facilities, marketing and sales activities of telecommunication network and/or services, maintenance, research and development of telecommunication facilities, and selling of telecommunication products / utilities.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir sehubungan dengan Anggaran Dasar Perusahaan yang telah disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peningkatan modal dasar ditempatkan Perusahaan, yang dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan tanggal 29 Mei 2015, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27 dan No. 28 masing-masing tertanggal 22 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Lenny Janis Ishak, S.H.

Perubahan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima dan dicatat oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana tertuang dalam surat No.AHU-0940316.AH.01.02. TAHUN 2015 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 98 Tambahan No. 43892 tanggal 6 November 2015, tanggal 7 Agustus 2015.

Untuk saat ini Perusahaan memiliki ijin jasa koneksi internet (*Internet Service Provider/ISP*) dan ijin jasa teleponi dasar melalui jaringan bergerak seluler.

Pada tanggal 26 September 2014, Perusahaan memperoleh persetujuan pengalihan izin penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita frekuensi radio 800 MHz PT Bakrie Telecom Tbk kepada PT Smartfren Telecom Tbk, berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 932/KEP/M.KOMINFO/ 09/2014 sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 800 MHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selular.

Perusahaan tergabung dalam Kelompok Usaha Bakrie.

1. GENERAL (continued)

a. Company Establishment (continued)

The Company's Articles of Association have been amended several times. The latest amendment in relation to the Company's Articles of Association that have been adapted to the Financial Services Authority (OJK) rules and the increase of authorized capital issued was based on Extraordinary General Meeting of Shareholders dated May 29, 2015, as stated in Deed of Resolution No. 27 and No. 28 which dated June 22, 2015 made before Lenny Janis Ishak, S.H., Notary.

This change was reported to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and was accepted and recorded by the Directorate General of General Law Administration per letter No. AHU-0940316.AH.01.02. TAHUN 2015 and was published in the State Gazette No. 98, Supplement No. 43892 dated November 6, 2015, dated August 7, 2015.

The Company's currently has internet service provider lisenca/ISP and basic telephony services true mobile seluler network.

On September 26, 2014, the Company obtained approval permits for transfer the radio frequency spectrum bandwidth 800 MHz of PT Bakrie Telecom Tbk to PT Smartfren Telecom Tbk, based on Decision Letter of the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia No. 932/KEP/M.KOMINFO/09/2014 in respect to Regulation of the Minister of Communication and Information Technology Number 30 Year 2014 concerning Settlement 800 MHz Radio Frequency Band the Purpose of Implementation of Cellular Mobile Network.

The Company is part of the Bakrie Group.

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Saham Perdana

Pada tanggal 3 Februari 2006, Perusahaan mencatat sahamnya pada Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui Penawaran Umum Perdana Saham Seri B Atas Nama Tahun 2005 sebanyak lima miliar lima ratus juta (5.500.000.000) saham dengan nilai nominal seratus rupiah (Rp100) per saham.

Dalam rangka penawaran umum perdana ini, Perusahaan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak satu miliar seratus juta (1.100.000.000) lembar Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma yang menyertai seluruh saham Seri B atas nama. Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham Seri B atas nama dengan harga pelaksanaan sebesar seratus tiga puluh lima rupiah (Rp135) setiap saham yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 3 Agustus 2006 sampai 2 Februari 2009.

Pada bulan Maret 2009, semua waran telah selesai dilaksanakan.

Penawaran Umum Saham Perdana tersebut disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 23 September 2005 dan dituangkan dalam Akta Notaris No. 39 oleh Agus Madjid, S.H.

c. Penawaran Umum Terbatas (PUT)

Pada tanggal 14 Februari 2008, Perusahaan memperoleh surat pernyataan efektif dari Ketua Otoritas Jasa keuangan melalui surat No. S-944/BL/2008 tanggal 14 Februari 2008 atas Penawaran Umum Terbatas (PUT) sebanyak-banyaknya delapan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh dua (8.638.079.352) saham Seri B dengan nilai nominal sebesar seratus rupiah (Rp100) setiap saham yang ditawarkan dengan harga penawaran sebesar tiga ratus lima puluh rupiah (Rp350). PUT tersebut telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 15 Februari 2008 dengan Akta Notaris No. 38 oleh Agus Madjid, S.H., dan pada tanggal 29 Februari 2008, PUT tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

1. GENERAL (continued)

b. Initial Public Offering

On February 3, 2006, the Company listed its shares on the Indonesia Stock Exchange (BEI) through an Initial Public Offering (IPO) of five billion five hundred million (5,500,000,000) registered Shares Series B in Year 2005 with nominal value of one hundred rupiah (Rp100) per share.

For the purposes of this public offering, the Company also simultaneously issued one billion one hundred million (1,100,000,000) Series I Warrants that were issued at no cost (naked warrants) accompanying the registered Series B shares. Series I Warrants gave the right to their holders to purchase Series B shares at an exercise price of one hundred and thirty-five rupiah (Rp135) per share, which could be exercised within the period of August 3, 2006 to February 2, 2009.

In March 2009, all warrants had been accomplished.

The IPO was approved by the Extraordinary Shareholders' General Meeting held on September 23, 2005 and notarized by Deed No. 39 of Agus Madjid, S.H.

c. Rights Issue

On February 14, 2008, the Company obtained the notice of effectiveness from the Chairman of the Financial Services Authority per letter No. S-944/BL/2008 dated February 14, 2008 of its Rights Issue for a maximum of eight billion, six hundred thirty-eight million, seventy-nine thousand, three hundred fifty-two (8,638,079,352) Series B shares with nominal value of one hundred rupiah (Rp100) per share which were offered at three hundred fifty rupiah (Rp350) per share. The Rights Issue, which was approved by the Extraordinary Shareholders' General Meeting held on February 15, 2008 and notarized by Deed No. 38 of Agus Madjid, S.H., was listed on the Indonesia Stock Exchange on February 29, 2008.

1. UMUM (lanjutan)

d. Pembelian kembali (buy-back) Saham Perusahaan

Pada tanggal 15 Oktober 2008, Direksi menyetujui pembelian kembali saham yang beredar Perusahaan sampai jumlah maksimum sebanyak satu koma satu triliun rupiah (Rp1,1 triliun) atau 20% dari modal disetor Perusahaan.

Pembelian kembali saham tahap pertama akan dilakukan sebesar-besarnya seratus miliar rupiah (Rp100,0 miliar) dan pembelian kembali saham tahap kedua akan dilakukan sesuai dengan kemampuan, keperluan dan kondisi Perusahaan. Pembelian kembali dilaksanakan dalam periode Oktober dan November tahun 2008, dimana sebanyak enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus (689.425.500) lembar saham telah dibeli kembali, dan pada tahun 2009, sebanyak lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus (579.425.500) lembar saham telah dijual kembali (Catatan 17).

e. Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT-HMETD)

Pada tanggal 22 Juni 2012 dan 29 Agustus 2012, Perusahaan menerbitkan saham Seri B dengan nilai nominal seratus rupiah (Rp100) per saham masing-masing sebesar lima ratus enam puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam (566.037.736) saham dan satu miliar lima ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh (1.536.135.340) saham, untuk PT Bakrie Global Ventura, pihak berelasi melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT-HMETD) dengan harga pelaksanaan dua ratus enam puluh lima rupiah (Rp265) per saham.

f. Struktur Entitas Anak

Pada tanggal 11 Maret 2010, berdasarkan Akta Notaris No. 03 dibuat oleh Dheasy Suzanti, S.H., M.Kn., Perusahaan mendirikan Entitas Anak yang bernama PT Bakrie Connectivity.

1. GENERAL (continued)

d. Buy-Back of the Company's Shares of Stock

On October 15, 2008, the Board of Directors approved the buy-back of the Company's shares up to a maximum of one point one trillion rupiah (Rp1.1 trillion) or 20% of the paid-in capital of the Company.

The buy-back of shares of stock in the first phase worth of up to one hundred billion rupiah (Rp100.0 billion) and the second phase of the balance will be carried out according to the availability, needs and condition of the Company. The buy-back was undertaken during the period of October and November 2008, during which time six hundred eighty-nine million, four hundred twenty-five thousand, five hundred (689,425,500) shares were bought back, and in 2009, five hundred seventy-nine million, four hundred twenty-five thousand, five hundred (579,425,500) shares were reissued (Note 17).

e. Capital Stock Issuance Through Non-Preemptive Right (PMT-HMETD)

On June 22, 2012 and August 29, 2012, the Company issued Series B shares with nominal value of one hundred rupiah (Rp100) per share amounting to five hundred sixty-six million, thirty-seven thousand, seven hundred thirty-six (566,037,736) shares and one billion, five hundred thirty-six million, one hundred thirty-five thousand, three hundred forty (1,536,135,340) shares, respectively, to PT Bakrie Global Ventura, a related party through Capital Stock Issuance Without Preemptive Right (PMT-HMETD) at an exercise price of two hundred sixty-five rupiah (Rp265) per share.

f. Structure of the Subsidiaries

On March 11, 2010, based on Notarial Deed No. 03, of Dheasy Suzanti, S.H., M.Kn., the Company established a Subsidiary, PT Bakrie Connectivity.

1. UMUM (lanjutan)

f. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

Ruang lingkup kegiatan Entitas Anak meliputi usaha perdagangan produk dan/atau perangkat telekomunikasi, jasa teknologi informasi, jasa penyedia dan pemanfaatan multimedia dan jasa pengadaan sumber daya manusia, telekomunikasi serta media cetak.

Pada tanggal 16 Juni 2016, berdasarkan Akta Notaris No. 09 dibuat oleh Ervina Christina Sembiring, S.H., M.Kn., Perusahaan mendirikan Entitas Anak yang bernama PT Anugerah Andalan Investama (AAI).

Ruang lingkup kegiatan AAI adalah meliputi perdagangan produk dan jasa berbasis internet, *internet provider*, jasa penyediaan sumber daya manusia, jasa televisi berbayar, jasa multimedia, dan jasa media cetak dan elektronik.

Pada tanggal 27 Desember 2016 berdasarkan Akta Notaris No. 22 yang kemudian ditegaskan kembali dengan Akta Notaris No. 15 tanggal 24 Januari 2017 yang keduanya dibuat oleh Ervina Christina Sembiring, S.H., M.Kn, AAI telah mengambil alih saham-saham pada PT. Mitra Kreasi Komunika (MKK).

Ruang lingkup kegiatan MKK adalah meliputi perdagangan barang dan jasa antara lain perdagangan alat-alat telekomunikasi, elektronik, jasa pembangunan instalasi telekomunikasi, industri barang-barang elektronik, jasa penerbitan dan desain grafis, jasa teknologi informasi dan internet konten serta jasa multimedia.

MKK adalah selaku pemegang saham pada PT. Layanan Prima Digital (LPD) berdasarkan Akta Notaris No. 8 tanggal 31 Agustus 2016 yang kemudian ditegaskan kembali melalui Akta Notaris No. 2 tanggal 28 Oktober 2016 yang keduanya dibuat oleh Firdhonal S.H.

1. GENERAL (continued)

f. Structure of the Subsidiaries (continued)

The scope of its Subsidiary activities consists of trading of products and/or telecommunications equipment, services as information technology service providers, and the use of multimedia and human resources services, telecommunications and media.

On June 16, 2016, based on Notarial Deed no. 09 of Ervina Christina Sembiring, S.H.,M.Kn. The Company established a Subsidiary, PT Anugerah Andalan Investama (AAI).

The scope of AAI consist of trading and services internet product, internet provider, human resources services, subscription television services, multimedia services, and printing and electronic media services.

On December 27, 2016, based on Notarial Deed No. 22 reaffirmed with Notarial Deed No. 15 dated January 24, 2017 of Ervina Christina Sembiring, S.H., M.Kn, both of them, AAI has taken over PT. Mitra Kreasi Komunika (MKK) shares.

The scope of MKK consist of trading goods and services such as telecommunication equipment, electronic, develop telecommunication instalation, electronic goods, services publications and graphic design, information technology services, and internet content with multimedia services.

MKK as a shareholders at PT. Layanan Prima Digital (LPD) based on Notarial Deed No. 8 dated August 31, 2016 reaffirmed with Notarial Deed No.2 dated October 28, 2016 of Firdhonal S.H both of them.

1. UMUM (lanjutan)

f. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

Ruang lingkup kegiatan LPD meliputi perdagangan barang-barang elektronik dan telekomunikasi serta peralatan jaringan, penyediaan jasa internet dan multimedia, jasa televisi berbayar, jasa telekomunikasi, jasa publikasi dan penyiaran, jasa *e-commerce* dan jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi dan jasa-jasa terkait lainnya.

MKK adalah pemegang saham pada PT. Inovasi Teknologi Nusantara (ITN) berdasarkan Akta Notaris No. 48 tanggal 30 November 2019 yang kemudian ditegaskan kembali melalui Akta Notaris No. 58 tanggal 27 Desember 2019 yang keduanya dibuat oleh Ervina Christina S, S.H., M.Kn.

Ruang lingkup kegiatan ITN dalam bidang perdagangan dan industri meliputi alat-alat telekomunikasi, informatika dan multimedia. Dalam bidang multimedia dan telekomunikasi meliputi pembangunan sarana-prasarana jaringan telekomunikasi dan multimedia. Dalam bidang jasa perawatan meliputi perbaikan dan pemeliharaan alat-alat komunikasi dan multimedia dan jasa pemeliharaan jaringan telekomunikasi.

Dalam bidang jasa teknologi informasi dan *internet content* meliputi jasa televisi berbayar, televisi berlangganan, jasa akses internet, dan jasa interkoneksi internet.

Pada tanggal 30 April 2021 berdasarkan Akta Notaris No 12 tanggal 30 April 2021 yang dibuat oleh Ervina Christina Sembiring, S.H., M.Kn, AAI, ITN telah mengambil alih saham-saham pada PT. Cakra Andalas Fasilitas (CAF) yang bergerak antara lain dibidang layanan infrastruktur media. ITN menjadi pemegang saham pengendali dari CAF.

1. GENERAL (continued)

f. Structure of the Subsidiaries (continued)

The scope of LPD consist of trading electronic telecommunication goods with and network equipment, internet and multimedia services provider, subscription television services, telecommunication services, publication and broadcasting services, e-commerce services, and multimedia services and utilize through the telecommunication and others related services.

MKK as a shareholders at PT. Inovasi Teknologi Nusantara (ITN) based on Notarial Deed No. 48 dated November 30, 2019 reaffirmed with Notarial Deed No. 58 dated December 27, 2019 of Ervina Christina S, S.H., M.Kn both of them.

The scope of ITN in trading and industry consist of telecommunication goods, informatika and multimedia. In multimedia and telecommunication consists of telecommunications and multimedia network infrastructure construction. In maintenance services consist of repair and maintenance of communication and multimedia telecommunications network maintenance services.

In information technology services and internet content consist of pay television services, pay television, internet access services, and internet interconnection services.

On April 30, 2021, based on Notarial Deed no. 12 dated April 30, 2021 drawn up by Ervina Christina Sembiring, S.H.,M.Kn. ITN has acquired the shares of PT. Cakra Andalas Fasilitas (CAF) a company dealing in among others media infrastructure services. ITN is the controlling shareholder of CAF.

1. UMUM (lanjutan)

f. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

Pada tanggal 17 Juni 2021 berdasarkan Akta Notaris No 24 tanggal 17 Juni 2021 yang dibuat oleh Ervina Christina Sembiring, S.H., M.Kn, AAI, ITN bersama pemegang saham lainnya membentuk atau mendirikan perusahaan PT. Sangads Digital Pariwara (SDP) yang bergerak antara lain dibidang agensi periklanan digital. ITN menjadi pemegang saham pengendali dari SDP.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perusahaan memiliki Entitas Anak dengan kepemilikan sebagai berikut (selanjutnya secara bersama-sama dengan Perusahaan disebut sebagai "Kelompok Usaha"):

<u>Entitas Anak / Subsidiaries</u>	<u>Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership (%)</u>	<u>Bidang Usaha / Scope of Activities</u>	<u>Saat Dimulainya Kegiatan Usaha Komersial / Start of Commercial Operation</u>	<u>Domisili / Domicile</u>	<u>Total Aset Sebelum Eliminasi / Total Asset Before Elimination</u>
<i>Kepemilikan Langsung / Direct Ownership :</i>					
PT Bakrie Connectivity	99,99	Perdagangan Telekomunikasi / Telecommunication Trading	2010	Indonesia	2
PT Anugerah Andalan Investama	99,80	Perdagangan dan Jasa / Trading and Services	2016	Indonesia	-16.266
<i>Melalui / Through AAI</i>					
PT Mitra Kreasi Komunika	70,00	Perdagangan dan Jasa / Trading and Services	2016	Indonesia	-12.246
<i>Melalui / Through MKK</i>					
PT Layanan Prima Digital	75,07	Perdagangan dan Telekomunikasi / Trading and Telecommunication	2016	Indonesia	7.934
PT Inovasi Teknologi Nusantara	99,87	Perdagangan dan Jasa / Trading and Services	2016	Indonesia	-762

1. GENERAL (continued)

f. Structure of the Subsidiaries (continued)

On June 17, 2021, based on Notarial Deed no. 24 dated June 17, 2021 drawn up by Ervina Christina Sembiring, S.H., M.Kn. ITN are with other shareholders formed or established PT. Sangads Digital Pariwara (SDP) a company dealing in among others digital advertising agency ITN is the controlling shareholder of SDP.

As of December 31, 2022, the Company had ownership interest in Subsidiaries as follows (together with the Company herein after referred to as the "Group"):

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

f. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

f. Structure of the Subsidiaries (continued)

Entitas Anak / Subsidiaries	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership (%)	Bidang Usaha / Scope of Activities	Saat Dimulainya Kegiatan Usaha Komersial / Start of Commercial Operation	Domisili / Domicile	Total Aset Sebelum Eliminasi / Total Asset Before Elimination
Kepemilikan Tidak Langsung / Indirect Ownership :					
Melalui / Through ITN					
PT Sangads Digital Pariwara	40,00	Agensi Periklanan Digital / Digital Advertising Agency	2021	Indonesia	951
PT Cakra Andalas Fasilitas	45,00	Layanan Infrastruktur Media / Media Infrastructure Services	2021	Indonesia	33.276

**g. Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit
serta Karyawan**

**g. Boards of Commissioners, Directors and
Audit Committee and Employees**

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022
dan 2021 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Boards of
Commissioners and Directors as of
December 31, 2022 and 2021 was as follows:

31 Desember / December 31, 2022		31 Desember / December 31, 2021	
Dewan Komisaris		Board of Commissioners	
Komisaris Utama	Taufan E.N Rotorasiko	Taufan E.N Rotorasiko	President Commissioner
Komisaris	Jastiro Abi	Jastiro Abi	Commissioner
Komisaris	Neil Ricardo Tobing	-	Commissioner Independent
Komisaris Independen	John Pieter Nazar	John Pieter Nazar	Commissioner
Dewan Direksi		Board of Directors	
Direktur Utama	Harya Mitra Hidayat	Harya Mitra Hidayat	President Director
Wakil Direktur Utama	Andi Pravidia Saliman	-	Vice President Director
Direktur	Aditya Irawan	Andi Pravidia Saliman	Director
Direktur	Agustinus Harimurti	Agustinus Harimurti	Director
Susunan Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:		The composition of the Company's Audit Committee and the sole Corporate Secretary as of December 31, 2022 and 2021 was as follows:	
31 Desember / December 31, 2022		31 Desember / December 31, 2021	
Komite Audit		Audit Committee	
Ketua	John Pieter Nazar		Chairman
Anggota	Arydhian B Djamin		Member
Anggota	Dwi Winarno		Member
Sekretaris Perusahaan	Purwoko Suatmadji		Corporate Secretary

1. UMUM (lanjutan)

**g. Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit
serta Karyawan (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, jumlah karyawan Kelompok Usaha masing-masing adalah 204 dan 220 karyawan (tidak diaudit).

**h. Penyelesaian Laporan Keuangan
Konsolidasian**

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini yang telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 28 Juni 2023.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERUSAHAAN**

**a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan
Konsolidasian dan Pernyataan Kepatuhan**

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, dan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tertanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, kecuali untuk penerapan pernyataan dan interpretasi baru dan revisi yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2021 seperti yang diungkapkan dalam kebijakan akuntansi terkait.

1. GENERAL (continued)

**g. Boards of Commissioners, Directors and
Audit Committee and Employees
(continued)**

As of December 31, 2022 and 2021, the Group had 204 and 220 employees, respectively (unaudited).

**h. Completion of the Consolidated Financial
Statements**

The management of the Company is responsible for the preparation of these consolidated financial statements which have been authorized for issue by the Board of Directors on June 28, 2023.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING

**a. Basis of Preparation of the Consolidated
Financial Statements and Statement of
Compliance**

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants, and the Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 regarding the Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies issued by the Financial Services Authority (OJK).

The accounting policies adopted in the preparation of these financial statements are consistent with the accounting policies in the preparation of the Company's consolidated financial statements for the year ended December 31, 2020, except for the adoption of new and revised statements and interpretations effective January 1, 2021 as described in the related accounting policies.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERUSAHAAN** (lanjutan)

**a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan
Konsolidasian dan Pernyataan Kepatuhan**
(lanjutan)

Penerapan perubahan standar akuntansi berikut yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021 dan 1 April 2021, dan relevan bagi Perusahaan, tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap angka-angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian tahun berjalan:

- Amendemen PSAK 73, PSAK 71, PSAK 60 dan PSAK 55 "Sewa, Instrumen Keuangan, Instrumen Keuangan: Pengungkapan, dan Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran Tentang Pembaruan IBOR Tahap Dua"
- Penyesuaian Tahunan PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan"
- Amendemen PSAK 73 "Sewa"

Standar baru dan amendemen standar yang telah diterbitkan dan relevan bagi Perusahaan, yang wajib diterapkan untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022 dan 2023 dan belum diterapkan secara dini oleh Perusahaan, adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan"
- Penyesuaian Tahunan PSAK 71 "Instrumen Keuangan"
- Penyesuaian Tahunan PSAK 73 "Sewa"
- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan"
- Amendemen PSAK 16 "Aset Tetap"
- Amendemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"
- Amendemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan"

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

**a. Basis of Preparation of the Consolidated
Financial Statements and Statement of
Compliance** (continued)

The application of the following revised accounting standards which is effective from January 1, 2021 and April 1, 2021, and relevant for Company, did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the current year consolidated financial statements:

- Amendment to PSAK 73, PSAK 71, PSAK 60, and PSAK 55 "Leases, Financial Instrument, Financial Instrument: Disclosures, and Financial Instrument: Recognition and Measurement about IBOR Reform Batch Two"
- Annual Improvement PSAK 1 "Presentation of Financial Statements"
- Amendment to PSAK 73 "Leases"

New standards and amendments issued and relevant for the Company, that are mandatory for the financial year beginning or after January 1, 2022 and 2023 and have not been early adopted by the Company, are as follows:

- Amendment to PSAK 57 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: Onerous Contracts"
- Annual Improvement to PSAK 71 "Financial Instrument"
- Annual Improvement to PSAK 73 "Lease"
- Amendment to PSAK 1 "Presentation of Financial Statements"
- Amendment PSAK 16 "Fixed Assets"
- Amendment to PSAK 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Error"
- Amendment to PSAK 46 "Income Taxes"

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERUSAHAAN (lanjutan)**

**a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan
Konsolidasian dan Pernyataan Kepatuhan
(lanjutan)**

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan sedang mempertimbangkan implikasi dari penerapan standar-standar tersebut, terhadap laporan keuangan konsolidasian Perusahaan.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, telah disusun secara akrual dengan menggunakan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk akun-akun tertentu yang dicatat berdasarkan basis lain seperti yang diungkapkan pada kebijakan akuntansi masing-masing akun terkait.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung, dan dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Ketika Kelompok Usaha menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika Kelompok Usaha mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya maka laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif disajikan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah ("Rp"), yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan Entitas Anak.

b. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 65, "Laporan Keuangan Konsolidasian". Dengan diterbitkannya PSAK tersebut, PSAK No. 4 (Revisi 2009), "Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri" diubah namanya menjadi PSAK No. 4 (Revisi 2013), "Laporan Keuangan Tersendiri", dan juga menggantikan ISAK No. 7, "Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus".

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**a. Basis of Preparation of the Consolidated
Financial Statements and Statement of
Compliance (continued)**

As at the authorization date of these consolidated financial statements, the Company is assessing the implication of the above standards, to the Company's consolidated financial statements.

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, have been prepared on an accrual basis of accounting using the historical cost concept, except for certain accounts that are measured on the other basis described in the related accounting policies.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method, and classified into operating, investing, and financing activities.

When the Group adopts accounting policy retrospectively or restates items in its financial statements or the Group reclassified the items in its financial statements, the statements of financial position at the beginning of comparative period are presented.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Rupiah ("Rp"), which is also the functional currency of the Company and its Subsidiaries.

b. Principles of Consolidation

Effective January 1, 2015, the Group applied PSAK No. 65, "Consolidated Financial Statements." With the issuance of such PSAK, PSAK No. 4 (Revised 2009), "Consolidated Financial Statements and Separate Financial Statements" was renamed to PSAK No. 4 (Revised 2013), "Separate Financial Statements," and ISAK No. 7, "Consolidation - Special Purpose Entities" was superseded.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERUSAHAAN (lanjutan)**

b. Prinsip-prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Penerapan PSAK No. 65 tidak berdampak dalam laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha.

Perusahaan (entitas induk) yang mengendalikan satu atau lebih entitas lain (entitas anak) menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Investor, terlepas dari sifat keterlibatannya dengan entitas (*investee*) menentukan apakah investor merupakan entitas induk dengan menilai apakah investor tersebut mengendalikan *investee*.

Investor mengendalikan *investee* ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*.

Dengan demikian, investor mengendalikan *investee* jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal berikut ini:

- (a) kekuasaan atas *investee*,
- (b) eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan
- (c) kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Investor menilai kembali apakah investor mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga (3) elemen pengendalian.

Konsolidasi atas *investee* dimulai sejak tanggal investor memperoleh pengendalian atas *investee* dan berakhir ketika investor kehilangan pengendalian atas *investee*.

Entitas induk menentukan apakah entitas induk adalah entitas investasi. Entitas investasi adalah entitas yang:

- (a) memperoleh dana dari satu atau lebih investor dengan tujuan memberikan investor tersebut jasa manajemen investasi;

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Principles of Consolidation (continued)

The adoption of PSAK No. 65 has no impact in the Group's consolidated financial statements.

The Company (the parent) that controls one or more other entities (subsidiaries) were present consolidated financial statements. Investors, apart of the nature of its involvement with an entity (*investee*), determine whether the investor is a parent by assessing whether the investor controls the *investee*.

An investor controls an *investee* when it is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the *investee* and has the ability to affect those returns through its power over the *investee*.

Therefore, the investor controls the *investee* if and only if the investor has all of the following:

- (a) power over the *investee*,
- (b) exposure or rights to variable returns from its involvement with the *investee*, and
- (c) the ability to use its power over the *investee* to affect the amount of the investor's returns.

Investors reassess whether the investor controls the *investee* if facts and circumstances indicate that one or more of the three (3) control elements have changed.

Investee is consolidated from the date of the investor obtains control of *investee* and continues to be consolidated until the date that such control ceases.

A parent determines whether the parent entity is an investment entity. An investment entity is an entity that:

- (a) obtains funds from one or more investors for the purpose of providing investment management services;

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERUSAHAAN (lanjutan)**

b. Prinsip-prinsip Konsolidasi (lanjutan)

(b) menyatakan komitmen kepada investor bahwa tujuan bisnisnya adalah untuk menginvestasikan dana yang semata-mata untuk memperoleh imbal hasil dari kenaikan nilai modal, penghasilan investasi, atau keduanya; dan

(c) mengukur dan mengevaluasi kinerja dari seluruh investasinya berdasarkan nilai wajar.

Entitas induk yang adalah entitas investasi mengukur investasi dalam entitas anak pada nilai wajar melalui laba rugi.

Kepentingan non-pengendali mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto yang tidak diatribusikan kepada entitas induk dan disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, dipisahkan dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk.

Seluruh penghasilan komprehensif diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan non-pengendali bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan non-pengendali mempunyai saldo defisit.

Seluruh saldo akun dan transaksi yang material antar entitas yang dikonsolidasi telah dieliminasi.

Jika entitas induk kehilangan pengendalian pada entitas anak, maka entitas induk:

(a) menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak terdahulu dari laporan posisi keuangan konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Principles of Consolidation (continued)

(b) its business purpose is to invest funds solely for returns from capital appreciation, investment income, or both; and

(c) measures and evaluates the performance of its investments on a fair value basis.

A parent that is an investment entity measures its investments in particular subsidiaries at fair value through profit or loss.

Non-controlling interest represents a portion of the profit or loss and net assets not attributable to the parent and is presented separately in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, and within equity in the consolidated statements of financial position, separately from equity attributable to the parent.

Total comprehensive income is attributed to the owners of the parent and to the non-controlling interests even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance.

All significant intercompany transactions and balances have been eliminated.

If a parent loses control of a subsidiary, the parent:

(a) derecognizes the assets (including *goodwill*) and liabilities of the former subsidiary from the consolidated statements of financial position.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERUSAHAAN (lanjutan)**

b. Prinsip-prinsip Konsolidasi (lanjutan)

(b) mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian, dan selanjutnya mencatat sisa investasi tersebut dan setiap jumlah terutang oleh atau kepada entitas anak terdahulu. Nilai wajar tersebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal aset keuangan atau (jika sesuai) biaya perolehan pada saat pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

(c) mengakui keuntungan atau kerugian terkait dengan hilangnya pengendalian yang dapat diatribusikan pada kepentingan pengendali terdahulu.

c. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas dan bank, serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga (3) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

d. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Kelompok Usaha mengungkapkan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Semua transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga ataupun tidak, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Principles of Consolidation (continued)

(b) recognizes any investment retained in the former subsidiary at its fair value at the date when control is lost, and subsequently accounts for it and for any amounts owed by or to the former subsidiary. That fair value shall be regarded as the fair value on initial recognition of a financial asset or, when appropriate, the cost on initial recognition of an investment in an associate or joint venture.

(c) recognizes the gain or loss associated with the loss of control attributable to the former controlling interest.

c. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks, and time deposits with original maturities within three (3) months or less and not pledged as collateral nor restricted in use.

d. Transaction with Related Parties

The Group discloses transactions with related parties as defined in PSAK No. 7 (Revised 2010), "Related Party Disclosures."

The transactions are made based on terms agreed by the parties, whereas such terms may not be the same as those transactions with unrelated parties.

All significant transactions with related parties whether or not conducted under the same terms and conditions as those with third parties, are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERUSAHAAN (lanjutan)**

e. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto (*lower of cost or net realizable value*), dimana biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan atas keadaan persediaan pada akhir tahun.

f. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi sesuai masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

g. Aset Tetap

Kelompok Usaha telah memilih untuk menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya.

Penyusutan dihitung dengan metode garis lurus selama umur manfaat aset. Taksiran masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

	<u>Tahun / Years</u>	
Bangunan	20	<i>Building</i>
Peralatan telekomunikasi	5	<i>Telecommunication equipment</i>
Fasilitas telekomunikasi	5	<i>Telecommunication facilities</i>
Peralatan pengangkutan	5	<i>Transportation equipment</i>
Peralatan dan perabot kantor	4-5	<i>Office equipment and fixtures</i>
Aset sewaan	10	<i>Leased assets</i>

Masa manfaat ekonomis aset tetap dan metode depresiasi ditelaah, dan disesuaikan jika sesuai keadaan, pada setiap akhir periode pelaporan.

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Kelompok Usaha mengestimasi taksiran sisa manfaat ekonomis peralatan dan fasilitas telekomunikasi menjadi lima (5) tahun. Sebelum tahun 2014, masa manfaat aset tersebut adalah 10 (sepuluh) tahun.

Tanah dinyatakan sebesar nilai perolehan dan tidak disusutkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Inventories

Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value (NRV), whereby cost is determined by the weighted-average method. Allowance for inventory obsolescence is provided based on a review of the condition of inventories at the end of the year.

f. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over the periods benefited using the straight-line method.

g. Fixed Asset

The Group has chosen the cost model as the accounting policy for its fixed assets measurement.

Depreciation is calculated on a straight-line basis over the useful lives of the assets. Estimated useful lives of the assets are as follows:

The fixed assets' useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted if appropriate, at each end of the reporting period.

As of December 31, 2015 and 2014, the Group estimated the remaining useful life of telecommunication equipment and facilities to be five (5) years. Prior 2014, the useful lives of those assets were 10 (ten) years.

Land is stated at cost and is not depreciated.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERUSAHAAN (lanjutan)**

g. Aset Tetap (lanjutan)

Aset dalam pengerjaan dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari "Aset Tetap" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya; biaya penggantian atau inspeksi yang signifikan dikapitalisasi pada saat terjadinya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Kelompok Usaha, dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset dimasukkan dalam laba rugi

h. Sewa

Kelompok Usaha telah menerapkan PSAK 73 "Sewa" sejak tanggal 1 Januari 2020.

PSAK 73 menerapkan persyaratan baru atau amandemen sehubungan dengan akuntansi sewa. Standar ini memperkenalkan perubahan signifikan untuk akuntansi *lessee* dengan menghapus perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan, serta mensyaratkan pengakuan aset hak-guna dan pengakuan liabilitas sewa pada saat dimulainya sewa untuk seluruh sewa, kecuali:

- sewa dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan dan tidak terdapat opsi beli;
- sewa atas aset dengan nilai rendah.

Berbeda dengan akuntansi *lessee*, persyaratan untuk akuntansi *lessor* sebagian besar tidak berubah. Dampak dari adopsi PSAK 73 pada laporan keuangan konsolidasian dijelaskan di bawah ini.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

g. Fixed Asset (continued)

Assets under construction are stated at cost and presented as part of "Fixed Assets" in the consolidated statements of financial position. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate fixed assets account when construction is completed and the assets are ready for their intended use.

The cost of repairs and maintenance is charged to profit or loss as incurred; replacement or major inspection costs are capitalized when incurred if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be reliably measured. An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset is included in profit or loss in the period the asset is derecognized.

h. Lease

The Group has applied PSAK 73 "Lease" since 1 January, 2020.

PSAK 73 introduces new or amended requirements with respect to lease accounting. This standard introduces significant changes to lessee accounting by removing the distinction between operating and finance lease, and requiring the recognition of a right-of-use asset and a lease liability at commencement for all leases, except for:

- Leases with a term of less or equal to 12 months and there is no call option;
- Leases of low value assets.

In contrast to lessee accounting, the requirements for lessor accounting have remained largely unchanged. The impact of the adoption of PSAK No. 73 on the consolidated financial statements is described below.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERUSAHAAN (lanjutan)**

h. Sewa (lanjutan)

Tanggal penerapan awal PSAK 73 untuk Kelompok Usaha adalah 1 Januari 2020. Kelompok Usaha telah menerapkan PSAK 73 menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi dengan mengakui dampak kumulatif dari awal penerapan PSAK 73. Dengan demikian, informasi komparatif yang disajikan untuk tahun 31 Desember 2020 tidak disajikan kembali sebagaimana dilaporkan sebelumnya, pada PSAK 30 dan interpretasi terkait.

a. Dampak definisi baru dari sewa

Perubahan utama dari definisi sewa berkaitan dengan konsep pengendalian. PSAK 73 menentukan apakah kontrak mengandung sewa atas dasar jika terdapat aset identifikasian dan *lessee* memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset selama suatu jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Hal tersebut merupakan perbedaan penentuan kontrak merupakan, atau mengandung sewa berdasarkan PSAK 30 yaitu dengan konsep risiko dan manfaat.

b. Dampak pada akuntansi *lessee*

Kelompok Usaha menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Kelompok Usaha mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

Kelompok Usaha mengakui liabilitas sewa sebesar jumlah pembayaran sewa yang masih harus dibayar hingga akhir masa sewa yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

h. Lease (continued)

The date of initial application of PSAK 73 for the Group is January 1, 2020. The Group has applied PSAK 73 using the modified retrospective approach by recognizing the cumulative impact of the initial application of PSAK 73. Therefore, the comparative information presented for December 31, 2020 has not been restated as previously reported, under PSAK 30 and the related interpretations.

a. Impact of the new definition of a lease

The major change in definition of a lease mainly relates to the concept of control. PSAK 73 determines whether a contract contains a lease on the basis of whether identified asset and lessee has the right to control the use of an asset for a period of time in exchange for consideration. This is in contrast to the focus or contain lease based on 'risks and rewards' concept in PSAK 30.

b. Impact on lessee accounting

The Group applies a single recognition and measurement approach to all leases, except for short-term leases and lowvalue asset leases. The Group recognized a lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets that represent the right to use the underlying asset.

The Group recognized lease liabilities at the amount of lease payments accrued to the end of the lease term which were discounted using the incremental borrowing rate.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERUSAHAAN (lanjutan)**

h. Sewa (lanjutan)

Sedangkan aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dibayarkan, biaya pemulihan dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai sewa, dikurangi insentif sewa yang diterima. Aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dengan estimasi masa manfaat aset.

Jika kepemilikan aset sewa dialihkan ke Kelompok Usaha pada akhir masa sewa atau pembayaran sewa mencerminkan pelaksanaan opsi pembelian, penyusutan dihitung menggunakan estimasi masa manfaat ekonomis aset. Aset hak-guna diuji penurunan nilainya sesuai dengan PSAK 48, "Penurunan Nilai Aset".

Sewa jangka pendek (dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan) dan sewa aset bernilai rendah, serta elemen-elemen sewa tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak menerapkan prinsip-prinsip pengakuan yang ditentukan oleh PSAK 73 akan diperlakukan sama dengan sewa operasi pada PSAK 30. Kelompok Usaha akan mengakui pembayaran sewa tersebut dengan dasar garis lurus selama masa sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Beban ini dicatat pada beban umum dan administrasi dalam laporan laba rugi.

Penerapan pencatatan PSAK 73 berlaku untuk seluruh sewa (kecuali sebagaimana yang disebutkan sebelumnya), yaitu sebagai berikut:

- (a) Menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari aset tetap dan liabilitas sewa disajikan sebagai bagian dari liabilitas lain-lain dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan;
- (b) Mencatat penyusutan aset hak-guna dan bunga atas liabilitas sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian; dan

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

h. Lease (continued)

While, the right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs paid, restoration costs and lease payments on or before the start date of the lease, less lease incentives received. Right-of-use are depreciated using the straight-line method over the shorter period between the lease term and the estimated useful life of the asset.

If the ownership of lease asset is transferred to the Group at the end of the lease term or the lease payments reflect the exercise of the purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the assets. Right-of-use assets are tested for impairment in accordance with PSAK 48, "Impairment of Assets".

Short-term leases (with term of less or equal to 12 months) and leases of low-value assets, and elements of those leases, partially or entirely not applying the recognition principles stipulated by PSAK 73 will be treated the same as operating leases in PSAK 30. The Group will recognized these lease payments on a straight-line basis during the lease period in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. This expense is recorded under general and administrative expenses in profit or loss.

The recording of implementation of PSAK 73 is applied for all leases (except as stated earlier), as follows:

- (a) Presents right-of-use assets as part of fixed assets and lease liabilities presented as part of other liabilities in the consolidated statement of financial position which are measured at the present value of the future lease payments;*
- (b) Records depreciation of right-of-use assets and interest on lease liabilities in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income; and*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERUSAHAAN (lanjutan)**

h. Sewa (lanjutan)

- (c) Memisahkan jumlah total pembayaran ke bagian pokok (disajikan dalam kegiatan pendanaan) dan bunga (disajikan dalam kegiatan operasional) dalam laporan arus kas konsolidasian.

i. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 48 (Revisi 2014), "Penurunan Nilai Aset".

PSAK No. 48 (Revisi 2014) menitikberatkan pada pengungkapan atas nilai terpulihkan untuk aset non-keuangan. Pernyataan yang direvisi mensyaratkan pengungkapan informasi tambahan jika jumlah terpulihkan merupakan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan.

Pada setiap tanggal pelaporan, Kelompok Usaha menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Kelompok Usaha mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan suatu aset atau unit penghasil kas adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakainya. Jika jumlah terpulihkan suatu aset lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset harus diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan.

Pemulihan rugi penurunan nilai untuk aset non-keuangan selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang disajikan pada jumlah revaluasi sesuai dengan PSAK lain. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

h. Lease (continued)

- (c) Separates the total amount of cash paid into principal (within financing activities) and interest (within operating activities) in the consolidated statement of cash flows.

i. Impairment of Non-Financial Assets

Effective January 1, 2015, the Group applied PSAK No. 48 (Revised 2014), "Impairment of Assets".

PSAK No. 48 (Revised 2014) focuses on the recoverable amount disclosures for non-financial assets. The revised statement requires additional disclosure of information if the recoverable amount represents the fair value less costs of disposal.

The Group evaluates at each reporting date whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Group estimates the recoverable amount of the asset. The recoverable amount of an asset or a cash-generating unit is the higher of its fair value less costs of disposal and its value in use. Whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

Reversal on impairment loss for non-financial assets other than *goodwill* would be recognized if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal on impairment losses will be immediately recognized on profit or loss, except for assets that presented using the revaluation model in accordance with other PSAK. Impairment losses relating to *goodwill* would not be reversed.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERUSAHAAN (lanjutan)**

j. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman, baik yang secara langsung maupun tidak langsung digunakan untuk mendanai suatu proses pembangunan aset tertentu yang memenuhi syarat ("aset kualifikasian"), dikapitalisasi hingga saat proses pembangunannya selesai. Untuk pinjaman yang secara khusus digunakan untuk perolehan aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi dengan penghasilan investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut.

Untuk pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset kualifikasian, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi tertentu terhadap pengeluaran untuk aset kualifikasian tersebut.

k. Jaminan

Jaminan merupakan uang jaminan yang dibayarkan untuk sewa lokasi untuk perangkat, sewa gedung kantor dan apartemen sesuai dengan perjanjian dan akan dikembalikan pada saat berakhirnya periode sewa.

l. Segmen Operasi

Pembuat keputusan operasional adalah Direksi. Direksi melakukan penelaahan terhadap pelaporan internal Perusahaan untuk menilai kinerja dan mengalokasikan sumber daya. Manajemen menentukan operasi segmen berdasarkan laporan ini. Direksi mempertimbangkan bisnis dari sudut pandang imbal hasil dari modal yang diinvestasikan.

Total aset dikelola secara tersentralisasi dan tidak dialokasikan. Perusahaan mengoperasikan dan mengelola bisnis dalam satu segmen yang menyediakan jaringan telekomunikasi kepada para pelanggan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam (Catatan 18 dan 30).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

j. Borrowing Costs

Borrowing costs, either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when construction is complete. For borrowings that are specific to the acquisition of a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined as the actual borrowing costs incurred during the period, less any income earned from the temporary investment of such borrowings.

For borrowings that are not specific to the acquisition of a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined by applying a capitalization rate to the amount expensed on the qualifying asset.

k. Security Deposits

Security deposits represent guarantee for site rental for equipment placement, office building rent and apartment rent in accordance with the agreements, which will be returned at the end of the rental period.

l. Operating Segment

The chief operating decision-maker is the Board of Directors. The Board of Directors reviews the Company's internal reporting in order to assess performance and allocate resources. Management has determined the operating segment based on these reports. The Board of Directors considers the business from the return of invested capital perspective.

Total assets are managed on a central basis and are not allocated. The Company operates and manages the business in a single segment that telecommunications network services to its customers. Further details are disclosed in (Notes 18 and 30).

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERUSAHAAN (lanjutan)**

m. Saham Beredar Yang Diperoleh Kembali

Saham beredar yang diperoleh kembali (*treasury stock*) untuk dikeluarkan lagi di kemudian hari dicatat dengan metode nilai nominal atau *par value method*. Berdasarkan metode ini, saham beredar yang diperoleh kembali dicatat sebesar nilai nominalnya dan disajikan sebagai pengurang akun modal saham. Apabila saham beredar yang diperoleh kembali tersebut semula dikeluarkan dengan harga di atas nilai nominal, akun tambahan modal disetor akan disesuaikan. Selisih lebih harga perolehan dari harga penerbitannya akan dikoreksi ke saldo laba.

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Kelompok Usaha dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat, dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN").

Beban diakui pada saat terjadinya.

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

PSAK 72 menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk menentukan bagaimana, kapan, dan berapa banyak pendapatan yang harus diakui. Standar ini menyediakan model lima langkah tunggal untuk penentuan dan pengakuan pendapatan untuk diterapkan pada semua kontrak dengan pelanggan. Standar ini juga memberikan panduan spesifik yang mensyaratkan jenis biaya tertentu untuk memperoleh dan/atau memenuhi kontrak yang akan dikapitalisasi dan diamortisasi secara sistematis yang konsisten dengan pengalihan kepada pelanggan barang atau jasa yang terkait dengan biaya yang dikapitalisasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

m. Treasury Stock

Re-acquisition of capital stock to be held as treasury stocks for future reissuance is accounted for under the par value method. Under this method, treasury stock is presented at par value as a reduction from the capital stock account. If the treasury stock had been originally issued at a price above par value, the related additional paid-in capital account is adjusted. Any excess of the reacquisition cost over the original issuance price is treated as an adjustment to retained earnings.

n. Revenue and Expense Recognition

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates, and Value Added Taxes ("VAT").

Expenses are recognized when they are

Revenue from contracts with customers

PSAK 72 establishes a comprehensive framework for determining how, when and how much income should be recognized. This standard provides for a single five-step model for the determination and recognition of revenue to apply to all contracts with customers. This standard also provides specific guidance requiring certain types of costs to acquire and/or fulfill contracts to be capitalized and amortized in a systematic manner consistent with transfers to customers of goods or services related to the costs being capitalized.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERUSAHAAN** (lanjutan)

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban
(lanjutan)

Kelompok Usaha mempertimbangkan apakah ada janji lain dalam kontrak yang merupakan kewajiban kinerja terpisah yang perlu dialokasikan sebagian dari harga transaksi (misalnya, jaminan, poin loyalitas pelanggan). Dalam menentukan harga transaksi untuk penjualan, Kelompok Usaha mempertimbangkan pengaruh pertimbangan variabel, keberadaan komponen pembiayaan yang signifikan, imbalan non tunai, dan imbalan yang harus dibayarkan kepada pelanggan (jika ada).

(i) **Konsiderasi variabel**

Jika imbalan dalam kontrak mencakup jumlah variabel, Kelompok Usaha mengestimasi jumlah imbalan yang menjadi haknya sebagai imbalan atas pengalihan barang kepada pelanggan.

Pertimbangan variabel diestimasi pada awal kontrak dan dibatasi hingga kemungkinan besar bahwa pembalikan pendapatan yang signifikan dalam jumlah pendapatan kumulatif yang diakui tidak akan terjadi ketika ketidakpastian terkait dengan pertimbangan variabel kemudian diselesaikan. Beberapa kontrak untuk penjualan memberi pelanggan hak untuk mengembalikan barang dalam jangka waktu tertentu.

Kelompok Usaha juga memberikan potongan volume retrospektif kepada pelanggan tertentu setelah jumlah yang dibeli selama periode tersebut melebihi ambang batas yang ditentukan dalam kontrak. Hak pengembalian dan rabat volume menimbulkan pertimbangan variabel.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

n. Revenue and Expense Recognition
(continued)

The Group considers whether there are other promises in the contract that are separate performance obligations to which a portion of the transaction price needs to be allocated (e.g., warranties, customer loyalty points). In determining the transaction price for the sales, the Group considers the effects of variable consideration, existence of a significant financing component, noncash consideration, and consideration payable to the customer (if any).

(i) **Variable consideration**

If the consideration in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it will be entitled in exchange for transferring the goods to the customer.

The variable consideration is estimated at contract inception and constrained until it is highly probable that a significant revenue reversal in the amount of cumulative revenue recognised will not occur when the associated uncertainty with the variable consideration is subsequently resolved. Some contracts for the sales provide customers with a right to return the goods within a specified period.

The Group also provides retrospective volume rebates to certain customers once the quantity purchased during the period exceeds the threshold specified in the contract. The rights of return and volume rebates give rise to variable consideration.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERUSAHAAN (lanjutan)**

**n. Pengakuan Pendapatan dan Beban
(lanjutan)**

Volume potongan harga

Kelompok Usaha menerapkan metode jumlah yang paling mungkin atau metode nilai yang diharapkan untuk mengestimasi imbalan variabel dalam kontrak. Metode terpilih yang paling baik memprediksi jumlah pertimbangan variabel terutama didorong oleh jumlah ambang volume yang terkandung dalam kontrak. Jumlah yang paling mungkin digunakan untuk kontrak-kontrak dengan batasan volume tunggal, sedangkan metode nilai yang diharapkan digunakan untuk kontrak-kontrak dengan lebih dari satu batasan volume.

Kelompok Usaha kemudian menerapkan persyaratan tentang estimasi batasan atas pertimbangan variabel untuk menentukan jumlah pertimbangan variabel yang dapat dimasukkan dalam harga transaksi dan diakui sebagai pendapatan. Kewajiban pengembalian dana diakui untuk potongan harga di masa depan yang diharapkan (yaitu, jumlah yang tidak termasuk dalam harga transaksi).

(ii) Komponen biaya signifikan

Terdapat komponen pembiayaan yang signifikan untuk kontrak-kontrak ini mengingat lamanya waktu antara pembayaran pelanggan dan pemindahan peralatan, serta tingkat bunga yang berlaku di pasar. Dengan demikian, harga transaksi untuk kontrak-kontrak ini didiskontokan, menggunakan tingkat suku bunga yang tersirat dalam kontrak (yaitu, tingkat bunga yang mendiskontokan harga jual tunai dari peralatan tersebut ke jumlah yang dibayarkan di muka). Tarif ini sepadan dengan tarif yang akan tercermin dalam transaksi pembiayaan terpisah antara Kelompok Usaha dan pelanggan pada awal kontrak.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**n. Revenue and Expense Recognition
(continued)**

Volume of rebates

The Group applies either the most likely amount method or the expected value method to estimate the variable consideration in the contract. The selected method that best predicts the amount of variable consideration is primarily driven by the number of volume thresholds contained in the contract. The most likely amount is used for those contracts with a single volume threshold, while the expected value method is used for those with more than one volume threshold.

The Group then applies the requirements on constraining estimates of variable consideration in order to determine the amount of variable consideration that can be included in the transaction price and recognised as revenue. A refund liability is recognised for the expected future rebates (i.e., the amount not included in the transaction price).

(ii) Significant financing component

There is a significant financing component for these contracts considering the length of time between the customers' payment and the transfer of the equipment, as well as the prevailing interest rate in the market. As such, the transaction price for these contracts is discounted, using the interest rate implicit in the contract (i.e., the interest rate that discounts the cash selling price of the equipment to the amount paid in advance). This rate is commensurate with the rate that would be reflected in a separate financing transaction between the Group and the customer at contract inception.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERUSAHAAN (lanjutan)**

**n. Pengakuan Pendapatan dan Beban
(lanjutan)**

Kelompok Usaha menerapkan cara praktis untuk uang muka jangka pendek yang diterima dari pelanggan. Artinya, jumlah imbalan yang dijanjikan tidak disesuaikan dengan pengaruh komponen pembiayaan yang signifikan jika jangka waktu antara pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan dan pembayarannya satu tahun atau kurang.

Pendapatan Jasa Telekomunikasi

Untuk pelanggan pasca bayar, pendapatan dari jasa penyambungan diakui pada saat aktivasi oleh pelanggan, sedangkan pendapatan pulsa serta pendapatan bulanan diakui pada saat terjadinya.

o. Imbalan Kerja

Kelompok Usaha menentukan liabilitas imbalan kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.11/2020 ("Undang-Undang") tanggal 2 November 2020. PSAK No. 24 (Revisi 2013; Penyesuaian 2018) mensyaratkan entitas menggunakan metode "Projected Unit Credit" untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini terkait, dan biaya jasa lalu.

Ketika entitas memiliki surplus dalam program imbalan pasti, maka entitas mengukur aset imbalan pasti pada jumlah yang lebih rendah antara surplus program imbalan pasti dan batas atas aset yang ditentukan dengan menggunakan tingkat diskonto.

Entitas mengakui komponen biaya imbalan pasti, kecuali SAK mensyaratkan atau mengizinkan biaya tersebut sebagai biaya perolehan aset, sebagai berikut:

- (a) biaya jasa dalam laba rugi;
- (b) bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto dalam laba rugi; dan
- (c) pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto dalam penghasilan komprehensif lain.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**n. Revenue and Expense Recognition
(continued)**

The Group applies the practical expedient for short-term advances received from customers. That is, the promised amount of consideration is not adjusted for the effects of a significant financing component if the period between the transfer of the promised good or service and the payment is one year or less.

Telecommunication Services

For post-paid subscribers, revenues from connection services are recognized as income at the time the connections take place, while usage airtime and monthly subscription charges are recognized when earned.

o. Employee Benefits

The Group determines its employee benefits liabilities under the Labor Law No. 11/2020 dated November 2, 2020 ("the Law"). PSAK No. 24 (Revised 2013; Adjustment 2018) requires the present value of the defined benefit obligation, the related current service cost, and past service cost to be determined using the "Projected Unit Credit" method.

When an entity has a surplus in a defined benefit plan, an entity measures the defined benefit asset at the lower amount between the surplus of defined benefit plan and the upper limit on assets that determined using a discount rate.

An entity recognizes the components of defined benefit cost, except SAKs require or permit such costs as the acquisition cost of the asset, as follows:

- (a) service cost in profit or loss;*
- (b) net interest on net liability (asset) of defined benefits in profit or loss; and*
- (c) remeasurement of the net liability (asset) of defined benefit in other comprehensive income.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERUSAHAAN** (lanjutan)

o. Imbalan Kerja (lanjutan)

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya. Akan tetapi, entitas dapat mengalihkan jumlah yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tersebut pada pos lain dalam ekuitas.

Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto terdiri atas:

- (a) keuntungan dan kerugian aktuarial;
- (b) imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto; dan
- (c) setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto.

Perusahaan mengakui biaya jasa lalu sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi dan ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi terkait atau pesangon.

Kelompok Usaha mengakui keuntungan atau kerugian atas penyelesaian program imbalan pasti pada saat penyelesaian terjadi. Kurtailmen terjadi ketika entitas mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program; atau mengubah ketentuan program imbalan pasti sehingga unsur yang signifikan dari jasa masa depan karyawan saat ini tidak lagi memenuhi syarat atas imbalan, atau akan memenuhi syarat hanya untuk imbalan yang dikurangi. Kurtailmen dapat terjadi karena suatu peristiwa yang berdiri sendiri, seperti penutupan pabrik, penghentian operasi, atau terminasi atau penghentian program.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

o. Employee Benefits (continued)

Remeasurement on net liability (asset) of defined benefits that is recognized in other comprehensive income is not reclassified to profit or loss in subsequent periods. However, the entity may transfer the amounts recognized as other comprehensive income in another account in equity.

Remeasurement the net liability (asset) of defined benefits consists of:

- (a) actuarial gains and losses;*
- (b) return on plan assets, excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability (asset); and*
- (c) any change in the effect of the asset ceiling, excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability (asset).*

The Company recognizes past service cost as an expense in an earlier of when the amendments or curtailment of program occurs and when the entity recognizes related restructuring costs or severances.

The Group recognizes gains or losses on the settlement of defined benefit plan when it occurs. A curtailment occurs when an entity make a material reduction in the number of employees covered by a plan; or amending the terms of a defined benefit plan so a significant element of future service by current employees will no longer qualify for benefits, or will qualify only for reduced benefits. A curtailment may arise from an isolated event, such as the closing of a plant, discontinuance of an operation or termination or suspension of a plan.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERUSAHAAN (lanjutan)**

o. Imbalan Kerja (lanjutan)

Sebelum menentukan biaya jasa lalu, atau keuntungan dan kerugian atas penyelesaian, Kelompok Usaha mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto menggunakan nilai wajar kini dari aset program dan asumsi aktuarial kini (termasuk suku bunga pasar dan harga pasar kini yang lain) yang mencerminkan imbalan yang ditawarkan dalam program sebelum amandemen, kurtailmen, atau penyelesaian program.

p. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional dengan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan ke dalam mata uang fungsional menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal terakhir transaksi perbankan pada periode tersebut. Laba atau rugi yang timbul dari penyesuaian kurs maupun penyelesaian aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing tersebut dikreditkan atau dibebankan sebagai laba rugi periode berjalan.

Pembukuan Entitas Anak tertentu diselenggarakan dalam mata uang asing. Untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas Entitas Anak pada tanggal pelaporan dijabarkan ke dalam Rupiah, yang merupakan mata uang pelaporan, dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut, sedangkan penghasilan dan beban dijabarkan dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Selisih kurs yang terjadi diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada akun "Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan".

Kurs penutup yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan adalah sebagai berikut:

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Employee Benefits (continued)

Before determining the past service cost, gains or losses on the settlement, the Group shall remeasure the net liability (asset) of defined benefits using current fair value of plan assets and current actuarial assumptions (including current market interest rates and other current market prices) which reflects the rewards offered in the program prior to amendment, curtailment or settlement program.

p. Foreign Currency Transactions and Balances

Transactions in foreign currencies are translated into functional currency at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the end of reporting period, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to functional currency to reflect the middle exchange rate published by Bank Indonesia at the last banking transaction date of the period. Gains or losses resulted from such adjustment or settlement of each monetary asset and liability denominated in foreign currencies are credited or charged as current period profit or loss.

The books of accounts of certain Subsidiaries are maintained in foreign currencies. For consolidation purposes, assets and liabilities of the Subsidiaries at the reporting date are translated into Rupiah, which is the presentation currency, using the exchange rates at that date, while income and expenses are translated at the transaction rates of exchange. Resulting translation adjustments are recognized in other comprehensive income under "Exchange Differences due to Financial Statements Translation" account.

The closing exchange rates used as of December 31, 2022 and 2021 were as follows:

2. IKHTISAR PERUSAHAAN (lanjutan)	KEBIJAKAN AKUNTANSI	31 Desember / December 31, 2022	2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)	31 Desember / December 31, 2021	
p. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing (lanjutan)		15.731	p. Foreign Currency Transactions and Balances (continued)	14.269	US Dollar
		11.659		10.534	Singapore Dollar
q. Pajak Penghasilan			q. Income Taxes		
Efektif tanggal 1 Januari 2015, Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan". Penerapan PSAK revisi ini tidak berdampak dalam laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha.			<i>Effective January 1, 2015, the Group applied PSAK No. 46 (Revised 2014), "Income Taxes." The adoption of this revised PSAK has no impact in the Group's consolidated financial statements.</i>		
Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak periode berjalan.			<i>Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the period.</i>		
Pajak penghasilan dalam laba rugi periode berjalan terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Pajak penghasilan diakui dalam laba rugi, kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi yang diakui langsung dalam ekuitas atau penghasilan komprehensif lain, dalam hal ini diakui dalam ekuitas atau penghasilan komprehensif lain.			<i>Income tax in profit or loss for the period comprises current and deferred tax. Income tax is recognized in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized directly in equity or other comprehensive income in which case it is recognized in equity or other comprehensive income.</i>		
Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dilakukan saling hapus jika, dan hanya jika, entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus jumlah yang diakui; dan memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.			<i>Current tax assets and current tax liabilities are offset if, and only if, the entity has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.</i>		
Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan, diakui sejauh besar kemungkinan realisasi atas manfaat pajak tersebut.			<i>Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date. Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that sufficient future taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized. Future tax benefits, such as the carry-forward of unused tax losses, are also recognized to the extent that realization of such benefits is probable.</i>		

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERUSAHAAN (lanjutan)**

q. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada periode ketika aset direalisasi atau ketika liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada akhir periode pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan dilakukan saling hapus jika, dan hanya jika, entitas memiliki hak secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, dan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan atas entitas kena pajak, yang sama atau entitas kena pajak berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan yang mana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan diselesaikan atau dipulihkan.

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima dan/atau, jika Kelompok Usaha mengajukan keberatan dan/atau banding, pada saat keputusan atas keberatan dan/atau banding telah ditetapkan.

r. Laba atau Rugi per Saham

Laba atau rugi per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk, dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

q. Income Taxes (continued)

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the end of reporting period.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if, and only if, the entity has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity, or different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received and/or, if objected to and/or appealed against by the Group, when the result of the objection and/or appeal is determined.

r. Earnings or Losses per Share

Basic earnings or losses per share are calculated by dividing profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity, by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERUSAHAAN (lanjutan)**

s. Provisi dan Kontinjensi

Provisi diakui jika Kelompok Usaha memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

Aset dan liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Liabilitas kontinjensi diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian, kecuali arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Aset kontinjensi diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian, jika terdapat kemungkinan besar arus masuk manfaat ekonomis akan diperoleh.

t. Instrumen Keuangan

Kelompok Usaha mengklasifikasi instrumen keuangan dalam bentuk aset dan liabilitas keuangan.

(i) Klasifikasi

Kelompok Usaha mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

s. Provisions and Contingencies

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each end of reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

Contingent assets and liabilities are not recognized in the consolidated financial statements. Contingent liabilities are disclosed in the consolidated financial statements, unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are disclosed in the consolidated financial statements where an inflow of economic benefits is probable.

t. Financial Instruments

Group classifies financial instruments to financial assets and liabilities.

(i) Classification

The Group classifies its financial assets according to the following categories at initial recognition:

- *Financial assets measured at fair value through profit or loss;*
- *Financial assets measured at fair value through other comprehensive income;*
- *Financial assets measured at amortized cost.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERUSAHAAN (lanjutan)**

t. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Penilaian model bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

t. Financial Instruments (continued)

Financial assets are measured at amortized cost if they meet the following conditions:

- *financial assets are managed in a business model that aims to have financial assets in order to obtain contractual cash flow; and*
- *the contractual terms of the financial asset provide rights on a certain date for cash flow obtained solely from payment of principal and interest (SPPI) on the principal amount owed.*

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if they meet the following conditions:

- *Financial assets are managed in a business model that aims to obtain contractual cash flow and sell financial assets; and*
- *The contractual requirements of the financial assets meet the SPPI criteria.*

Other financial assets that do not meet the requirements to be classified as financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income, are classified as measured at fair value through profit or loss.

Valuation of business models

The business model is determined at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve certain business objectives.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERUSAHAAN (lanjutan)**

t. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Kelompok Usaha;
- Apakah risiko yang mempengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga margin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Kelompok Usaha mempertimbangkan:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Financial Instruments (continued)

The evaluation of the business model is carried out by considering, but not limited to, the following:

- *How the performance of the business model and financial assets held in the business model are evaluated and reported to the Group's key management personnel;*
- *What risks affect the performance of the business model (including financial assets held in the business model) and specifically how the financial assets are managed; and*
- *How to evaluate the performance of managers of financial assets (for example, whether performance appraisals are based on the fair value of the assets being managed or the contractual cash flows obtained).*

Evaluation of contractual cash flows obtained solely from payment of principal and interest

For the purpose of this valuation, principal is defined as the fair value of financial assets at initial recognition. Interest is defined as compensation for the time value of money and credit risk in relation to the principal amount owed over a certain period of time and also the risk and standard borrowing costs, as well as profit margins.

An assessment of contractual cash flows obtained solely from principal and interest payments is made by considering contractual terms, including whether financial assets contain contractual terms that can change the timing or amount of contractual cash flows. In assessing, the Group considers:

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERUSAHAAN (lanjutan)**

t. Instrumen Keuangan (lanjutan)

- Peristiwa kontinjensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat mengubah nilai waktu dari elemen uang.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan kedalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lain.
Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.

(ii) Pengakuan awal

- a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Kelompok Usaha berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

t. Financial Instruments (continued)

- *Contingency events that will change the timing or amount of contractual cash flow;*
- *Leverage feature;*
- *Terms of advance payment and contractual extension;*
- *Requirements regarding limited claims for cash flows from specific assets; and*
- *Features that can change the time value of the money element.*

Financial liabilities are classified into the following categories at initial recognition:

- *Financial liabilities at fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. those designated as such upon initial recognition and those classified as held for trading;*
- *Other financial liabilities.*
Other financial liabilities pertain to financial liabilities that are not held for trading nor designated as at fair value through profit or loss upon recognition of the liability.

(ii) Initial recognition

- a. *Purchase or sale of financial assets that requires delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market (regular purchases) is recognized on the trade date, i.e., the date that the Group commits to purchase or sell the assets.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERUSAHAAN (lanjutan)**

t. Instrumen Keuangan (lanjutan)

- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Kelompok Usaha, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

(iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

t. Financial Instruments (continued)

- b. *Financial assets and financial liabilities are initially recognized at fair value. For those financial assets or financial liabilities not classified as fair value through profit or loss, the fair value is added/deducted with directly attributable transaction costs to the issuance of financial assets or liabilities.*

The Group, upon initial recognition, may designate certain financial assets and liabilities, at fair value through profit or loss (fair value option). The fair value option is only applied when the following conditions are met:

- *the application of the fair value option reduces or eliminates an accounting mismatch that would otherwise arise; or*
- *the financial assets and liabilities are part of a portfolio of financial instruments, the risks of which are managed and reported to key management on a fair value basis; or*
- *the financial assets and liabilities consist of a host contract and an embedded derivative that must be bifurcated, but are unable to measure the embedded derivative separately.*

(iii) *Subsequent measurement*

Financial assets at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss are measured at fair value.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERUSAHAAN (lanjutan)**

t. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan kelompok biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Penghentian pengakuan

- a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:
- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
 - Kelompok Usaha telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dibawah kesepakatan pelepasan, dan antara (a) Kelompok Usaha telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Kelompok Usaha tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset tersebut.

Ketika Kelompok Usaha telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Kelompok Usaha yang berkelanjutan atas aset tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

t. Financial Instruments (continued)

Financial assets classified as amortized cost and other financial liabilities measured at amortized cost using the effective interest rate method.

(iv) *Derecognition*

- a. *Financial assets are derecognized when:*
- *the contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; or*
 - *the Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flow in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.*

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a passthrough arrangement and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Group's continuing involvement in the asset.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERUSAHAAN (lanjutan)**

t. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Kelompok Usaha dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

- b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

(v) Pengakuan pendapatan dan beban

- a. Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

t. Financial Instruments (continued)

Loans are written off when there is no realistic prospect of collection in the near future or the normal relationship between the Group and the borrowers have ceased to exist. When a loan is deemed uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment losses.

- b. Financial liabilities are derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or has expired.*

Where an existing financial liability is replaced by another liability from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

(v) Income and expense recognition

- a. Interest income and expense on financial assets measured at fair value through other comprehensive income as well as financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost are recognized in the statement of profit or loss using the effective interest method.*

The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for allowance for impairment.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERUSAHAAN (lanjutan)**

t. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

Untuk aset keuangan yang memburuk setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto dari aset keuangan tersebut.

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

- b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang dikasifikasikan dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui secara langsung dalam laporan laba rugi komprehensif (merupakan bagian dari ekuitas) sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar untuk instrumen utang.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

t. Financial Instruments (continued)

In calculating interest income and expenses, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of an asset (when the asset is not a deteriorated financial asset) or to the amortized cost of a liability.

For financial assets that deteriorated after initial recognition, interest income is calculated by applying an effective interest rate to the amortized cost of the financial assets. If the asset no longer deteriorates, the calculation of interest income will be calculated by applying an effective interest rate to the gross carrying amount of the financial asset.

For financial assets that have deteriorated at initial recognition, interest income is calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial assets. If the asset no longer deteriorates, the calculation of interest income will still be calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset.

- b. Gains and losses arising from changes in the fair value of fair value through other comprehensive income financial assets other than foreign exchange gains or losses on debt instrument are recognized directly in other comprehensive income (as part of equity), until the financial asset is derecognized or impaired, except gain or loss arising from changes in exchanges rate for debt instrument.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERUSAHAAN (lanjutan)**

t. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

(vi) Reklasifikasi aset keuangan

Kelompok Usaha mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada wajar.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

t. Financial Instruments (continued)

When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gains or losses previously recognized in equity are recognized in profit or loss.

(vi) Reclassification of financial assets

The Group reclassifies financial assets if and only if, the business model for managing financial assets changes.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value through profit or loss are recorded at fair value. The difference between the recorded value and fair value is recognized in profit or loss on the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value classifications through other comprehensive are recorded at their fair values.

Reclassification of financial assets from fair value classification through other comprehensive income to fair value classification through profit or loss is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reclassified to profit or loss.

Reclassification of financial assets from fair value classifications through other comprehensive income to the amortized cost classification is recorded at carrying value. Unrealized gains or losses is removed from equity and is adjusted against the fair value.

Reclassifications on financial assets from fair value classification through profit or loss to fair value classification through other comprehensive income are recorded at fair value.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERUSAHAAN (lanjutan)**

t. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada wajar.

(vii) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika Kelompok Usaha memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

(vii) Pengukuran biaya amortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

t. Financial Instruments (continued)

Reclassification of financial assets from fair value classification through profit or loss to amortized cost classification is recorded at fair value.

(vii Offsetting)

Financial assets and liabilities are set off and the net amount is presented in the consolidated statement of financial position when, and only when, the Group has a legal right to set off the amounts and intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the company or the counterparty.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the accounting standards.

(vii Amortized cost measurement)

The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of and difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERUSAHAAN (lanjutan)**

t. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(ix) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Jika tersedia, Kelompok Usaha mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar. Nilai wajar dapat diperoleh dari *Interdealer Market Association (IDMA)* atau harga pasar atau harga yang diberikan oleh *broker (quoted price)* dari Bloomberg atau Reuters pada tanggal pengukuran.

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Kelompok Usaha menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian.

(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

- Kelompok Usaha mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- Kelompok Usaha mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

t. Financial Instruments (continued)

(ix) Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at measurement date.

When available, the Group measures the fair value of an instrument using quoted prices in an active market for that instrument. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's length basis. The fair value can be obtained from IDMA's (Interdealer Market Association) quoted market prices or broker's quoted price from Bloomberg or Reuters on the measurement date.

If a market for a financial instrument is not active, the Group establishes fair value using a valuation technique.

(x) Allowance for impairment losses on financial assets

- *The Group recognizes the allowance for expected credit losses on financial instruments that are not measured at fair value through profit or loss.*
- *There is no allowance for expected credit losses on investment in equity instruments.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERUSAHAAN** (lanjutan)

t. Instrumen Keuangan (lanjutan)

- Kelompok Usaha mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan;
- instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan
- instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan.

Kelompok Usaha menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi *investment grade* yang dipahami secara global.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran Kerugian Kredit

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Kelompok Usaha sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Kelompok Usaha);

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

t. Financial Instruments (continued)

- The Group measure the allowance for losses for the lifetime of an expected credit losses, except for the following, which are measured according to 12 months expected credit losses;
- debt instruments that have low credit risk at the reporting date; and
- other financial instruments for which credit risk has not increased significantly since initial recognition.

The Group considers debt instruments to have low credit risk when the credit risk rating is at par with the globally understood definition of investment grade.

The 12-month expected credit loss is part of the expected credit loss throughout its lifetime that represents an expected credit loss arising from a default on financial instruments that might occur 12 months after reporting date.

Measurement of Expected Credit

Expected Credit Loss is an estimate of the weighted probability of a credit loss measured as follows:

- financial assets that do not deteriorate at the reporting date, the expected credit loss is measured at the difference between the present value of all cash shortages (i.e. the difference between the cash flows owed to the Group in accordance with the contract and the cash flows expected to be received by the Group);

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERUSAHAAN** (lanjutan)

t. Instrumen Keuangan (lanjutan)

- aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasikan;
- komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Kelompok Usaha;
- kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Financial Instruments (continued)

- *financial assets that deteriorate at the reporting date, the expected credit loss is measured at the difference between the gross carrying amount and the present value of estimated future cash flows;*
- *for undisbursed loan commitments, expected credit losses are measured at the difference between the present value of the amount of cash flow if the commitments is withdrawn and the cash flow expected to be received by the Group;*
- *for financial guarantee contracts, expected credit losses are measured at the difference between the estimated payments to replace the holder for the credit losses incurred less the amount estimated to be recoverable.*

Presentation of Allowance for Expected Credit Losses in Statements of Financial Position

Allowance for expected credit losses is presented in the statement of financial positions as follows:

- *for financial assets measured at amortized cost, allowance for expected credit losses is presented as a deduction from the gross carrying amount of the asset;*
- *for loan commitments and financial guarantee contracts, allowance for expected credit losses is presented as a provision;*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERUSAHAAN** (lanjutan)

t. Instrumen Keuangan (lanjutan)

- instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan bunga.

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, Kelompok Usaha mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti objektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Financial Instruments (continued)

- for debt instruments measured at fair value through other comprehensive income, allowance for expected credit losses are not recognized in the statement of financial position because the carrying amounts of these assets are at their fair values. However, allowance for expected credit losses is disclosed and recognized in other comprehensive income.

Recoveries of written-off financial assets

The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off financial assets from previous years are recorded as operational income other than interest income.

At each consolidated statement of financial position date, the Group assesses whether there is objective evidence that financial assets not carried at fair value through profit or loss are impaired. Financial assets are impaired when objective evidence demonstrates that loss event has occurred after the initial recognition of the asset, and that the loss event has an impact on the future cash flows on the asset that can be estimated reliably.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERUSAHAAN (lanjutan)**

**u. Akuntansi aset dan liabilitas pengampunan
pajak**

PSAK 70 “Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak” memberikan pengaturan akuntansi atas aset dan liabilitas yang timbul dari pengampunan pajak, dimana entitas dapat memilih menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan SAK lain yang relevan dalam mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan Aset dan liabilitas pengampunan pajak atau menerapkan kebijakan akuntansi sesuai PSAK 70.

Kelompok Usaha telah menerapkan PSAK ini dan telah melengkapi persyaratan mengenai informasi akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak.

Aset Pengampunan Pajak dan Liabilitas Pengampunan Pajak diakui pada saat Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan tidak diakui secara neto (saling hapus). Selisih antara Aset pengampunan dan Liabilitas pengampunan pajak diakui sebagai Tambahan Modal Disetor.

Aset pengampunan pajak pada awalnya diakui sebesar nilai yang disetujui dalam SKPP.

Liabilitas Pengampunan Pajak pada awalnya diakui sebesar nilai kas dan setara kas yang masuk harus dibayarkan oleh Kelompok Usaha sesuai kewajiban kontraktual atas perolehan Aset Pengampunan Pajak.

Uang tebusan yang dibayarkan oleh Kelompok Usaha untuk memperoleh pengampunan pajak diakui sebagai beban pada periode dimana SKPP diterima oleh Perusahaan.

Setelah pengakuan awal, Aset dan liabilitas pengampunan pajak diukur sesuai dengan SAK yang relevan sesuai dengan klasifikasi masing-masing Aset dan liabilitas pengampunan pajak.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**u. Accounting for tax amnesty assets and
liabilities**

PSAK 70 “Accounting for Tax Amnesty Assets and Liabilities” sets the accounting treatment for assets and liabilities arising from tax amnesty, in which entity is allowed to choose between accounting policy as prescribed by other relevant SAK’s in recognition, measurement, presentation, and disclosure of tax amnesty assets and liabilities, or apply accounting policies in accordance with PSAK 70.

The Group had adopting this PSAK and had completed the requirement regarding accounting for Tax Amnesty and Liabilities information.

Tax Amnesty Assets and Liabilities are recognized upon the issuance of Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) by the Minister of Finance of Republic Indonesia, and they are not recognized as net amount (offset). The difference between Tax amnesty assets and Tax amnesty liabilities are recognized as Additional Paid in Capital.

Tax amnesty assets are initially recognized at the value stated in SKPP.

Tax Amnesty Liabilities are initially measured at the amount of cash or cash equivalents to be settled by the Group according to the contractual obligation with respect to the acquisition of respective Tax Amnesty Assets.

The redemption money paid by the Group to obtain the tax amnesty is recognized as expense in the period in which the Company receives SKPP.

After initial recognition, Tax amnesty assets and liabilities are measured in accordance with respective relevant SAKs according to the classifications of each Tax amnesty assets and liabilities.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERUSAHAAN (lanjutan)**

**u. Akuntansi aset dan liabilitas pengampunan
pajak (lanjutan)**

Sehubungan dengan aset dan liabilitas pengampunan pajak yang diakui, Kelompok Usaha mengungkapkan dalam laporan keuangannya:

- (a) Tanggal SKPP;
- (b) Jumlah yang diakui sebagai Aset pengampunan pajak sesuai SKPP;
- (c) Jumlah yang diakui sebagai Liabilitas pengampunan pajak, (jika ada).

v. Kombinasi bisnis entitas sepengendali

Pengalihan aset, liabilitas, saham, dan instrumen kepemilikan lain antara entitas sepengendali tidak akan menghasilkan suatu laba atau rugi bagi Kelompok Usaha atau entitas individual yang berada dalam Kelompok Usaha yang sama. Oleh karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengubah substansi ekonomi atas kepemilikan aset, liabilitas, saham, atau instrumen kepemilikan lain yang dipertukarkan, aset atau liabilitas yang dialihkan harus dicatat berdasarkan nilai buku yang menggunakan metode penyatuan kepentingan (*pooling-of-interest*).

Dalam metode penyatuan kepentingan, unsur-unsur laporan keuangan konsolidasian dari entitas yang bergabung pada periode terjadinya kombinasi bisnis entitas sepengendali dan untuk periode komparatif sajian, disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian. Seluruh saldo "Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali" dicatat pada akun "Tambahkan Modal Disetor - Neto" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**u. Accounting for tax amnesty assets and
liabilities (continued)**

With respect to tax amnesty assets and liabilities recognized, the Group disclose the following in its financial statements:

- (a) The date of SKPP;*
- (b) Amount recognized as tax amnesty assets in accordance with SKPP;*
- (c) Amount recognized as tax amnesty liabilities, (if any).*

v. Business combination of entities under

The transfer of asset, liability, shares, and other ownership instruments among entities under common control does not result in any gain or loss to the Group or individual entity within the same Group. Since the restructuring transaction among entities under common control does not change the economic substances of the ownerships of the asset, liability, shares, or other ownership instruments which are being transferred, the transferred asset or liability should be recorded based on book value using the pooling-of-interests method.

Under the pooling-of-interests method, the consolidated financial statement items of the restructured entity for the period of which the restructuring occurs and for any comparative periods presented should be presented as if the restructuring had occurred since the restructured entity is under common control. The balance of "Difference arising from restructuring transactions of entities under common control" recorded under "Additional Paid-in Capital - Net" in the consolidated statement of financial position.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mewajibkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

Kelompok Usaha mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Kelompok Usaha. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Pertimbangan, estimasi dan asumsi berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Menentukan mata uang fungsional

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan mata uang fungsional Perusahaan dan masing-masing Entitas Anak termasuk, antara lain, mata uang:

- yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa;
- dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa entitas;
- yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa;
- yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan; dan
- yang mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS

The preparation of consolidated financial statements, in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards, requires management to make judgments, estimations and assumptions that affect amounts reported therein. Due to the inherent uncertainty in making estimates, actual results reported in future periods may differ from those estimates.

The Group based their assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

The following judgments, estimates and assumptions made by management in the process of applying the Group's accounting policies have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Determining functional currency

The factors considered in determining the functional currency of the Company and each of its Subsidiary include, among others, the currency:

- *that mainly influences sales prices for goods and services;*
- *of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the sales prices of its goods and services;*
- *that mainly influences labor, material, and other costs of providing goods or services;*
- *in which funds from financing activities are generated; and*
- *in which receipts from operating activities are usually retained.*

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING** (lanjutan)

Berdasarkan substansi ekonomis dari kondisi yang sesuai dengan Kelompok Usaha, mata uang fungsional telah ditentukan berupa Rupiah (Rp), karena hal ini berkaitan dengan fakta bahwa mayoritas bisnis Kelompok Usaha dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi utama dimana Kelompok Usaha beroperasi dan harga jual barang dalam mata uang Rupiah.

Menentukan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Kelompok Usaha menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha seperti diungkapkan pada (Catatan 2).

Menentukan nilai wajar dan perhitungan amortisasi biaya perolehan dari instrumen keuangan

Kelompok Usaha mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar dan pada biaya perolehan yang diamortisasi, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan amortisasi biaya perolehan ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah nilai wajar atau amortisasi dapat berbeda bila Kelompok Usaha menggunakan metodologi penilaian atau asumsi yang berbeda.

Perubahan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba rugi Kelompok Usaha. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam (Catatan 27).

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS** (continued)

Based on the economic substance of the underlying circumstances relevant to the Group, the functional currency has been determined to be Rupiah (Rp), as this reflected the fact that majority of the Group's businesses are influenced by primary economic environment in which the Group operates and sales prices for goods in Rupiah currency.

Determining classification of financial assets and financial liabilities

The Group determines the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55 (Revised 2014). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in (Note 2).

Determining fair value and calculation of cost amortization of financial instruments

The Group records certain financial assets and liabilities at fair values and at amortized costs, which require the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement and assumptions used in the calculation of cost amortization were determined using verifiable objective evidence, the fair value or amortization amount would differ if the Group utilized different valuation methodology or assumption.

Such changes would directly affect the Group's profit or loss. Further details are disclosed in (Note 27).

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING** (lanjutan)

Menilai jumlah terpulihkan dari aset keuangan

Kelompok Usaha mengevaluasi akun piutang tertentu yang diketahui bahwa pelanggan tertentu tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Kelompok Usaha menggunakan pertimbangan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat penyisihan spesifik atas pelanggan terhadap jumlah terutang guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Kelompok Usaha. Penyisihan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan atas penurunan nilai piutang. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam (Catatan 6).

Menilai jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

Jumlah terpulihkan aset tetap didasarkan pada estimasi dan asumsi khususnya mengenai prospek pasar dan arus kas terkait dengan aset. Estimasi arus kas masa depan mencakup perkiraan mengenai pendapatan masa depan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini mungkin memiliki dampak material terhadap pengukuran jumlah terpulihkan dan bisa mengakibatkan penyesuaian penyisihan penurunan nilai yang sudah dibukukan (Catatan 11).

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS** (continued)

Assessing recoverable amounts of financial
assets

The Group evaluates specific accounts receivable where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group uses judgment, based on available facts and circumstances, including but not limited to, the length of their relationship with the customer and the customer's current credit status based on any available third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce their receivable amounts that the Group expects to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the provision for impairment. Further details are disclosed in (Note 6).

Assessing recoverable amounts of non-financial
assets

Allowance for decline in market value and obsolescence of inventories is estimated based on available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories own physical condition, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred for their sales. The provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated.

The recoverable amounts of fixed assets is based on estimates and assumptions regarding in particular the expected market outlook and future cash flows associated with the assets. Estimated future cash flows include estimates of future revenues. Any changes in these assumptions may have a material impact on the measurement of the recoverable amount and could result in adjustments to the provision of impairment already booked (Note 11).

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING** (lanjutan)

Menentukan metode penyusutan dan estimasi umur
manfaat aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara empat (4) sampai dengan dua puluh (20) tahun. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam (Catatan 2h dan 11).

Pada tanggal 31 Desember 2014, Kelompok Usaha mengestimasi taksiran sisa manfaat ekonomis peralatan dan fasilitas telekomunikasi menjadi lima (5) tahun.

Menentukan pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Kelompok Usaha mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam (Catatan 25).

Estimasi beban pensiun dan imbalan kerja

Penentuan liabilitas dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Kelompok Usaha bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun, dan tingkat kematian.

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS** (continued)

Determining depreciation method and estimated
useful lives of fixed assets

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management properly estimates the useful lives of these fixed assets to be within four (4) to twenty (20) years. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. Further details are disclosed in (Notes 2h and 11).

As of December 31, 2014, the Group estimated that the remaining useful life of telecommunication equipment and facilities to be five (5) years.

Determining income taxes

Significant judgment is involved in determining provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates as to whether additional corporate income tax will be due. Further details are disclosed in (Note 25).

Estimate of pension cost and employee benefits

The determination of the Group's liabilities and cost for pension and employee benefits liabilities is dependent on their selection of certain assumptions used in calculating such amounts. These assumptions include among others, discount rates, annual salary increase rate, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age, and mortality rate.

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING** (lanjutan)

Sementara Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Kelompok Usaha dapat mempengaruhi secara material liabilitas dan beban imbalan kerja. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam (Catatan 27).

Mengevaluasi perjanjian sewa

Kelompok Usaha menandatangani perjanjian sewa sebagai lessee. Manajemen melakukan penilaian dalam menentukan apakah semua risiko signifikan dan manfaat kepemilikan aset sewaan dialihkan kepada Kelompok Usaha. Sewa guna usaha dimana Kelompok Usaha memperoleh seluruh risiko signifikan dan manfaat kepemilikan aset sewaan diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, jika sebaliknya maka diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Mengevaluasi provisi dan kontinjensi

Kelompok Usaha terlibat dalam berbagai proses hukum dan pajak. Manajemen melakukan penilaian untuk membedakan antara provisi dan kontinjensi terutama melalui konsultasi dengan penasehat hukum Kelompok Usaha yang menangani proses hukum dan pajak tersebut. Kelompok Usaha mempersiapkan provisi yang sesuai untuk proses hukum saat ini atau kewajiban konstruktif, jika ada.

Dalam situasi tertentu, Kelompok Usaha tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan, atau negosiasi dengan otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks serta jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan.

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS** (continued)

While the Group believes that their assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual results or significant changes in the Group's assumptions may materially affect their employee benefits liability and expense. Further details are discussed in (Note 27).

Evaluating lease agreements

The Group has entered into lease agreements as lessee. The management exercises judgment in determining whether all significant risk and rewards of ownership of the leased property are transferred to the Group. Lease wherein the Group acquires all significant risks and rewards of ownership of the leased property is accounted for as finance lease, otherwise it is accounted for as operating lease.

Evaluating provisions and contingencies

The Group involved in various legal and tax proceedings. The management exercises its judgment to distinguish between provisions and contingencies mainly through consultation with the Group's legal counsel handling those proceedings. The Group sets up appropriate provisions for its present legal or constructive obligations, if any.

In certain circumstances, the Group may not be able to determine the exact amount of their current or future tax liabilities due to ongoing investigations by, or negotiations with, the taxation authority. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income.

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING** (lanjutan)

Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Kelompok Usaha menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK No. 57 (Revisi 2009), "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi".

Kelompok Usaha membuat analisa untuk semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk manfaat pajak yang belum diakui harus diakui.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Kelompok Usaha tidak yakin bahwa proses-proses tersebut akan berpengaruh secara signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam (Catatan 26)

4. DEKONSOLIDASI ENTITAS ANAK

Pada tanggal 24 September 2020 Bakrie Telecom Pte Ltd (BTPL), Entitas Anak, yang terdaftar dan berdomisili di Singapura, telah mengeluarkan *Special Resolution* yang berisi tentang Pelepasan Saham (*Disposal of Shares*) sebanyak 45 lembar saham dari Perusahaan kepada PT Bakrie Digital Net (BDN), Entitas Anak, yang penandatanganannya disaksikan dan diratifikasi oleh Ervina Christina Sembiring, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, Banten, Indonesia.

Selanjutnya pada tanggal 25 September 2020, berdasarkan Akta Notaris No. 32 dibuat oleh Ervina Christina Sembiring, S.H., M.Kn., tentang *Sale Purchase and Transfer Deed*, Perusahaan dan BDN, sepakat untuk melakukan jual beli kepemilikan saham BTPL sebanyak 45 lembar saham atau sebesar 90% kepemilikan saham, yang dimiliki oleh Perusahaan, kepada BDN.

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS** (continued)

In determining the amount to be recognized in respect of an uncertain tax liability, the Group applies similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognized in accordance with PSAK No. 57 (Revised 2009), "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Asset."

The Group makes an analysis of all tax positions related to income taxes to determine if a tax liability for unrecognized tax benefit should be recognized.

As of December 31, 2022, the Group did not believe that those proceedings will have a significant adverse effect on the consolidated financial statements. Further details are discussed in (Notes 26)

4. DECONSOLIDATE THE SUBSIDIARY

On 24 September 2020 Bakrie Telecom Pte Ltd (BTPL), a Subsidiary, which is registered and domiciled in Singapore, has issued a Special Resolution which contains the Disposal of Shares of 45 shares from the Company to PT Bakrie Digital Net (BDN), A Subsidiary, seen and ratified by Ervina Christina Sembiring, S.H., M.Kn., Notary in Tangerang City, Banten, Indonesia.

Furthermore, on September 25, 2020, based on the Notary Deed No. 32 made by Ervina Christina Sembiring, S.H., M.Kn., regarding Sale Purchase and Transfer Deed, the Company and BDN, agreed to buy and sell 45 shares of BTPL or 90% share ownership, which is owned by the Company, to BDN.

4. DEKONSOLIDASI ENTITAS ANAK (lanjutan)

Pada tanggal 29 September 2020, Perusahaan dengan PT Telecomindo Prima Nusantara (TPN) menyetujui pengalihan saham atas nama Perusahaan pada BDN sebanyak 20.000 saham kepada TPN dengan ketentuan-ketentuan dan harga jual yang disepakati atas pengalihan saham tersebut sebesar Rp 400 juta sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris No. 34 yang dibuat oleh Ervina Christina Sembiring SH. M.Kn tentang Pengambilalihan Saham.

Selanjutnya berdasarkan Akta Notaris No. 33 dibuat oleh Ervina Christina Sembiring, S.H., M.Kn., pada tanggal 29 September 2020, tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham BDN, menyetujui pengalihan saham atas nama Perusahaan pada BDN sebanyak 20.000 saham kepada PT Telecomindo Prima Nusantara (TPN), sehingga susunan pemegang saham BDN adalah sebagai berikut:

- (a) saham atas nama TPN sebanyak 20.000 saham atau setara 80 % kepemilikan saham pada BDN,
- (b) saham atas nama Perusahaan sebanyak 4.999 saham atau setara 19,996 % kepemilikan saham pada BDN,
- (c) saham atas nama PT Bakrie Connectivity (BCON), Entitas Anak, sebanyak 1 saham atau setara 0,004 % kepemilikan saham pada BDN.

Adapun perubahan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima dan dicatat oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana tertuang dalam surat No.AHU-AH.01.03-0393143, tanggal 1 Oktober 2020.

Atas pengalihan saham Kelompok Usaha pada BTPL dan BDN masing-masing sebesar 90% dan 80% tersebut di atas, efektif per tanggal 30 September 2020 dilakukan dekonsolidasi kedua Entitas Anak tersebut.

4. DECONSOLIDATE THE SUBSIDIARY (continued)

On September 29, 2020, the Company and PT Telecomindo Prima Nusantara (TPN) agreed to transfer 20,000 BDN shares owned by the Company to TPN with the terms and the agreed selling price for the transfer of shares amounting to Rp 400 million as stated in the Notary Deed No. 34 created by Ervina Christina Sembiring SH. M.Kn regarding transfer of shares.

Furthermore, based on the Notary Deed No. 33 made by Ervina Christina Sembiring, S.H., M.Kn., on September 29, 2020, regarding the Decision Statement of BDN Shareholders, approving the transfer of 20,000 shares on behalf of the Company to BDN to PT Telecomindo Prima Nusantara (TPN), so that the composition of BDN shareholders is as follows:

- (a) 20,000 shares in the name of TPN or the equivalent of 80% share ownership in BDN,*
- (b) shares in the name of the Company amounting to 4,999 shares or the equivalent of 19.996% share ownership in BDN,*
- (b) shares in the name of PT Bakrie Connectivity (BCON), a subsidiary, amounting to 1 share or equal to 0.004% share ownership in BDN.*

The changes have been submitted to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and have been received and recorded by the Directorate General of General Legal Administration as stated in letter No.AHU-AH.01.03-0393143, October 1, 2020.

For the transfer of the Group's shares in BTPL and BDN, respectively 90% and 80%, effective as of September 30, 2020, the two Subsidiaries were deconsolidated.

4. DEKONSOLIDASI ENTITAS ANAK (lanjutan)

Akrual bunga Wesel Senior (Catatan 17) periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 pada tingkat suku bunga sebesar 11,5% per tahun total sebesar USD32.775.000 tidak dibukukan pada akun Liabilitas entitas anak yang sebelumnya dikonsolidasi tersebut.

Akibat kebijakan akuntansi dekonsolidasi Entitas Anak, pada tanggal 31 Desember 2020 Kelompok Usaha mengakui Utang pihak berelasi dan akrual bunga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") atas dana hasil penerbitan wesel senior, dengan jumlah sebesar Rp4,94 triliun, dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember / December 31, 2020 (dalam dolar/ <i>(in USD)</i>)
Pokok utang hubungan istimewa ke BTPL dana hasil pinjaman penerbitan Wesel Senior	380.000.000
Akrual bunga pinjaman	27.360.000
Jumlah	<u>407.360.000</u>

Pada tanggal 31 Desember 2020, Kelompok Usaha tidak lagi mencatat kewajiban yang seharusnya sudah jatuh tempo kepada para pemegang wesel senior atas utang pokok dan akrual bunganya, masing-masing sejumlah USD380 juta dan USD334,30 juta (suku bunga 11,50% per tahun).

Pada tanggal 31 Desember 2020, Kelompok Usaha mencatat kewajiban utang kepada BTPL dengan mengacu kepada ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 08 Desember 2014 dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU"), dimana utang kepada BTPL tersebut merupakan pinjaman pihak berelasi Perusahaan kepada BTPL yang dananya diperoleh BTPL dari wesel senior dengan utang pokok sejumlah USD380 juta atau setara Rp4,612 triliun dan akrual bunga sejumlah USD27,36 juta atau setara dengan Rp332,10 miliar (suku bunga 4% per tahun dan kurs PKPU, USD1 = Rp12.138).

4. DECONSOLIDATE THE SUBSIDIARY (continued)

Accrued interest on Senior Notes (Note 17) for the period January 1 to December 31 2020 at an interest rate of 11.5% per annum with a total of USD32,775,000 was not recorded in the Liabilities of the subsidiary previously consolidated.

As a result of the Subsidiaries' deconsolidation accounting policy, on December 31, 2020 the Group recognized the related party's debt and Suspension Payment ("PKPU")'s interest accrual from fund result from the issuance of senior notes, total amounting to Rp4.94 trillion , with details as follows:

	31 Desember / December 31, 2020 (dalam jutaan rupiah)/ <i>(in million rupiah)</i>	
	4.612.440	<i>Principal due to related party to BTPL from the loan proceeds from the issuance of Senior Notes</i>
	332.096	<i>Accrual of loan interest</i>
Jumlah	<u>4.944.536</u>	Total

As of December 31, 2020, the Group no longer recorded obligations that should have been due to senior note holders for principal and accrued interest, amounting to USD380 million and USD334.30 million, respectively (interest rate 11.50% per year).

On December 31, 2020, the Group recorded its obligations to BTPL with reference to the provisions contained in the Amicable Agreement dated December 8, 2014 in the Suspension Payment ("PKPU"), where the debt to BTPL is a loan from a related party of the Company to BTPL whose funds were obtained by BTPL from senior notes with principal debt of USD380 million or equivalent to Rp4.612 trillion and accrued interest amounting to USD27.36 million or equivalent to Rp332.10 billion (interest rate 4% per year and PKPU exchange rate, USD1 = Rp12,138).

4. DEKONSOLIDASI ENTITAS ANAK (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian utang wesel senior antara BTPL dengan para pemegang wesel senior, disebutkan bahwa Perusahaan sebagai entitas induk merupakan Penjamin atas utang wesel senior tersebut. Selain itu berdasarkan *Intercompany Loan Agreement* antara Perusahaan dan BTPL diatur bahwa setiap pembayaran dari Perusahaan kepada BTPL akan ditujukan untuk pembayaran Wesel Senior dari BTPL kepada pemegang wesel senior.

Kondisi ini tidak menyebabkan hilang atau hapusnya tanggung jawab dan kewajiban Perusahaan untuk menyelesaikan utang dana hasil wesel senior sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian.

Berdasarkan keterangan dari konsultan hukum Perusahaan di Amerika Serikat sehubungan dengan putusan atau *court order* tertanggal 6 Mei 2021 dari Pengadilan Kepailitan New York atas permohonan Bab 15 yang diajukan Perusahaan, dinyatakan bahwa Pengadilan Kepailitan New York telah mengabulkan permohonan Bab 15 BTEL dengan memberikan pengakuan atas keputusan PKPU BTEL sebagai *foreign main proceeding* berdasarkan Bab 15 dari Undang-undang Kepailitan Amerika Serikat. Lebih lanjut berdasarkan putusan tersebut BTEL mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hukum Amerika Serikat dimana pemegang Wesel Senior dan pihak manapun juga tidak dapat melakukan klaim atau tuntutan terhadap BTEL maupun terhadap aset-aset di Amerika Serikat milik BTEL. (Catatan 17)

Putusan tersebut ataupun jika ada putusan lain dari badan peradilan manapun, tidak mempengaruhi keberlakuan putusan PKPU BTEL yang telah mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan hukum Indonesia (Catatan 17).

4. DECONSOLIDATE THE SUBSIDIARY (continued)

Based on the senior draft debt agreement between BTPL and senior note holders, it is stated that the Company as the parent entity is the guarantor for the senior draft debt. Further, based on the Intercompany Loan Agreement between Company and BTPL every repayment made by Company to BTPL shall be utilized for repayment of senior notes by BTPL to note holders.

This condition does not cause the loss or elimination of the Company's responsibilities and obligations to settle the debts resulting from senior drafts according to the provisions in the Amicable Agreement.

Based on information from the Company's legal consultant in the United States regarding the decision or court order dated May 6, 2021 from the New York Bankruptcy Court on the application for Chapter 15 submitted by the Company, it is stated that the Bankruptcy Court of New York has granted the application for Chapter 15 of BTEL by granting acknowledgment of the PKPU decision. BTEL as a foreign main proceeding under Chapter 15 of the United States Bankruptcy Act. Furthermore, based on the decision, BTEL has legal protection under United States law wherein the holders of Senior Notes and any other party cannot make claims or demands against BTEL or against assets in the United States belonging to BTEL. (Note 17).

This decision or if there is another decision from any judicial body, does not affect the validity of the BTEL PKPU decision which is binding and has permanent legal force under Indonesian law (Note 17).

5. KAS DAN SETARA KAS

	<u>31 Desember / December 31, 2022</u>
Kas	
Rupiah	13
Dolar AS	10
Total Kas	<u>23</u>
Kas di bank	
<u>Rupiah</u>	
PT Bank Permata Tbk	199
PT Bank Mandiri Persero) Tbk	91
PT Bank Central Asia Tbk	38
Lain - lain (masing -masing dibawah Rp 10 juta)	<u>12</u>
Sub - total	<u>340</u>
<u>Dolar AS</u>	
PT Bank Permata Tbk	14
Lain - lain (masing -masing dibawah Rp 20 juta)	<u>27</u>
Sub - total	<u>41</u>
Total Kas di Bank	<u>381</u>
Total	<u>404</u>

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	<u>31 Desember / December 31, 2021</u>	
		<i>Cash on hand</i>
		<i>Rupiah</i>
		<i>US Dollar</i>
		<i>Total Cash on Hand</i>
		<i>Cash in banks</i>
		<i>Rupiah</i>
		<i>PT Bank Permata Tbk</i>
		<i>PT Bank Mandiri</i>
		<i>(Persero) Tbk</i>
		<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
		<i>Others (each below</i>
		<i>Rp 10 million)</i>
		<i>Sub - total</i>
		<i>US Dollar</i>
		<i>PT Bank Permata Tbk</i>
		<i>Others (each below</i>
		<i>Rp 20 million)</i>
		<i>Sub - total</i>
	<u>3.123</u>	<i>Total Cash in Banks</i>
	<u>3.153</u>	Total

6. PIUTANG USAHA

	<u>31 Desember / December 31, 2022</u>
Pihak ketiga	
<u>Jasa pemakaian dan interkoneksi</u>	
Pelanggan individual dan bisnis	56.458
Penyelenggara jasa telekomunikasi	16.508
Total	<u>72.966</u>
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(72.966)</u>
Neto	<u>(0)</u>

6. TRADE RECEIVABLES

	<u>31 Desember / December 31, 2021</u>	
		<i>Thrid parties</i>
		<i>Usage and interconnection service</i>
		<i>Individual and business</i>
		<i>subscribers</i>
		<i>Telecommunication service</i>
		<i>provider</i>
		<i>Total</i>
		<i>Less allowance for</i>
		<i>impairment loss</i>
		<i>Net</i>
	<u>56.458</u>	
	<u>16.508</u>	
	<u>72.966</u>	
	<u>(72.966)</u>	
	<u>(0)</u>	

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

6. TRADE RECEIVABLES (continued)

	<u>31 Desember / December 31, 2022</u>	<u>31 Desember / December 31, 2021</u>	
<u>Jasa lainnya</u>			<u>Other service</u>
Solitech Synergi	-	3.587	Solitech Synergi
PT Ecart Webportal Indonesia	700	583	PT Ecart Webportal Indonesia
PT NTT Indonesia Solutions	434	388	PT NTT Indonesia Solutions
Lain - lain (masing -masing dibawah Rp 100 juta)	280	45	Others (each below Rp 100 million)
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai	(439)	(222)	Less allowance for impairment loss
Neto	<u>975</u>	<u>4.381</u>	Net
Pihak ketiga-neto	<u>975</u>	<u>4.381</u>	Thrid parties-net
Pihak berelasi			Related parties
PT Digi Bintang Sinergi	5.421	-	PT Digi Bintang Sinergi
PT Lativi Media Karya	2.610	732	PT Lativi Media Karya
PT Cakrawala Andalas Televisi	37	1.171	PT Cakrawala Andalas Televisi
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai	(2.711)	-	Less allowance for impairment loss
Pihak berelasi - neto	<u>5.357</u>	<u>1.903</u>	Related parties - net

Piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Trade receivables based on currencies are as follows:

	<u>31 Desember / December 31, 2022</u>	<u>31 Desember / December 31, 2021</u>	
Rupiah	65.994	63.020	Rupiah
Dolar AS	16.454	16.454	US Dollar
Total	82.448	79.474	Total
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai	(76.116)	(73.188)	Less allowance for impairment loss
Neto	<u>6.332</u>	<u>6.284</u>	Net

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31, 2022
Sampai dengan 30 hari	324
Lebih dari 30 hari - 60 hari	15
Lebih dari 60 hari - 90 hari	693
Lebih dari 90 hari	5.300
Total	6.332

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha yang seluruhnya berdasarkan penilaian secara individual adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31, 2022
Saldo awal tahun	73.188
Penyisihan selama tahun berjalan	2.928
Saldo Akhir Tahun	76.116

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai piutang adalah cukup untuk menutup kerugian penurunan nilai atas tidak tertagihnya piutang usaha.

6. TRADE RECEIVABLES (continued)

The aging schedule of trade receivables are as follows:

	31 Desember / December 31, 2021	
	405	<i>Up to 30 days</i>
	1.017	<i>Over 30 days - 60 days</i>
	36	<i>Over 60 days - 90 days</i>
	4.826	<i>Over 90 days</i>
Total	6.284	Total

Movements in the allowance for impairment loss of trade receivables which were wholly based on individual assessments were as follows:

	31 Desember / December 31, 2021	
	72.969	<i>Beginning balance for the year</i>
	219	<i>Provision during the year</i>
Saldo Akhir Tahun	73.188	Ending Balance for the Year

The management believed that allowance for impairment loss of receivables was adequate to cover impairment losses on uncollectible trade receivables.

7. PERSEDIAAN

	31 Desember / December 31, 2022
Set Top Box TV	2.006
Total	2.006

8. UANG MUKA

Uang muka operasional departemen merupakan uang muka yang belum dipertanggungjawabkan oleh departemen yang bersangkutan. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 saldo atas akun ini masing-masing sebesar Rp2,572 miliar dan Rp3,128 miliar. Uang muka tersebut merupakan uang muka atas pengadaan *modification transmitter* yang sampai tanggal neraca jasa yang dipesan belum diterima oleh CAF dan dana talangan operasional kepada karyawan.

9. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	31 Desember / December 31, 2022
Asuransi	111
Total	111

10. PIUTANG PIHAK BERELASI

	31 Desember / December 31, 2022
PT Cakrawala	
Andalas Televisi	2.820
PT Lativi Media Karya	2.820
Total	5.640

Saldo piutang pihak berelasi sejumlah Rp5,64 miliar merupakan piutang setoran modal dari pihak berelasi tersebut di atas kepada CAF (Entitas Anak).

7. INVENTORIES

	31 Desember / December 31, 2021	
	644	Set Top Box TV
Total	644	Total

8. ADVANCES

Operational department advances represents advances that have not yet been settled by the related departments. In December 31, 2022 and 2021 the amount of this account is Rp2.572 billion and Rp3.128 billion, respectively. The advances represent advances for the procurement of modification transmitters which until the balance sheet date for services ordered have not been received by CAF and operational bailout funds to employees.

9. PREPAID EXPENSES

	31 Desember / December 31, 2021	
	587	Insurance
Total	587	Total

10. DUE FROM RELATED PARTIES

	31 Desember / December 31, 2021	
		PT Cakrawala
	2.820	Andalas Televisi
	2.820	PT Lativi Media Karya
Total	5.640	Total

The balance of receivables from related parties amounting to Rp5.64 billion represents receivables for paid up capital from related parties mentioned above to CAF (Subsidiary).

11. ASET TETAP

11. FIXED ASSETS

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut:

The details of fixed assets are as follows:

31 Desember 2022 / December 31, 2022						
	Saldo 1 Jan/ Balance as of Jan 1, 2022	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi / Reclassi- fications	Saldo 31 Des/ Balance as of Dec 31, 2022	
Biaya Perolehan						Historical Cost
Pemilikan						Direct
Langsung						Ownership
Tanah	276	-	-	-	276	Land
Bangunan	12.674	-	-	-	12.674	Building
Peralatan dan						Telecommunication
fasilitas						equipment and
telekomunikasi	13.044.662	-	-	-	13.044.662	facilities
Peralatan						Transportation
pengangkutan	13.725	-	-	-	13.725	equipment
Peralatan dan						Office equipment
perabot kantor	138.017	129	-	-	138.146	and fixtures
Total Biaya						Total Acquisition
Perolehan	13.209.354	129	-	-	13.209.483	Costs
Akumulasi						Accumulated
Penyusutan						Depreciation
Pemilikan						Direct
Langsung						Ownership
Bangunan	12.582	-	-	-	12.582	Building
Peralatan dan						Telecommunication
fasilitas						equipment and
telekomunikasi	9.207.332	-	-	-	9.207.332	facilities
Peralatan						Transportation
pengangkutan	13.712	-	-	-	13.712	equipment
Peralatan dan						Office equipment
perabot kantor	137.649	110	-	-	137.759	and fixtures
Total Akumulasi						Total Accumulated
Penyusutan	9.371.275	110	-	-	9.371.385	Depreciation

11. ASET TETAP (lanjutan)

11. FIXED ASSETS (continued)

31 Desember 2022 / December 31, 2022						
	Saldo 1 Jan/ Balance as of Jan 1, 2022	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi / Reclassi- fications	Saldo 31 Des/ Balance as of Dec 31, 2022	
Penurunan Nilai Aset Tetap						Impairment of Fixed Assets
Tanah	276	-	-	-	276	Land
Bangunan	92	-	-	-	92	Building
Peralatan dan fasilitas telekomunikasi	3.837.405	-	-	-	3.837.405	Telecommunication equipment and facilities
Peralatan pengangkutan	13	-	-	-	13	Transportation equipment
Peralatan dan perabot kantor	10	-	-	-	10	Office equipment and fixtures
Total Penurunan Nilai Aset Tetap	3.837.796	-	-	-	3.837.796	Total Impairment of Fixed Assets
Jumlah Tercatat	283				302	Carrying Amounts
31 Desember 2021 / December 31, 2021						
	Saldo 1 Jan/ Balance as of Jan 1, 2021	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi / Reclassi- fications	Saldo 31 Des/ Balance as of Dec 31, 2021	
Biaya Perolehan						Historical Cost
Pemilikan Langsung						Direct Ownership
Tanah	276	-	-	-	276	Land
Bangunan	12.674	-	-	-	12.674	Building
Peralatan dan fasilitas telekomunikasi	13.044.662	-	-	-	13.044.662	Telecommunication equipment and facilities
Peralatan pengangkutan	13.725	-	-	-	13.725	Transportation equipment
Peralatan dan perabot kantor	137.704	313	-	-	138.017	Office equipment and fixtures
Total Biaya Perolehan	13.209.041	313	-	-	13.209.354	Total Acquisition Costs

11. ASET TETAP (lanjutan)

11. FIXED ASSETS (continued)

	31 Desember 2021 / December 31, 2021				Saldo 31 Des/ Balance as of Dec 31, 2021	
	Saldo 1 Jan/ Balance as of Jan 1, 2021	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi / Reclassi- fications		
Akumulasi						Accumulated
Penyusutan						Depreciation
Pemilikan langsung						Direct Ownership
Bangunan	12.582		-	-	12.582	Building
Peralatan dan fasilitas telekomunikasi	9.207.332	-	-	-	9.207.332	Telecommunication equipment and facilities
Peralatan pengangkutan	13.712	-	-	-	13.712	Transportation equipment
Peralatan dan perabot kantor	137.558	91	-	-	137.649	Office equipment and fixtures
Total Akumulasi Penyusutan	9.371.184	91	-	-	9.371.275	Total Accumulated Depreciation
Penurunan Nilai Aset Tetap						Impairment of Fixed Assets
Tanah	276	-	-	-	276	Land
Bangunan	92	-	-	-	92	Building
Peralatan dan fasilitas telekomunikasi	3.837.405	-	-	-	3.837.405	Telecommunication equipment and facilities
Peralatan pengangkutan	13	-	-	-	13	Transportation equipment
Peralatan dan perabot kantor	10	-	-	-	10	Office equipment and fixtures
Total Penurunan Nilai Aset Tetap	3.837.796	-	-	-	3.837.796	Total Impairment of Fixed Assets
Jumlah Tercatat	61				283	Carrying Amounts

Beban penyusutan untuk periode dan tahun yang masing-masing berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian masing-masing sebesar Rp110 juta dan Rp91 juta.

Depreciation expense for period and year ended as of December 31, 2022 and 2021 was charged to the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income amounting to Rp110 million and Rp91 million, respectively.

12. ASET DALAM Pengerjaan

12. ASSETS IN PROGRESS

Aset dalam pengerjaan untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 meliputi pembelian perangkat transmitter, Integrated Receiver/Decoder (IRD), dan monitoring yang masih dalam proses penyelesaian sebesar Rp12,47 miliar.

Assets in progress for the period and year ended December 31, 2022 include purchases of transmitter, Integrated Receiver/Decoder (IRD), and monitoring equipment which are still in the process of being completed amounting to Rp12.47 billion.

13. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Aset tidak lancar lainnya untuk periode dan tahun yang masing-masing berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 meliputi Lisensi, *Goodwill* dan lain-lain sebesar Rp822 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, *Goodwill* seluruhnya merupakan selisih yang timbul dari kombinasi bisnis di AAI.

13. OTHER NON-CURRENT ASSETS

Other non current asset for period and year ended as of December 31, 2022 and 2021 represent License, Goodwill and others amounted Rp822 million.

As at December 31, 2022 and 2021, Goodwill entirely represent difference arise from business combination di AAI.

14. UTANG USAHA

	31 Desember / December 31, 2022
Pihak ketiga	
<u>Mata uang asing</u>	
Blackberry Singapore Pte. Ltd	8.477
Lain - lain (masing -masing dibawah Rp4 miliar)	81.123
Sub - total	89.600
<u>Rupiah</u>	
PT Smartfren Telecom Tbk Kementerian Komunikasi dan Informasi	172.138
Lain - lain (masing -masing dibawah Rp4 miliar)	60.503
Sub - total	287.460
Beban Interkoneksi	49.113
Total pihak ketiga	426.173
Pihak berelasi	
PT Bakrie Swasakti Utama	13.627
PT Multi Kontrol Nusantara	2.851
Lain - lain (masing -masing dibawah Rp4 miliar)	437
Total pihak berelasi	16.915
Total Utang Usaha	443.088
Persentase utang usaha pihak berelasi terhadap total liabilitas konsolidasian	0,2872%

14. ACCOUNT PAYABLE

	31 Desember / December 31, 2021	
		Third parties
		<u>Foreign currencies</u>
		Blackberry Singapore Pte. Ltd
	7.688	Others (each below Rp4 billion)
	73.048	Sub - total
	80.736	
		<u>Rupiah</u>
	172.138	PT Smartfren Telecom Tbk Ministry of Communication and Information
	54.819	Others (each below Rp4 billion)
	61.527	Sub - total
	288.484	
	49.113	Interconnection expense
	418.333	Total third parties
		Related parties
	13.627	PT Bakrie Swasakti Utama
	2.851	PT Multi Kontrol Nusantara
	386	Others (each below Rp4 billion)
	16.864	Total related parties
	435.197	Total Trade Payable
		Percentage of related parties trade payables to total consolidated liabilities
	0,2929%	

14. UTANG USAHA (lanjutan)

Analisis umur utang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31, 2022
Sampai dengan 30 hari	3.401
Lebih dari 30 hari - 60 hari	1.068
Lebih dari 60 hari - 90 hari	643
Lebih dari 90 hari	437.976
Total	443.088

Utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31, 2022
Rupiah	353.488
Dolar AS	89.327
Dolar Singapura	270
Euro	3
Total	443.088
Neto	443.088

15. UTANG LAIN-LAIN

	31 Desember / December 31, 2022
Dalam mata uang Rupiah	179.648
Dalam mata uang asing	297
Total	179.945

14. ACCOUNT PAYABLE (continued)

The aging schedule of trade payables was as follows:

	31 Desember / December 31, 2021	
	4.308	Up to 30 days
	2.155	Over 30 days - 60 days
	12.924	Over 60 days - 90 days
	415.810	Over 90 days
Total	435.197	Total

Trade payables based on currencies are as follows:

	31 Desember / December 31, 2021	
	352.440	Rupiah
	82.202	US Dollar
	552	Singapore Dollar
	3	Euro
Total	435.197	Total
Neto	435.197	Net

15. OTHER PAYABLES

	31 Desember / December 31, 2021	
Dalam mata uang Rupiah	157.459	In Rupiah currency
Dalam mata uang asing	269	In foreign currencies
Total	157.731	Total

16. BEBAN AKRUAL

	31 Desember / December 31, 2022
Kewajiban kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi - Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi	77.902
Gaji dan pensiun	50.475
Jasa profesional	17.617
Sewa	13.549
Lain-lain (masing - masing dibawah Rp20 miliar)	87.545
Total	247.088

Kewajiban kepada Departemen Komunikasi dan Informatika - Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi merupakan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) telekomunikasi dengan tarif sebesar 0,5% dari pendapatan neto setelah dikurangi penghapusan piutang ragu-ragu, ditambah dengan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (KKPU) atau Universal Service Obligation (USO) sebesar 1,25% dari pendapatan neto setelah dikurangi penghapusan piutang ragu-ragu. Selain itu, ada juga kewajiban BHP Pita dan Terrestrial.

Berdasarkan Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta telah ditetapkan jumlah piutang yang harus dilunasi oleh Perusahaan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah dengan rincian sebagai berikut:

Nomor/ Number	Keterangan/ Description	Hutang Pokok/ Principle debt	Denda/ Fines	Biaya Admi- nistrasi 10%/ Admi- nistration fee 10%	Jumlah/ Total
PJPN-43/PUPNC.10.05/2017	KPU USO 2014	15.661	9.070	2.473	27.205
	KPU USO 2015	6.568	1.599	817	8.983
PJPN-79/PUPNC.10.05/2017	BHP TEL 2014	5.395	1.580	697	7.672
	BHP TEL 2015	2.637	783	342	3.762
PJPN-165/PUPNC.10.05/2017	BHP ISR 2015	6.785	-	679	7.464
100/DJPPI.1/KU.03.02/1/2020	BHP TEL 2016	649	396	105	1.150
4/KOMINFO/BAKTI.31/KU.03.02/1/2020	KPU USO 2016	1.659	1.011	267	2.938
				Neto / Net	55.034

16. ACCRUED EXPENSES

	31 Desember / December 31, 2021	
	77.902	Obligation to the Ministry of Communication and Information - the Directorate General of Post and Telecommunication
	47.534	Salaries and pension
	17.549	Professional fees
	13.549	Rent
	78.817	Others (each below Rp20 billion)
Total	235.350	Total

Obligation to the Department of Communication and Information - the Directorate General of Post and Telecommunication represents the Cost of Frequency Utilization Providing Right telecommunications at a rate of 0.5% of net revenues after the deduction of allowance for bad debts written-off, plus an additional Universal Service Obligation (USO) of 1.25% of net revenues after the deduction of allowance for bad debts written-off. Also, included BHP Band and Terrestrial obligations.

Based on the Decree of the DKI Jakarta Branch Committee for State Receivable Affairs, the amount of receivables that must be paid by the Company to the Ministry of Communication and Information Technology is as follows:

16. BEBAN AKRUAL (lanjutan)

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan telah melakukan pembayaran atas utang tersebut sejumlah Rp4,140 juta. (Catatan 14)

Pembayaran harus dilakukan oleh Perusahaan guna menghindari tindakan hukum lebih lanjut, antara lain:

- a) Pencegahan ke luar wilayah Republik Indonesia terhadap pengurus/ penanggungjawab Perusahaan,
- b) Paksa badan terhadap pengurus/ penanggungjawab Perusahaan, dan
- c) Penyitaan atas harta kekayaan penanggung utang dan/atau penjamin utang.

17. UTANG EX WESEL SENIOR

11.500% Guaranteed Senior Notes due 2015

Pada tanggal 7 Mei 2010, Bakrie Telecom Pte., Ltd, sebelumnya Entitas Anak, menerbitkan "11.500% Guaranteed Senior Notes due 2015" (selanjutnya disebut "Wesel Senior") sebesar USD250 juta dengan jangka waktu lima (5) tahun yang berakhir pada tanggal 7 Mei 2015, yang terdaftar di Singapore Exchange Securities Trading. Wesel Senior tersebut dibebani tingkat suku bunga sebesar 11,5% per tahun.

Wesel Senior tersebut dijamin oleh Perusahaan sebagai entitas induk perusahaan penjamin, PT Bakrie Connectivity dan PT Bakrie Digital Net (dahulu PT Bakrie Network) sebagai Entitas Anak penjamin. Credit Suisse (Singapura) Limited (CS), Singapura, Merrill Lynch (Singapura) Pte., Ltd dan Morgan Stanley Asia (Singapura) Pte., bertindak sebagai pembeli awal (*initial purchasers*), dengan CS sebagai koordinator global tunggal (*sole global coordinator*). The Bank of New York Mellon ditunjuk sebagai wali amanat, agen pembayaran dan pelaku pendaftaran, sedangkan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta, ditunjuk sebagai agen penjamin Indonesia sehubungan dengan saham yang dijaminkan.

16. ACCRUED EXPENSES (continued)

As of the completion date of these consolidated financial statements, the Company has made payments on this debt amounting to Rp4.140 million. (Note 14)

Payments must be made by the Company to avoid further legal action, among others:

- a) *Prevention outside the territory of the Republic of Indonesia towards the management/responsible of the Company,*
- b) *Forced the body of the Company's management/responsibility, and*
- c) *Confiscation of the assets of the debt guarantor and/or debt guarantor.*

17. EX SENIOR NOTES PAYABLE

11.500% Guaranteed Senior Notes due 2015

On May 7, 2010, Bakrie Telecom Pte., Ltd, previously a Subsidiary, issued "11.500% Guaranteed Senior Notes due 2015" (hereafter referred to as the "Senior Notes") amounting to USD250 million with a maturity of five (5) years ended May 7, 2015, which are listed on Singapore Exchange Securities Trading. These Senior Notes are subject to interest of 11.5% per annum.

These Senior Notes are guaranteed by the Company as Parent Guarantor, PT Bakrie Connectivity and PT Bakrie Digital Net (formerly PT Bakrie Network) as Subsidiary Guarantors. Credit Suisse (Singapore) Limited (CS), Singapore, Merrill Lynch (Singapore) Pte., Ltd, and Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte., acted as initial purchasers with CS as the sole global coordinator. The Bank of New York Mellon has been appointed as the trustee, paying agent and registrar, while Standard Chartered Bank, Jakarta Branch, has been appointed as Indonesian collateral agent with respect to the pledged shares.

17. WESEL SENIOR (lanjutan)

Biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Wesel Senior tersebut adalah sebesar Rp82,8 miliar. Hasil penerbitan Wesel Senior tersebut diteruskan oleh Bakrie Telecom Pte., Ltd kepada Perusahaan dalam bentuk pinjaman berdasarkan *Intercompany Loan Agreement* antara Bakrie Telecom Pte., Ltd dan Perusahaan tanggal 7 Mei 2010. Utang *intercompany* tersebut digunakan untuk melunasi utang dan modal belanja Perusahaan.

Pada tanggal 27 Januari 2011, Bakrie Telecom Pte., Ltd, menerbitkan Wesel Senior sebesar USD130 juta pada harga 107%. Wesel Senior tersebut dijamin oleh Perusahaan, PT Bakrie Connectivity, PT Bakrie Digital Net (dahulu PT Bakrie Network) dan Bakrie Telecom Pte., Ltd.

Hasil penerbitan Wesel Senior tersebut diteruskan oleh Bakrie Telecom Pte., Ltd kepada Perusahaan dalam bentuk pinjaman berdasarkan *Supplemental Intercompany Loan Agreement* antara Bakrie Telecom Pte., Ltd dan Perusahaan tanggal 27 Januari 2011. Utang *intercompany* tersebut digunakan untuk melunasi utang kepada CS dan belanja modal Perusahaan. Biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan USD130 juta Wesel Senior tersebut adalah sebesar Rp71,5 miliar.

Pada tanggal 22 September 2014, terdapat pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya sebagai pemegang 25% Wesel Senior-USD yaitu Universal Investment Advisory SA, Vaquero Master EM Credit Fund Ltd, dan Trucharm Ltd yang tergabung dalam Komite Ad Hoc, mengajukan gugatan terhadap Kelompok Usaha terkait dengan pembayaran bunga dan percepatan pembayaran pokok Wesel Senior yang diterbitkan oleh Bakrie Telecom Pte., Ltd. Gugatan tersebut terdaftar pada Pengadilan New York dengan nomor 652890/2014. Proses peradilan gugatan ini dihentikan sementara karena Perusahaan mengajukan permohonan Bab 15 atas keputusan PKPU ke Pengadilan Niaga New York (Catatan 18).

Penyelesaian atas utang dana hasil penerbitan Wesel Senior ini telah diatur dan ditetapkan dalam perjanjian perdamaian dalam PKPU perusahaan (Catatan 36).

17. SENIOR NOTES (continued)

The issuance costs related to the Senior Notes amounted to Rp82.8 billion. The proceeds of the Senior Notes were passed through by Bakrie Telecom Pte., Ltd to the Company in the form of loan based on Intercompany Loan Agreement between Bakrie Telecom Pte., Ltd and the Company dated May 7, 2010 and used to pay outstanding debt and for capital expenditures of the Company.

Bakrie Telecom Pte., Ltd, issued Senior Notes amounting to USD130 million on January 27, 2011 at 107%. These Senior Notes are guaranteed by the Company, PT Bakrie Connectivity, PT Bakrie Digital Net (formerly PT Bakrie Network) and Bakrie Telecom Pte., Ltd.

The proceeds of Senior Notes were passed through by Bakrie Telecom Pte., Ltd to the Company in the form of loan based on Supplemental Intercompany Loan Agreement between Bakrie Telecom Pte., Ltd and the Company dated January 27, 2011. The Intercompany Loan was used to pay outstanding debts to CS and for capital expenditure of the Company. The issuance costs related to the USD130 million Senior Notes amounted to Rp71.5 billion.

On September 22, 2014, parties acting on behalf of themselves as the holders of 25% of USD Senior Notes, namely Universal Investment Advisory SA, Vaquero EM Credit Master Fund Ltd, and Trucharm Ltd incorporated in the Ad Hoc Committee, and filed a lawsuit against the Group in connection with the acceleration of principal repayment and the payment of interest on the USD Senior Notes issued by Bakrie Telecom Pte., Ltd. The lawsuit was registered with the New York Supreme Court under a number 652890/2014. This proceeding was pending due to the submission of Chapter 15 petition by the company to the Bankruptcy Court of New York (Note 18).

The Company and Bakrie Telecom Pte., Ltd, is in the process of implementing restructuring the debt of Senior Notes (Note 36).

17. WESEL SENIOR (lanjutan)

Apapun putusan Pengadilan New York atas gugatan Komite Ad Hoc, penyelesaian utang dana hasil penerbitan Wesel Senior akan tetap mengacu pada Perjanjian Perdamaian PKPU Perusahaan (Catatan 36).

18. UTANG YANG DISELESAIKAN MELALUI PKPU

	31 Desember / December 31, 2022
Utang pihak berelasi atas penerbitan wesel senior	1.383.732
Utang penyedia menara	769.897
Utang usaha	1.171.039
Utang dengan jaminan	485.520
Utang biaya hak penggunaan dan <i>universal service obligation</i>	326.734
Utang akibat derivatif	54.508
Utang afiliasi	22.122
	<u>4.213.552</u>
Akrual bunga	718.389
Total	<u>4.931.941</u>

Saldo utang yang diselesaikan melalui PKPU per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp4.932 triliun dan Rp4.842 triliun. Penyelesaian utang PKPU termasuk dengan penerbitan obligasi wajib konversi senilai Rp 5.673 triliun.

Akrual bunga sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp718 miliar dan Rp628 miliar adalah merupakan pengakuan bunga berdasarkan PKPU antara Perusahaan dengan para kreditornya (Catatan 36).

Utang kepada kreditor dalam mata uang asing dikonversikan ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang ditentukan dalam PKPU (Catatan 36).

Pada tanggal 9 Desember 2014, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili permohonan PKPU oleh Netwave terhadap Perusahaan telah mengeluarkan keputusan yang mengesahkan (Homologasi) Perjanjian Perdamaian dalam PKPU antara Perusahaan dan para kreditornya (Catatan 36).

17. SENIOR NOTES (continued)

Regardless of the decision to be granted by the State Court of New York, the settlement of the Senior Notes shall refer to Settlement Agreement under PKPU ruling (Note 36).

18. SETTLEMENT OF PAYABLES THROUGH PKPU

	31 Desember / December 31, 2021	
	1.383.732	Due to related parties from issuance senior bonds
	769.897	Tower provider payables
	1.171.039	Trade payables
	485.520	Payables with collateral
		Payables on fee of rights to use and the universal service obligation
	326.734	
	54.508	Derivatives payables
	22.122	Affiliate payables
	<u>4.213.552</u>	
	628.591	Accrued interest
Total	<u>4.842.143</u>	Total

The debt balances that were settled through PKPU as of December 31, 2022 and 2021 were Rp4,932 trillion and Rp4,842 trillion, respectively. PKPU debt settlement including the issuance of mandatory convertible bonds worth Rp5,673 trillion.

Accrued interest up to December 31, 2022 and 2021, amounting to Rp718 billion and Rp628 billion, respectively, represents interest recognition based on the PKPU, between the Company and its creditors (Note 36).

Debt to creditors in foreign currency is converted into rupiah currency using the exchange rate determined in PKPU (Note 36).

On December 9, 2014, the judges of the Commercial Court in Central Jakarta District Court and the PKPU adjudicators of Netwave petition against the Company issued a decision officially approving in PKPU, the Amicable Settlement Agreement between the Company and its creditors (Note 36).

**18. UTANG YANG DISELESAIKAN MELALUI PKPU
(lanjutan)**

Sesuai dengan Perjanjian Perdamaian dalam PKPU, kreditor atas Utang Tower Provider dapat menghentikan layanan penggunaan tower yang disewa oleh Perusahaan akhir bulan Juni 2015, kecuali ditentukan lain oleh Perusahaan dan kreditor atas Utang Tower Provider terkait.

Pada bulan Juni 2015, Perusahaan menghentikan layanan penggunaan tower yang disewa. Sesuai dengan Perjanjian Perdamaian dalam PKPU maka 100% dari nilai sisa masa sewa akan ditukar dengan Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bond* (MCB-A). Pada tahun 2015, Perusahaan mencatat utang nilai sisa masa sewa sebesar Rp1.818,7 miliar dan beban terkait disajikan dalam laba rugi sebesar Rp1.667,8 miliar.

Pada tanggal 26 Juni 2016, Perusahaan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang menyetujui penambahan modal Perusahaan atau penerbitan saham baru Perusahaan tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dengan mekanisme penerbitan Obligasi Wajib Konversi terlebih dahulu. Saham baru Perusahaan tersebut diterbitkan sebadai pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian.

Berdasarkan keterangan dari konsultan hukum Perusahaan di Amerika Serikat sehubungan dengan putusan atau *court order* tertanggal 6 Mei 2021 dari Pengadilan Kepailitan New York atas permohonan Bab 15 yang diajukan Perusahaan, dinyatakan bahwa Pengadilan Kepailitan New York telah mengabulkan permohonan Bab 15 BTEL sebagai berikut:

- a. Memberikan pengakuan atas keputusan PKPU BTEL sebagai *foreign main proceeding*.
- b. Memberikan perlindungan kepada BTEL atas setiap klaim terhadap BTEL dan aset-aset milik BTEL di Amerika Serikat.
- c. Memberikan hak kepada BTEL untuk mengajukan permohonan perlindungan atau bantuan lainnya kepada Pengadilan New York.

**18. SETTLEMENT OF PAYABLES THROUGH
PKPU (continued)**

Based on the Amicable Settlement Agreement, creditors of Tower Provider Payables may terminate the usage service of leased tower by the Company by at the latest June 2015, unless otherwise determined by the Company and its creditors in relation to Tower Provider Payables.

In June 2015, the Company discontinued the use of the leased service tower. Based on the Amicable Settlement Agreement, 100% of the residual value of the lease will be exchanged with the Mandatory Convertible Bond (MCB-A). In 2015, the Company booked residual value payable of the lease amounting to Rp1,818.7 billion and the related expense was presented in profit or loss amounting Rp1,667.8 billion.

On June 26, 2016, Company obtained approval from the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) which approved the issuance of new shares by way of non-preemptive rights by issuing Mandatory Convertible Bonds before hand. The new shares to be issued as the implementation of conversion of Mandatory Convertible Bonds as governed under the Amicable Settlement Agreement.

Based on information from the Company's legal consultant in the United States regarding the decision or court order dated May 6, 2021 from the Bankruptcy Court of New York on the application for Chapter 15 submitted by the Company, it is stated that the Bankruptcy Court of New York has granted the application for Chapter 15 of BTEL as follows:

- a. *Giving recognition to BTEL's PKPU decision as a foreign main proceeding.*
- b. *Provide protection to BTEL for any claims against BTEL and BTEL's assets in the United States.*
- c. *Granting the right to BTEL to apply for protection or other assistance to the New York Court.*

18. UTANG YANG DISELESAIKAN MELALUI PKPU
(lanjutan)

Berdasarkan putusan Pengadilan Kepailitan New York tersebut yang memberikan pengakuan putusan PKPU BTEL sebagai *foreign main proceeding*, BTEL mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hukum Amerika Serikat dimana pemegang Wesel Senior dan pihak manapun juga tidak dapat melakukan klaim atau tuntutan terhadap BTEL maupun terhadap aset-aset di Amerika Serikat milik BTEL.

Keputusan tersebut ataupun jika ada putusan lain dari badan peradilan manapun, tidak mempengaruhi keberlakuan putusan PKPU BTEL yang telah mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan hukum Indonesia.

Jika pemegang wesel senior akan melakukan klaim terhadap BTEL, maka klaim tersebut hanya dapat dilakukan memakai yuridiksi Indonesia, dimana terhadap klaim tersebut sudah diatur penyelesaiannya dalam putusan PKPU.

Di samping itu Pengadilan Kepailitan New York juga menegaskan hak bagi BTEL untuk mengajukan permohonan lainnya kepada Pengadilan Kepailitan New York untuk memberlakukan atau implementasi Keputusan PKPU di Amerika Serikat.

Keputusan tersebut di atas merupakan keputusan terakhir yang terima sampai oleh BTEL sampai dengan tanggal laporan ini.

Dengan keputusan PKPU yang sudah dikuatkan oleh keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta memperoleh pengakuan (*recognition*) sebagai *foreign main proceeding* berdasarkan Bab 15 dari Pengadilan Kepailitan New York, yang mana BTEL mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hukum Amerika Serikat dimana pemegang wesel senior dan pihak manapun juga tidak dapat melakukan klaim atau tuntutan terhadap BTEL maupun terhadap aset-aset di Amerika Serikat milik BTEL, maka diyakini bahwa BTEL dapat melakukan kegiatan bisnis seperti yang direncanakan bersamaan dengan implementasi PKPU tanpa ada kekhawatiran adanya klaim diluar yang sudah disepakati dalam keputusan PKPU.

18. SETTLEMENT OF PAYABLES THROUGH PKPU (continued)

Based on the New York Bankruptcy Court decision which recognized BTEL's PKPU decision as a foreign main proceeding, BTEL received legal protection under United States law where Senior Note holders and any other party could not make claims or demands against BTEL or assets in the United States. owned by BTEL.

This decision or if there is another decision from any judicial body, does not affect the validity of the BTEL PKPU decision which is binding and has permanent legal force based on Indonesian law.

Should the note holders intend to make a claim towards BTEL, then the claim shall only be made within the jurisdiction of Indonesia where the settlement of such claim is already governed under the PKPU decision.

Aside from the above, the New York Bankruptcy Court asserts the rights for BTEL to submit other request to the New York Bankruptcy Court in order for the PKPU decision to be implemented and enforced in United States of America.

The above-mentioned decisions are the latest decision received by BTEL to date.

Given the PKPU decision has been reinforced by the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia and acquired a recognition as a foreign main proceeding pursuant to the Chapter 15 from the New York Bankruptcy Court in which BTEL is granted a legal protection based on the laws of United States of America where the note holders or any other party shall not make any claim and lawsuit against BTEL and or any asset in United States of America owned by BTEL, it is believed that BTEL is able to carry out its business activities as planned simultaneously with the implementation of PKPU without any concern of claims made outside the agreed-PKPU decision.

18. UTANG YANG DISELESAIKAN MELALUI PKPU
(lanjutan)

BTEL sendiri pada tahun 2016 telah melaksanakan keputusan PKPU yaitu menerbitkan dan menyerahkan OWK para kreditur termasuk kepada BTPL dan selanjutnya OWK akan diserahkan oleh BTPL kepada pemegang Wesel Senior.

**18. SETTLEMENT OF PAYABLES THROUGH
PKPU (continued)**

BTEL, in 2016, has carried out its obligation under the PKPU Decision by issuing and handing over the MCB to creditors including BTPL and thereafter the MCB to be handed over by BTPL to the note holders.

19. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 berdasarkan catatan yang dibuat oleh PT Ficomindo Buana Registrar adalah sebagai berikut:

19. CAPITAL STOCK

The composition of shareholders as of December 31, 2022 and 2021 based on registration by PT Ficomindo Buana Registrar, was as follows:

Pemegang Saham	31 Desember / December 31, 2022		31 Desember / December 31, 2021	
	Jumlah saham / Ditempatkan dan disetor penuh (dalam satuan penuh) / Number of shares issued and fully paid (in full amount)	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Shareholders	
Total saham biasa seri A dan B			Total common shares series A and B	
PT Huawei Tech Investment	6.189.313.980	16,81%	PT Huawei Tech Investment	
PT Mahindo Agung Sentosa	5.000.439.000	13,58%	PT Mahindo Agung Sentosa	
PT Bakrie Global Ventura	2.639.582.576	7,17%	PT Bakrie Global Ventura	
Raiffeisen Bank International s/a Best Quality Global Limited	2.213.279.000	6,01%	Raiffeisen Bank International s/a Best Quality Global Limited	
Credit Suisse AG Singapore Branch S/A Bright Ventures Pte Ltd	1.980.000.000	5,38%	Credit Suisse AG Singapore Branch S/A Bright Ventures Pte Ltd	
PT Bakrie Brothers Tbk	43.043.142	0,12%	PT Bakrie Brothers Tbk	
Masyarakat	18.757.008.057	50,94%	Public	
Total	36.822.665.755	100,00%	Total	

Pada tanggal 3 Februari 2006, perusahaan mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta).

On February 3, 2006, the Company listed its shares on the Indonesia Stock Exchange (previously Jakarta Stock Exchange).

Pada tanggal 1 Maret 2017, PT Huawei Tech Investment telah mengkonversi Obligasi Wajib Konversi yang dimiliki sebesar Rp1.237.862.796.141 menjadi saham Perusahaan sebanyak 6.189.313.980 lembar saham.

On March 1, 2017, Mandatory Convertible Bond owned by PT Huawei Tech Investment amounting to Rp1,237,862,796,141 has converted to shares of the Company of 6,189,313,980 shares.

19. MODAL SAHAM (lanjutan)

Modal saham Perusahaan, PT Bakrie Connectivity dan PT Bakrie Digital Net (dahulu PT Bakrie Network), Entitas Anak, pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, digunakan sebagai jaminan atas Wesel Senior yang diterbitkan oleh Bakrie Telecom Pte., Ltd., sebelumnya Entitas Anak (Catatan 17).

Jumlah saham modal dasar pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 berdasarkan anggaran dasar Perusahaan adalah sebagai berikut:

Jenis saham	Jumlah saham modal dasar (dalam satuan penuh)/ Number of authorized shares (in full amount)	Nominal/ Nominal (Rp)	Total dalam jutaan rupiah/ Total in million rupiah	Shares
Saham biasa seri A	10.000.000.000	200	2.000.000	Common shares series A
Saham biasa seri B	87.111.652.195	100	8.711.165	Common shares series B
Total	97.111.652.195		10.711.165	Total

Sesuai dengan hasil keputusan RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2015 sebagaimana tertuang dalam akta notaris No. 28 tanggal 10 Juli 2015 oleh Lenny Janis Ishak, SH; modal dasar Perusahaan ditingkatkan menjadi Rp10.711.165.219.500 (dalam satuan penuh) dengan komposisi saham seri A sejumlah sepuluh miliar (10.000.000.000) saham dengan nilai nominal dua ratus rupiah (Rp200) setiap saham dan saham seri B sejumlah delapan puluh tujuh miliar seratus sebelas juta enam ratus lima puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima (87.111.652.195) saham dengan nilai nominal seratus rupiah (Rp100) setiap saham.

20. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Melalui Penawaran Umum Perdana pada tanggal 3 Februari 2006, Perusahaan telah menerima sebesar Rp605 miliar untuk penawaran lima miliar lima ratus juta (5.500.000.000) saham seri B atas nama dengan nilai nominal seratus rupiah (Rp100) dengan harga penawaran seratus sepuluh rupiah (Rp110).

19. CAPITAL STOCK (continued)

As of December 31, 2022 and 2021, the capital stock of the Company, PT Bakrie Connectivity and PT Bakrie Digital Net (formerly PT Bakrie Network), Subsidiaries, were used as collateral for the Senior Notes issued by Bakrie Telecom Pte., Ltd., previously A Subsidiary (Note 17).

The number of authorized shares as of December 31, 2022 and 2021 based on the Company's articles of association, was as follows:

Based on the result of the Extraordinary General Shareholders' Meeting held on June 22, 2015 as stated in the notarial deed No. 28 dated July 10, 2015 of Lenny Janis Ishak, SH; the authorized capital of the Company has increased to be of Rp10,711,165,219,500 (in full amount) consist of common stock series A of ten billion (10,000,000,000) share with nominal value of two hundred rupiah (Rp200) per share and common stock series B of eighty seven billion, one hundred eleven million, six hundred fifty two thousand, one hundred ninety five (87,111,652,195) share with nominal value of one hundred rupiah (Rp100) per share.

20. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Through the Initial Public Offering on February 3, 2006, the Company received the amount of Rp605 billion for the offering of five billion five hundred million (5,500,000,000) share series B with nominal value of one hundred rupiah (Rp100) at an offering price of one hundred and ten rupiah (Rp110).

20. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

Melalui Penawaran Umum Terbatas I pada tanggal 29 Februari 2008, Perusahaan menerbitkan sebanyak-banyaknya sejumlah delapan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh dua (8.638.079.352) saham dengan nilai nominal seratus rupiah (Rp100) setiap saham yang ditawarkan dengan harga tiga ratus lima puluh rupiah (Rp350) setiap saham dengan nilai keseluruhan sebanyak-banyaknya sebesar Rp3 triliun dan dengan selisih harga yang ditawarkan dengan harga nominal sebesar Rp2,2 triliun.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I, Perusahaan telah melakukan penyesuaian harga pelaksanaan sebesar seratus dua puluh tujuh rupiah (Rp127) setiap sahamnya dan menerbitkan sebanyak tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh satu (38.549.131) lembar Waran Seri I yang berlaku efektif mulai tanggal 27 Maret 2008. Waran Seri I merupakan lanjutan dari Penawaran Umum Saham Perdana.

Selisih neto antara harga penawaran dengan harga nominal diakui sebagai tambahan modal disetor pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

20. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

Through the Rights Issue I on February 29, 2008, the Company issued a maximum of eight billion, six hundred thirty-eight million, seventy-nine thousand, three hundred fifty-two (8,638,079,352) shares with nominal value of one hundred rupiah (Rp100) per share, which were offered at three hundred fifty rupiah (Rp350) per share in the total maximum amount of Rp3 trillion and with an excess offering price over nominal price amounting to Rp2.2 trillion.

In accordance with Rights Issue I, the Company adjusted the exercise price to one hundred twenty-seven rupiah (Rp127) per share and issued thirty-eight million, five hundred forty-nine thousand, one hundred thirty-one (38,549,131) Series I Warrants effective March 27, 2008. Series I Warrants were an extension of the Initial Public Offering.

Net excess of price over par value of shares between nominal price and offering price was recognized as additional paid-in capital as of December 31, 2022 and 2021 as follows:

	31 Desember 2022 dan 2021			
	December 31, 2022 and 2021			
	Sisa Lebih		Selisih Lebih	
	Harga Atas Nilai	Biaya	Harga Atas	
	Nominal	Penerbitan	Nilai	
(Satuan penuh)				(Full amount)
Penerbitan 5.500.000.000 saham melalui penawaran umum (Catatan 1b)	55.000	27.229	27.771	Issuance of 5,500,000,000 shares through initial public offering (Note 1b)
Penerbitan 566.037.736 saham seri B melalui PMTHMETD (Catatan 1e)	93.396	-	93.396	Issuance of 566,037,736 shares series B through PMTHMETD (Note 1e)
Penerbitan 1.536.135.340 saham seri B melalui PMTHMETD (Catatan 1e)	253.462	11	253.451	Issuance of 1,536,135,340 shares series B through PMTHMETD (Note 1e)
Penerbitan 8.626.486.836 saham melalui PUT (Catatan 1c)	2.156.622	80.881	2.075.741	Issuance of 8,626,486,836 shares through right issue (Note 1c)
Penerbitan 1.076.515.248 saham melalui pelaksanaan waran	37.655	-	37.655	Issuance of 1,076,515,248 shares through exercise of warrants
Pengampunan pajak	857	-	857	Tax amnesty
Total	2.596.992	108.121	413.130	Total

21. SAHAM BEREDAR YANG DIPEROLEH KEMBALI

Transaksi saham beredar yang diperoleh kembali adalah sebagai berikut:

21. TREASURY STOCK

Transactions regarding treasury stock were as follows:

31 Desember 2022 dan 2021/ December 31, 2022 and 2021					
Keterangan	Periode/ Period	Jumlah saham (Dalam satuan penuh)/ Number of Shares (in full amount)	Realisasi/ Realization (%)	Harga Nominal/ Par Value Shares	Description
Disetujui dalam rapat Direksi (Catatan 1d)	2008	11.000.000.000			Approved in Board of Directors Meeting (Note 1d)
Pembelian kembali	2008	689.000.000	6,27%	68.900	Buy back
Penerbitan kembali	2009	(579.000.000)		(57.900)	Re issuance
Total		110.000.000		11.000	Total

Selisih neto antara harga perolehan dengan harga nominal per lembar saham diakui sebagai "Agi Saham Beredar yang Diperoleh Kembali" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Net excess of price over par value of shares between nominal price and acquisition price was recognized as "Premium on Treasury Stock" in the consolidated statements of financial position.

22. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

a. Kepentingan non-pengendali atas aset neto Entitas Anak

	31 Desember / December 31, 2022
PT Bakrie Connectivity	(21)
PT Anugerah Andalan Investama	(10.089)
Total	(10.110)

b. Laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali

	31 Desember / December 31, 2022
PT Anugerah Andalan Investama	(5.074)
Total	(5.074)

22. NON-CONTROLLING INTEREST

a. Non-controlling interest in net assets of Subsidiaries

	31 Desember / December 31, 2021	
PT Bakrie Connectivity	(21)	
PT Anugerah Andalan Investama	(4.665)	
Total	(4.686)	Total

b. Income (loss) attributable to non-controlling interest

	31 Desember / December 31, 2021	
PT Anugerah Andalan Investama	(9.648)	
Total	(9.648)	Total

23. PENDAPATAN USAHA

Pendapatan usaha tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 meliputi pendapatan yang berasal dari jasa telekomunikasi dan teknologi informasi, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember / December 31,		
	2022	2021	
Pendapatan layanan infrastruktur media	26.414	25.992	Media infrastructure services
Pendapatan jasa telekomunikasi	9.451	7.948	Telecommunication services revenue
Pendapatan jasa periklanan digital	7.162	14.606	Digital advertising agency
Pendapatan jasa teknologi informasi	4.823	3.564	Information technology services
Beban pokok pendapatan	(15.480)	(15.719)	Cost of revenues
Pendapatan Usaha - Neto	32.370	36.391	Operating Revenues - Net

Transaksi pendapatan yang berasal dari pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp38,24 miliar dan Rp37,01 miliar (Catatan 28).

Selain itu, terdapat biaya bagi hasil untuk pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp251 juta dan Rp742 juta yang dicatat sebagai bagian dari potongan harga dan biaya bagi hasil.

23. REVENUE

Operating revenues for the year ended December 31, 2022 and 2021 represent revenues from telecommunication services and information technology, with details as follows:

	31 Desember / December 31,		
	2022	2021	
Operating revenues from related parties for the years ended December 31, 2022 and 2021, amounted to Rp38.24 billion and Rp37.01 billion, respectively (Note 28).			
In addition, revenue sharing cost to related party for the years ended December 31, 2022 and 2021 amounting to Rp251 million and Rp742 juta, was recorded as part of discount and sharing cost.			

24. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	31 Desember / December 31,		
	2022	2021	
Jasa profesional	9.102	2.299	Professional fees
Perbaikan dan pemeliharaan	1.904	10.796	Repair and maintenance
Penelitian	1.800	-	Research
Beban imbalan kerja	1.674	817	Employee benefit expenses
Asuransi	1.142	821	Insurance
Transportasi	570	448	Transportation
Telepon, listrik dan air	439	74	Telephone, electricity and water
Perizinan, lisensi dan bea masuk	435	769	Permits, licenses and customs clearance
Biaya kantor	434	143	Office expenses
Iklan, promosi dan pameran	236	1.195	Advertising, promotion and exhibition
Sewa	104	76	Rent
Rugi penurunan nilai piutang usaha (Catatan 6)	-	222	Bad debt expenses (Note 6)
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp100 juta)	1.482	772	Others (each below Rp100 million)
Total	19.322	18.432	Total

24. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

24. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI
 (lanjutan)

Beban jasa profesional terutama ditimbulkan dari jasa konsultan hukum terkait dengan penanganan perkara litigasi dimana Perusahaan mengajukan permohonan Bab 15 kepada Pengadilan Kepailitan New York berdasarkan Undang-undang Kepailitan Amerika Serikat untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum berdasarkan hukum Amerika Serikat atas putusan PKPU Perusahaan. (Catatan 18)

24. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES
 (continued)

Professional fees are mainly incurred from legal consulting services related to the handling of litigation cases where the Company submitted a Chapter 15 application to the New York Bankruptcy Court under the United States Bankruptcy Law to obtain legal recognition and protection under United States law for the Company's PKPU decision. (Notes 18)

25. BEBAN KARYAWAN

25. EMPLOYEES EXPENSES

	31 Desember / December 31,		
	2022	2021	
Gaji dan upah	29.333	23.821	Salaries and wages
Transportasi	178	202	Transportation
Tunjangan kesehatan	86	94	Medical allowance
Tunjangan uang makan	41	17	Meal allowance
Tunjangan PPh 21	23	-	Tax art 21 allowance
Pelatihan	-	5	Training
Total	29.661	24.139	Total

26. PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN

26. OTHER INCOME (CHARGES)

a. Selisih kurs

a. Foreign exchange

	31 Desember / December 31,		
	2022	2021	
Laba selisih kurs	31.961	351	Gain on foreign exchange
Rugi selisih kurs	(39.018)	(2.668)	Loss on foreign exchange
Total	(7.057)	(2.317)	Total

b. Beban keuangan

b. Financing charges

	31 Desember / December 31,		
	2022	2021	
Beban bunga dan beban keuangan lainnya (Catatan 18)	(89.799)	(89.799)	Interest charges and other financial charges (Notes 18)
Administrasi bank	(15)	(32)	Bank charges
Total	(89.814)	(89.831)	Total

26. PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN (lanjutan)

26. OTHER INCOME (CHARGES) (continued)

c. Lain-lain

c. Others

	31 Desember / December 31,		
	2022	2021	
Penghasilan bunga	891	350	Interest income
Lain-lain	(5.269)	3.818	Others
Total	(4.378)	4.168	Total

27. PERPAJAKAN

27. TAXATION

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid taxes

	31 Desember / December 31, 2022		
	2022	2021	
Pajak Pertambahan Nilai	2.615	217	Value-Added Tax
Total	2.615	217	Total

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	31 Desember / December 31, 2022		
	2022	2021	
Pajak Penghasilan			Income taxes
Pasal 21	15.268	14.221	Article 21
Pasal 23	1.766	1.750	Article 23
Pasal 26	3.933	3.858	Article 26
Pasal 29	363	636	Article 29
Pasal 4 (2)	38	-	Article 4 (2)
Pajak Pertambahan Nilai	6.692	4.328	Value-Added Tax
Total	28.060	24.791	Total

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

27. TAXATION (continued)

c. Pajak Kini

c. Current Tax

Rekonsiliasi antara rugi sebelum beban pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran rugi fiskal untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Reconciliation between loss before income tax expense as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and the estimated fiscal loss for the years ended December 31, 2022 and 2021 was as follows:

	31 Desember / December 31,		
	2022	2021	
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	(117.972)	(94.251)	Profit (loss) before income tax expenses per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Laba (rugi) Entitas Anak sebelum beban pajak penghasilan	(10.473)	2.777	Income (loss) of Subsidiaries before income tax expenses
Rugi sebelum beban pajak yang dapat diatribusikan kepada Perusahaan	(107.499)	(97.028)	Loss before income tax expense attributable to the Company
Beda temporer			Temporary differences
Depresiasi	24	13	Depreciation
Penyisihan imbalan kerja	209	134	Provision for employee benefits
Total	233	147	Total
Beda tetap			Permanent differences
Beban bunga	89.799	89.799	Interest expenses
Total	89.799	89.799	Total
Taksiran rugi fiskal	(17.467)	(7.082)	Estimated fiscal loss

	31 Desember / December 31,		
	2022	2021	
2016	-	(1.103.798)	2016
2017	(899.102)	(899.102)	2017
2018	(119.415)	(119.415)	2018
2019	7.858	7.858	2019
2020	(5.284)	(5.284)	2020
2021	(7.082)	(7.082)	2021
2022	(17.467)	-	2022
Total rugi fiskal	(1.040.492)	(2.126.823)	Total fiscal loss
Total Akumulasi Rugi Fiskal	(1.040.492)	(2.126.823)	Estimated Cumulative Fiscal Loss

Perusahaan tidak melakukan penyisihan beban pajak penghasilan kini karena Perusahaan masih mengalami rugi fiskal.

No provision for current income tax expense was made due to the Company still being in a fiscal loss position.

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

- d. Pajak tangguhan
- Manajemen berkeyakinan bahwa Perusahaan tidak mengakui aset pajak tangguhan karena besar kemungkinan aset pajak tangguhan tidak dapat terealisasi di masa yang akan datang.

27. TAXATION (continued)

- d. *Deferred Tax*
- The management believed that the Company did not recognize deferred tax assets because it is probable that deferred tax assets can not be realized in the future.*

28. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha yang normal, Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

28. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Group entered into transactions with related parties.

	31 Desember / December 31,		
	2022	2021	
Penjualan kepada:			<i>Revenue to:</i>
PT Cakrawala Andalas			<i>PT Cakrawala Andalas</i>
Televisi	17.400	17.400	<i>Televisi</i>
PT Lativi Media Karya	11.342	13.605	<i>PT Lativi Media Karya</i>
PT Digi Bintang Sinergi	4.867	1.145	<i>PT Digi Bintang Sinergi</i>
PT Viva Media Baru	14	238	<i>PT Viva Media Baru</i>
Total	38.246	37.011	Total
Persentase terhadap			Percentage to Total
Total Penjualan Konsolidasian	79,9297%	71,0250%	Consolidated Revenues

Sifat dan hubungan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Nature of relationships and transactions with related parties were as follows:

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan/ Nature of Relationship	Related Parties
PT Bakrie Swasakti Utama	<i>Afiliasi / Affiliate</i>	<i>PT Bakrie Swasakti Utama</i>
PT Provinces Indonesia	<i>Afiliasi / Affiliate</i>	<i>PT Provinces Indonesia</i>
PT Multi Kontrol Nusantara	<i>Afiliasi / Affiliate</i>	<i>PT Multi Kontrol Nusantara</i>
PT Viva Media Baru	<i>Afiliasi / Affiliate</i>	<i>PT Viva Media Baru</i>
PT Asia Global Media	<i>Afiliasi / Affiliate</i>	<i>PT Asia Global Media</i>
Koperasi Karyawan Mitra Usaha Dinamika	<i>Afiliasi / Affiliate</i>	<i>Koperasi Karyawan Mitra Usaha Dinamika</i>
PT Bakrie Global Ventura	<i>Afiliasi / Affiliate</i>	<i>PT Bakrie Global Ventura</i>
PT Cakrawala Andalas Televisi	<i>Afiliasi / Affiliate</i>	<i>PT Cakrawala Andalas Televisi</i>
PT Lativi Media Karya	<i>Afiliasi / Affiliate</i>	<i>PT Lativi Media Karya</i>
PT Digi Bintang Sinergi	<i>Afiliasi / Affiliate</i>	<i>PT Digi Bintang Sinergi</i>
PT Viva Media Baru	<i>Afiliasi / Affiliate</i>	<i>PT Viva Media Baru</i>

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR ENDED**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

Piutang Pihak Berelasi

	31 Desember / December 31, 2022
Piutang jangka panjang	
PT Cakrawala Andalas Televisi	2.820
PT Lativi Media Karya	2.820
Total	5.640
Persentase terhadap Total Piutang Konsolidasian	47,1104%

Utang Pihak Berelasi

	31 Desember / December 31, 2022
Liabilitas jangka panjang	
Koperasi Karyawan Mitra Usaha Dinamika	35.186
PT Bakrie Global Ventura	12.086
PT Multi Kontrol Nusantara	2.851
PT Viva Media Baru	146
PT Cakrawala Andalas Televisi	11.096
Total	61.365
Persentase terhadap Total Liabilitas Konsolidasian	1,0418%

Utang pihak berelasi yang diperoleh PT Bakrie Connectivity (BCON), Entitas Anak, dari Koperasi Karyawan Mitra Usaha Dinamika (Komunika) merupakan utang usaha yang pembayarannya ditunda sejak tanggal 23 Desember 2014.

Utang pihak berelasi yang diperoleh Perusahaan dari PT Bakrie Global Ventura merupakan utang yang pembayarannya ditunda sejak tanggal 24 Maret 2015.

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Liabilitas imbalan kerja Kelompok Usaha pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang masing-masing dihitung oleh aktuaris independen KKA Nurichwan dan PT Sigma Prima Solusindo dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dan mempertimbangkan beberapa asumsi sebagai berikut:

28. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

Due From Related Parties

	31 Desember / December 31, 2021
Non current receivable	
PT Cakrawala Andalas Televisi	2.820
PT Lativi Media Karya	2.820
Total	5.640
Percentage to Total Consolidated Receivables	47,3004%

Due To Related Parties

	31 Desember / December 31, 2021
Non current liabilities	
Koperasi Karyawan Mitra Usaha Dinamika	35.186
PT Bakrie Global Ventura	12.086
PT Multi Kontrol Nusantara	2.851
PT Viva Media Baru	146
PT Cakrawala Andalas Televisi	-
Total	50.269
Percentage to Total Consolidated Liabilities	0,8732%

Due to a related party obtained by PT Bakrie Connectivity (BCON), a Subsidiary, from Koperasi Karyawan Mitra Usaha Dinamika (Komunika) represents trade payable, which payment was deferred starting from December 23, 2014.

Due to a related party obtained by the Company from PT Bakrie Global Ventura represents payable, which payment was starting from March 24, 2015.

29. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY

The employee benefits liability of the Group as of December 31, 2022 and 2021 as determined by an independent firm of actuaries KKA Nurichwan and PT Sigma Prima Solusindo respectively using the "Projected Unit Credit" method and considering the following assumptions:

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

29. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

Tingkat diskonto	7,01% pada 31 Desember 2022 dan 7,22% pada 31 Desember 2021 7,01% in December 31, 2022 and 7,22% in December 31, 2021		Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	6,5% per tahun / per annum		Salary increment rate
Tingkat mortalitas	TMI-IV tahun 2019 / TMI-IV year 2019		Mortality rate
Tingkat kemungkinan	5% dari tingkat mortalitas / 5% of mortality rate		Disability rate
Usia pensiun normal	55 tahun / 55 years		Normal retirement age
Tingkat Pengunduran diri	1% - 5%		Resignation rate

Analisa sensitivitas kuantitatif liabilitas imbalan kerja terhadap perubahan asumsi utama tertimbang pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

The quantitative sensitivity analysis of the employee benefits liability to the changes in the weighted principal assumptions as of December 31, 2022 was as follows:

	Peningkatan (Penurunan) / Increase (Decrease)	Nilai kini liabilitas imbalan pasti/ Present value of defined benefits obligation	
Tingkat diskonto	1,00%	2.368	Discount rate
	-1,00%	2.666	
Tingkat kenaikan gaji	1,00%	2.666	Salary increment rate
	-1,00%	2.366	

Kelompok Usaha tidak menghadapi risiko signifikan terkait program imbalan kerja, atas perubahan asumsi di atas.

The Group was not exposed to a number of significant risks related to its employee benefit plans, from the changes assumptions above.

Tabel berikut ini merangkum komponen-komponen atas beban imbalan kerja karyawan yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan total yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai liabilitas imbalan kerja untuk Perusahaan.

The following tables summarize the components of employee benefits expense recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and amounts recognized in the consolidated statement of financial position as employee benefits liability for the Company.

Liabilitas imbalan kerja karyawan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Employee benefits liability for the years ended December 31, 2022 and 2021 as follow:

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Nilai kini liabilitas kewajiban kerja	12.708	14.160	Present value of benefits liability
Liabilitas imbalan kerja	12.708	14.160	Employee benefits liability

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2022
Saldo awal	14.160
Beban imbalan kerja karyawan	1.674
Rugi (penghasilan) komprehensif lain	(2.409)
Realisasi pembayaran manfaat	(717)
Saldo Akhir	12.708

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2022
Nilai kini liabilitas imbalan kerja pada awal tahun	14.160
Biaya jasa kini	746
Biaya bunga	952
Dampak kurtailmen atau penyelesaian program	-
Pengukuran kembali dari : Keuntungan (kerugian) aktuarial yang timbul dari : Perubahan dalam asumsi aktuaris	(24)
Beban komprehensif lain	(2.409)
Imbalan yang dibayar	(717)
Nilai Kini Liabilitas Imbalan Kerja Pada Akhir Tahun	12.708

Jadwal jatuh tempo dari liabilitas imbalan pasti pada

	31 Desember/ December 31, 2022
Dalam waktu 12 bulan berikutnya (periode laporan tahunan berikutnya)	-
Antara 1 dan 3 tahun	1.589
Antara 3 dan 5 tahun	-
Antara 5 dan 10 tahun	-
Di atas 10 tahun	11.119
Total	12.708

29. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

Movements of employee benefits liability were as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021	
	385	<i>Beginning balance</i>
	817	<i>Employee benefits expense</i>
	13.403	<i>Other comprehensive loss (income)</i>
	(445)	<i>Actual benefits payments</i>
	14.160	<i>Ending Balance</i>

Movements of the present value of the employee benefits liability were as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021	
	385	<i>Present value of employee benefits liability at beginning of the year</i>
	879	<i>Current-service cost</i>
	28	<i>Interest cost</i>
	-	<i>Cutailment effect or program settlement</i>
	-	<i>Remeasurements from : Actuarial gain (losses) arisig from: changes in actuary assumption</i>
	(90)	<i>Other comprehensive loss</i>
	13.403	<i>Benefit paid</i>
	(445)	
	14.160	<i>Present Value of Employee Benefits Liability at End of Year</i>

The maturity profile of defined benefits obligation

	31 Desember/ December 31, 2021	
	-	<i>Within the next 12 months (the next period yearly report)</i>
	1.770	<i>Between 1 and 3 years</i>
	-	<i>Between 3 and 5 years</i>
	-	<i>Between 5 and 10 years</i>
	12.390	<i>Beyond 10 years</i>
	14.160	<i>Total</i>

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Perbandingan nilai kini liabilitas imbalan kerja, dan penyesuaian yang timbul akibat perbedaan antara asumsi aktuarial dan kenyataan selama lima (5) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Nilai kini liabilitas						Present value of employee
kewajiban kerja	(12.708)	(14.160)	(385)	(206)	(1.095)	benefit liability
Penyesuaian dalam						Adjustment on
liabilitas	39	(246)	(246)	(952)	450	liability

30. INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dan taksiran nilai wajar dari instrumen keuangan yang dicatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 :

29. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

Comparison of the present value of employee benefits liability, and the experience adjustments (the effects of differences between the previous actuarial assumptions and what has actually

30. FINANCIAL INSTRUMENTS

The following table presents the carrying amounts and the estimated fair values: of the financial instruments carried in the consolidated statements of financial position as of December 31, 2022 and 2021 :

Akun	<u>31 Desember 2022 / December 31, 2022</u>		Accounts Financial Assets
	<u>Nilai Tercatat/ Carrying Amounts</u>	<u>Nilai Wajar/ Fair Values</u>	
Aset Keuangan			
<u>Diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi</u>			<u>Measured at amortized Cost</u>
Kas	23	23	Cash on hand
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>			<u>Loans and receivables</u>
Kas di bank	381	381	Cash in bank
Kas yang dibatasi			
Piutang usaha	5.357	5.357	Trade receivables
Total Aset Keuangan	<u>5.761</u>	<u>5.760</u>	Total Financial Assets

Akun	<u>31 Desember 2022 / December 31, 2022</u>		Accounts Financial Liabilities
	<u>Nilai Tercatat/ Carrying Amounts</u>	<u>Nilai Wajar/ Fair Values</u>	
Liabilitas Keuangan			
<u>Diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi</u>			<u>Measured at amortized Cost</u>
Utang usaha	443.088	443.088	Trade payables
Utang lain-lain	179.945	179.945	Other payables
Beban akrual	247.088	247.088	Accrued expenses
Utang pihak berelasi atas penerbitan wesel senior	4.944.536	4.944.536	Due to related parties from issuance senior bonds
Utang pihak berelasi	61.365	61.365	Due to related parties
Utang yang diselesaikan melalui PKPU	4.931.941	4.931.941	Settlement of payables through PKPU
Total Liabilitas Keuangan	<u>10.807.963</u>	<u>10.807.963</u>	Total Financial Liabilities

30. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

30. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

Akun	31 Desember 2021/ December 31, 2021		Accounts Financial Assets
	Nilai Tercatat/ Carrying Amounts	Nilai Wajar/ Fair Values	
Aset Keuangan			Financial Assets
<u>Diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi</u>			<u>Measured at amortized Cost</u>
Kas	30	30	Cash on hand
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>			<u>Loans and receivables</u>
Kas di bank	3.123	3.123	Cash in bank
Piutang usaha	11.924	11.924	Trade receivables
Total Aset Keuangan	15.077	15.077	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
<u>Diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi</u>			<u>Measured at amortized Cost</u>
Utang usaha	435.197	435.197	Trade payables
Utang lain-lain	157.731	157.731	Other payables
Beban akrual	235.350	235.350	Accrued expenses
Utang pihak berelasi atas penerbitan wesel senior	4.944.536	4.944.536	Due to related parties from issuance senior bonds
Utang pihak berelasi	61.365	61.365	Due to related parties
Utang yang diselesaikan melalui PKPU	4.842.143	4.842.143	Settlement of payables through PKPU
Total Liabilitas Keuangan	10.676.322	10.676.322	Total Financial Liabilities

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan yang praktis untuk memperkirakan nilai tersebut:

Aset dan liabilitas keuangan jangka pendek :

Instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu (1) tahun atau kurang (kas dan setara kas, piutang usaha, kas yang dibatasi penggunaannya, investasi jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain dan beban akrual).

Instrumen keuangan ini sangat mendekati nilai tercatat mereka karena jatuh tempo mereka dalam jangka pendek (Level 2).

Aset dan liabilitas keuangan jangka panjang :

- a) Liabilitas keuangan jangka panjang dengan suku bunga tetap dan variabel yang tidak dikuotasi (pinjaman jangka panjang dan utang sewa pembiayaan).

The following methods and assumptions were used to estimate the fair value of each class of financial instrument for which it is practicable to estimate such value:

Short-term financial assets and liabilities :

Short-term financial instruments with remaining maturities of one (1) year or less (cash and cash equivalents, trade receivables, restricted cash., short-term investments, trade payables, other payables and accrued expenses).

These financial instruments approximate to their carrying amounts largely due to their short-term maturities (Level 2).

Long-term financial assets and liabilities :

- a) Unquoted long-term fixed-rate and variable-rate financial liabilities (long-term loan and finance lease payables).

30. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Nilai wajar dari liabilitas keuangan ini ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa datang menggunakan suku bunga yang berlaku dari transaksi pasar yang dapat diamati untuk instrumen dengan persyaratan, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama (Level 2).

- b) Liabilitas keuangan yang dikuotaskan dalam pasar aktif (aset keuangan tersedia untuk dijual dan wesel senior).

Nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual ditentukan dengan mengacu pada harga pasar terakhir.

Nilai wajar dari Wesel Senior yang diterbitkan oleh Kelompok Usaha yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga pasar yang berlaku (Level 1).

- c) Aset keuangan jangka panjang

Untuk aset keuangan tidak lancar lainnya yang tidak dikuotasi di harga pasar dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal tanpa menimbulkan biaya yang berlebihan, dicatat berdasarkan nilai nominal dikurangi penurunan nilai.

Tabel di atas ini menganalisis instrumen keuangan yang dicatat pada nilai wajar berdasarkan tingkatan penilaian. Perbedaan pada setiap tingkatan metode penilaian dijelaskan sebagai berikut:

- a) harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Level 1);
- b) input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung (Level 2); dan
- c) input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

30. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

The fair values of these financial liabilities are determined by discounting future cash flows using applicable rates from observable current market transactions for instruments with similar terms, credit risk and remaining maturities (Level 2).

- b) *Financial instruments quoted on an active market (available-for-sale financial asset and senior notes).*

The fair value of available-for-sale financial asset is determined based on the latest published quoted price.

The fair value of the Senior Notes issued by the Group that are traded on an active market is determined with reference to their quoted market prices (Level 1).

- c) *Long-term financial assets*

Other non-current financial assets that are not stated at quoted market price and whose fair value cannot be reliably measured without incurring excessive costs are carried at their nominal amounts less any impairment losses.

The table above analyzes the financial instruments measured at fair value by level of valuation method. The different levels of valuation methods have been defined as follows:

- a) *quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);*
- b) *inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly (Level 2); and*
- c) *inputs are unobservable inputs for the asset or liability (Level 3).*

**31. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN**

Kelompok Usaha dipengaruhi oleh berbagai risiko keuangan, termasuk risiko kredit, risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko likuiditas. Tujuan manajemen risiko Kelompok Usaha secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengendalikan risiko-risiko ini dan meminimalisasi pengaruh merugikan yang dapat terjadi terhadap kinerja keuangan mereka tahun-tahun sebelumnya.

Manajemen risiko keuangan berada dibawah pengawasan langsung oleh Direksi dan terutama oleh *Chief Financial Officer* (CFO). CFO memiliki pusat departemen keuangan berikut kebijakan yang telah disetujui oleh Divisi Manajemen Risiko dan Direksi. Departemen ini mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko keuangan dalam kerjasama yang erat dengan unit-unit operasi Perusahaan. Divisi Manajemen Risiko dan Direksi menentukan prinsip manajemen risiko keuangan secara keseluruhan, serta kebijakan pada area tertentu, seperti risiko mata uang asing, risiko tingkat suku bunga, risiko kredit, penggunaan instrumen keuangan derivatif dan non-derivatif, dan investasi atas kelebihan likuiditas.

a. Risiko kredit

Eksposur Kelompok Usaha terhadap risiko kredit timbul dari wanprestasi pihak lain, dengan eksposur maksimum sebesar nilai tercatat aset keuangan Kelompok Usaha, sebagai berikut:

	31 Desember / December 31, 2022
Kas dan setara kas (kecuali kas)	381
Piutang usaha	
Pihak ketiga	975
Pihak berelasi	5.357
Total	6.712

**31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
OBJECTIVES AND POLICIES**

The Group is affected by various financial risks, including credit risk, foreign currency risk, interest rate risk and liquidity risk. The Group's overall risk management objectives are to effectively manage these risks and minimize potential adverse effects on its previous years of financial performance.

Financial risk management is under the direct supervision of the Board of Directors and especially the Chief Financial Officer (CFO). The CFO has a central treasury department that follows policies approved by the Risk Management Division and Board of Directors. The department identifies and evaluates financial risks in close cooperation with the Company's operating units. The Risk Management Division and Board of Directors determine the principles for overall financial risk management, as well as policies covering specific areas, such as foreign currency risk, interest rate risk, credit risk, use of derivative and non-derivative financial instruments, and investment in excess of liquidity.

a. Credit risk

The Group's exposure to credit risk arises from the default of other parties, with maximum exposure equal the carrying amount of its financial assets, as follows:

	31 Desember / December 31, 2021	
	379	Cash and cash equivalents (except cash on hand)
	4.381	Trade receivables
	1.903	Third parties
		Related parties
Total	4.760	Total

**31. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
 KEUANGAN** (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

Kelompok Usaha mempunyai kebijakan dan prosedur kredit untuk memastikan evaluasi kredit yang berkesinambungan dan pemantauan saldo secara aktif. Kelompok Usaha mengelola risiko kredit yang terkait dengan simpanan di bank dan aset derivatif dengan memonitor reputasi, peringkat kredit dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak. Tidak terdapat konsentrasi risiko kredit yang signifikan terkait dengan piutang usaha, hal ini disebabkan keragaman pelanggan.

Analisis umur aset keuangan yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dan yang lewat jatuh tempo pada akhir periode pelaporan tetapi tidak mengalami penurunan nilai adalah sebagai berikut:

**31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
 OBJECTIVES AND POLICIES** (continued)

a. Credit risk (continued)

The Group has in place credit policies and procedures to ensure the ongoing credit evaluation and active account monitoring. The Group manages credit risk exposed from their deposits with banks and derivative assets by monitoring reputation, credit ratings and limiting the aggregate risk to any individual counterparty. There are no significant concentration of credit risk with respect to trade receivables due to its diverse customer base.

The analysis of the age of financial assets that were not yet due or not impaired and past due as at the end of the reporting period but not impaired was as follows:

31 Desember 2022 / December 31, 2022							
Belum Jatuh Tempo ataupun Menga- lami	Telah Jatuh Tempo tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai / Past Due but Not Impaired					Total / Total	
	Penuru- nan Nilai/ Neither Past Due nor Impai- red	Kurang dari 3 bulan/ Less than 3 months	3 bulan- 6 bulan/ 3 months - 6 months	6 bulan - 1 tahun/6 months - 1 year	Lebih dari 1 tahun /over 1 year		
Kas dan setara kas (kecuali kas)	381	-	-	-	-	381	Cash and cash equivalents (except cash on hand)
Piutang usaha	-	-	324	15	5.300	5.639	Trade receivables
Total	381	-	324	15	5.300	6.019	Total

31. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

31 Desember 2021 / December 31, 2021

	Belum Jatuh Tempo ataupun Menga- lami Penuru- nan Nilai/ <i>Neither Past Due nor Impai- red</i>	Telah Jatuh Tempo tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai / <i>Past Due but Not Impaired</i>				Total / Total	
		Kurang dari 3 bulan/ <i>Less than 3 months</i>	3 bulan- 6 bulan/ 3 <i>months- 6 months</i>	6 bulan - 1 tahun/6 <i>months - 1 year</i>	Lebih dari 1 tahun /over 1 year		
Kas dan setara kas (kecuali kas)	3.123	-	-	-	-	3.123	Cash and cash equivalents (except cash on hand)
Piutang usaha	-	7	-	379	619	1.005	Trade receivables
Total	3.123	7	-	379	619	4.128	Total

Manajemen melakukan penilaian atas kualitas kredit *counterparties* karena tidak ada peringkat kredit eksternal yang tersedia dan terpenuhi, dimana tidak terdapat risiko signifikan yang terkait dengan mereka.

The management assessed the credit quality of the counterparties for which no external credit rating is available and is satisfied, that there is no significant risk associated with them.

b. Risiko mata uang asing

Kelompok Usaha terekspos risiko perubahan nilai tukar mata uang asing terutama dari transaksi, aset dan liabilitas tertentu dalam Dolar AS yang timbul karena aktivitas pendanaan dan kegiatan operasional sehari-hari.

b. Foreign currency risk

The Group is exposed to changes in foreign currency exchange rates primarily from certain transactions, assets and liabilities in US Dollar which arise from financing activities and daily operations.

Kelompok Usaha memonitor dan mengelola risiko ini dengan menyepadankan liabilitas keuangan dalam mata uang asing dengan aset keuangan dalam mata uang asing terkait dan melakukan pembelian atau penjualan mata uang asing saat diperlukan.

The Group monitors and manages the risk by matching the foreign currency financial liabilities with relevant foreign currency assets and buying or selling foreign currencies at spot rate when necessary.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Kelompok usaha memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

As of December 31, 2022 and 2021, the Group had monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies as follows:

**31. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
 KEUANGAN** (lanjutan)

b. Risiko mata uang asing (lanjutan)

	31 Desember / December 31, 2022
Aset	
Kas	
Dolar AS	51
Total Aset	<u>51</u>
Liabilitas	
Utang usaha	
Dolar AS dan mata uang lain	89.600
Utang lain-lain	
Dolar AS	297
Utang pihak berelasi	
Dolar AS	12.086
Utang yang diselesaikan melalui PKPU	
Dolar AS dan mata uang lain	6.725.637
Total Liabilitas	<u>6.827.620</u>
Liabilitas Neto	<u>(6.827.569)</u>

Berdasarkan estimasi manajemen, sampai dengan tanggal pelaporan Kelompok Usaha berikutnya, kurs Rupiah terhadap Dolar AS dapat melemah/menguat 5% dibandingkan kurs pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Jika nilai tukar mata uang Rupiah Indonesia berlanjut melemah/menguat 5% terhadap mata uang Dolar AS yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2022 dengan seluruh variabel lain tetap, maka rugi sebelum pajak penghasilan pada tahun 31 Desember 2022 masing-masing akan berupa peningkatan/penurunan sekitar Rp5,899 miliar.

c. Risiko tingkat suku bunga

Eksposur Kelompok Usaha terhadap risiko tingkat suku bunga terutama sehubungan dengan pinjaman serta aset dan liabilitas berbunga. Kebijakan Kelompok Usaha adalah mendapatkan tingkat suku bunga yang paling menguntungkan.

**31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
 OBJECTIVES AND POLICIES** (continued)

b. Foreign currency risk (continued)

	31 Desember / December 31, 2021	
		Assets
		Cash
		US Dollar
		Total Assets
		Liabilities
		Trade payables
		US Dollar and other
		currencies
		Other payables
		US Dollar
		Due to related party
		US Dollar
		Settlement payables
		through PKPU
		US Dollar and other
		currencies
		Total Liabilities
		Liabilities-Net

Based on management's estimate, until the Group's next reporting date, the exchange rate of Rupiah against US Dollar may weaken/strengthen by 5%, compared to the exchange rate as of December 31, 2022 and 2021.

If the extent the Indonesian Rupiah had weakened/strengthened by 5% against US Dollar at December 31, 2022 with all other variables held constant, at December 31, 2022 loss before income tax would have been an increase/a decrease of approximately Rp5.899 billion, respectively.

c. Interest rate risk

The Group's exposure to interest rate risk relates primarily to its borrowing obligations and interest-bearing assets and liabilities. The Group's policies are to obtain the most favorable interest rates available.

**31. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN** (lanjutan)

d. Risiko likuiditas

Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati termasuk mengatur kas dan setara kas yang cukup untuk menunjang aktivitas usaha secara tepat waktu. Kelompok Usaha mengatur keseimbangan antara kesinambungan kolektibilitas dan fleksibilitas piutang melalui penggunaan utang bank dan pinjaman lainnya.

Tabel di bawah menunjukkan analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Kelompok Usaha dalam rentang waktu yang menunjukkan jatuh tempo kontraktual untuk semua liabilitas keuangan non-derivatif yang diperlukan dalam pemahaman jatuh tempo kebutuhan arus kas. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto (yang terdiri dari saldo pokok terutang). Utang yang diselesaikan melalui PKPU sebagian akan diselesaikan melalui penerbitan *Mandatory Convertible Bond*.

**31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
OBJECTIVES AND POLICIES** (continued)

d. Liquidity risk

Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents to support business activities on a timely basis. The Group maintains a balance between continuity of accounts receivable collectability and flexibility through the use of bank loans and other borrowings.

The following table analyzes the Group's financial liabilities into relevant maturity groupings based on their contractual maturities for all non-derivative financial liabilities which are essential in understanding the timing of cash flows requirements. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows (consisting of outstanding principal balance). Settlement of payables through PKPU will be settled partially by issuing *Mandatory Convertible Bonds*.

31 Desember 2022 / December 31, 2022						
Nilai arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto/ Contractual undiscounted cash flow amounts						
	Nilai tercatat/ Carrying amounts	Total/ Total	S/d 1 tah - un/ With - in 1 year	Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun/ After 1 year but not more than 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	
Utang usaha dan utang lain-lain	623.033	623.033		623.033	-	Trade and other payables
Beban akrual	247.088	247.088	-	-	247.088	Accrued expenses
Utang pihak berelasi	61.365	61.365	-	61.365	-	Due to related parties
Utang yang diselesaikan melalui PKPU	4.931.941	4.931.941	-	-	4.931.941	Settlements of payables through PKPU
Total	5.863.427	5.863.427	-	684.398	5.179.028	Total

31. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
 KEUANGAN (lanjutan)

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
 OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

d. Risiko likuiditas (lanjutan)

d. Liquidity risk (continued)

December 31, 2021 / December 31, 2021						
Nilai arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto/ Contractual undiscounted cash flow amounts						
	Nilai tercatat/ Carrying amounts	Total/ Total	S/d 1 tah - un/ With - in 1 year	Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun/ After 1 year but not more than 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	
Utang usaha dan utang lain-lain	592.929	592.929		592.929	-	Trade and other payables
Beban akrual	235.350	235.350	-	-	235.350	Accrued expenses
Utang pihak berelasi	47.272	47.272	-	47.272	-	Due to related parties
Utang yang diselesaikan melalui PKPU	4.842.143	4.842.143	-	-	4.842.143	Settlements of payables through PKPU
Total	5.717.694	5.717.694	-	640.201	5.077.493	Total

Pengelolaan Permodalan

Capital Management

Tujuan utama dari pengelolaan permodalan Kelompok Usaha adalah untuk memastikan bahwa dipertahankannya peringkat kredit yang kuat dan rasio modal yang sehat agar dapat mendukung kelancaran usahanya dan memaksimalkan nilai dari pemegang saham. Kelompok Usaha mengelola struktur modalnya dan membuat penyesuaian-penyesuaian sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik dari risiko usahanya. Agar dapat menjaga dan menyesuaikan struktur modalnya, Kelompok Usaha akan menyesuaikan jumlah dari pembayaran dividen kepada para pemegang saham atau tingkat pengembalian modal atau menerbitkan surat saham. Tidak ada perubahan dalam tujuan, kebijakan dan proses dan sama seperti penerapan tahun-tahun sebelumnya.

The main objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains a strong credit rating and healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value. The Group manages its capital structure and makes adjustments with respect to changes in economic conditions and the characteristics of its business risks. In order to maintain and adjust its capital structure, the Group may adjust the amount of dividend payments to shareholders, return capital structure or issue shares certificates. No changes have been made in the objectives, policies and processes as they have been applied in previous years.

Kelompok Usaha memonitor struktur modalnya dengan menggunakan rasio utang terhadap modal dimana total utang dibagi dengan total modal. Total utang ini adalah utang pokok dari pinjaman yang berbunga dan total modal adalah total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

The Group monitors its use of capital structure using a debt-to-equity ratio which is total debt divided by total equity. Total debt represents interest bearing borrowings, while equity represents total equity attributable to owners of the parent.

**32. RUGI NETO PER SAHAM DASAR
 DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS**

	<u>31 Desember / December 31, 2022</u>
Rugi neto diatribusikan kepada pemilik entitas induk	(110.442)
Jumlah rata-rata tertimbang saham per saham dasar (angka penuh)	36.773.904.635
Rugi per saham dasar (dalam satuan penuh)	<u>(3,27)</u>

33. INFORMASI SEGMENT

Kelompok Usaha hanya mempunyai satu segmen usaha yaitu jasa telekomunikasi dan teknologi informasi yang dipertimbangkan sebagai segmen primer.

Rincian pendapatan jasa telekomunikasi dan teknologi informasi berdasarkan jenis jasa layanan adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember / December 31</u>	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Pendapatan layanan infrastruktur media	26.414	25.992
Pendapatan jasa telekomunikasi	9.451	7.948
Pendapatan jasa periklanan digital	7.162	14.606
Pendapatan jasa teknologi informasi	4.823	3.564
Total	<u>47.850</u>	<u>52.110</u>

34. LISENSI JASA TELEKOMUNIKASI

a. Izin Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan Bergerak Seluler

Pada tanggal 17 April 2015, Perusahaan memperoleh Izin Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan Bergerak Seluler berdasarkan Surat Keputusan dari Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika No. 186 tahun 2015 tentang "Izin Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan Bergerak Seluler PT Bakrie Telecom Tbk".

32. LOSS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO THE OWNERS OF PARENTS

	<u>31 Desember / December 31, 2021</u>	
	(91.352)	<i>Net loss attributable to the owners of parents</i>
	36.773.904.635	<i>Weighted average number of ordinary shares (full amount)</i>
	<u>(2,75)</u>	<i>Basic loss per share (in full amount)</i>

33. SEGMENT INFORMATION

The Group has only one business segment, i.e. telecommunication services and information technology, which are considered as a primary segment.

The details of telecommunication and information technology service revenues by service type are as follows:

	<u>31 Desember / December 31</u>		
	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
	25.992	25.992	<i>Media infrastructure services</i>
	7.948	7.948	<i>Telecommunication services revenue</i>
	14.606	14.606	<i>Digital advertising agency</i>
	3.564	3.564	<i>Information technology services</i>
Total	<u>52.110</u>	<u>52.110</u>	<i>Total</i>

34. TELECOMMUNICATION SERVICE LICENSE

a. License for Basic Telephony Services Through Cellular Mobile Network

On April 17, 2015, the Company obtained Operational License for Basic Telephony Services Through Cellular Mobile Network based on the Decree of Director General of Post and Information No. 186 year 2015 regarding "License for the Basic Telephony Services Through Cellular Mobile Network PT Bakrie Telecom Tbk".

34. LISENSI JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan)

a. Izin Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan bergerak Seluler (lanjutan)

Lisensi ini diberikan untuk menyelenggarakan Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan Bergerak seluler dengan Wilayah Penyelenggaraan Nasional. Izin ini dilakukan evaluasi setiap tahun dan evaluasi secara menyeluruh dilakukan setiap lima (5) tahun. Evaluasi terbaru dibuat pada tahun 2021.

b. Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (ISP)

Pada tanggal 2 Maret 2007, Perusahaan memperoleh Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) dengan wilayah layanan nasional berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 053/DIRJEN/2007 tentang "Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet PT Bakrie Telecom Tbk". Izin penyelenggaraan jasa ISP ini dilakukan evaluasi setiap tahun dan evaluasi secara menyeluruh setiap lima (5) tahun. Evaluasi terbaru dibuat pada tahun 2021.

35. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN

Perusahaan memiliki perjanjian dan ikatan yang signifikan, sebagai berikut:

a. PT Bakrie Swasakti Utama (Pihak Berelasi)

Perusahaan menandatangani perjanjian sewa dengan PT Bakrie Swasakti Utama untuk sewa kantor dan lahan parkir untuk satu (1) tahun.

Perjanjian tersebut dapat diperbaharui kembali setelah tanggal perjanjian berakhir. Jumlah beban sewa setiap tahun disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian yang diungkapkan dalam (Catatan 27).

34. TELECOMMUNICATION SERVICE LICENSE (continued)

a. License for Basic Telephony Services Through Cellular Mobile Network (continued)

This license was granted for Basic Telephony Services through cellular mobile network with national service area coverage. The license will be evaluated annually and will be fully evaluated every five (5) years. The most recent evaluation was conducted in 2021.

b. License for Operation of Internet Service Provider (ISP)

On March 2, 2007, the Company obtained a License for Operational Internet Service Provider with nationwide coverage, based on Decision Letter of the Director General Post and Telecommunication No. 053/DIRJEN/2007 regarding "License for Operation of Internet Service Provider PT Bakrie Telecom Tbk." The ISP license will be evaluated annually and will be fully evaluated every five (5) years. The most recent evaluation was conducted in 2021.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

The Company had outstanding significant agreements and commitments, as follows:

a. PT Bakrie Swasakti Utama (Related Party)

The Company entered into a rental agreement with PT Bakrie Swasakti Utama for the lease of certain office and parking spaces with one (1) year term.

The agreement subject to renewal after the expiry date. The amount of the rental expense for every year presented in the consolidated financial statements is disclosed in (Note 27).

35. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)

Pada tanggal 1 Oktober 2014, Perusahaan memperpanjang perjanjian sewa dengan PT Bakrie Swasakti Utama dari tanggal 1 September 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015 yang dapat diperpanjang kembali setelah tanggal perjanjian berakhir. Harga sewa baru untuk luas area 6.559,99 m² adalah sebesar Rp471,9 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan menandatangani perjanjian pengalihan pengelolaan ruang usaha sektor utara Rasuna Office Park dari PT Provinces Indonesia ke PT Bakrie Swasakti Utama dari tanggal 3 Juni 2014 sampai dengan tanggal 2 Januari 2015. Biaya iuran pengelolaan per bulan yang harus dibayar Perusahaan adalah sebesar Rp30,25 ribu per meter dengan luas area 1.665 m² atau sebesar Rp50,4 juta per bulan (Catatan 27).

Perusahaan juga menandatangani pengalihan perjanjian pengelolaan ruang usaha sektor selatan Rasuna Office Park dari PT Provinces Indonesia ke PT Bakrie Swasakti Utama dari tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan 31 Desember 2014. Biaya iuran pengelolaan per bulan yang harus dibayar Perusahaan adalah sebesar Rp30 ribu per meter dengan luas area 937 m² atau sebesar Rp28,3 juta per bulan (Catatan 27).

Pada tanggal 25 September 2014, Perusahaan memperpanjang perjanjian sewa dengan PT Bakrie Swasakti Utama dari tanggal 1 September 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015 yang dapat diperpanjang kembali setelah tanggal perjanjian berakhir. Harga sewa baru untuk luas area 459,74 m² adalah sebesar Rp32,9 juta per bulan. Sampai dengan tanggal laporan ini, proses perpanjangan perjanjian sewa masih dalam proses penandatanganan.

**35. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS** (continued)

On October 1, 2014, the Company extended its rental agreement with PT Bakrie Swasakti Utama from September 1, 2014 until August 31, 2015 subject to renewal after the expiry date. The new rental per month amounted to Rp471,9 million for a total area of 6,559.99 m².

On December 31, 2013, the Company entered into an agreement to transfer building management of the northern sector of Rasuna Office Park from PT Provinces Indonesia to PT Bakrie Swasakti Utama from June 3, 2014 until January 2, 2015. Service charges per square meter amounted to Rp30.25 thousand for a total area of 1,665 m² or amounting to Rp50.4 million per month (Note 27).

The Company also entered into an agreement to transfer the building management of the southern sector Rasuna Office Park from PT Provinces Indonesia to PT Bakrie Swasakti Utama from March 1, 2014 until December 31, 2014. Service charges per meter amounted to Rp30 thousand for a total area of 937 m² amounting to Rp28.3 million per month (Note 27).

On September 25, 2014, the Company extended its rental agreement with PT Bakrie Swasakti Utama from September 1, 2014 until February 28, 2015, subject to renewal after expiry date. The new rental change amounted to Rp32.9 million per month for a total area of 459.74 m². As of the date of this report, the extension of the rental agreement is still in the process of signing.

35. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)

b. Perjanjian Sewa Menyewa Jaringan

Perusahaan mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Jaringan Telekomunikasi ("Perjanjian Sewa") dengan pihak ketiga, PT Smartfren Telecom Tbk ("SF") pada tanggal 30 Oktober 2014. Berdasarkan Perjanjian Sewa tersebut, Perusahaan akan menyewa jaringan telekomunikasi yang digunakan dan dioperasikan oleh SF, guna melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

Jangka waktu atas Perjanjian Sewa ini berlaku selama tiga tahun sejak Perjanjian Sewa ini ditandatangani. Jangka waktu sewa ini dapat diperpanjang berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disetujui bersama antara Perusahaan dan SF.

**c. Madison Pacific Trust Limited
(sebelumnya dengan Credit Suisse)**

Pada tanggal 30 Agustus 2012, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan *Credit Suisse* (Singapura) *Limited*, sebagai *facility agent*, dengan jumlah fasilitas pinjaman sebesar USD50 juta untuk jangka waktu delapan belas (18) bulan. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 11,5% per tahun.

Pemberi pinjaman atas pinjaman ini adalah *Orchard Centar Master Limited*, *Orchard Dejima Limited* dan *Milton Global Resources Limited* dengan nilai pinjaman masing-masing sebesar USD26 juta, USD4 juta dan USD20 juta. Pada tanggal 4 Juli 2014, *facility agent* atas pinjaman ini berubah dari dengan *Credit Suisse* (Singapura) *Limited* menjadi *Madison Pacific Trust Limited* ("MPTL"). Perubahan ini telah diketahui dan disetujui bersama antara Perusahaan sebagai peminjam dengan para pemberi pinjaman.

**35. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS** (continued)

b. Lease Agreement Telecommunication

On October 30, 2014, the Company entered into Lease Agreement telecommunication Networks ("Lease Agreement") with PT Smartfren Telecom Tbk ("SF"), a third party. In accordance with the Lease Agreement, SF is willing to lease the telecommunications network that is used and operated by SF for the Company's operation as a telecommunications provider.

The Lease Agreement is effective for three years from signing of the Lease Agreement. The duration of the lease can be extended based on the terms and conditions mutually agreed between the Company and SF.

**c. Madison Pacific Trust Limited (previously
with Credit Suisse)**

On August 30, 2012, the Company entered into a credit agreement with Credit Suisse (Singapore) Limited, as the facility agent, with loan facility amounting to USD50 million that will be payable in eighteen (18) months. This loan bears interest of 11.5% per annum.

The original lenders of this loan are Orchard Centar Master Limited, Orchard Dejima Limited and Milton Global Resources Limited in the amount of USD26 million, USD4 million and USD20 million, respectively. On July 4, 2014, the facility agent of this loan changed from Credit Suisse (Singapore) Limited to Madison Pacific Trust Limited ("MPTL"). This change was acknowledged and agreed together with the Company as borrower and lenders

35. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)

c. Madison Pacific Trust Limited
(sebelumnya dengan **Credit Suisse**)
(lanjutan)

Pada tanggal 9 Desember 2014, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili permohonan PKPU oleh Netwave terhadap Perusahaan telah mengeluarkan keputusan yang mengesahkan (Homologasi) Perjanjian Perdamaian dalam PKPU antara Perusahaan dan para kreditornya (Catatan 18 dan 36).

**36. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN
PERDAMAIAN UTANG**

Pada tanggal 23 Oktober 2014, PT Netwave Multimedia (Netwave) mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan dengan register perkara No. 59/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst sebagai akibat dari tidak dibayarkannya utang jatuh tempo Perusahaan terhadap Netwave Rp4,7 miliar. Pada rapat kreditor tanggal 8 Desember 2014 yang dilaksanakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dilakukan pembahasan dan pemungutan suara (*voting*) kreditor atas Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Perusahaan dan sebagian besar kreditor konkuren Perusahaan atau sejumlah 94,56% kreditor konkuren telah memberikan suara setuju atas Rencana Perdamaian tersebut.

Pada tanggal 9 Desember 2014, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili permohonan PKPU oleh Netwave terhadap Perusahaan telah mengeluarkan keputusan yang mengesahkan (Homologasi) Perjanjian Perdamaian dalam PKPU antara Perusahaan dan para kreditornya dengan keputusan No. 59/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN. Niaga. Jkt. Pst. Pada tanggal 23 Oktober 2015 Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan keputusan No. 83 PK/Pdt. Sus-Pailit/2015 yang menguatkan keputusan homologasi Perjanjian Perdamaian dalam PKPU Perusahaan. Keputusan Pengadilan atas Perjanjian Perdamaian dalam PKPU Perusahaan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

**35. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS** (continued)

**c. Madison Pacific Trust Limited (previously
with Credit Suisse)** (continued)

On December 9, 2014, the judges of the Commercial Court in Central Jakarta District Court and the PKPU adjudicators of Netwave petition against the Company issued a decision officially approving in PKPU, the Amicable Settlement Agreement between the Company and its creditors (Notes 18 and 36).

**36. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS
SETTLEMENT**

On October 23, 2014, PT Netwave Multimedia (Netwave) filed PKPU petition against the Company under case register No. 59/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst as a result of non-payment of overdue payables to Netwave by the Company amounting to Rp4.7 billion. At the creditors meeting on December 8, 2014 held in the Commercial Court of the Central Jakarta District Court, discussions were held and creditors voted on the Amicable Settlement Plan proposed by the Company, with the majority, or 94.56% of the unsecured creditors of the Company voting in favor of the Amicable Settlement Plan.

On December 9, 2014, the judges of the Commercial Court in Central Jakarta District Court and the PKPU adjudicators of Netwave petition against the Company issued a decision officially approving in PKPU, the Amicable Settlement Agreement between the Company and its creditors by the ruling No. 59/Pdt. Sus/PKPU/2014/PN. Niaga. Jkt. Pst. On October 23, 2015, the Supreme Court of the Republic of Indonesia granted ruling No. 83 PK/Pdt. Sus-Pailit/2015 under which the homologation of the PKPU Settlement Agreement is strengthened. The Court ruling on the PKPU Settlement Agreement has had permanent legal enforce.

**36. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN
PERDAMAIAN UTANG** (lanjutan)

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam Perjanjian Perdamaian ini Perusahaan dan para kreditor dengan ini saling menyetujui hal-hal yang telah diatur didalam Rencana Perdamaian, antara lain sebagai berikut:

1. Perjanjian Perdamaian ini dibuat dengan mempertimbangkan dan mendasarkan kepada keadaan kegiatan usaha Perusahaan saat ini, Perjanjian Penggabungan Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi antara Perusahaan dengan PT Smartfren Telecom Tbk tanggal 30 Oktober 2014, Perjanjian Sewa Menyewa Jaringan Telekomunikasi antara Perusahaan dengan PT Smartfren Telecom Tbk tanggal 30 Oktober 2014, dan keadaan pasar, serta kedudukan para kreditor Perusahaan sehubungan dengan jaminan-jaminan yang dimiliki oleh kreditor separatis dan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang relevan dengan jaminan-jaminan yang diberikan tersebut.
2. *Cash Waterfall.*
Perusahaan akan berusaha mengalokasikan Sisa Kas Operasional (di luar Utang Baru dan penerbitan Saham Baru) dari kegiatan usaha utama Perusahaan ke dalam suatu rekening Perusahaan dan akan dipergunakan dengan urutan skala prioritas sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam perjanjian PKPU.
3. Pengesampingan terhadap Kewajiban Lain.

Perjanjian Perdamaian ini tidak mengikat atau tidak berlaku terhadap pembayaran atau pelaksanaan kewajiban-kewajiban Perusahaan kepada setiap pihak yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Penggabungan Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi antara Perusahaan dengan PT Smartfren Telecom Tbk tanggal 30 Oktober 2014 dan Perjanjian Sewa Menyewa Jaringan Telekomunikasi antara Perusahaan dengan PT Smartfren Telecom Tbk tanggal 30 Oktober 2014 berikut seluruh perjanjian turutannya (apabila ada).

**36. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS
SETTLEMENT** (continued)

Furthermore, based on the aforementioned, in Amicable Settlement Agreement, the Company and the creditors mutually agree with the terms that have been set out in the Amicable Settlement Agreement, among others, as follows:

1. Amicable Settlement Agreement was made in consideration of and based on the current condition of the Company's operations, the Agreement of Business Activity Merger of Telecommunication Network Implementation between the Company and PT Smartfren Telecom Tbk dated October 30, 2014, Agreement of Telecommunication Network Lease between the Company and PT Smartfren Telecom Tbk dated October 30, 2014, and the market condition, as well as the position of the creditors in connection with the guarantees held by secured creditors, and the terms and conditions relevant to the guarantees given.
2. *Cash Waterfall.*
The Company will attempt to allocate the Remaining Amount of Cash Operations from the Company's main business activities (outside New Debt and the issuance of New Shares) in the accounts of the Company and which will be used in accordance with the order of priorities as required by the PKPU settlement agreement.
3. *Waiver of Other Obligations.*

The Amicable Settlement Agreement is not binding and does not apply to payments or implementation of the obligations of the Company to any parties related to the Agreement of Business Activity Merger of Telecommunication Network Implementation between the Company and PT Smartfren Telecom Tbk dated October 30, 2014 and Agreement of Telecommunication Network Lease Agreement between the Company and PT Smartfren Telecom Tbk dated October 30, 2014 following the entire agreement and its other related agreements (if any).

**36. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN
PERDAMAIAN UTANG** (lanjutan)

4. Seluruh bunga, penalti dan/atau denda yang telah timbul sampai dengan Tanggal Homologasi akibat Utang Perusahaan akan dihapuskan seluruhnya, kecuali diatur sebaliknya secara tegas dan khusus oleh Perusahaan dalam Perjanjian Perdamaian ini.
5. Terhadap tagihan-tagihan lain yang:
 - 1) belum teridentifikasi sampai Perjanjian Perdamaian ini dihomologasi; atau
 - 2) belum teridentifikasi sampai Perjanjian Perdamaian ini dihomologasi; atau
 - 3) yang baru teridentifikasi setelah Perjanjian Perdamaian ini dihomologasi namun tagihan tersebut berasal dari atau timbul karena kondisi, perbuatan hukum, permulaan atau rangkaian kejadian, atau ketentuan hukum yang terdapat sebelum Perjanjian Perdamaian ini dihomologasi yang terdapat putusan badan peradilan atau badan arbitrase yang berkekuatan okum tetap yang diakui oleh hukum Indonesia;

maka tagihan-tagihan lain sebagaimana disebut di atas (disebut "Utang Diluar Verifikasi") akan tunduk pada ketentuan sebagai berikut:

- a) tagihan tersebut dapat diterima oleh Perusahaan namun harus sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan/PSAK) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b) hanya ketika ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi dan tagihan diterima dan diakui kemudian oleh Perusahaan, maka tagihan tersebut akan dibayar Perusahaan mulai tahun ke-31 setelah Tanggal Homologasi.

**36. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS
SETTLEMENT** (continued)

4. All interest, penalties and/or fines related to the Company's Debts that have been incurred up to the Official Approval of Settlement Agreement Date will be entirely eliminated, except as otherwise expressly and specifically stated by the Company in the Amicable Settlement Agreement.
5. With regard to other outstanding bills that:
 - 1) have not been identified in the Amicable Settlement Agreement; or
 - 2) have not been identified in the Amicable Settlement Agreement; or
 - 3) those newly identified after the Amicable Settlement Agreement but that came from or arose out of conditions, legal acts, the beginning or a series of events, or laws that occurred before this Amicable Settlement Agreement obtained the binding of the court and arbitration body's decision as recognized by the laws of Indonesia;

the other outstanding bills as referred to above (referred as "Verification of Outside Debt") will be subject to the following conditions:

- a) the outstanding bills may be accepted by the Company but must be in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia (Indonesian Financial Accounting Standards/PSAK) and the prevailing laws; and
- b) only when the above conditions have been met and the outstanding bill is accepted and recognized later by the Company, then the bill will be paid by the Company starting in the 31st year after the Official Approval of Settlement Agreement Date.

36. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN
PERDAMAIAAN UTANG (lanjutan)

Utang Usaha

A. Utang Usaha Rp1 sampai dengan Rp3 miliar (utang kategori *Tranche A*), Perusahaan akan melakukan pembayaran tunai atas utang dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Utang Usaha Rp1 sampai dengan Rp3 miliar, pembayaran akan dicicil dan akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan ke-84 setelah Tanggal Homologasi.

b) Jika setelah pengeluaran / pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Utang Usaha Rp1 sampai dengan Rp3 miliar (utang kategori *Tranche A*), maka sisa nilai utang yang tidak terbayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran utang pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai tanggal jatuh tempo terakhir.

c) Jika setelah pengeluaran / pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar sisa utang sesuai dengan jadwal pada butir b) sampai dengan tanggal jatuh tempo terakhir, maka atas sisa utang tersebut akan dibayarkan paling lambat pada akhir tahun ke-15 setelah Tanggal Homologasi.

B. Utang Usaha diatas Rp3 miliar dalam mata uang selain Rupiah (utang kategori *Tranche C*) dan Utang Usaha di atas Rp3 miliar dalam mata uang Rupiah (utang kategori *Tranche D*)

36. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS
SETTLEMENT (continued)

Trade Payables

A. For Trade Payables of Rp1 up to Rp3 billion (debt category *Tranche A*), the Company will make a cash payment on the payables under the following conditions:

a) For Trade Payables of Rp1 up to Rp3 billion, the payment will be paid in installments and will be paid no later than the 84th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date.

b) If after spending/payments made based on the priority in accordance with the *Cash Waterfall* as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay Trade Payables of Rp1 to Rp3 billion (debt category *Tranche A*), then the payment of residual value of the payables remaining unpaid on any maturity date will be deferred and combined with payable payments on the next due date, and this will continue until the final maturity date.

c) If after spending/payments made based on the priority in accordance with the *Cash Waterfall* as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the remaining amounts of payables in accordance with the schedule in point b) as at the final maturity date, then the remaining amounts of payables will be paid no later than the end of the 15th year after the Official Approval of Settlement Agreement Date.

B. Trade Payables above Rp3 billion in currencies other than Rupiah (debt category *Tranche C*) and Trade Payables above Rp3 billion in Indonesian Rupiah (debt category *Tranche D*)

**36. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN
PERDAMAIAN UTANG (lanjutan)**

1. Nilai Utang Usaha sampai dengan Rp3 miliar pertama akan dibayarkan sesuai ketentuan Perjanjian Perdamaian di atas.
2. 30% dari sisa Utang Usaha setelah dikurang nilai sesuai butir 1) akan dibayarkan secara tunai ("Porsi Tunai") dengan dicicil dan akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi.
3. Perusahaan akan memberikan bunga atas Porsi Tunai utang kategori *Tranche C* sebesar 4% per tahun dan untuk Porsi Tunai utang kategori *Tranche D* sebesar 6% per tahun, yang akan dibayarkan dengan mengikuti jadwal pembayaran Porsi Tunai di atas.
4. 70% dari sisa Utang Usaha setelah dikurang nilai sesuai butir 1) akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bond (MCB-A)* Perusahaan yang berjangka waktu 10 tahun terhitung sejak Tanggal Efektif dengan harga pelaksanaan Rp200/saham dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas berikut perubahan dan/atau tambahannya ("UUPT").

**36. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS
SETTLEMENT (continued)**

1. *Trade Payables up to Rp3 billion will be paid in accordance with the aforementioned Amicable Settlement Agreement.*
2. *Of the remaining amounts of Trade Payables, 30% after deduction of the amounts as mentioned in point 1) will be paid in cash with installments ("Cash Portion") and will be paid not later than the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date.*
3. *The Company will provide interest on Cash Portion of Tranche C category at 4% per year and for the Cash Portion of Tranche D category at 6% per year, which will be paid by following the above Cash Portion payment schedule.*
4. *Of the remaining amounts of Trade Payables, 70% after deduction of the amounts, as mentioned in point 1) will be paid by Mandatory Convertible Bond (MCB-A) of the Company with a maturity of 10 years from the Effective Date at an exercise price of Rp200/share having regard to the provisions of the Capital Market Regulation and provisions of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and its changes and/or enhancements ("UUPT").*

**36. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN
PERDAMAIAN UTANG (lanjutan)**

5. Jika setelah pengeluaran / pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Porsi Tunai beserta bunganya yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian di atas, maka sisa nilai Porsi Tunai dan bunganya yang tidak dapat dibayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Porsi Tunai pada tanggal jatuh tempo berikutnya, dan demikian selanjutnya sampai tanggal jatuh tempo terakhir.

6. Jika setelah pengeluaran / pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar sisa Porsi Tunai dan bunga yang belum dibayarkan pada jadwal sebagaimana dimaksud pada butir 5) di atas sampai dengan bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi ("Sisa Porsi Tunai") maka Sisa Porsi Tunai tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu lima (5) tahun setelah bulan ke-66 tersebut secara prorata setiap tahunnya.

**36. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS
SETTLEMENT (continued)**

5. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Cash Portion and its interest set out in the aforementioned Amicable Settlement Agreement, then payment of the residual value of Cash Portion and its interest that remain unpaid on any maturity date will be deferred and combined with the Cash Portion payment on the next due date, and this will continue until the final maturity date.*

6. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the residual value of the Cash Portion and unpaid interest in accordance with the schedule referred to in point 5) above as at the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement ("Remaining Cash Portion") then the Remaining Cash Portion shall be paid within a period of five (5) years after the 66th month on a pro rata basis each year.*

**36. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN
 PERDAMAIAN UTANG (lanjutan)**

7. Jika setelah pengeluaran / pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai pada setiap saat jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada butir 6) di atas, maka Sisa Porsi Tunai yang belum dibayarkan tersebut akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Sisa Porsi Tunai pada saat jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan saat jatuh tempo terakhir (pada akhir tahun ke-5).

8. Jika setelah pengeluaran / pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai dengan jadwal sebagaimana dimaksud pada butir 7) di atas, maka atas Sisa Porsi Tunai tersebut akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bonds* (MCB-B) Perusahaan yang berjangka waktu dua (2) tahun dengan tata cara dan harga pelaksanaan konversi minimal sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.

9. Perusahaan tidak memberikan bunga atas nilai pokok 70% sebagaimana dimaksud pada butir 4) di atas, yang akan dikonversi menjadi saham sesuai ketentuan di atas.

Utang Tower Provider (Penyedia Menara)

Berikut adalah ketentuan restrukturisasi untuk Utang *Tower Provider* atas sewa tower yang telah jatuh tempo, belum dibayarkan, dan timbul sampai dengan tanggal 10 November 2014:

**36. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS
 SETTLEMENT (continued)**

7. If after spending/payments made based on the priority in accordance with the *Cash Waterfall* as set forth in the *Amicable Settlement Agreement*, there are insufficient funds to pay the *Remaining Cash Portion* at any maturity date as referred to in point 6) above, then payment of the unpaid *Remaining Cash Portion* will be deferred and combined with the *Remaining Cash Portion* payments on the next due date, and will continue until the final maturity date (at the end of the 5th year).

8. If after spending/payments made based on the priority in accordance with the *Cash Waterfall* as set forth in the *Amicable Settlement Agreement*, there are insufficient funds to pay the *Remaining Cash Portion* at any maturity date as referred to in point 7) above, then the unpaid *Remaining Cash Portion* will be paid by *Mandatory Convertible Bonds (MCB-B)* of the Company with a maturity of two (2) years with the procedures and minimum conversion exercise price in accordance with the applicable provisions of the *Capital Market Regulation* and the provisions of *UUPT*.

9. The Company does not provide interest on the principal amount of the 70% as referred to in point 4) above, which will be converted into shares in accordance with the above.

Tower Provider Payables (Tower Provider)

The debt restructuring provisions on *Tower Provider Payables* for tower rentals that have matured, but are unpaid up to November 10, 2014:

**36. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN
PERDAMAIAN UTANG (lanjutan)**

**A. Utang Rp1 sampai dengan Rp3 miliar
(utang kategori Tranche A)**

- 1) Utang Rp1 sampai dengan Rp3 miliar pembayaran akan dicicil dan akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan ke-84 setelah Tanggal Homologasi.
- 2) Jika setelah pengeluaran / pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar utang sebagaimana dimaksud pada Perjanjian Perdamaian (utang kategori *Tranche A*), maka sisa nilai utang yang tidak terbayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran utang pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai tanggal jatuh tempo terakhir.
- 3) Jika setelah pengeluaran / pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar sisa utang sesuai dengan jadwal pada butir 2) sampai dengan tanggal jatuh tempo terakhir, maka atas sisa utang tersebut akan dibayarkan paling lambat pada akhir tahun ke-15 setelah Tanggal Homologasi.

B. Utang diatas Rp3 miliar

- 1) Nilai utang sampai dengan Rp3 miliar pertama akan dibayarkan sesuai ketentuan Perjanjian Perdamaian di atas.

**36. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS
SETTLEMENT (continued)**

**A. Payables of Rp1 up to Rp3 billion (debt
category of Tranche A)**

- 1) *Payables Rp1 up to Rp3 billion the payment will be paid in installments and will be paid no later than the 84th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date.*
- 2) *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement there are insufficient funds to pay payables as set forth in the Amicable Settlement Agreement, (debt category Tranche A), then payment of the residual value of the payables remaining unpaid on any maturity date will be deferred and combined with the payable payments on the next due date, and this will continue until final maturity date.*
- 3) *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the remaining amounts of payables in accordance with the schedule as referred to in point 2) as at the final maturity date, then the remaining unpaid amounts of the payables will be paid no later than end of the 15th year after the Official Approval of Settlement Agreement Date.*

B. Payables above Rp3 billion

- 1) *Payables up to Rp3 billion will be paid in accordance with the aforementioned Amicable Settlement Agreement.*

**36. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN
PERDAMAIAN UTANG (lanjutan)**

- 2) 30% dari sisa utang setelah dikurang nilai sesuai butir 1) di atas (utang kategori *Tranche D*), berikut dengan bunga sebesar 6% per tahun dari nilai tersebut akan dibayarkan secara tunai ("Porsi Tunai") dengan dicicil dan akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi.
- 3) 70% dari sisa utang setelah dikurangi nilai sesuai butir 1) di atas akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bond* (MCB-A) Perusahaan yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Efektif dengan harga pelaksanaan konversi Rp200/saham dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.
- 4) Jika setelah pengeluaran / pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Porsi Tunai yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian di atas, maka sisa nilai Porsi Tunai yang tidak dapat dibayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Porsi Tunai pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan tanggal jatuh tempo terakhir.

**36. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS
SETTLEMENT (continued)**

- 2) *Of the remaining amounts of payables, 30% after deduction of the amounts as mentioned in point 1) (debt category Tranche D), including its interest at 6% per year will be paid in cash in installments ("Cash Portion") and will be paid no later than the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date.*
- 3) *Of the remaining amounts of payables, 70% after deduction of the amounts as mentioned in point 1) above will be paid by Mandatory Convertible Bond (MCB-A) of the Company with a maturity of 10 years from the Effective Date at an exercise price of Rp200/ share having regard to the provisions of the Capital Market Regulation and provisions of UUPT.*
- 4) *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Cash Portion as set forth in the aforementioned Amicable Settlement Agreement, then payment of the residual value of Cash Portion remaining unpaid on any maturity date will be deferred and combined with the Cash Portion payment on the next due date, and this will continue until the final maturity date.*

**36. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN
PERDAMAIAN UTANG (lanjutan)**

5) Jika setelah pengeluaran /pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar sisa Porsi Tunai dan bunga sampai dengan bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi ("Sisa Porsi Tunai") maka Sisa Porsi Tunai tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu lima (5) tahun setelah bulan ke-66 tersebut secara prorata setiap tahunnya.

6) Jika setelah pengeluaran / pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada butir 5) di atas maka Sisa Porsi Tunai yang belum dibayarkan tersebut akan ditangguhkan pembayarannya.

Dan digabungkan dengan pembayaran Sisa Porsi Tunai pada saat jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan saat jatuh tempo terakhir (pada akhir tahun ke-5).

**36. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS
SETTLEMENT (continued)**

5) *If after spending/payments made based on the priority in accordance with Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the residual value of Cash Portion and its interest as at the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date ("Remaining Cash Portion") then the Remaining Cash Portion shall be paid within a period of five (5) years after the 66th month on a pro rata basis each year.*

6) *If after spending/ payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Remaining Cash Portion at any maturity date as referred to in point 5) above, then payment of the unpaid Remaining Cash Portion will be deferred.*

And combined with Remaining Cash Portion payments on the next due date, and will continue until the final maturity date (at the end of the 5th year).

**36. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN
PERDAMAIAN UTANG (lanjutan)**

7) Jika setelah pengeluaran / pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai sampai dengan akhir tahun ke-5 sebagaimana dimaksud pada butir 6), maka atas Sisa Porsi Tunai tersebut akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bonds (MCB-B)* Perusahaan yang berjangka waktu dua (2) tahun dengan tata cara dan harga pelaksanaan konversi minimal sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.

8) Perusahaan tidak memberikan bunga atas nilai pokok 70% sebagaimana dimaksud pada butir 3) di atas, yang akan dikonversi menjadi saham sesuai ketentuan di atas.

C. Sisa Masa Sewa

Berikut adalah ketentuan restrukturisasi untuk Utang Tower Provider atas nilai sewa untuk sisa masa sewa tower berdasarkan perjanjian sewa tower yang telah ada antara Perusahaan dengan masing-masing kreditor atas Utang Tower Provider yang dihitung sejak tanggal 10 November 2014 sampai dengan akhir masa sewa tower sesuai masing-masing perjanjian sewa tersebut:

**36. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS
SETTLEMENT (continued)**

7) *If after spending/ payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Remaining Cash Portion as at the end of the 5th year as referred to in point 6) above, then the Remaining Cash Portion will be paid by Mandatory Convertible Bonds (MCB-B) of the Company with a maturity of two (2) years with the procedures and minimum conversion exercise price in accordance with the applicable provisions of the Capital Market Regulation and the provisions of UUPT.*

8) *The Company does not provide interest on the principal amount of 70% as referred to in point 4) above, which will be converted into shares in accordance with the above.*

C. The Remaining Lease Period

The debt restructuring provisions of Tower Provider Payables for the remaining term of the tower lease based on the existing tower lease agreements between the Company and each of the creditors on Tower Provider Payables calculated from November 10, 2014 through the end of the lease term in accordance with respective tower lease agreement are as follows:

**36. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN
 PERDAMAIAN UTANG (lanjutan)**

- 1) 100% dari nilai sisa masa sewa akan ditukar dengan Obligasi Wajib Konversi/Mandatory Convertible Bond (MCB-A) berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang diterbitkan oleh Perusahaan pada Tanggal Efektif dengan harga pelaksanaan konversi Rp200/saham, dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.
- 2) Perusahaan tidak memberikan bunga atas nilai yang akan ditukar menjadi MCB-A sesuai ketentuan di atas.

D. Penghentian Fasilitas Penyediaan

Kreditor atas Utang Tower Provider dapat menghentikan layanan penggunaan tower yang disewa oleh Perusahaan akhir bulan Juni 2015, kecuali ditentukan lain oleh Perusahaan dan kreditor atas Utang Tower Provider terkait.

Utang Biaya Hak Penggunaan (BHP) dan Universal Service Obligation (USO)

1. Utang Pokok BHP dan USO adalah utang yang diakui Perusahaan secara tertulis sampai dengan tanggal 10 November 2014 ("Utang Pokok BHP"), terdiri atas:
 - a. Utang BHP Frekuensi Pita.
 - b. Utang BHP Frekuensi ISR.
 - c. Utang BHP Telekomunikasi.
 - d. Utang USO.

**36. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS
 SETTLEMENT (continued)**

- 1) The total amount (100%) of the remaining term of the lease will be exchanged for Mandatory Convertible Bond (MCB-A) for a period of ten (10) years issued by the Company on the Effective Date at the conversion price of Rp200/share, having regard to the provisions of Capital Market Regulation and the provisions of UUPT.
- 2) The Company does not provide interest on the amount to be exchanged into MCB-A according to the above provisions.

D. Termination of Tower Provider Facilities

Creditors of Tower Provider Payables may terminate the usage service of leased tower by the Company by at the latest June 2015, unless otherwise determined by the Company and its creditors in relation to Tower Provider Payables.

Payables on Fee of Right to Use (BHP) and the Universal Service Obligation (USO)

1. BHP and USO Principal Payables represent payables that are recognized by the Company in writing up to November 10, 2014 ("BHP Principal Payables"), consisting of:
 - a. BHP Frequency Band Payables.
 - b. BHP Frequency ISR Payables.
 - c. BHP Telecommunication Payables.
 - d. USO Payables.

**36. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN
PERDAMAIAN UTANG (lanjutan)**

2. Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran atas Utang Pokok BHP, maka kelebihan pembayaran tersebut akan diperhitungkan sebagai pembayaran cicilan Utang Pokok BHP berikutnya.
3. Pembayaran Utang Pokok BHP Frekuensi Pita, Utang BHP Frekuensi ISR, Utang BHP Frekuensi Telekomunikasi dan Utang USO akan dicicil dan akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan ke-10 setelah Tanggal Homologasi.
4. Jika setelah pengeluaran/ pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar utang yang diatur dalam butir 3) di atas, maka sisa utang yang tidak dapat dibayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran utang pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan tanggal jatuh tempo terakhir. Apabila masih terdapat sisa utang yang belum dibayarkan setelah tahun ke-10 setelah Tanggal Homologasi maka sisa utang tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu lima (5) tahun berikutnya secara prorata setiap tahunnya.

**36. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS
SETTLEMENT (continued)**

2. *In the event of excess payment of BHP Principal Payables, the excess will be included in the next repayment installments of BHP Principal Payables.*
3. *Principals of BHP Frequency Band Payables, BHP Frequency ISR Payables, BHP Frequency Telecommunications Payables and USO Payables will be paid in installments and will be paid no later than the 10th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date.*
4. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the payables as referred to in point 3) above, then payables remaining unpaid on any maturity date will be deferred and combined with payables payment on the next due date, and this will continue until final maturity date. If there are remaining payables after the 10th year after the Official Approval of Settlement Agreement Date then these remaining payables will be paid within a period of five (5) years on a pro rata basis each year.*

**36. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN
PERDAMAIAAN UTANG** (lanjutan)

5. Jika setelah pengeluaran/ pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar utang sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada butir 4) di atas maka sisa utang yang belum dibayarkan tersebut akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran sisa utang pada saat jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan saat jatuh tempo terakhir (pada akhir tahun ke-5).
6. Dalam hal terdapat penjaminan atas pembayaran Utang Pokok BHP dan penjaminan tersebut kemudian jatuh tempo dan diefektifkan/dicairkan sebelum jadwal pembayaran Utang Pokok BHP tersebut di atas berakhir, maka jadwal pembayaran tersebut tidak berlaku lagi kecuali masih terdapat sisa Utang Pokok BHP terkait yang jadwal pembayarannya tetap akan merujuk pada jadwal pembayaran Utang Pokok BHP sebagaimana ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian ini.

Utang Dana Hasil Wesel Senior

- A. Pembayaran Utang Dana Hasil Wesel Senior akan dilakukan oleh Perusahaan dengan cara sebagai berikut:
 1. 30% dari Utang Dana Hasil Wesel Senior (utang kategori *Tranche C*) akan dibayarkan secara tunai ("Porsi Tunai") dengan dicicil dan akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi.

**36. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS
SETTLEMENT** (continued)

5. If after spending/payments made based on the priority in accordance with the *Cash Waterfall* as set forth in the *Amicable Settlement Agreement*, there are insufficient funds to pay the payables based on schedule as referred in point 4), then payables remaining unpaid on any maturity date will be deferred and combined with payables payment on the next due date, and this will continue until the final maturity date (at the end of the 5th year).
6. In the event of a guarantee given for payment of BHP Principal Payables and the guarantee then matures and is effected before the aforementioned BHP Principal Payables repayment schedule expires, the payment schedule is no longer valid unless related BHP Principal Payables remain that still refer to the BHP Principal Payables repayment schedule as stipulated in the *Amicable Settlement Agreement*.

Payables on Proceeds from Senior Notes

- A. Payables on Proceeds from the Senior Notes will be made by the Company in the following manner:
 1. Of Payables on Proceeds from Senior Notes (debt category *Tranche C*), 30% will be paid in cash ("Cash Portion") in installments and will be paid no later than the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date.

**36. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN
PERDAMAIAN UTANG (lanjutan)**

2. Perusahaan akan memberikan bunga atas Porsi Tunai untuk utang kategori *Tranche C* sebesar 4%, yang akan dibayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir 1) di atas.
3. 70% dari Utang Afiliasi akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bond (MCB-A)* Perusahaan yang berjangka waktu sepuluh (10) tahun terhitung sejak Tanggal Efektif dan dapat diperpanjang oleh Perusahaan dengan harga pelaksanaan konversi Rp200/saham, dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.
4. Jika setelah pengeluaran / pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Porsi Tunai beserta bunganya yang diatur dalam butir 1) di atas, maka sisa nilai Porsi Tunai dan bunganya yang tidak dapat dibayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Porsi Tunai pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian seterusnya.

**36. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS
SETTLEMENT (continued)**

2. The Company will provide interest at 4% on Cash Portion of debt category *Tranche C*, which will be paid in accordance with the payment schedule referred to in point 1) above.
3. Of the Affiliate Payables, 70% will be paid by *Mandatory Convertible Bond (MCB-A)* of the Company with a maturity of ten (10) years from the Effective Date and may be extended by the Company at the conversion price of Rp200/share, having regard to the provisions of Capital Market Regulation and the provisions of UUPT.
4. If after spending/payments made based on the priority in accordance with the *Cash Waterfall* as set forth in the *Amicable Settlement Agreement*, there are insufficient funds to pay the Cash Portion and its interest as mentioned in point 1) above, then payment of the residual value of Cash Portion that remains unpaid on any maturity date will be deferred and combined with Cash Portion payment on the next due date, and this will continue until final maturity date.

**36. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN
PERDAMAIAN UTANG (lanjutan)**

5. Jika setelah pengeluaran / pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar sisa Porsi Tunai dan bunganya sampai bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi ("Sisa Porsi Tunai") maka Sisa Porsi Tunai tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah bulan ke-66 tersebut secara prorata setiap tahunnya.

6. Jika setelah pengeluaran / pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai sampai dengan tanggal jatuh tempo sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada butir 5) di atas, maka Sisa Porsi Tunai yang belum dibayarkan tersebut akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Porsi Tunai pada saat jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan saat jatuh tempo terakhir (pada akhir tahun ke-5).

**36. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS
SETTLEMENT (continued)**

5. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the residual value of the Cash Portion and its interest as at the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date ("Remaining Cash Portion") then the Remaining Cash Portion shall be paid within a period of five (5) years after the 66th month on a pro rata basis each year.*

6. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Remaining Cash Portion at any maturity date as referred to in point 5) above, then payment of the unpaid Remaining Cash Portion will be deferred and combined with the Remaining Cash Portion payments on the next due date, and will continue until the final maturity date (at the end of the 5th year).*

**36. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN
PERDAMAIAN UTANG (lanjutan)**

7. Jika setelah pengeluaran / pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai setelah akhir tahun ke-5 sebagaimana dimaksud pada butir 6), maka atas Sisa Porsi Tunai tersebut akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/ *Mandatory Convertible Bonds (MCB-B)* Perusahaan yang berjangka waktu dua (2) tahun dengan tata cara dan harga pelaksanaan konversi minimal sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.
8. Perusahaan tidak memberikan bunga atas nilai pokok 70% sebagaimana dimaksud pada butir 3) di atas, yang akan dikonversi menjadi saham sesuai ketentuan di atas.
9. Jika diperlukan, Perusahaan akan berusaha meminta atau melakukan upaya/tindakan yang diperlukan agar dilaksanakan penyelesaian/pembayaran atas Utang Dana Hasil Wesel Senior sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perdamaian ini, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan dan ketentuan, antara lain sebagai berikut:

**36. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS
SETTLEMENT (continued)**

7. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Remaining Cash Portion as at the end of the 5th year as referred to in point 6) above, then the Remaining Cash Portion will be paid by Mandatory Convertible Bonds (MCB-B) of the Company with a maturity of two (2) years with the procedures and minimum conversion exercise price in accordance with the applicable provisions of the Capital Market Regulation and the provisions of UUPT.*
8. *The Company does not provide interest on the principal amount of 70% as referred to in point 3) above, which will be converted into shares in accordance with the above.*
9. *If necessary, the Company will attempt to solicit or make efforts/actions needed to be implemented for settlement/payment of Payables on Proceeds from Senior Notes in accordance with the provisions of the Amicable Settlement Agreement, including but not limited to the following acts and provisions, among others:*

**36. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN
PERDAMAIAN UTANG (lanjutan)**

- a) Secara khusus meminta perhatian pengadilan bahwa, dalam rangka memenuhi ketentuan *Securities Acts* Amerika Serikat, diperkenankan untuk berpedoman pada pengecualian terhadap pendaftaran berdasarkan Pasal 3(a)(10) dari *Securities Acts* 1933 Amerika Serikat, dimana, Pasal 3(a)(10) mengizinkan suatu proses pengadilan di luar Amerika Serikat (dalam hal ini, proses PKPU Perusahaan) untuk melakukan suatu pertukaran Wesel Senior dengan pemegang Wesel Senior yang berada di Amerika Serikat jika memenuhi syarat-syarat tertentu.
- b) Atas Porsi Tunai dapat diterbitkan sebagai surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan dan ditawarkan kepada para pemegang Wesel Senior sebagai pertukaran (*exchange offer*) berdasarkan peraturan pasar modal yang berlaku, termasuk pengecualian pendaftaran yang sesuai berdasarkan *Securities Acts* Amerika Serikat. Surat berharga yang baru dapat memiliki ketentuan dan persyaratan tambahan sebagaimana akan disetujui oleh pemegang Wesel Senior, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Perjanjian Perdamaian ini.

**36. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS
SETTLEMENT (continued)**

- a) *In particular call to the attention of the court that, in order to comply with the United States Securities Acts, it be allowed to be guided by the exceptions to the registration pursuant to Article 3(a)(10) of the 1933 United States Securities Act, whereby Article 3(a)(10) permits a court outside the United States (in this case, the PKPU process of the Company) to conduct an exchange of Senior Notes by the holders of such Notes who are in the United States providing they meet certain conditions.*
- b) *The Cash Portion may be exchanged for new securities issued by the Company and offered to holders of Senior Notes based on the prevailing capital market regulations, including the appropriate registration exemption under the United States Securities Acts, The new securities may have additional terms and conditions as shall be approved by the holders of the Senior Notes, and the provisions do not conflict with this Amicable Settlement Agreement.*

**36. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN
PERDAMAIAN UTANG (lanjutan)**

- c) Apabila ada pemegang Wesel Senior yang tidak bersedia untuk melepaskan tagihan berdasarkan hukum manapun, maka mereka tidak berhak untuk menerima surat berharga baru.

Ketentuan ini secara khusus tidak mengurangi hak Perusahaan untuk meminta pengakuan atas proses PKPU ini berdasarkan Pasal 15 *Bankruptcy Code* Amerika Serikat atau setiap ketentuan lain dari hukum nasional manapun yang mengizinkan pengakuan atas proses pengadilan asing.

- d) Melakukan upaya yang wajar agar Pemegang Wesel Senior asing dapat dihubungi melalui sistem kliring. Namun demikian, jika ada Pemegang Wesel Senior asing yang tidak dapat dihubungi atau tidak memberikan dokumentasi yang diperlukan untuk menerima surat berharga baru dalam waktu enam (6) bulan sejak pemberitahuan, maka seluruh hak mereka akan gugur.

**36. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS
SETTLEMENT (continued)**

- c) *If there are any holders of Senior Notes who are not willing to relinquish any claim under the law, then they are not entitled to receive new securities.*

This provision specifically does not reduce the Company's right to request recognition of this PKPU process under Article 15 United States Bankruptcy Code or any other provision of any national law that allow the recognition of the foreign court.

- d) *Make a reasonable effort so that foreign holders of Senior Notes may be contacted through the clearing system. However, if there is a foreign holder of Senior Notes that cannot be contacted or does not provide the necessary documentation to receive new securities within six (6) months from the notification, then all their rights will be void.*

**36. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN
PERDAMAIAN UTANG** (lanjutan)

**36. OVERVIEW OF AMICABLE
SETTLEMENT** (continued)

10. Untuk menghindari keragu-raguan:

- a) Utang Dana Hasil Wesel Senior adalah utang Perusahaan kepada BTPL sebesar USD380 juta berdasarkan *Intercompany Loan Agreement* dan *Supplemental Intercompany Loan Agreement* masing-masing tertanggal 7 Mei 2010 dan 27 Januari 2011 ("*Intercompany Loan Agreement*") dimana Perusahaan sebagai peminjam dan BTPL sebagai pemberi pinjaman.
- b) Dana Hasil Wesel Senior yang diperoleh Perusahaan berdasarkan *Intercompany Loan Agreement* merupakan dana hasil penerbitan Wesel Senior yang harus diberikan oleh BTPL dalam bentuk pinjaman kepada Perusahaan melalui *Intercompany Loan*, sesuai dengan ketentuan dalam *Offering Memorandum USD250 Million 11.5% Guaranteed Senior Notes Due 2015* dan *USD130 Million Senior Notes at 107%* yang diterbitkan oleh BTPL.
- c) Dengan di-homologasi-nya Perjanjian Perdamaian ini yang juga mencakup skema atau pola penyelesaian Utang Dana Hasil Wesel Senior oleh Perusahaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian ini.

10. For the avoidance of doubt:

- a) *Payables on Proceeds from Senior Notes are Payables of the Company to BTPL amounting to USD380 million based on the Intercompany Loan Agreement and Supplemental Intercompany Loan Agreement, dated May 7, 2010 and January 27, 2011, respectively, ("Intercompany Loan Agreement"), wherein the Company is the borrower and BTPL the lender.*
- b) *Proceeds from the Senior Notes were acquired by the Company based on the Intercompany Loan Agreement as the proceeds from the Senior Notes to be provided by BTPL in the form of loans to the Company through Intercompany Loan in accordance with the provisions of the Offering Memorandum, being USD250 million 11.5% Senior Guaranteed Notes Due 2015 and USD130 million Senior Notes at 107%, issued by BTPL.*
- c) *With the Amicable Settlement Agreement, which also includes a scheme or pattern of settlement of Payables on Proceeds from Senior Notes by the Company.*

**36. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN
 PERDAMAIAN UTANG (lanjutan)**

Maka terhitung sejak Tanggal Homologasi tersebut, Perusahaan tidak lagi memiliki kewajiban untuk memenuhi seluruh perjanjian atau dokumen yang terkait dengan penerbitan Wesel Senior yang menjadi berakhir, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan seluruh jaminan yang ada dalam rangka penerbitan Wesel Senior, yaitu jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*) yang diberikan oleh Perusahaan, jaminan yang diberikan oleh Para Penjamin, serta jaminan lainnya apabila ada. Dalam hal terdapat putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan diakui oleh hukum Indonesia yang menyatakan Perusahaan dan Para Penjamin wajib melaksanakan pembayaran akibat pencairan setiap jaminan yang diberikan dalam penerbitan Wesel Senior maka pembayaran kewajiban tersebut akan dilakukan Perusahaan dengan mengikuti ketentuan Perjanjian Perdamaian ini dan porsi pembayaran kewajiban tersebut akan mengurangi porsi pembayaran terhadap Utang Dana Hasil Wesel Senior secara sama besar.

Utang Afiliasi

Utang Afiliasi akan dibayarkan dengan cara sebagai berikut:

1. 100% dari Utang Afiliasi akan ditukar dengan Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bond* (MCB-A) Perusahaan yang berjangka waktu 10 tahun terhitung sejak Tanggal Efektif dengan harga pelaksanaan konversi Rp200/saham dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.

**36. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS
 SETTLEMENT (continued)**

Then starting from the Official Approval of Settlement Agreement Date, the Company no longer has an obligation to fulfill the entire agreements or documents associated with the issuance of the Senior Notes, which were automatically terminated, including but not limited to compliance with all existing collateral for issuance of the Senior Notes, which are Corporate Guarantee provided by the Company, the guarantee given by the Guarantor, as well as other guarantees, if any. In the event of a court decision that is legally binding and recognized by Indonesian law, which rules that the Company and the Guarantor shall make payment due to execution of any guarantees given in the issuance of Senior Notes, the payment obligations of the Company will be carried out by following the provisions of the Amicable Settlement Agreement and the portion of payment obligations will reduce the portion of payment to Payables on Proceeds from Senior Notes in the same amount. payment to Payables on Proceeds from Senior Notes in the same amount.

Affiliate Payables

Affiliate Payables will be paid under the following scheme:

1. *All the Affiliate Payables (100%) will be exchanged for the Mandatory Convertible Bond (MCB-A) of the Company with a maturity of 10 years from the Effective Date of conversion at an exercise price of Rp200/share having regard to the provisions of Capital Market Regulation and the provisions of UUPT.*

**36. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN
PERDAMAIAAN UTANG (lanjutan)**

2. Perusahaan tidak memberikan bunga atas nilai sebagaimana dimaksud pada butir 1) di atas yang akan dikonversi menjadi MCB-A sesuai ketentuan di atas.

**Utang dengan Jaminan (Utang Kategori
Tranche B)**

1. Terhadap Utang dengan Jaminan dalam Perjanjian Perdamaian ini yang diperhitungkan dan diakui adalah seluruh nilai utang pokoknya saja.
2. Seluruh jumlah Utang dengan Jaminan akan dibayarkan secara tunai dengan dicicil dan akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi.
3. Perusahaan akan memberikan bunga atas Utang dengan Jaminan sebesar 4% yang akan dibayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir 2) di atas.
4. Jika setelah pengeluaran/ pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Utang dengan Jaminan beserta bunganya yang diatur dalam butir 2) dan 3), maka sisa nilai Utang dengan Jaminan dan bunganya yang tidak dapat dibayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran berikutnya pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian seterusnya.

**36. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS
SETTLEMENT (continued)**

2. *The Company does not provide interest on the amount of payables as referred to in point 1) to be exchanged into MCB-A according to the above provisions.*

**Payables with Collateral (Debt Category
Tranche B)**

1. *Payables with Collateral in the Amicable Settlement Agreement are included and recognized only for their principal amounts.*
2. *The entire amounts of Payables with Collateral will be paid in cash by installments and will be paid no later than the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date.*
3. *The Company will provide interest at 4% on Payables with Collateral, which will be paid in accordance with the payment schedule referred to in point 2) above.*
4. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay Payables with Collateral and associated interest as referred in points 2) and 3), then payment of the residual value of Payables with Collateral and associated interest remaining unpaid on any maturity date will be deferred and combined with payment on the next due date, and this will continue.*

**36. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN
PERDAMAIAN UTANG (lanjutan)**

5. Jika setelah pengeluaran/ pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar sisa Utang dengan Jaminan dan bunga yang belum dibayarkan setelah bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi ("Sisa Utang dengan Jaminan") maka Sisa Utang dengan Jaminan tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu lima (5) tahun secara prorata setiap tahunnya.

6. Jika setelah pengeluaran/ pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar, Sisa Utang dengan Jaminan pada saat jatuh tempo sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada butir 5) di atas, maka Sisa Utang dengan Jaminan yang belum dibayarkan tersebut akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Utang dengan Jaminan pada saat jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan saat jatuh tempo terakhir (pada akhir tahun ke-5).

**36. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS
SETTLEMENT (continued)**

5. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the residual value of Payables with Collateral and associated interest as at the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date ("Remaining Payables With Collaterals") then the Remaining Payables with Collateral shall be paid within a period of five (5) years after the 66th month on a pro rata basis each year.*

6. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Remaining Payables with Collateral at any maturity date as referred to in point 5) above, then payment of the unpaid Remaining Payables with Collateral will be deferred and combined with Remaining Payables with Collateral on the next due date, and will continue until the final maturity date (at the end of the 5th year).*

**36. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN
 PERDAMAIAN UTANG (lanjutan)**

7. Jika setelah pengeluaran/ pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Utang dengan Jaminan, dan setelah akhir tahun ke-5 sebagaimana dimaksud pada butir 6) di atas masih terdapat Sisa Utang dengan Jaminan yang belum terbayarkan, maka atas Sisa Utang dengan Jaminan tersebut akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bonds* (MCB-B) Perusahaan yang berjangka waktu dua (2) tahun yang diterbitkan oleh Perusahaan dengan tata cara dan harga pelaksanaan konversi minimal sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.

**Utang Akibat Derivatif (utang kategori
 Tranche C)**

1. 30% dari sisa Utang Akibat Derivatif akan dibayarkan secara tunai ("Porsi Tunai") dengan dicicil dan akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi.
2. Perusahaan akan memberikan bunga atas Porsi Tunai 4% per tahun yang akan dibayarkan dengan mengikuti jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir 1) di atas.
3. 70% dari sisa Utang Akibat Derivatif akan ditukar dengan Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bond* (MCB-A) berjangka waktu sepuluh (10) tahun yang diterbitkan oleh Perusahaan pada Tanggal Efektif dengan harga pelaksanaan konversi Rp200/saham, dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.

**36. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS
 SETTLEMENT (continued)**

7. If after spending/payments made based on the priority in accordance with the *Cash Waterfall* as set forth in the *Amicable Settlement Agreement*, there are insufficient funds to pay the *Remaining Payables with Collateral* as at the end of the 5th year as referred to in point 6) above, then the *Remaining Payables with Collateral* will be paid by *Mandatory Convertible Bonds (MCB-B)* of the Company with a maturity of two (2) years with the procedures and minimum conversion exercise price in accordance with the applicable provisions of the *Capital Market Regulation* and the provisions of UUPT. a period of two (2) years issued by the Company with the procedure and the minimum conversion price in accordance with the applicable *Capital Market regulations* and the provisions of the UUPT.

**Derivatives Payables (debt category
 Tranche C)**

1. Of remaining amount of *Derivative Payables*, 30% will be paid in cash ("Cash Portion") in installments and will be paid no later than the 66th month after the *Official Approval of Settlement Agreement Date*.
2. The Company will provide interest at 4% on *Cash Portion*, which will be paid in accordance with the payment schedule referred to in point 1) above.
3. Of the *Derivative Payables*, 70% will be paid by *Mandatory Convertible Bond (MCB-A)* issued by the Company with a maturity of ten (10) years from the *Effective Date* at the conversion price of Rp200/share, having regard to the provisions of *Capital Market Regulation* and the provisions of UUPT.

**36. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN
PERDAMAIAAN UTANG (lanjutan)**

4. Jika setelah pengeluaran/ pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Porsi Tunai beserta bunganya yang diatur dalam butir 1) dan 2) di atas, maka sisa nilai Porsi Tunai dan bunganya yang tidak dapat dibayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Porsi Tunai pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian seterusnya.
5. Jika setelah pengeluaran/ pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar sisa Porsi Tunai dan bunga yang belum dibayarkan setelah bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi ("Sisa Porsi Tunai") maka Sisa Porsi Tunai tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah bulan ke-66 tersebut secara prorata setiap tahunnya.
6. Jika setelah pengeluaran/ pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai pada setiap saat jatuh tempo sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada butir 5) di atas, maka Sisa Porsi Tunai yang belum dibayarkan tersebut akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Sisa Porsi Tunai pada saat jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan saat jatuh tempo terakhir (pada akhir tahun ke-5).

**36. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS
SETTLEMENT (continued)**

4. If after spending/payments made based on the priority in accordance with the *Cash Waterfall* as set forth in the *Amicable Settlement Agreement*, there are insufficient funds to pay the *Cash Portion* and its interest as mentioned in points 1) and 2) above, then payment of the residual value of *Cash Portion* that remains unpaid on any maturity date will be deferred and combined with *Cash Portion* payment on the next due date, and this will continue until final maturity date.
5. If after spending/payments made based on the priority in accordance with the *Cash Waterfall* as set forth in the *Amicable Settlement Agreement*, there are insufficient funds to pay the residual value of the *Cash Portion* and its interest as at the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date ("*Remaining Cash Portion*") then the *Remaining Cash Portion* shall be paid within a period of five (5) years after the 66th month on a pro rata basis each year.
6. If after spending/payments made based on the priority in accordance with the *Cash Waterfall* as set forth in the *Amicable Settlement Agreement*, there are insufficient funds to pay the *Remaining Cash Portion* at any maturity date as referred to in point 5) above, then payment of the unpaid *Remaining Cash Portion* will be deferred and combined with the *Remaining Cash Portion* payments on the next due date, and will continue until the final maturity date (at the end of the 5th year).

**36. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN
PERDAMAIAAN UTANG** (lanjutan)

7. Jika setelah pengeluaran/ pembayaran sesuai prioritas berdasarkan *Cash Waterfall* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai, setelah akhir tahun ke-5 sebagaimana dimaksud pada butir 6) yang belum terbayarkan, maka atas Sisa Porsi Tunai tersebut akan ditukar dengan Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bond* (MCB B) berjangka waktu 2 tahun yang diterbitkan oleh Perusahaan dengan tata cara dan harga pelaksanaan konversi minimal sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.

8. Perusahaan tidak memberikan bunga atas nilai pokok 70% sebagaimana dimaksud dalam butir 3) di atas yang akan dikonversi menjadi saham sesuai ketentuan di atas.

Utang Pembiayaan Kendaraan

1. Utang Pembiayaan Kendaraan termasuk bunganya akan dibayar sesuai ketentuan kontrak antara Perusahaan dengan kreditor atas Utang Pembiayaan Kendaraan yang telah ada sebelum Perjanjian Perdamaian ini.
2. Kelalaian atau kegagalan pelaksanaan kewajiban Perusahaan kepada kreditor atas Utang Pembiayaan Kendaraan berdasarkan kontrak yang telah ada sebelum Perjanjian Perdamaian ini yang menimbulkan akibat atau konsekuensi yang diatur dalam kontrak tersebut, tidak menyebabkan atau tidak dianggap telah terjadi kegagalan pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini.

**36. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS
SETTLEMENT** (continued)

7. If after spending/payments made based on the priority in accordance with the *Cash Waterfall* as set forth in the *Amicable Settlement Agreement*, there are insufficient funds to pay the *Remaining Cash Portion* as at the end of the 5th year as referred to in point 6) above, then the *Remaining Cash Portion* will be paid by *Mandatory Convertible Bonds (MCB-B)* of the Company with a maturity of two (2) years with the procedures and minimum conversion exercise price in accordance with the applicable provisions of the *Capital Market Regulation* and the provisions of *UUPT*.

8. The Company does not provide interest on the principal amount of 70% as referred to in point 3) above, which will be converted into shares in accordance with the above.

Vehicles Finance Payables

1. *Vehicles Finance Payables* and associated interest will be paid in accordance with the terms in the contract between the Company and creditors based on existing *Vehicles Finance Payables* that were entered into before this *Amicable Settlement Agreement*.
2. *Negligence* or failure in the implementation of the Company's obligations to creditors on *Vehicles Finance Payables* under existing contracts prior to the *Amicable Settlement Agreement*, arising from or due to consequences as stipulated in the contract, shall not cause or be deemed to have resulted in the failure of the implementation of the *Amicable Settlement Agreement*.

36. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN
PERDAMAIAN UTANG (lanjutan)

Ketentuan-Ketentuan Lain
Restrukturisasi, antara lain sebagai
berikut:

1. Tidak ada pemberian jaminan kebendaan dan/atau jaminan perusahaan yang baru yang akan diberikan sehubungan dengan Perjanjian Perdamaian yang dihomologasi, kecuali ditentukan lain oleh Perusahaan.
2. Setiap Obligasi Wajib Konversi/*Mandatory Convertible Bonds* (MCB) yang diterbitkan berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini yang tidak dimintakan konversi menjadi saham Perusahaan oleh kreditor terkait sampai dengan tanggal jatuh tempo MCB tersebut, maka MCB tersebut menjadi berakhir dan jika terdapat klaim atas nilai MCB tersebut oleh kreditor maka pembayarannya akan dilakukan mulai tahun ke-31 setelah Tanggal Homologasi.

Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian PKPU masih memerlukan proses lebih lanjut yang sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini masih berlangsung.

Pada tanggal 26 Juni 2016, Perusahaan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan untuk melakukan penambahan modal baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu melalui mekanisme penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK) sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian.

36. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS
SETTLEMENT (continued)

Other Restructuring Provisions, among
others, are as follows:

1. No new asset guarantees and/or corporate guarantees shall be given in connection with the Amicable Settlement Agreement, unless otherwise determined by the Company.
2. Each Mandatory Convertible Bonds (MCB) issued pursuant to this Amicable Settlement Agreement whose conversion into shares of the Company is not requested by creditors on its maturity date, shall then be automatically terminated and should a claim on the MCB be subsequently be made by creditors, the payment will be made after the 31st year following the Official Approval of Settlement Agreement Date.

The execution of this Amicable Settlement Agreement in PKPU is still subject to further process, which as of the completion date of the consolidated financial statements is still ongoing.

On June 26, 2016, the Company had approval from the General Meeting of Shareholders the Company to perform additional capital without right to order by OWK mechanism as stipulated on Amicable Settlement Agreement.

**36. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN
PERDAMAIAN UTANG** (lanjutan)

Pada tanggal 1 Maret 2017, PT Huawei Tech Investment telah mengkonversi Obligasi Wajib Konversi yang dimiliki sebesar Rp1.237.862.796.141 menjadi saham Perusahaan sebanyak 6.189.313.980 lembar saham.

Pada bulan Agustus 2016, Perusahaan menerbitkan sertifikat OWK bagi masing-masing kreditur yang berhak memperoleh OWK sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian.

37. KELANGSUNGAN USAHA

Pada tanggal 31 Desember 2022, Kelompok Usaha mencatat nilai aset sejumlah Rp33,28 miliar serta mengalami defisiensi modal sejumlah Rp5,86 triliun dan mencatat liabilitas sejumlah Rp5,89 triliun yang terbagi dalam utang yang telah diselesaikan melalui PKPU sejumlah Rp4,93 triliun (Catatan 18) dan utang jangka pendek sejumlah Rp958 miliar. Apabila Kelompok Usaha tidak mampu melaksanakan pembayaran porsi utang yang diselesaikan melalui PKPU sejumlah tersebut, maka di tahun 2026 utang pokok sejumlah Rp9,89 Triliun akan dikonversi menjadi kepemilikan kreditur di saham Perusahaan (Catatan 36).

Dengan maksud untuk tetap mempertahankan kelangsungan usaha dan menyelesaikan liabilitas tersebut di atas, Manajemen Kelompok Usaha memiliki rencana aksi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan negosiasi kepada para kreditur dan pemasok agar utang akrual bunga sejumlah tersebut dapat dihapuskan atau dikurangi.
- b. Mengoptimalkan kinerja Entitas anak Perusahaan. Entitas anak yang masih memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan, dengan cara mendapatkan proyek baru dari pihak ketiga maupun memperoleh dukungan dari pihak afiliasi agar mendapatkan proyek-proyek baru.

**36. OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS
SETTLEMENT** (continued)

On March 1, 2017, Mandatory Convertible Bond owned by PT Huawei Tech Investment amounting to Rp1,237,862,796,141 has converted to shares of the Company of 6,189,313,980 shares.

In August 2016, the Company issued OWK certificates for each creditors which are entitled to obtain OWK as stipulated on Amicable Settlement Agreement.

37. GOING CONCERN

As of December 31, 2022, the Group recorded the asset balance of Rp33.28 billion and is suffering a capital deficiency amounting to Rp5.86 trillion and recorded liabilities amounting to Rp5.89 trillion divided into debts that had been settled through PKPU of Rp4,93 trillion (Note 18) and short-term debt of Rp958 billion. If the Group is unable to pay this portion of the debt settled through PKPU, the principal debt amounting to Rp9.89 trillion will be converted into the creditor's ownership in the Company's shares in 2026 (Note 36).

By the intention of maintaining going concern and settling the above-mentioned liabilities, the Group's Management has the action plans are as follows:

- a. *Conducting negotiations with creditors and suppliers regarding the interest accrued amounting as above mentioned for be written off or reduced.*
- b. *Optimizing the performance of the Subsidiaries of the Company. The Subsidiaries that have the abilities to generate revenue, by way of finding projects from third parties supports as well as from affiliated parties.*

37. KELANGSUNGAN USAHA (lanjutan)

- c. Pelaksanaan penyelesaian kewajiban berdasarkan keputusan PKPU sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.
- d. Mendirikan lini bisnis baru sesuai dengan bisnis utama Kelompok Usaha atau lini bisnis tersendiri yang menasar pasar pihak ketiga dan dengan dukungan dari pihak afiliasi.

Dengan rencana aksi tersebut di atas serta kinerja ITN dan LPD, suatu entitas anak masih memiliki kemampuan untuk beroperasi yang menghasilkan pendapatan, maka Manajemen Kelompok Usaha menyusun Laporan keuangan konsolidasian dengan asumsi bahwa Kelompok Usaha akan melanjutkan usahanya secara berkelanjutan.

38. PERISTIWA LUAR BIASA PADA PERIODE PELAPORAN

Sejak awal tahun 2020, pandemi virus Corona ("COVID-19") telah menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Menanggapi pandemi COVID-19, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan berupa pembatasan kegiatan masyarakat di beberapa daerah yang mana berimbas pada kegiatan bisnis dan operasional Kelompok Usaha di beberapa aspek. Perusahaan terus melakukan penilaian atas dampak pandemi COVID-19 ini terhadap bisnis dan operasional Kelompok Usaha, dan berdasarkan penilaian pada saat laporan ini diterbitkan, manajemen Kelompok Usaha tidak melihat adanya ketidakpastian material yang akan menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap bisnis dan operasional Kelompok Usaha maupun menimbulkan keraguan signifikan atas kemampuan Kelompok Usaha untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Kelompok Usaha akan terus memantau perkembangan situasi terkini akibat pandemi COVID-19, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi dampak tersebut terhadap bisnis dan operasi Kelompok Usaha.

37. GOING CONCERN (continued)

- c. *Implementation of obligation settlement based on PKPU ruling in accordance with the specified term.*
- d. *Established new line of business that is in line with the Group's main business or distinctive line of business targeting third parties market with support from affiliated parties.*

By the action plans above mentioned as well as the performance of ITN and LPD, the subsidiaries that have the ability to generate revenue, the Group's Management prepares consolidated financial statements with the assumption that the Group will continue in going concern.

38. EXTRAORDINARY EVENTS ON REPORTING PERIOD

Since early 2020, the Coronavirus pandemic ("COVID-19") has spread to many countries including Indonesia. In response to COVID-19 pandemic, the Government of Indonesia has issued policies limiting people's activity in several regions, which affected the Group's business and operational activity in several aspects. The Company continuously assess the impact of COVID-19 pandemic toward the Group's business and operational, and based on the assessment on the date of this report, the Group does not foresee any material uncertainty that may have significant adverse impact to the Group's business or operation or may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. The Group will continue to monitor the current development of COVID-19 pandemic, and take the necessary steps to curb the impacts toward the Group's business and operational.